

Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS PU)



Tahun 2008



Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS PU) | 2008



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

STATISTIK
PEKERJAAN UMUM
<http://www.pu.go.id/infostatistik>

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262

KATA PENGANTAR

Penyebarluasan berbagai bentuk penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PU, Sosial, Budaya dan Ekonomi dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU) kepada masyarakat sangat diperlukan, karena banyaknya permintaan akan hal tersebut. Oleh sebab itu disusun Buku Induk Statistik Infrastruktur ke-PU-an yang selanjutnya disebut sebagai “Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU)”.

Data dan informasi yang disajikan berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Departemen PU. Dalam Penyusunan BIS-PU ini, disajikan data dan informasi tingkat Nasional yang dirinci per Provinsi. Bentuk penyajian dibuat sederhana, mudah dan menarik untuk dibaca serta informatif.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan BIS-PU ini, masih terdapat banyak kekurangan, sehingga masih perlu disempurnakan dan dikembangkan lagi. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pengguna buku ini sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jakarta, November 2008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	3
BAB II : KONDISI UMUM INDONESIA	
2.1 Wilayah Indonesia	4
2.1.1 Luas Wilayah	4
2.1.2 Wilayah Administrasi	5
2.2 Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan	5
2.2.1 Kependudukan	5
2.2.2 Ketenaga Kerjaan	9
2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi.....	15
2.3.1 Sosial	15
2.3.2 Budaya	16
2.3.3 Ekonomi.....	19

BAB III : INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1	Konstruksi	22
3.2	Kondisi dan Permasalahan Air	24
3.3	Potensi Lahan	27
3.2.1	Penggunaan Lahan Sawah	27
3.2.2	Perluasan Areal Tanam	28
3.2.4	Pengelolaan Lahan Pertanian	28
3.4	Angkutan Darat	29
3.5	Perumahan dan Lingkungan Permukiman	30
3.5.1	Perumahan	30
3.5.2	Lingkungan Permukiman	33
3.6	Bencana Alam	35

BAB IV : INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

4.1	Infrastruktur Sumber Daya Air	38
4.1.1	Sungai dan Wilayah Sungai	39
4.1.2	Danau	41
4.1.3	Rawa	41
4.1.4	Air Tanah	42
4.1.5	Irigasi	43
4.1.6	Bendungan/ Waduk	45
4.1.7	Embung.....	47
4.2	Infrastruktur Bina Marga	47
4.2.1	Jalan Tol	47
4.2.2	Jalan	48
4.2.3	Jembatan	53
4.3	Infrastruktur Cipta Karya	54
4.3.1	Penyediaan Air Minum	54
4.3.2	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	56
4.4	Penataan Ruang	61

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70

DAFTAR TABEL

I. STATISTIK UMUM

1. Wilayah Indonesia

Tabel 2.1	: Luas Wilayah Di Indonesia Tahun 2006	A-1
Tabel 2.2	: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2008	A-2

2. Kependudukan dan Ketenaga kerjaan

Tabel 2.3	: Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2000-2006	A-3
Tabel 2.4	: Distribusi Persentase Dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2000-2006	A-4
Tabel 2.5	: Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi Tahun 2000-2006	A-5
Tabel 2.6	: Jumlah Penduduk dan Keluarga Tahun 2006	A-6
Tabel 2.7	: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Perkotaan, Tahun 2000 - 2006	A-7
Tabel 2.8	: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Perdesaan, Tahun 2000 - 2006	A-8
Tabel 2.9	: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Kota dan Desa, Tahun 2000 - 2006	A-9
Tabel 2.10A	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2006.....	A-10A
Tabel 2.10B	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2006 (Lanjutan)	A-10B

Tabel 2.11	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2006	A-11
Tabel 2.12	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Lapangan Kerja Utama Tahun 2006	A-12
Tabel 2.13	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2006	A-13
Tabel 2.14	: Pekerja Menurut Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan dengan Jenis Kelamin dan Wilayah (Desa Kota) Tahun 2007	A-14

3. Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Tabel 2.15	: Sekolah Dasar (SD) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2003/2004 – 2005/2006 .	A-15
Tabel 2.16	: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2003/2004 – 2005/2006	A-16
Tabel 2.17	: Sekolah Menengah Atas (SMA) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2003/2004 – 2005/2006	A-17
Tabel 2.18	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2003/2004 – 2005/2006	A-18
Tabel 2.19	: Perguruan Tinggi ¹⁾ Negeri dan Swasta Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi Tahun 2005-2006	A-19
Tabel 2.20	: Banyaknya Sarana Tempat Ibadah Menurut Provinsi Tahun 2005	A-20

Tabel 2.21	: Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2005	A-21
Tabel 2.22	: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2003-2006	A-22
Tabel 2.23	: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2006	A-23
Tabel 2.24	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2002-2005 (Rupiah)	A-24
Tabel 2.25	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, Tahun 2002-2005 (Rupiah)	A-25

II. STATISTIK PENDUKUNG PRASARANA KE-PU-AN

1. Konstruksi

Tabel 3.1	: Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi	B-1
Tabel 3.2	: Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi	B-2
Tabel 3.3	: Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan	B-3

2. Kondisi dan Permasalahan Air

Tabel 3.4	: Status Mutu Air Beberapa Sungai di Indonesia	B-4
-----------	--	-----

3. Potensi Lahan

Tabel 3.5	: Luas Lahan Sawah Dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Provinsi Tahun 2005 (Ha)	B-5
-----------	--	-----

Tabel 3.6	: Rencana dan Realisasi Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 2006, (Ha)	B-6
Tabel 3.7	: Pengembangan Konservasi Lahan Terpadu Tahun 2006, (Ha)	B-7

4. Angkutan Darat

Tabel 3.8	: Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Polda dan Jenis Kendaraan Tahun 2003 – 2005, (Unit).....	B-8
-----------	--	-----

5. Perumahan, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

Tabel 3.9	: Kualitas Bangunan Rumah dan Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2005	B-9
Tabel 3.10	: Tempat Tinggal di Bantaran/ Tepi Sungai di Indonesia Tahun 2005/2006	B-10
Tabel 3.11	: Tempat Tinggal di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV) di Indonesia Tahun 2005/2006	B-11
Tabel 3.12	: Rencana Pembangunan Rumah Berdasarkan Provinsi Tahun 2008	B-12
Tabel 3.13	: Rata-rata Timbunan Sampah di Kota Metropolitan di Indonesia Tahun 2005 dan Tahun 2006	B-13
Tabel 3.14	: Daerah Rawan Bencana Alam Beserta Keluarga yang Tinggal di Lokasi Tersebut Tahun 2005	B-14
Tabel 3.15	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan Tahun 2006-2007 (Status per 31 Desember 2006)	B-15

III. STATISTIK PRASARANA KE-PU-AN

1. Sumber Daya Air

Tabel 4.1	: Data Sungai Berdasarkan Nama Sungai di Indonesia	C-1
Tabel 4.2	: Wilayah Sungai Lintas Negara	C-2
Tabel 4.3	: Wilayah Sungai Lintas Provinsi	C-3
Tabel 4.4	: Wilayah Sungai Strategis Nasional	C-4
Tabel 4.5	: Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota	C-5
Tabel 4.6	: Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	C-6
Tabel 4.7	: Data Danau Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-7
Tabel 4.8	: Data Rawa di Beberapa Pulau di Indonesia Tahun 2007	C-8
Tabel 4.9	: Data Rawa di Indonesia Tahun 2007	C-9
Tabel 4.10	: Pemanfaatan Lahan Rawa di Indonesia Tahun 2007	C-10
Tabel 4.11	: Detil Daerah Rawa di Beberapa Tempat di Indonesia, Tahun 2007	C-11
Tabel 4.12	: Data Air Tanah dan Kepadatan Penduduk di Indonesia	C-12
Tabel 4.13.1	: Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Tahun 2007	C-13.1
Tabel 4.13.2	: Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Tahun 2007	C-13.2
Tabel 4.13.3	: Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tahun 2007	C-13.3
Tabel 4.14	: Rekapitulasi Daerah Irigasi Tahun 2007	C-14
Tabel 4.15	: Data Bendungan Berdasarkan Nama Bendungan di Indonesia	C-15
Tabel 4.16	: Data Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-16
Tabel 4.17	: Kondisi Waduk Utama di Indonesia Tahun 2007	C-17
Tabel 4.18	: Data Embung Berdasarkan Nama Embung di Indonesia	C-18
Tabel 4.19	: Data Embung Potensi Berdasarkan Nama Embung Potensi di Indonesia	C-19

2. Bina Marga

Tabel 4.20	: Jalan Nasional Jalan Tol	C-20
Tabel 4.21A	: Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa Tahun 2005-2010	C-21A
Tabel 4.21B	: Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Sumatera Tahun 2005-2010	C-21B/C
Tabel 4.21C	: Jaringan Jalan Tol Pulau Sulawesi Tahun 2005-2010	C-21B/C
Tabel 4.21D	: Jaringan Jalan Tol Pulau Bali Tahun 2005-2010	C-21D
Tabel 4.22	: Ruas Jalan Tol Yang Telah Beroperasi	C-22
Tabel 4.23.1	: Prioritas Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa	C-23.1
Tabel 4.23.2	: Prioritas Pembangunan Jalan Tol Non Trans Jawa	C-23.2
Tabel 4.24	: Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang (km) Tahun 1978-2005	C-24
Tabel 4.25	: Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Tahun 1978-2005	C-25
Tabel 4.26	: Panjang Jalan Trayek Angkutan Umum dan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Tahun 2004-2005.....	C-26
Tabel 4.27.1	: Data Hasil Survai Jalan Nasional TA 2007	C-27.1
Tabel 4.27.2	: Data Hasil Survai Jalan Nasional TA 2007 dan Jenis Kendaraan Bermotor Menurut Polda Tahun 2005	C-27.2
Tabel 4.28	: Klasifikasi Jalan Nasional Tahun 2008 (Berdasarkan Tipe Perkerasan)	C-28
Tabel 4.29	: Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS 2008 Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004).	C-29
Tabel 4.30	: Rekapitulasi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2008 Berdasarkan Tahun Dibangun (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-30

3. Cipta Karya

Tabel 4.31	: Perkembangan Perusahaan Air Minum (PAM), 2002-2006 ..	C-31
Tabel 4.32	: Persentase Rumah tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Tahun 2007	C-32
Tabel 4.33	: Lokasi IPA Hingga Tahun 2007 PDAM	C-33
Tabel 4.34	: Pencapaian Di Bidang Air Minum, 2005-2007	C-34
Tabel 4.35	: Presentase Rumah tangga menurut Provinsi dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2006	C-35
Tabel 4.36	: Lokasi IPAL Hingga Tahun 2007	C-36
Tabel 4.37	: Lokasi IPLT Hingga Tahun 2007	C-37
Tabel 4.38	: Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Air Tinja Tahun 2007	C-38
Tabel 4.39	: Lokasi TPA Hingga Tahun 2007	C-39
Tabel 4.40	: Banyaknya Desa Menurut Provinsi Dan Jenis Tempat Membuang Sampah Sebagian Besar Keluarga	C-40
Tabel 4.41	: Pencapaian Pengembangan Permukiman Tahun 2005-2007	C-41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Jumlah Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan Indonesia, Tahun 2000 - 2025	6
Gambar 2.2 : Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur dan Desa dan Kota, Tahun 2007	10
Gambar 2.3 : Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan dan Desa dan Kota, Tahun 2007	10
Gambar 2.4 : Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Desa Kota, Tahun 2007	11
Gambar 2.5 : Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Desa Kota, Tahun 2007	12
Gambar 2.6 : Jumlah Pekerja Menurut Klasifikasi Pekerja Tahun 2007	13
Gambar 2.7 : Jumlah Penganggur Terbuka Menurut Pulau, Tahun 2000-2007	14
Gambar 2.8 : Jumlah Wisatawan Mancanegara, Tahun 2006 - 2007	17
Gambar 2.9 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (000 orang) dan Jumlah Perjalanan (000), Tahun 2001 - 2007	18
Gambar 2.10: Jumlah Total Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Triliun Rp), Tahun 2001 - 2007	18
Gambar 2.11: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (persen), 2002 – 2005	20
Gambar 2.12: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (persen), 2002 – 2005	21

Gambar 3.1 : Nilai Konstruksi yang diselesaikan dari berbagai sumber Dana (000 rupiah)	23
Gambar 3.2 : Jumlah karyawan bidang konstruksi tetap menurut gender ..	24
Gambar 3.3 : Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 2002-2006	30
Gambar 3.4 : Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2000 - 2005	34
Gambar 3.5 : Rata-rata Kondisi TPA Seluruh Indonesia Akhir Tahun 2006 .	35
Gambar 3.6 : Persentase Kejadian Bencana Alam di Indonesia Tahun 2006	36
Gambar 4.1 : Jumlah Bendungan/ Waduk di Indonesia	46
Gambar 4.2 : Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kewenangan, Tahun 2001-2005	49
Gambar 4.3 : Panjang Jalan di Indonesia Menurut Tingkat Kewenangan (Km ; %) Tahun 2006	50
Gambar 4.4 : Panjang Jalan di Indonesia Menurut Jenis Permukaan (Km ; %) Tahun 2006	50
Gambar 4.5 : Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kondisi Jalan (Km ; %) Tahun 2006	51
Gambar 4.6 : Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan (%) Tahun 2006	52
Gambar 4.7 : Persentase Rumahtangga Menurut Kualitas Air Minum, 2004 dan 2007	55
Gambar 4.8 : Persentase Rumahtangga Menggunakan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri Menurut Tipe Daerah, 2000-2005	57
Gambar 4.9 : Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Penampungan Air Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci, Tahun 2007	58
Gambar 4.10 : Persentase Rumahtangga Menurut Keadaan Air Got/ Selokan Di Sekitar Rumah, Tahun 2007	59
Gambar 4.11 : Persentase Rumahtangga Menurut Cara Pembuangan Sampah, Tahun 2007	60
Gambar 4.12 : Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	64

DAFTAR SINGKATAN

- B** BIS – PU = Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- D** DAS = Daerah Aliran Sungai
 DPKTI = Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
- H** Ha = Hektar
 H_{bend} = Height (Tinggi Bendungan)
- I** IPA = Instalasi Pengolahan Air
 IPAL = Instalasi Pengolahan Air Limbah
 IPLT = Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
 IRI = International Roughness Index
- K** KAPET = Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
 KBI = Kawasan Barat Indonesia
 KEKI = Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
 KPS = Kerjasama Pemerintah Swasta
 KTI = Kawasan Timur Indonesia
 KV = Kilo Voltage
- L** L/td = Liter/detik
- M** MCK = Mandi Cuci Kakus
 MDG's = Millenium Development Goals
- O** OMS = Organisasi Masyarakat Setempat
 OP = Operasi dan Pemeliharaan
 OPL = Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

P	PAM	=	Perusahaan Air Minum
	PBL	=	Penambahan Baku Lahan
	PDAM	=	Perusahaan Daerah Air Minum
	PDB	=	Produk Domestik Bruto
	PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
	PHBS	=	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	PSDPU	=	Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum
R	RDTR	=	Rencana Detail Tata Ruang
	Renstra	=	Rencana Strategis
	RKL	=	Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
	RTR	=	Rencana Tata Ruang
	RTRW	=	Rencana Tata Ruang Wilayah
	RTRWN	=	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	=	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
S	SDA	=	Sumber Daya Air
	SDI	=	Surface Distrees Index
	SPAM	=	Sistem Penyediaan Air Minum
T	TA	=	Tahun Anggaran
	TPA	=	Tempat Pembuangan Akhir
	TPAK	=	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
V	V_{waduk}	=	Volume Waduk (Isi)
W	WS	=	Wilayah Sungai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan serta penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Departemen PU. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya Pusdata menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyusunan program pengolahan data beserta pembinaan dan pengembangannya, kemudian penyelenggaraan sistem informasi, pengelolaan dan penyediaan data spasial serta literal. Data literal disini meliputi data literal dan kestatistikan infrastruktur Pekerjaan Umum, serta data literal dan kestatistikan pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum.

Program pembangunan Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah bagian dari pelaksanaan program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang ke-PU-an tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk membantu perencanaan umum, disain, pelaksanaan, serta pemanfaatan pembangunan. Data serta informasi statistik sangat dibutuhkan disini terutama bila Pimpinan Departemen atau Lembaga/ Instansi terkait ingin mengetahui data atau informasi statistik tentang prasarana dan sarana ke-PU-an dengan cepat.

Data serta informasi yang sesuai dengan bidang ke-PU-an ini dapat diperoleh dari Departemen Pekerjaan Umum melalui Pusdata - Pekerjaan Umum. Data

yang dibutuhkan tersebut merupakan rekapitulasi data secara keseluruhan per wilayah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Dalam kaitannya dengan fungsi tersebut, maka Pusdata menyediakan data tentang ke-PU-an beserta pendukungnya yang diharapkan bisa memberi gambaran perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana yang telah ada dapat diwujudkan. Diharapkan, dengan adanya dukungan data ini, pelaksanaan pembangunan prasarana tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhannya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Buku Induk Statistik PU ini dibuat dengan tujuan menyediakan informasi statistik dibidang ke-PU-an serta informasi statistik tentang sektor-sektor terkait lainnya dan diperuntukkan bagi para Pimpinan di dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum maupun instansi lainnya serta untuk masyarakat pengguna.

BIS-PU ini dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data statistik bidang lainnya yang terkait. Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat membantu dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan Departemen Pekerjaan Umum. Sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih tepat pada sasaran serta dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu, penerbitan BIS-PU adalah untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum, sehingga diketahui kondisi dan kebutuhan untuk masa mendatang. Diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui dan memanfaatkan data serta informasi yang tersaji melalui buku ini serta memberikan masukan bagi Departemen Pekerjaan Umum.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Buku Induk Statistik PU ini menyajikan data dan informasi tentang kinerja Departemen Pekerjaan Umum di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun data dan informasi dari BIS-PU ini meliputi data ke-PU-an dan pendukungnya untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ruang lingkup data dan informasi ke-PU-an adalah sebagai berikut :

1. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Sumber Daya Air
2. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Bina Marga
3. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Cipta Karya
4. Penataan Ruang

Sedangkan untuk data dan informasi pendukung, meliputi :

1. Wilayah Indonesia
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3. Sosial, Budaya, dan Ekonomi
4. Konstruksi
5. Kondisi dan Permasalahan Air
6. Potensi Lahan
7. Angkutan Darat
8. Perumahan, Lingkungan Permukiman dan Bencana Alam

Penyajian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabulasi dan grafik.

BAB II

KONDISI UMUM INDONESIA

2.1 Wilayah Indonesia

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai ribuan pulau. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak berubah wilayah geologinya di dunia.

2.1.1 Luas Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 17.504 pulau, 7.870 telah bernama dan sekitar 9.634 diantaranya belum memiliki nama. Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia terletak antara 6° 08' Lintang Utara sampai dengan 11° 15' Lintang Selatan dan antara 94° 45' Bujur Barat sampai dengan 141° 05' Bujur Timur, serta terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Panjang garis pantai Indonesia ± 81.000 Km. Wilayah Indonesia juga terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kesatuan yang berbentuk Republik ini (semenjak tahun 1999 Timor Timur tidak lagi merupakan wilayah Indonesia) memiliki daratan seluas 1.860.360 kilo meter persegi (km²), terdiri dari Pulau Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 507.412,18 km² (27,27%), Maluku dan Papua 511.811,21 km² (27,51%), Sumatera 446.686,68 km² (24,01%), Sulawesi 193.847,09 km² (10,42%), Jawa 129.306,48 km² (6,95%) serta Bali dan Nusa Tenggara 71.296,03 km² (3,83%) (Tabel 2.1). Provinsi-provinsi yang paling besar adalah Papua 319.036,05 km², Kalimantan Timur 204.534,34 km², Kalimantan Tengah 153.564,50 km², dan Kalimantan Barat 147.307,00 km² (Tabel 2.2).

Indonesia merupakan negara bahari dengan luas lautnya sekitar 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan dan mempunyai garis pantai nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Daratan Indonesia yang mempunyai luas lebih dari 1,86 juta km², mempunyai puluhan atau mungkin ratusan gunung api dan sungai. Sehubungan dengan letak negara Indonesia yang dikelilingi beberapa samudera, serta banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif, menyebabkan Indonesia sering kali dilanda gempa.

2.1.2 Wilayah Administrasi

Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 4 diantaranya memiliki status khusus, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Sejak tahun 2005 ada 3 (tiga) tambahan provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat. Tahun 2007 (PP No.24/ 2007), menyebutkan bahwa Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat. Pada tahun 2008 dari jumlah provinsi tersebut terdapat 370 kabupaten, 95 kota, 6.093 kecamatan, serta 73.067 kelurahan dan desa (Tabel 2.2).

2.2 Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan

2.2.1 Kependudukan

Sinergi yang kuat antara pembangunan dengan kependudukan harus terus dibangun, mengingat persoalan kependudukan dan pembangunan demikian kompleks. Permasalahan kependudukan yang masih harus diselesaikan adalah persebaran penduduk yang tidak merata, utamanya antara kota dan desa. Disamping itu laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi atau kesejahteraan dan kesehatan penduduk kurang memadai, serta perlunya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu pemerintah terus bekerja keras memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan penduduk atau kualitas manusia Indonesia.

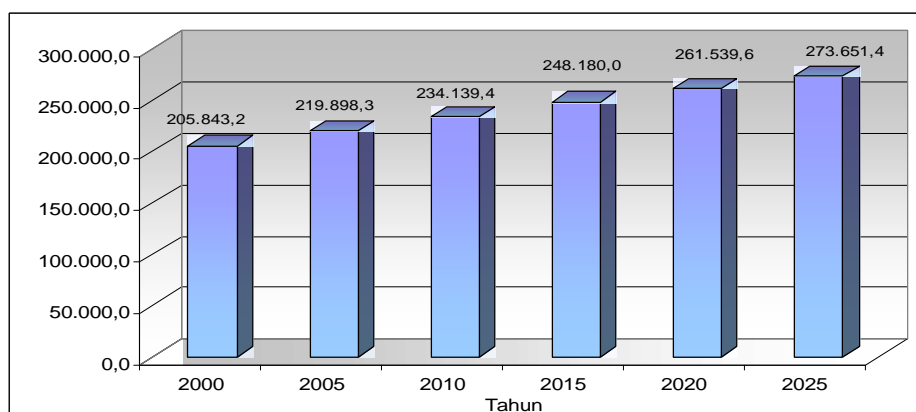
a. *Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.*

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 219,898 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 273,65 juta jiwa pada tahun 2025, tetapi laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000-2005 terjadi penurunan yaitu 1,36 persen dan diperkirakan menjadi 0,98 persen pada tahun 2020-2025. (Bapenas, 2006)

Sedangkan berdasarkan data Statistik Indonesia 2007 (BPS), pada tahun 2006 jumlah penduduk Indonesia adalah 222,2 juta, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,34 persen pertahun selama periode 2000-2006. Sebagian besar Provinsi mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk, kecuali Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Tingkat pertumbuhan penduduk telah turun secara cepat sejak tahun 1990 dari 1,45 persen pada periode 1990-2000 menjadi 1,34 persen per tahun selama periode 2000-2006. Pada periode 2000-2006, laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi di Provinsi Irian Jaya Barat (4.46%) dan laju terendah di Provinsi Kalimantan Barat (0.42%) (Tabel 2.3).

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan Indonesia, Tahun 2000 – 2025



Sumber : Bapenas

b. *Persebaran dan Kepadatan Penduduk*

Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk, karena sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan Data tahun 2006 menunjukkan sekitar 59% penduduk tinggal di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% penduduk tinggal di Provinsi Jawa Barat, 16% di Jawa Timur, serta 15% di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan luas Pulau Jawa sendiri secara keseluruhan hanya 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Ironisnya pada gabungan Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua yang memiliki luas sekitar 24% dari luas total Indonesia hanya dihuni sekitar 2% penduduk. Gambaran tersebut menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk, kenyataan ini menggambarkan bahwa daya dukung lingkungan yang kurang seimbang di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan luar Jawa. (Tabel 2.1 dan 2.4).

Besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menyebabkan kepadatan penduduk pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu 951 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2000 dan 1.007 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2005 dan menjadi 1.019 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2006. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2006 kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 13.499 penduduk per km^2 . Provinsi di luar Pulau Jawa yang termasuk cukup padat penduduknya adalah Provinsi Bali, yaitu 609 penduduk per km^2 . Di sisi lain provinsi Papua yang luasnya hampir 16 persen dari total luas Indonesia hanya dihuni 7 penduduk per km^2 (Tabel 2.4).

c. *Anggota Rumah Tangga*

Banyaknya rumah tangga pada tahun 2005 tercatat sebesar 55,1 juta rumah tangga, dengan rata-rata besarnya anggota rumah tangga 4,0 orang. Pada tahun 2006 tercatat jumlah rumah tangga sebesar 55,9 juta, sedangkan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di tahun 2006 ini tidak mengalami

perubahan. Data rumah tangga untuk tahun 2005 dan 2006 merupakan hasil estimasi berdasarkan data hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005. Dibandingkan dengan tahun 2000, rata-rata besarnya anggota rumah tangga pada tahun 2005 dan 2006 ini mengalami kenaikan (Tabel 2.5).

d. Keluarga Miskin

Yang termasuk keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, makan minimal 2 kali sehari, pakaian lebih dari satu pasang, sebagian besar lantai rumahnya tidak dari tanah, dan jika sakit tidak dibawa ke sarana kesehatan. Keluarga Sejahtera Satu, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, Keluarga Berencana (KB), interaksi dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Pada tahun 2005/2006, jumlah keluarga di Indonesia mencapai 53.890.224. Dari jumlah tersebut, 17.657.563 (32,77%) adalah jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu (Tabel 2.6).

e. Kemiskinan

Berbagai upaya perlu dilaksanakan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan agar jumlah penduduk miskin terus berkurang hingga jumlahnya kecil dan ketimpangan antara si miskin dan si kaya dapat dikurangi. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan para kaum miskin adalah memberdayakan kaum miskin di berbagai aspek kehidupannya.

Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin secara nasional tercatat sebesar 36.802.10 juta jiwa (17,03%) dari total penduduk Indonesia (Tabel 2.9). Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin menjadi 39.295,10 juta jiwa, secara nasional meningkat dibandingkan tahun 2005 dari total penduduk Indonesia.

Bila dilihat menurut daerah, penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan pada tahun 2005. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode 2004-2005 terjadi peningkatan penduduk miskin di daerah perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan. Pada tahun 2006 penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Periode 2005-2006 terjadi peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan (Tabel 2.7 dan Tabel 2.8).

Dari angka kemiskinan tahun 2005 antar provinsi terlihat bahwa ada beberapa provinsi yang dapat dikategorikan memiliki penduduk miskin yang relatif rendah, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Bali, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Sedangkan tahun 2006 hanya Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Provinsi yang memiliki penduduk miskin terbesar pada tahun 2005 dan 2006 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Tabel 2.9).

Dari Tabel 2.7 - 2.9 dapat dilihat distribusi penduduk miskin secara nasional pada tahun 1999-2006 menurut provinsi. Distribusi secara nasional pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 36,13 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,87 persen sisanya berada di daerah perdesaan dan pada tahun 2006 ada 36,87 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,13 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan.

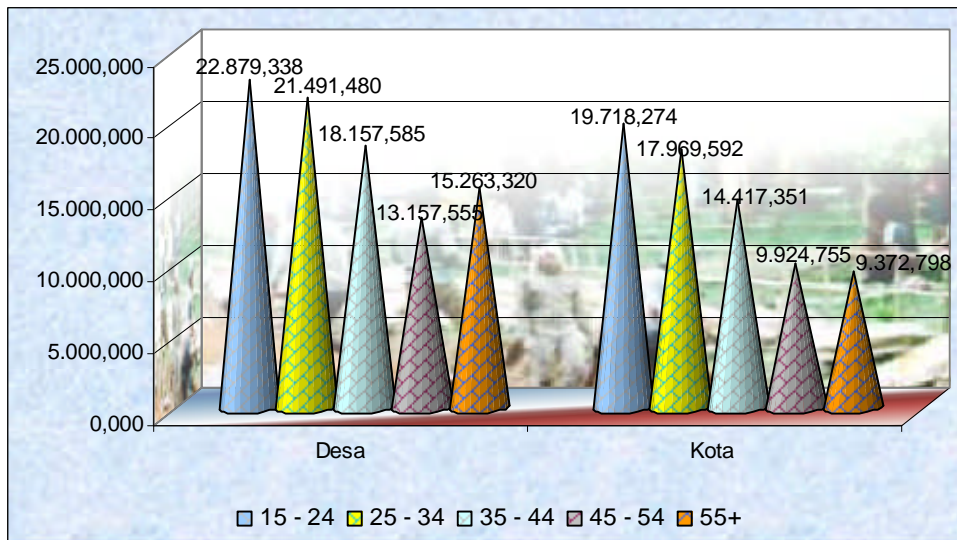
2.2.2 Ketenaga Kerjaan

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung turun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya ketidakcocokan dalam pasar kerja.

a. *Penduduk Usia Kerja*

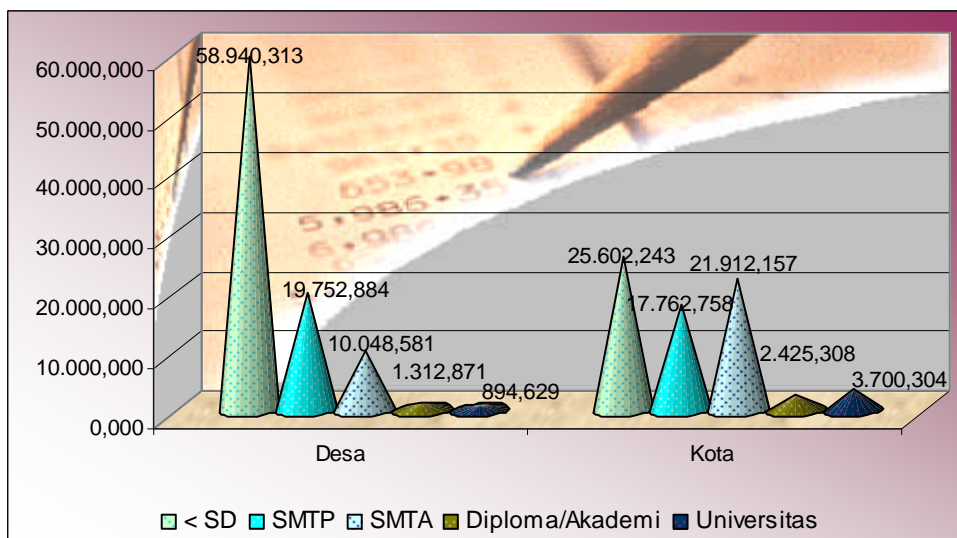
Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja menurut golongan umur di wilayah desa dan kota pada tahun 2007, menunjukkan golongan usia antara 15-24 tahun yang terbanyak (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur dan Desa dan Kota, Tahun 2007



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,2,143,pnaker> (BPS/Sakernas, Februari 2007)

Gambar 2.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan dan Desa dan Kota, Tahun 2007



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,2,139,pnaker> (BPS/Sakernas, Februari 2007)

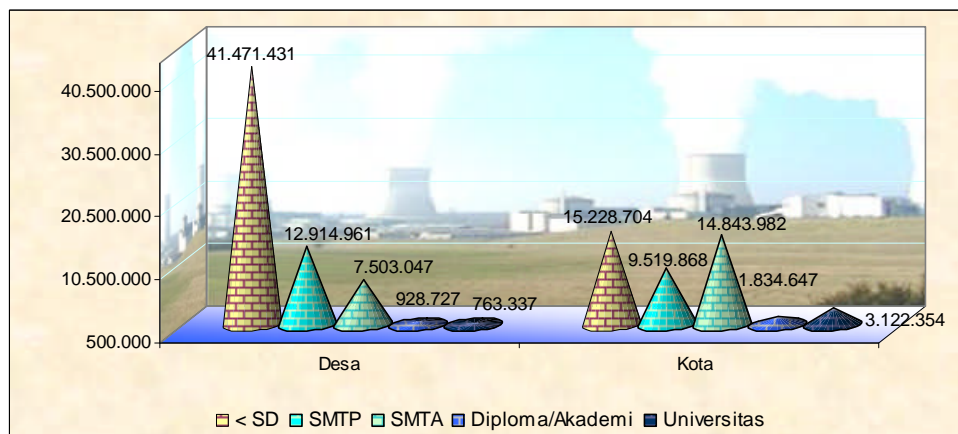
Sedangkan penduduk usia kerja menurut pendidikan di wilayah desa dan kota pada tahun 2007, menunjukkan bahwa penduduk usia kerja banyak yang berpendidikan di bawah SD (Gambar 2.3).

b. *Partisipasi Angkatan Kerja*

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2006, di Indonesia terdapat 160,81 juta penduduk usia kerja, sekitar 60,66 persen dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja (15+). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia pada tahun 2006 sekitar 66,16 persen (Tabel 2.10A dan 2.10B).

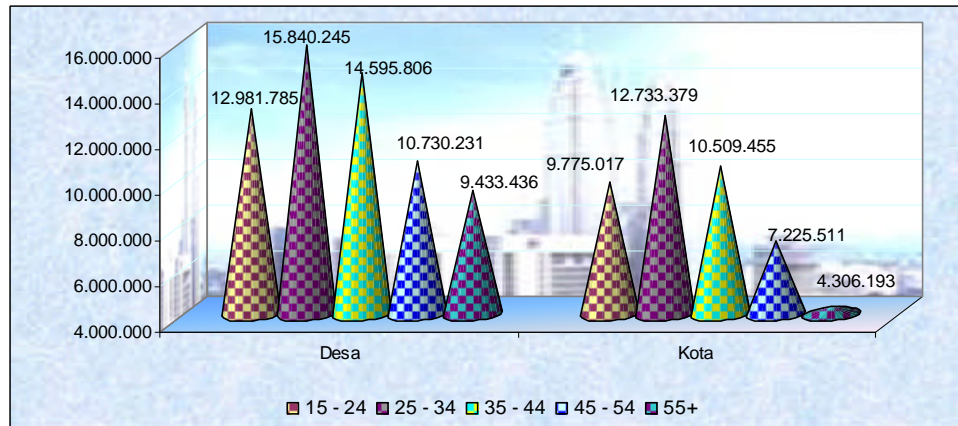
Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran). Pada tahun 2007, jumlah angkatan kerja terbesar berpendidikan di bawah SD, dengan rentang usia antara 25-34 tahun. Penduduk di desa lebih banyak jumlahnya ditinjau dari pendidikan dan umur. (Gambar 2.4 dan Gambar 2.5).

Gambar 2.4 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Desa Kota, Tahun 2007



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,3,43,pnaker> (BPS/Sakernas, Februari 2007)

Gambar 2.5 Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Desa Kota, Tahun 2007



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,3,43,pnaker> (BPS/Sakernas, Februari 2007)

c. Penduduk yang Bekerja

Dari 94,46 juta penduduk yang bekerja, sekitar 40,14 juta dari mereka bekerja disektor pertanian, sektor perdagangan 19,215 juta, industri 11,890 juta, dan jasa 11,355 juta (Tabel 2.11). Pada tabel terlihat, bahwa sektor pertanian, kehutanan, perburuhan, dan perikanan masih menduduki tempat tertinggi dari lapangan pekerjaan utama di Indonesia.

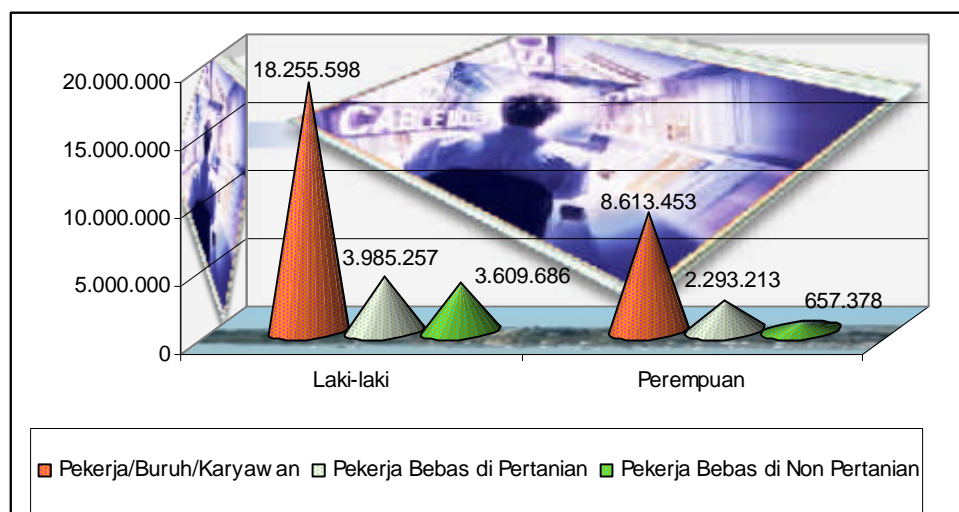
Jumlah buruh/karyawan/pegawai di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 26.821 juta jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja. Persentase terbesar dari buruh/karyawan/pegawai tersebut bekerja disektor jasa kemasyarakatan, industri pengolahan, perdagangan besar, eceran, dan pertanian. Sementara jumlah penduduk yang berusaha di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 42.301.812 juta jiwa terdiri dari mereka yang berusaha sendiri 46 persen, berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap 47 persen dan berusaha dengan buruh tetap 7 persen. Seperti diketahui, dari 40,136 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sekitar 30,25 persen dari mereka merupakan pekerja tidak dibayar. Jumlah pekerja tidak dibayar di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 16.173.796 juta jiwa dari penduduk yang bekerja (Tabel 2.12).

Makin lama jam kerja diasumsikan produktivitas pekerja juga semakin tinggi. Dari seluruh penduduk yang bekerja, sekitar 16,53 persen dari mereka bekerja lebih dari 54 jam seminggu, 22,28 persen bekerja 45 - 54 jam seminggu, 25,68 persen bekerja 35 - 44 jam seminggu dan sisanya sebesar 35,51 persen dapat dikelompokkan sebagai penduduk setengah pengangguran karena mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu. (Tabel 2.13).

d. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual. Atau tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah dan atau imbalan dalam bentuk lain. Pada tahun 2007, jumlah pekerja yang banyak menerima upah / gaji selama sebulan berada pada rentang Rp. 200.000 sampai Rp. 400.000 , didominasi di wilayah desa, dan lebih banyak kaum laki-laki yang menerimanya (Tabel 2.14). Untuk jumlah pekerja menurut klasifikasi pekerja, maka yang paling banyak adalah sebagai pekerja/buruh/karyawan dan didominasi oleh kaum laki-laki (Gambar 2.6).

Gambar 2.6 Jumlah Pekerja Menurut Klasifikasi Pekerja Tahun 2007

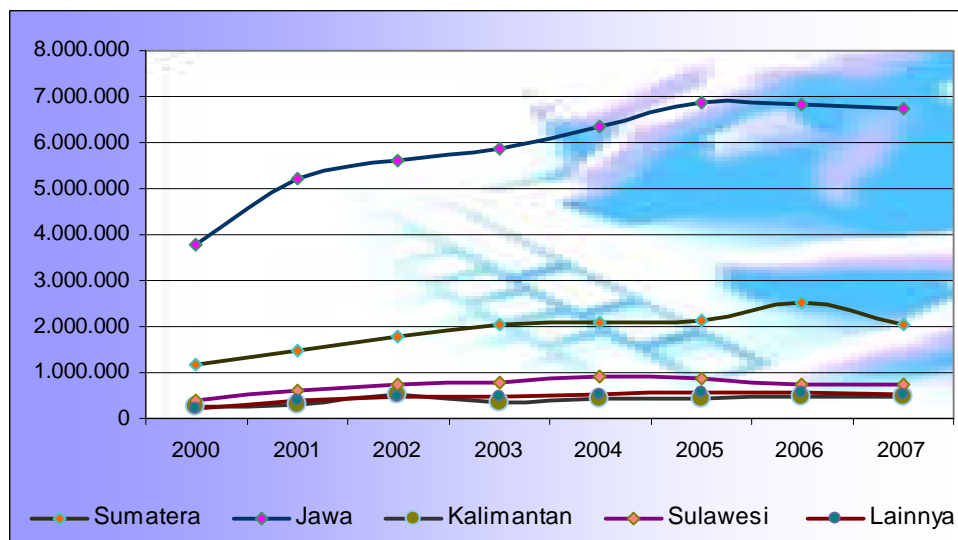


Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,5,61,pnaker> (BPS/Sakernas, Februari 2007)

e. Penganggur

Yang dinamakan penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari data jumlah penganggur terbuka dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, terlihat bahwa Pulau Jawa paling tinggi tingkat penganggurannya dan jaraknya jauh dibandingkan dengan pulau yang lain, disusul dengan Pulau Sumatera. Untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Lainnya jaraknya sangat berdekatan, yang menandakan tingkat pengangguran ketiga pulau ini kurang lebih sama rendahnya dibandingkan kedua pulau sebelumnya (Gambar 2.7).

Gambar 2.7 Jumlah Penganggur Terbuka Menurut Pulau, Tahun 2000-2007



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/BPS> (BPS/Sakernas, Februari 2007)

2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi

2.3.1 Sosial

a. *Sarana Pendidikan*

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tabel 2.15 sampai dengan Tabel 2.18 memuat data tentang jumlah sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA dan SMK).

Pada tahun ajaran 2005/2006 di tingkat Sekolah Dasar (SD), terjadi peningkatan jumlah sekolah dibandingkan dengan tahun ajaran 2004/2005. Sama halnya dengan tingkat sekolah dasar (SD), pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) jumlah sekolah mengalami peningkatan. Demikian pula untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) jumlah sekolah juga mengalami peningkatan.

Data perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.19, jumlah perguruan tinggi swasta pada tahun ajaran 2005/2006 masih lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Dari sini dapat dilihat tingkat keberhasilan pendidikan di Indonesia.

b. *Sarana Peribadatan*

Kerukunan hidup antar umat beragama dapat menjadikan ketenteraman batin dalam menjalani ibadah menurut agama masing-masing. Adapun agama-agama yang diakui oleh negara di Indonesia ini yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Pada Tabel 2.20 disajikan sarana tempat beribadah berupa Masjid sebanyak 226.019 buah, Surau/Langgar 489.268 buah, gereja dan kapel untuk umat Kristen/Protestan dan Katolik masing berjumlah 39.085 buah dan 11.050 buah, dan untuk umat Hindu jumlah pura sebanyak 13.435 buah serta untuk umat Budha jumlah vihara/klenteng sebanyak 2.956 buah.

c. *Sarana Kesehatan*

Masalah kesehatan adalah suatu hal yang fundamental yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Besarnya kepedulian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan masyarakat dapat terlihat dari ketersediaan sarana kesehatan seperti halnya rumah sakit, Puskesmas serta tenaga kesehatan.

Jumlah rumah sakit yang ada secara nasional pada tahun 2005 terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga halnya dengan jumlah Puskesmas, sebesar 7.977 unit pada tahun 2003 menjadi 8.278 unit sampai dengan pertengahan tahun 2005, sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu menjadi 22.785 hingga pertengahan tahun 2005.

Berdasarkan hasil Sensus Potensi Desa 2005 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.21 bahwa untuk sarana kesehatan tersedia Rumah Sakit sebanyak 1.711 unit, Rumah Sakit Bersalin 5.348 unit. Disamping itu juga tersedia Posyandu 228.628 unit, Praktek Dokter dan Praktek Bidan masing-masing 29.634 buah dan 44.619 buah, Polindes 27.686 unit, serta Toko Khusus Obat/Jamu 18.268 unit, Apotik 9.409 unit.

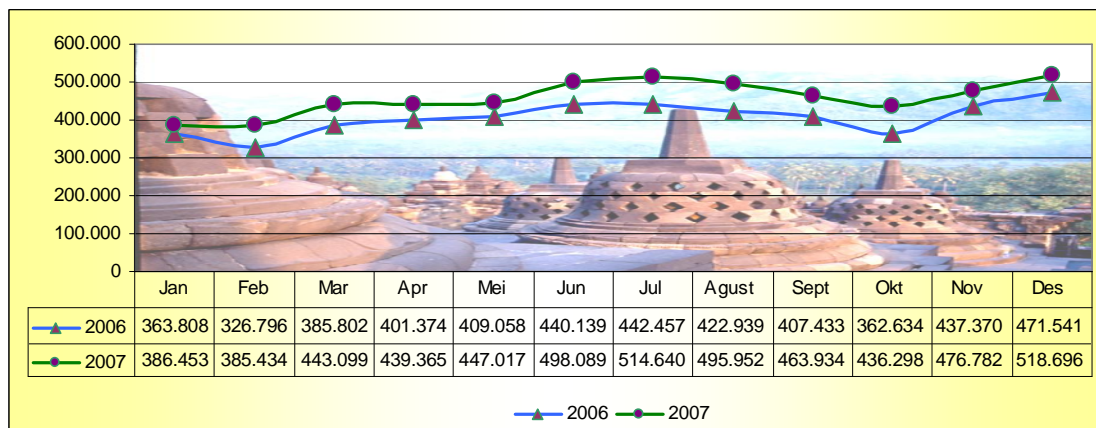
2.3.2 Budaya

Jumlah situs/ benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak di seluruh Indonesia tahun 2007 tercatat sebanyak 8.232 situs/ BCB, sedangkan situs/ BCB yang sudah ditetapkan sebanyak 400 situs/ BCB. Provinsi yang paling banyak memiliki situs/ BCB adalah provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1.167 situs/ BCB, yang sudah ditetapkan baru sebanyak 26 situs/ BCB. Sedangkan jumlah pengunjung museum di Indonesia tahun 2006 sebanyak 1.082.509 orang. Untuk periode Januari-Mei 2007, jumlah pengunjung museum tercatat sebanyak 288.533 orang (dari http://www.budpar.go.id/filedata/2474_1149-bukusaku2007indonesia.pdf)

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia selama tahun 2007 sebanyak 5.505.759 kunjungan, atau naik sebesar 13,02% dibanding tahun 2006 sebesar 4.871.351 kunjungan. Tahun 2007 jumlah wisman terbesar yang datang ke Indonesia melalui pintu masuk Ngurah Rai sebanyak 1.741.935 kunjungan atau naik sebesar 31,08% dibandingkan 2006. Jumlah wisman terbesar kedua melalui pintu masuk Soekarno Hatta sebanyak 1.153.006 kunjungan atau naik sebesar 0,50% dibandingkan tahun 2006. Jumlah wisman terbesar ketiga melalui pintu masuk Batam sebanyak 1.077.306 kunjungan atau naik sebesar 6,38% dibandingkan tahun 2006.

Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata selama tahun 2007 sejumlah US\$ 5.345,98 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 20,19% dibanding tahun 2006. Melihat hal tersebut, maka diperkirakan sektor pariwisata akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

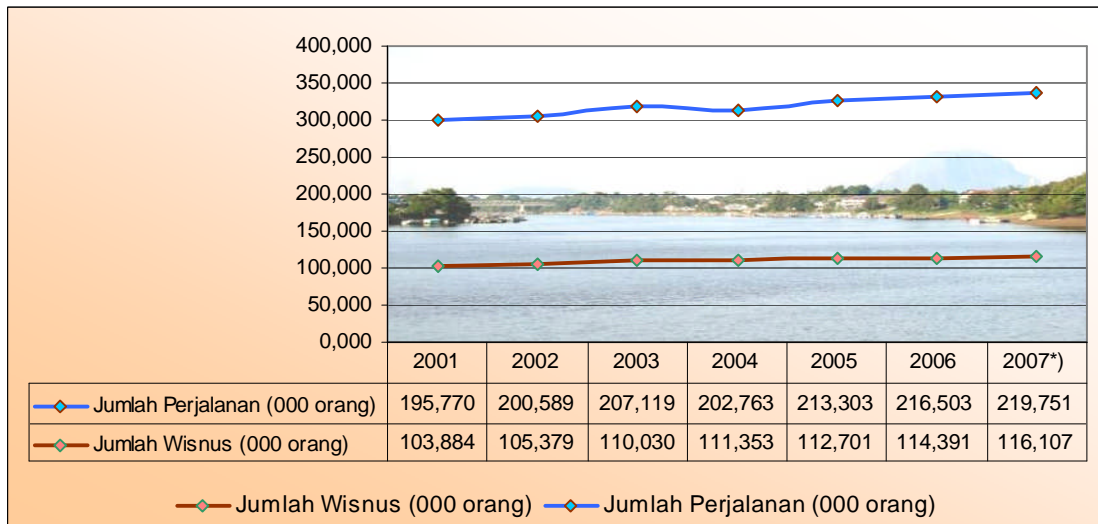
Gambar 2.8 Jumlah Wisatawan Mancanegara, Tahun 2006-2007



Sumber: www.budpar.go.id/page.php?ic=521&id=2474 (Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan)

Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2007 diperkirakan sebanyak 116.107.000 orang, jumlah perjalanan sebanyak 219.751.000 orang, dan pengeluaran wisnus diperkirakan sebesar Rp 79.85 triliun (Gambar 2.9 dan Gambar 2.10).

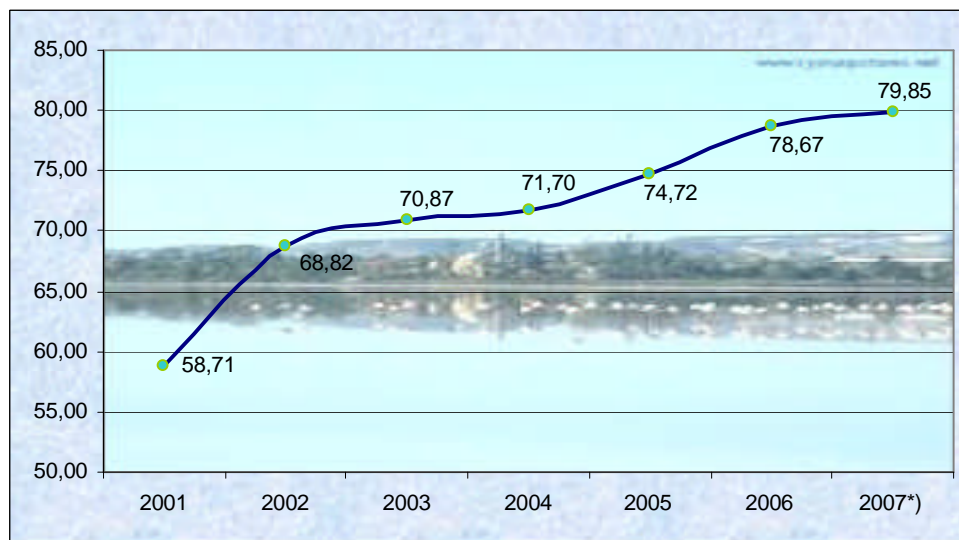
Gambar 2.9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (000 orang) dan Jumlah Perjalanan (000 orang), Tahun 2001 - 2007



Sumber : www.budpar.go.id/page.php?ic=521&id=2474 (diolah kembali oleh P2DSJ)

*) Angka Sementara

Gambar 2.10 Jumlah Total Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Trilyun Rp), Tahun 2001 – 2007



Sumber : www.budpar.go.id/page.php?ic=521&id=2474 (diolah kembali oleh P2DSJ)

*) Angka Sementara

2.3.3 Ekonomi

a. *Produk Domestik Bruto (PDB)*

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2006 sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2005. Berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2006 adalah sekitar 5,48 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah sekitar 6,09 persen (Tabel 2.22). Seluruh sektor ekonomi PDB pada tahun 2006 mencatat pertumbuhan yang positif.

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Indonesia dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDB Indonesia. Pada tahun 2006 sumbangan sektor industri pengolahan sekitar 28,05 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan andil sekitar 14,87 persen, sedangkan sumbangan sektor pertanian sekitar 12,90 persen (Tabel 2.23). Adapun sektor konstruksi pertumbuhannya belum menonjol dibandingkan sektor lainnya.

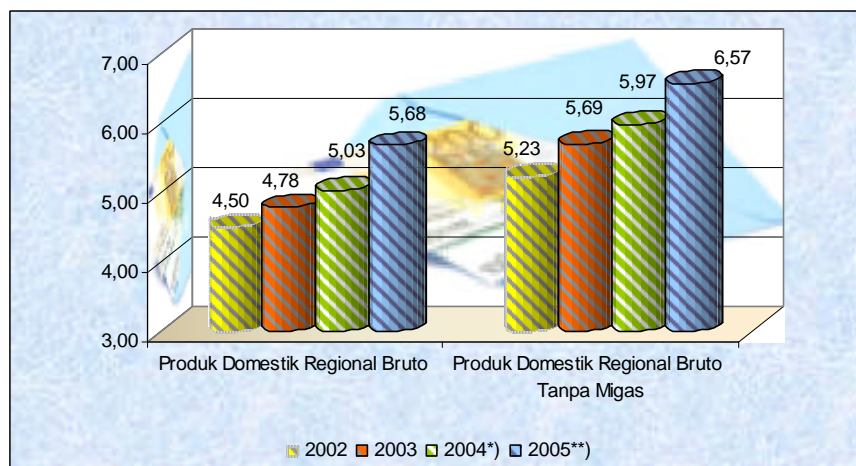
b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Besaran PDRB per kapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk. Berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dengan migas, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau merupakan provinsi yang mempunyai PDRB per kapita tertinggi. PDRB per kapita DKI Jakarta lebih kecil dari Kalimantan Timur karena jumlah penduduk DKI Jakarta lebih besar dari Kalimantan Timur. Berdasarkan harga berlaku dengan migas, PDRB Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau masing-masing sebesar 61,4 juta rupiah, 49,2 juta rupiah, dan 32,2 juta rupiah. Bila migas diabaikan, PDRB

Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau masing-masing hanya sebesar 23,3 juta rupiah dan 29,3 juta rupiah (lihat Tabel 2.24 dan Tabel 2.25).

Laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan atau tanpa migas pada kurun waktu 2002-2005 selalu mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2002 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,50 persen dan tanpa migas sebesar 5,23 persen. Pada tahun 2005 kinerja perekonomian tumbuh sebesar 5,68 persen dan tanpa migas sebesar 6,57 persen (Gambar 2.11). Hal demikian juga terjadi pada perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 dengan atau tanpa migas (Gambar 2.12). Disini pada tahun 2002 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 1,03 persen dan tanpa migas sebesar 1,74 persen. Pada tahun 2005 kinerja perekonomian tumbuh sebesar 4,32 persen dan tanpa migas sebesar 5,20 persen.

Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), 2002-2005

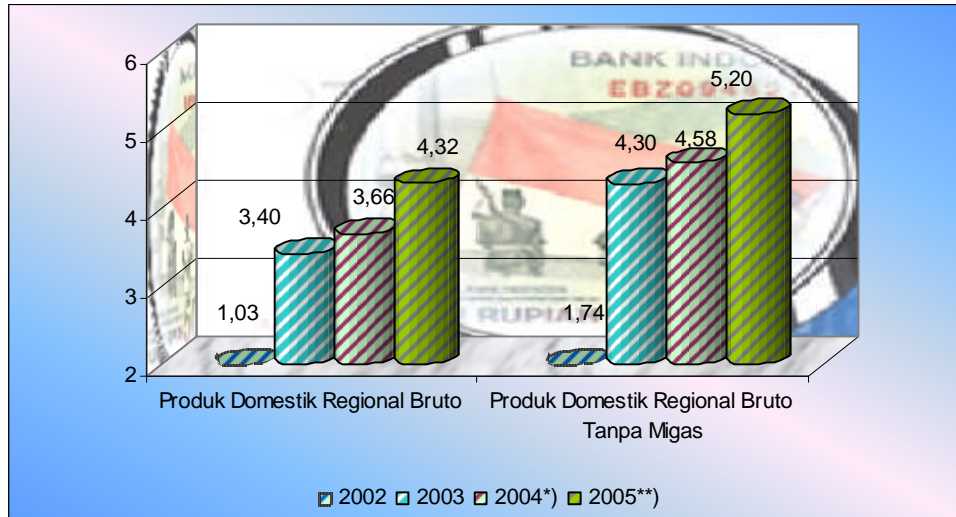


Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2007

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), 2002-2005



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2007

Cat. : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

c. *Pendapatan per Kapita*

Secara umum pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita. Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 11,2 juta rupiah pada tahun 2005 menjadi sekitar 13,2 juta rupiah pada tahun 2006. Namun demikian laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita pada tahun 2006 bila dilihat berdasar harga konstan 2000 menurun menjadi 2,76 persen, sementara tahun 2005 laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebesar 3,76 persen.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Di Indonesia
Tahun 2006

No.	Provinsi	Luas Area ¹⁾ (Km ²)	Persentase terhadap Luas Indonesia
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	56.500,51	3,04
2	Sumatera Utara	72.427,81	3,89
3	Sumatera Barat	42.224,65	2,27
4	Riau	87.844,23	4,72
5	Jambi	45.348,49	2,44
6	Sumatera Selatan	60.302,54	3,24
7	Bengkulu	19.795,15	1,06
8	Lampung	37.735,15	2,03
9	Kep. Bangka Belitung	16.424,14	0,88
10	Kep. Riau	8.084,01	0,43
11	D.K.I Jakarta	740,29	0,04
12	Jawa Barat	36.925,05	1,98
13	Jawa Tengah	32.799,71	1,76
14	D.I. Yogyakarta	3.133,15	0,17
15	Jawa Timur	46.689,64	2,51
16	Banten	9.018,64	0,48
17	Bali	5.449,37	0,29
18	Nusa Tenggara Barat	19.708,79	1,06
19	Nusa Tenggara Timur	46.137,87	2,48
20	Kalimantan Barat	120.114,32	6,46
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	8,25
22	Kalimantan Selatan	38.884,28	2,09
23	Kalimantan Timur	194.849,08	10,47
24	Sulawesi Utara	13.930,73	0,75
25	Sulawesi Tengah	68.089,83	3,66
26	Sulawesi Selatan	46.116,45	2,48
27	Sulawesi Tenggara	36.757,45	1,98
28	Gorontalo	12.165,44	0,65
29	Sulawesi Barat	16.787,19	0,90
30	Maluku	47.350,42	2,55
31	Maluku Utara	39.959,99	2,15
32	Irian Jaya Barat	114.566,40	6,16
33	Papua	309.934,40	16,66
	Indonesia	1.860.359,67	100

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

¹⁾ : Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 18 Tahun 2005 tanggal 28 April 2005

Tabel 2.2
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi Seluruh Indonesia
Tahun 2008

No	Provinsi	Jumlah				Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)*
		Kab	Kota	Kec	Kel/ Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	18	5	263	6.292	57.956,00	4.228,726
2	Sumatera Utara	21	7	372	5.618	72.981,23	13.319,525
3	Sumatera Barat	12	7	165	897	42.012,89	4.549,356
4	Riau	9	2	150	1.555	87.023,66	4.715,437
5	Jambi	9	1	114	1.279	50.058,16	2.805,297
6	Sumatera Selatan	11	4	212	2.943	91.592,43	7.508,091
7	Bengkulu	8	1	99	1.249	19.919,33	1.715,689
8	Lampung	9	2	188	2.161	34.623,80	7.348,623
9	Kep.Bangka Belitung	6	1	36	321	16.424,06	1.059,481
10	Kepulauan Riau	4	2	56	323	8.201,72	1.393,897
11	DKI Jakarta	1	5	44	267	664,01	7.706,175
12	Jawa Barat	17	9	615	5.822	35.377,76	40.707,250
13	Jawa Tengah	29	6	568	8.574	32.800,69	34.034,177
14	DI Yogyakarta	4	1	78	438	3.133,15	3.441,614
15	Jawa Timur	29	9	657	8.469	47.799,75	37.872,044
16	Banten	4	3	152	1.503	9.662,92	9.245,075
17	Bali	8	1	56	695	5.780,06	3.372,335
18	Nusa Tenggara Barat	7	2	112	871	18.572,32	4.364,141
19	Nusa Tenggara Timur	19	1	254	2.684	48.718,10	4.230,028
20	Kalimantan Barat	12	2	164	1.511	147.307,00	4.165,308
21	Kalimantan Tengah	13	1	117	1.390	153.564,50	2.019,117
22	Kalimantan Selatan	11	2	140	1.960	38.744,23	3.407,423
23	Kalimantan Timur	10	4	135	1.401	204.534,34	3.088,322
24	Sulawesi Utara	9	4	130	1267	13.851,64	2.199,701
25	Sulawesi Tengah	9	1	115	1.532	61.841,29	2.521,327
26	Sulawesi Selatan	20	3	300	2.887	46.717,48	7.606,500
27	Sulawesi Tenggara	10	2	162	1.783	38.067,70	2.003,744
28	Gorontalo	5	1	47	494	11.257,07	945,001
29	Sulawesi Barat	5	0	55	450	16.787,18	1.050,928
30	Maluku	7	2	64	895	46.914,03	1.407,921
31	Maluku Utara	6	2	71	920	31.982,50	970,443
32	Papua	20	1	302	3.422	319.036,05	2.152,823
33	Papua Barat (PP No.24/2007)	8	1	100	1.194	97.024,27	690,349
Indonesia		370	95	6.093	73.067	1.910.931,32	227.845,868

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 31 Januari 2008

¹⁾ Sumber Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri, Bulan September 2007

Tabel 2.3
Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2006

Provinsi	Penduduk ¹⁾ (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)		
	2000	2005 ³⁾	2006 ⁴⁾	1990-2000	2000-2005	2000-2006
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	3.929	4.032	4.073	1,46	0,52	0,60
Sumatera Utara	11.642	12.451	12.643	1,32	1,35	1,38
Sumatera Barat	4.249	4.566	4.632	0,63	1,45	1,45
Riau	4.948	4.579	4.763	4,35	3,22	3,35
Jambi	2.407	2.636	2.683	1,84	1,83	1,83
Sumatera Selatan	6211 ²⁾	6.782	6.900	1,28	1,78	1,77
Bengkulu	1456 ²⁾	1.549	1.568	2,20	1,26	1,25
Lampung	6.731	7.116	7.212	1,17	1,12	1,16
Kep. Bangka Belitung	900	1.043	1.075	0,97	3,00	3,00
Kepulauan Riau	-	1.275	1.338	-	4,15	4,28
DKI Jakarta	8.361	8.860	8.963	0,17	1,17	1,17
Jawa Barat	35.724	38.965	39.649	2,03	1,75	1,75
Jawa Tengah	31.223	31.978	32.179	0,94	0,48	0,50
DI. Yogyakarta	3.121	3.344	3.389	0,72	1,39	1,38
Jawa Timur	34.766	36.294	36.592	0,70	0,86	0,86
Banten	8.098	9.029	9.224	3,21	2,20	2,19
Bali	3.150	3.384	3.432	1,31	1,44	1,44
Nusa Tenggara Barat	4.009	4.184	4.257	1,82	0,86	1,01
Nusa Tenggara Timur	3.823	4.260	4.355	1,64	2,19	2,20
Kalimantan Barat	4.016	4.052	4.118	2,29	0,18	0,42
Kalimantan Tengah	1.856	1.915	1.938	2,99	0,63	0,76
Kalimantan Selatan	2.984	3.282	3.346	1,45	1,92	1,93
Kalimantan Timur	2.452	2.849	2.936	2,81	3,05	3,05
Sulawesi Utara	2.001	2.129	2.161	1,33	1,25	1,29
Sulawesi Tengah	2.176	2.295	2.349	2,57	1,07	1,29
Sulawesi Selatan	8.051	7.510	7.630	1,49	0,96	1,07
Sulawesi Tenggara	1.820	1.963	2.002	3,15	1,52	1,60
Gorontalo	833	922	941	1,59	2,04	2,05
Sulawesi Barat	-	969	992	-	1,69	1,81
Maluku	1166 ²⁾	1.252	1.271	0,11	1,42	1,44
Maluku Utara	815 ²⁾	884	919	1,60	1,64	2,02
Papua	2.214	1.875	1.974	3,22	2,17	2,68
Irian Jaya Barat	-	643	688	-	3,95	4,46
Indonesia	205.132²⁾	218.869	222.192	1,45	1,30	1,34

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2007

Catatan : 1) Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap

2) Angka Perbaikan Berdasarkan Sensus Penduduk 2000

3) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

4) Hasil Estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2006

Provinsi	Persentase Penduduk			Kepadatan Penduduk Per Km ²		
	2000	2005	2006	2000	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
Nanggre Aceh Darussalam	1,92	1,84	1,83	76	78	78
Sumatera Utara	5,68	5,69	5,69	158	169	172
Sumatera Barat	2,07	2,09	2,08	99	106	108
Riau	2,41	2,01	2,14	52	52	54
Jambi	1,17	1,20	1,21	45	49	50
Sumatera Selatan	3,03	3,10	3,11	67	73	74
Bengkulu	0,71	0,71	0,71	74	78	79
Lampung	3,28	3,25	3,25	190	201	204
Kep. Bangka Belitung	0,44	0,48	0,48	56	65	66
Kep. Riau	-	0,58	0,60	-	15	15
Sumatera	20,70	21,03	21,10	88	96	98
DKI Jakarta	4,08	4,05	4,03	12.592	13.344	13.499
Jawa Barat	17,42	17,80	17,84	1.033	1.126	1.146
Jawa Tengah	15,22	14,61	14,48	959	982	989
DI. Yogyakarta	1,52	1,53	1,53	980	1.049	1.064
Jawa Timur	16,95	16,58	16,47	725	757	764
Banten	3,95	4,13	4,15	936	1.044	1.066
Jawa	59,13	58,70	58,51	951	1.007	1.019
Bali	1,54	1,55	1,54	559	601	609
Nusa Tenggara Barat	1,95	1,91	1,92	199	208	211
Nusa Tenggara Timur	1,86	1,95	1,96	81	90	92
Bali dan Nusa Tenggara	5,35	5,40	5,42	150	162	165
Kalimantan Barat	1,96	1,85	1,85	27	28	28
Kalimantan Tengah	0,90	0,87	0,87	12	12	13
Kalimantan Selatan	1,45	1,50	1,51	69	75	77
Kalimantan Timur	1,20	1,30	1,32	11	12	13
Kalimantan	5,51	5,53	5,55	20	21	21
Sulawesi Utara	0,98	0,97	0,97	131	139	141
Sulawesi Tengah	1,06	1,05	1,06	34	36	37
Sulawesi Selatan	3,92	3,43	3,43	129	85	87
Sulawesi Tenggara	0,89	0,90	0,90	48	51	52
Gorontalo	0,41	0,42	0,42	68	75	77
Sulawesi Barat	-	0,44	0,45	-	11	11
Sulawesi	7,25	7,21	7,23	78	82	84
Maluku	0,57	0,57	0,57	25	27	27
Maluku Utara	0,40	0,40	0,41	26	29	30
Papua	1,08	0,86	0,89	6	7	8
Irian Jaya Barat	-	0,31	0,31	-	21	22
Maluku dan Papua	2,05	2,13	2,18	9	10	11
Indonesia	100,00	100,00	100,00	108	116	118

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2007

Catatan : Diolah dari hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005

Tabel 2.5
Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2006

Provinsi	Rumah Tangga (000)			Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga		
	2000 ¹	2005 ²	2006 ³	2000	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Nanggroe Aceh Darussalam	922	899	908	4,3	4,5	4,5
Sumatera Utara	2.610	2.802	2.846	4,5	4,4	4,4
Sumatera Barat	1.020	1.091	1.107	4,2	4,2	4,2
Riau	1.202	1.069	1.111	4,1	4,3	4,3
Jambi	594	642	654	4,1	4,1	4,1
Sumatera Selatan	1.495	1.585	1.613	4,2	4,3	4,3
Bengkulu	358	380	385	4,1	4,1	4,1
Lampung	1.633	1.745	1.769	4,1	4,1	4,1
Kep. Bangka Belitung	214	257	265	4,2	4,1	4,1
Kep. Riau	-	345	362	-	3,7	3,7
DKI Jakarta	2.232	2.211	2.237	3,7	4,0	4,0
Jawa Barat	9.561	10.185	10.364	3,7	3,8	3,8
Jawa Tengah	7.900	8.361	8.414	4,0	3,8	3,8
DI. Yogyakarta	923	1.000	1.013	3,4	3,3	3,3
Jawa Timur	9.500	9.845	9.926	3,7	3,7	3,7
Banten	2.002	2.145	2.192	4,0	4,2	4,2
Bali	800	859	872	3,9	3,9	3,9
Nusa Tenggara Barat	1.032	1.085	1.104	3,9	3,9	3,9
Nusa Tenggara Timur	794	909	929	4,8	4,7	4,7
Kalimantan Barat	901	908	922	4,5	4,5	4,5
Kalimantan Tengah	482	473	478	3,8	4,1	4,1
Kalimantan Selatan	785	867	883	3,8	3,8	3,8
Kalimantan Timur	613	682	703	4,0	4,2	4,2
Sulawesi Utara	545	564	572	3,7	3,8	3,8
Sulawesi Tengah	504	546	559	4,3	4,2	4,2
Sulawesi Selatan	1.816	1.712	1.740	4,4	4,4	4,4
Sulawesi Tenggara	409	438	446	4,4	4,5	4,5
Gorontalo	214	235	239	3,9	3,9	3,9
Sulawesi Barat	-	219	223	-	4,4	4,4
Maluku	243	270	274	4,8	4,6	4,6
Maluku Utara	149	188	196	5,5	4,7	4,7
Irian Jaya Barat	-	150	166	-	4,3	4,1
Papua	552	451	469	4,0	4,2	4,2
Indonesia	52.010	55.119	55.942	3,9	4,0	4,0

Catatan : 1) Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000

2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005

3) Hasil Estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2007

Tabel 2.6 :
Jumlah Penduduk dan Keluarga
Tahun 2006

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Keluarga	Jumlah Pra KS dan KS I
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.027.041	2.112.935	975.374	510.633
2	Sumatera Utara	5.630.479	5.725.608	2.480.890	666.658
3	Sumatera Barat	2.251.014	2.356.735	1.066.287	259.269
4	Riau	2.382.015	2.288.886	1.071.212	269.917
5	Jambi	1.367.068	1.348.530	684.123	190.363
6	Sumatera Selatan	3.469.906	3.473.091	1.633.648	649.606
7	Bengkulu	817.027	803.028	394.508	148.655
8	Lampung	3.669.314	3.558.038	1.718.901	865.132
9	Kep.Bangka Belitung	521.314	505.649	256.633	62.777
10	Kep.Riau	623.376	632.924	318.516	52.644
	Sumatera	22.758.554	22.805.424	10.600.092	3.675.654
11	DKI Jakarta	3.865.581	3.618.992	1.731.503	277.831
12	Jawa Barat	18.843.006	18.655.680	9.814.684	3.680.679
13	Jawa Tengah	16.277.532	16.525.742	8.382.490	4.434.859
14	DI Yogyakarta	1.684.043	1.723.387	843.853	343.824
15	Jawa Timur	17.636.941	18.284.414	9.694.644	97.279
16	Banten	4.457.964	4.387.992	2.100.661	653.966
17	Bali	1.633.360	1.638.223	795.735	130.247
	Jawa dan Bali	64.398.427	64.834.430	33.363.570	9.618.685
18	Nusa Tenggara Barat	2.067.958	2.163.322	1.152.459	743.535
19	Nusa Tenggara Timur	2.119.625	2.177.857	951.260	660.912
	Nusa Tenggara	4.187.583	4.341.179	2.103.719	1.404.447
20	Kalimantan Barat	2.057.121	2.005.433	940.189	292.996
21	Kalimantan Tengah	986.260	940.509	482.884	134.502
22	Kalimantan Selatan	1.621.916	1.614.087	853.861	273.124
23	Kalimantan Timur	1.541.867	1.390.323	749.338	166.573
	Kalimantan	6.207.164	5.950.352	3.026.272	867.195
24	Sulawesi Utara	1.104.111	1.079.960	575.336	201.220
25	Sulawesi Tengah	1.204.041	1.168.188	567.063	251.593
26	Sulawesi Selatan	4.137.659	4.329.961	1.902.591	718.139
27	Sulawesi Tenggara	995.696	997.858	458.917	236.536
28	Gorontalo	454.219	456.879	237.643	112.218
	Sulawesi	7.895.726	8.032.846	3.741.550	1.519.706
29	Maluku	669.330	680.806	287.644	143.601
30	Maluku Utara	455.027	439.519	189.778	81.143
	Maluku	1.124.357	1.120.325	477.422	224.744
31	Papua	1.283.754	1.182.385	577.599	347.132
	Indonesia	107.855.565	108.266.941	53.890.224	17.657.563

Sumber : BPS, Podes 2006

Tabel 2.7 :
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Perkotaan, Tahun 2000 - 2006

No.	Provinsi	Jumlah (000)							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	104,70	102,30	112,10	201,10	223,90	198,40	222,90	226,90
2	Sumatera Utara	968,40	613,64	364,18	698,83	686,30	633,40	732,30	863,60
3	Sumatera Barat	237,40	136,82	112,87	173,65	184,80	167,80	189,30	189,80
4	Riau	142,70	115,60	85,71	178,78	178,70	160,50	199,90	226,30
5	Jambi	176,90	148,62	103,80	138,40	134,60	130,80	143,70	142,50
6	Sumatera Selatan	566,30	520,69	179,67	573,46	459,80	455,10	557,80	599,50
7	Bengkulu	97,70	49,30	43,25	129,51	110,60	112,80	142,40	134,50
8	Lampung	307,20	381,19	244,45	345,14	318,70	317,30	405,60	398,60
9	Kep.Bangka Belitung	-	-	81,58	38,87	37,00	33,00	37,70	46,60
10	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	70,10	82,70
11	DKI Jakarta	379,60	416,10	247,50	286,88	294,10	277,10	316,20	407,10
12	Jawa Barat	4.279,00	3.157,20	1.657,81	2.647,05	2.445,30	2.243,20	2.444,70	2.777,10
13	Jawa Tengah	3.032,20	2.444,75	1.440,99	2.762,28	2.520,30	2.346,50	2.671,20	2.958,10
14	DI Yogyakarta	482,70	436,61	266,77	303,75	303,30	301,40	340,30	346,00
15	Jawa Timur	3.047,50	2.271,51	1.829,71	2.859,00	2.474,60	2.230,60	2.716,40	2.836,30
16	Banten	-	-	570,68	305,84	309,40	279,90	370,20	417,10
17	Bali	114,50	80,07	67,14	98,88	99,70	87,00	105,90	127,40
18	Nusa Tenggara Barat	249,30	340,40	312,19	537,38	486,00	492,50	575,30	573,30
19	Nusa Tenggara Timur	146,30	130,23	77,93	135,24	126,00	122,70	133,50	148,00
20	Kalimantan Barat	95,70	114,37	111,56	185,49	165,80	143,80	171,60	151,00
21	Kalimantan Tengah	26,50	25,23	21,17	42,33	41,30	33,00	48,50	52,90
22	Kalimantan Selatan	99,50	42,43	51,90	77,60	76,00	63,50	82,40	102,60
23	Kalimantan Timur	127,90	92,27	122,38	75,73	94,80	84,30	106,00	127,30
24	Sulawesi Utara	102,90	77,29	67,49	36,59	36,50	35,90	46,40	66,20
25	Sulawesi Tengah	125,70	59,19	58,20	89,17	79,10	70,50	73,20	71,50
26	Sulawesi Selatan	447,20	341,42	177,26	176,95	173,40	152,20	182,00	167,80
27	Sulawesi Tenggara	68,70	39,01	33,72	43,53	39,40	38,00	37,20	29,90
28	Gorontalo	-	-	43,24	52,92	44,60	43,70	47,30	41,20
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	57,50
30	Maluku	166,60	126,20	41,08	40,20	41,90	41,10	45,10	46,20
31	Maluku Utara	-	-	21,71	34,80	27,20	23,90	29,30	20,70
32	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	13,30
33	Papua	49,60	49,97	51,37	49,30	50,60	49,1	53,00	39,40
	Indonesia	15.643	12.312	8.599	13.319	12.264	11.369	13.297	14.489

Sumber : Diolah dari Susenas kor 2006

Tabel 2.8 :
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Perdesaan, Tahun 2000 - 2006

No.	Provinsi	Jumlah (000)							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	497,40	492,80	646,5	998,80	1.030,3	958,80	943,5	922,8
2	Sumatera Utara	1.004,30	878,16	995,52	1.185,07	1.197,3	1.166,70	1.107,9	1.033,5
3	Sumatera Barat	364,10	345,68	530,43	322,71	316,3	304,60	293,5	389,0
4	Riau	447,00	370,00	405,89	543,63	572,6	583,90	400,5	338,6
5	Jambi	500,10	356,28	376,6	188,51	192,7	194,30	174,1	162,1
6	Sumatera Selatan	1.247,40	817,31	934,13	1.027,14	937,3	924,20	871,2	847,4
7	Bengkulu	204,60	199,70	265,25	242,91	233,6	232,30	218,8	225,5
8	Lampung	1.730,00	1.636,61	1429,66	1.305,55	1.249,3	1.244,40	1.167,0	1.239,4
9	Kep.Bangka Belitung	-	-	46,33	67,32	61,2	58,80	57,6	70,8
10	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	77,9	80,3
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0,00	0,0	-
12	Jawa Barat	4.114,50	3.501,20	3.874	2.291,16	2.453,7	2.411,00	2.692,9	2.935,4
13	Jawa Tengah	5.723,20	4.068,86	5.416	4.546,05	4.459,7	4.497,30	3.862,3	4.142,5
14	DI Yogyakarta	306,40	599,19	501	331,91	333,5	314,80	285,5	302,7
15	Jawa Timur	7.238,80	5.573,89	5.679	4.842,15	5.103,8	5.081,90	4.423,5	4.841,8
16	Banten	-	-	853,32	480,85	546,4	499,30	460,3	487,1
17	Bali	143,30	96,73	181,26	122,88	146,4	144,90	122,5	116,0
18	Nusa Tenggara Barat	1.027,60	730,10	863,32	608,43	564,8	539,10	561,2	582,8
19	Nusa Tenggara Timur	1.632,70	1.295,67	1239,57	1.071,26	1.040,0	1.029,40	1.037,7	1.125,9
20	Kalimantan Barat	920,60	980,63	616,94	458,71	417,9	414,40	458,2	475,7
21	Kalimantan Tengah	235,30	188,47	194,23	189,06	166,4	161,10	182,4	159,9
22	Kalimantan Selatan	340,70	342,87	305,61	182,20	183,0	167,50	153,3	175,8
23	Kalimantan Timur	381,30	301,33	227,32	237,31	233,8	233,90	193,1	208,1
24	Sulawesi Utara	401,80	288,61	145,71	192,72	155,1	156,30	155,0	183,2
25	Sulawesi Tengah	473,70	444,01	472,31	475,43	430,0	415,80	454,3	482,0
26	Sulawesi Selatan	1.014,80	856,58	1119,04	1.132,28	1.128,5	1.089,30	1.098,6	944,2
27	Sulawesi Tenggara	436,20	380,19	423,78	420,30	389,0	380,40	413,3	436,8
28	Gorontalo	-	-	209,76	221,75	213,1	215,40	207,7	232,6
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	147,7
30	Maluku	847,30	765,50	377,72	378,60	358,0	356,50	366,4	372,4
31	Maluku Utara	-	-	88,39	75,30	91,6	83,90	89,3	96,1
32	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	270,8
33	Papua	1.099,10	920,93	849,43	935,40	866,4	917,70	975,2	777,3
	Indonesia	32.332,20	26.431,30	29.267,64	25.075,39	25.071,70	24.777,90	23.504,70	24.806,20

Sumber : Diolah dari Susenas kor 2006

Tabel 2.9 :
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Kota dan Desa, Tahun 2000 - 2006

No.	Provinsi	Jumlah (000)							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	602,10	595,10	758,60	1.199,90	1.254,20	1.157,20	1.166,4	1.149,7
2	Sumatera Utara	1.972,70	1.491,80	1.359,70	1.883,90	1.883,60	1.800,10	1.840,2	1.897,1
3	Sumatera Barat	601,50	482,50	643,30	496,36	501,10	472,40	482,8	578,8
4	Riau	589,70	485,60	491,60	722,41	751,30	744,40	600,4	564,9
5	Jambi	677,00	504,90	480,40	326,91	327,30	325,10	317,8	304,6
6	Sumatera Selatan	1.813,70	1.338,00	1.113,80	1.600,60	1.397,10	1.379,30	1.429,0	1.446,9
7	Bengkulu	302,30	249,00	308,50	372,42	344,20	345,10	361,2	360,0
8	Lampung	2.037,20	2.017,80	1.674,11	1.650,69	1.568,00	1.561,70	1.572,6	1.638,0
9	Kep.Bangka Belitung	-	-	127,91	106,19	98,20	91,80	95,3	117,4
10	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	148,0	163,0
11	DKI Jakarta	379,60	416,10	247,50	286,88	294,10	277,10	316,2	407,1
12	Jawa Barat	8.393,50	6.658,40	5.532,30	4.938,21	4.899,00	4.654,20	5.137,6	5.712,5
13	Jawa Tengah	8.755,40	6.513,61	6.856,70	7.308,33	6.980,00	6.843,80	6.533,5	7.100,6
14	DI Yogyakarta	789,10	1.035,80	767,60	635,66	636,80	616,20	625,8	648,7
15	Jawa Timur	10.286,30	7.845,40	7.508,30	7.701,15	7.578,40	7.312,50	7.139,9	7.678,1
16	Banten	-	-	1.424,00	786,69	855,80	779,20	830,5	904,2
17	Bali	257,80	176,80	248,40	221,76	246,10	231,90	228,4	243,4
18	Nusa Tenggara Barat	1.276,90	1.070,50	1.175,51	1.145,81	1.050,80	1.031,60	1.136,5	1.156,1
19	Nusa Tenggara Timur	1.779,00	1.425,90	1.317,50	1.206,50	1.166,00	1.152,10	1.171,2	1.273,9
20	Kalimantan Barat	1.016,30	1.095,00	728,50	644,20	583,70	558,20	629,8	626,7
21	Kalimantan Tengah	261,80	213,70	215,40	231,39	207,70	194,10	230,9	212,8
22	Kalimantan Selatan	440,20	385,30	357,51	259,80	259,00	231,00	235,7	278,4
23	Kalimantan Timur	509,20	393,60	349,70	313,04	328,60	318,20	299,1	335,4
24	Sulawesi Utara	504,70	365,90	213,20	229,31	191,60	192,20	201,4	249,4
25	Sulawesi Tengah	599,40	503,20	530,51	564,60	509,10	486,30	527,5	553,5
26	Sulawesi Selatan	1.462,00	1.198,00	1.296,30	1.309,23	1.301,90	1.241,50	1.280,6	1.112,0
27	Sulawesi Tenggara	504,90	419,20	457,50	463,83	428,40	418,40	450,5	466,7
28	Gorontalo	-	-	253,00	274,67	257,70	259,10	255,0	273,8
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	0,0	205,2
30	Maluku	1.013,90	891,70	418,80	418,80	399,90	397,60	411,5	418,6
31	Maluku Utara	-	-	110,10	110,10	118,80	107,80	118,6	116,8
32	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	0,0	284,1
33	Papua	1.148,70	970,90	900,80	984,70	917,00	966,80	1.028,2	816,7
	Indonesia	47.974,90	38.743,71	37.867,05	38.394,04	37.335,40	36.146,90	36.802,100	39.295,10

Sumber : Diolah dari Susenas kor 2006

Tabel 2.10A
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu
Tahun 2006

No.	Provinsi	Angkatan Kerja				Jumlah Angkatan Kerja	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
		Bekerja	Pengangguran Terbuka ¹		Jumlah		
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.624.335	31.042	158.127	189.169	1.813.504	89,57
2	Sumatera Utara	4.859.647	132.110	499.939	632.049	5.491.696	88,49
3	Sumatera Barat	1.808.275	56.797	186.728	243.525	2.051.800	88,13
4	Riau	1.773.277	61.612	140.775	202.387	1.975.664	89,76
5	Jambi	1.103.386	17.077	61.187	78.264	1.181.650	93,38
6	Sumatera Selatan	3.021.938	57.746	253.105	310.851	3.332.789	90,67
7	Bengkulu	761.517	11.264	37.729	48.993	810.510	93,96
8	Lampung	3.064.139	62.963	244.726	307.689	3.371.828	90,87
9	Kep. Bangka Belitung	427.328	7.043	35.167	42.210	469.538	91,01
10	Kep. Riau	515.560	31.363	40.551	71.914	587.474	87,76
11	DKI Jakarta	3.812.590	233.298	257.463	490.761	4.303.351	88,60
12	Jawa Barat	14.997.578	905.414	1.656.111	2.561.525	17.559.103	85,41
13	Jawa Tengah	15.567.335	442.869	914.040	1.356.909	16.924.244	91,98
14	DI Yogyakarta	1.750.575	41.649	76.299	117.948	1.868.523	93,69
15	Jawa Timur	17.669.660	503.297	1.072.002	1.575.299	19.244.959	91,81
16	Banten	3.235.808	239.188	515.429	754.617	3.990.425	81,09
17	Bali	1.870.288	54.627	65.561	120.188	1.990.476	93,96
18	Nusa Tenggara Barat	1.906.816	49.402	136.857	186.259	2.093.075	91,10
19	Nusa Tenggara Timur	1.973.187	18.749	55.995	74.744	2.047.931	96,35
20	Kalimantan Barat	1.953.938	52.880	129.318	182.198	2.136.136	91,47
21	Kalimantan Tengah	944.266	17.035	50.596	67.631	1.011.897	93,32
22	Kalimantan Selatan	1.487.985	46.728	98.037	144.765	1.632.750	91,13
23	Kalimantan Timur	1.146.881	54.304	123.693	177.997	1.324.878	86,57
24	Sulawesi Utara	828.550	39.990	101.876	141.866	970.416	85,38
25	Sulawesi Tengah	1.035.890	34.784	84.274	119.058	1.154.948	89,69
26	Sulawesi Selatan	2.738.632	86.299	314.389	400.688	3.139.320	87,24
27	Sulawesi Tenggara	835.322	13.703	75.738	89.441	924.763	90,33
28	Gorontalo	364.176	4.630	25.409	30.039	394.215	92,38
29	Sulawesi Barat	403.507	6.467	21.353	27.820	431.327	93,55
30	Maluku	451.988	9.667	62.187	71.854	523.842	86,28
31	Maluku Utara	389.279	1.660	27.177	28.837	418.116	93,10
32	Irian Jaya Barat	280.705	4.918	26.852	31.770	312.475	89,83
33	Papua	852.577	8.936	43.799	52.735	905.312	94,17
	Indonesia	95.456.935	3.339.511	7.592.489	10.932.000	106.388.935	89,72

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : ¹ 1. Mencari pekerjaan

2. Mempersiapkan usaha

3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tabel 2.10B
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu
Tahun 2006 (Lanjutan)

No.	Provinsi	Bukan Angkatan Kerja			Jumlah Total	Jumlah Total	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk usia Kerja
		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	364.735	497.078	71.986	933.799	2.747.303	66,01
2	Sumatera Utara	921.338	1.369.525	426.092	2.716.955	8.208.651	66,90
3	Sumatera Barat	349.924	550.871	209.017	1.109.812	3.161.612	64,90
4	Riau	362.355	870.383	104.025	1.336.763	3.312.427	59,64
5	Jambi	144.838	409.239	103.140	657.217	1.838.867	64,26
6	Sumatera Selatan	473.618	802.574	176.689	1.452.881	4.785.670	69,64
7	Bengkulu	103.978	177.775	44.470	326.223	1.136.733	71,30
8	Lampung	407.595	983.049	235.007	1.625.651	4.997.479	67,47
9	Kep. Bangka Belitung	47.789	199.622	34.437	281.848	751.386	62,49
10	Kep. Riau	61.375	220.851	45.323	327.549	915.023	64,20
11	DKI Jakarta	627.177	1.418.898	279.723	2.325.798	6.629.149	64,92
12	Jawa Barat	2.124.170	7.142.648	1.768.482	11.035.300	28.594.403	61,41
13	Jawa Tengah	2.061.028	4.062.325	1.621.651	7.745.004	24.669.248	68,60
14	DI Yogyakarta	346.173	362.069	123.509	831.751	2.700.274	69,20
15	Jawa Timur	1.964.122	5.609.744	1.752.708	9.326.574	28.571.533	67,36
16	Banten	611.462	1.482.319	307.185	2.400.966	6.391.391	62,43
17	Bali	176.095	278.808	162.442	617.345	2.607.821	76,33
18	Nusa Tenggara Barat	269.848	491.796	121.204	882.848	2.975.923	70,33
19	Nusa Tenggara Timur	201.374	352.386	152.276	706.036	2.753.967	74,36
20	Kalimantan Barat	239.656	411.517	110.848	762.021	2.898.157	73,71
21	Kalimantan Tengah	112.344	234.451	39.615	386.410	1.398.307	72,37
22	Kalimantan Selatan	166.371	401.347	117.738	685.456	2.318.206	70,43
23	Kalimantan Timur	153.859	421.770	69.000	644.629	1.969.507	67,27
24	Sulawesi Utara	135.456	443.542	89.868	668.866	1.639.282	59,20
25	Sulawesi Tengah	112.735	341.093	60.884	514.712	1.669.660	69,17
26	Sulawesi Selatan	446.527	1.348.110	379.846	2.174.483	5.313.803	59,08
27	Sulawesi Tenggara	129.868	274.969	58.710	463.547	1.388.310	66,61
28	Gorontalo	48.030	151.039	25.727	224.796	619.011	63,68
29	Sulawesi Barat	54.285	131.671	89.826	275.782	707.109	61,00
30	Maluku	108.558	180.599	46.401	335.558	859.400	60,95
31	Maluku Utara	55.337	86.088	17.917	159.342	577.458	72,41
32	Irian Jaya Barat	41.827	75.522	6.195	123.544	436.019	71,67
33	Papua	106.313	194.295	62.489	363.097	1.268.409	71,37
	Indonesia	13.530.160	31.977.973	8.914.430	54.422.563	160.811.498	66.16

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : ¹ 1. Mencari pekerjaan

2. Mempersiapkan usaha

3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2006

No.	Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama ¹⁾									Jumlah total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh Darussalam	899.579	21.260	72.128	1.803	81.515	219.010	77.676	3.715	247.649	1.624.335
2	Sumatera Utara	2.412.366	11.447	343.955	15.871	182.405	933.561	320.844	65.417	573.781	4.859.647
3	Sumatera Barat	821.996	27.406	118.879	5.671	94.203	352.187	114.211	17.404	256.318	1.808.275
4	Riau	977.638	37.511	94.859	1.691	97.684	277.579	99.152	14.438	172.725	1.773.277
5	Jambi	637.986	16.559	46.724	1.622	44.056	160.289	56.630	3.862	135.658	1.103.386
6	Sumatera Selatan	1.948.341	19.010	131.722	2.520	78.937	354.512	136.112	23.231	327.553	3.021.938
7	Bengkulu	502.007	11.889	26.361	2.321	15.248	95.326	21.158	3.262	83.945	761.517
8	Lampung	1.892.189	11.493	246.878	873	141.467	371.356	120.356	15.952	263.575	3.064.139
9	Kep.Bangka Belitung	122.895	130.725	15.873	794	19.721	68.858	15.065	4.260	49.137	427.328
10	Kep. Riau	100.868	4.592	127.511	938	31.990	117.821	45.214	12.661	73.965	515.560
11	DKI Jakarta	27.093	9.093	636.490	18.517	178.142	1.433.111	308.821	285.060	916.263	3.812.590
12	Jawa Barat	3.954.974	80.199	2.743.978	42.796	894.086	3.747.208	1.533.386	230.564	1.770.387	14.997.578
13	Jawa Tengah	5.988.914	113.356	2.703.414	33.628	911.843	3.408.887	680.223	101.919	1.625.151	15.567.335
14	DI Yogyakarta	612.454	17.011	191.091	2.139	133.499	411.000	57.522	45.076	280.783	1.750.575
15	Jawa Timur	7.918.615	120.142	2.404.589	33.837	893.881	3.498.271	770.032	182.309	1.847.984	17.669.660
16	Banten	711.251	15.025	668.760	9.317	132.295	779.086	311.237	85.803	523.034	3.235.808
17	Bali	663.016	2.257	250.613	8.718	127.570	403.612	74.129	69.422	270.951	1.870.288
18	Nusa Tenggara Barat	899.526	42.772	190.271	1.176	65.587	346.017	114.523	14.864	232.080	1.906.816
19	Nusa Tenggara Timur	1.470.101	3.348	164.428	1.228	42.703	93.527	61.463	5.719	130.670	1.973.187
20	Kalimantan Barat	1.252.538	33.940	97.286	2.642	60.516	273.980	53.962	11.300	167.774	1.953.938
21	Kalimantan Tengah	604.434	19.749	36.225	561	22.838	128.107	36.411	7.856	88.085	944.266
22	Kalimantan Selatan	613.567	48.814	132.540	5.267	43.393	354.840	79.885	12.131	197.548	1.487.985
23	Kalimantan Timur	409.479	78.669	78.468	4.372	70.323	228.394	69.414	49.670	158.092	1.146.881
24	Sulawesi Utara	341.347	10.402	42.273	3.888	65.268	131.614	111.385	12.021	110.352	828.550
25	Sulawesi Tengah	713.459	2.666	29.870	2.851	17.384	117.072	23.363	3.285	125.940	1.035.890
26	Sulawesi Selatan	1.313.535	15.664	125.350	17.750	143.780	537.303	186.700	40.952	357.598	2.738.632
27	Sulawesi Tenggara	502.473	5.343	59.341	846	22.329	114.991	46.915	4.381	78.703	835.322
28	Gorontalo	201.743	1.500	34.622	663	12.367	36.418	24.539	4.713	47.611	364.176
29	Sulawesi Barat	245.533	4.864	17.268	1.299	7.849	56.687	17.112	4.112	48.783	403.507
30	Maluku	269.023	776	23.314	182	12.424	49.966	29.767	3.559	62.977	451.988
31	Maluku Utara	253.525	596	10.385	888	15.091	54.944	22.164	1.661	30.025	389.279
32	Irian Jaya Barat	188.404	2.319	3.783	127	12.506	19.931	16.390	1.036	36.209	280.705
33	Papua	665.373	3.194	20.921	1.222	24.454	40.195	28.195	4.429	64.594	852.577
Indonesia		40.136.242	923.591	11.890.170	228.018	4.697.354	19.215.660	5.663.956	1.346.044	11.355.900	95.456.935

Keterangan :
 Berdasarkan Sakernas 2003
¹⁾ (1). Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan
 (2). Pertambangan
 (3). Industri Pengolahan
 (4). Listrik, Gas dan Air
 (5). Bangunan
 (6). Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
 (7). Angkutan, Pergudangan, Komunikasi.
 (8). Keuangan, Asuransi, Usaha Perdewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
 (9). Jasa Kemasyarakatan

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 2.12
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Lapangan Kerja Utama
Tahun 2006

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama ¹⁾									Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain	4.779.732	274.448	1.279.222	17.515	414.577	7.982.976	3.229.216	118.052	1.408.894	19.504.632
Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/ buruh tidak tetap	14.442.871	53.661	1.231.125	4.779	89.317	3.689.672	186.474	27.819	221.014	19.946.732
Berusaha dengan buruh tetap	906.425	31.447	451.599	3.141	233.256	842.574	170.611	40.299	171.096	2.850.448
Buruh/karyawan/pegawai	2.323.052	384.350	6.882.018	192.038	1.661.071	3.988.399	1.456.880	1.131.332	8.802.749	26.821.889
Pekerja bebas pertanian	5.541.158	-	-	-	-	-	-	-	-	5.541.158
Pekerja bebas di non pertanian	-	125.906	764.570	10.003	2.265.439	273.930	567.392	21.978	589.062	4.618.280
Pekerja tidak dibayar	12.143.004	53.779	1.281.636	542	33.694	2.438.109	53.383	6.564	163.085	16.173.796
Jumlah	40.136.242	923.591	11.890.170	228.018	4.697.354	19.215.660	5.663.956	1.346.044	11.355.900	95.456.935

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Keterangan : Berdasarkan Sakernas 2006

¹⁾ (1). Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan

(2). Pertambangan

(3). Industri Pengolahan

(4). Listrik, Gas dan Air

(5). Bangunan

(6). Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel

(7). Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

(8). Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan

(9). Jasa Kemasyarakatan

Tabel 2.13
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2006

Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama ^{*)}									Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 ^{**)}	1.863.615	11.315	68.807	2.505	100.318	173.927	75.951	28.576	115.762	2.440.776
1 - 4	120.812	1.126	6.638	-	962	20.868	2.586	14.516	30.531	198.039
5 - 9	830.723	1.936	69.877	2.150	13.826	133.749	27.016	10.253	109.967	1.199.497
10 - 14	2.216.391	14.648	179.322	3.259	7.815	303.907	34.520	13.891	253.482	3.027.235
15 - 19	2.902.598	11.996	231.588	2.264	18.249	382.319	70.669	13.097	320.543	3.953.323
20 - 24	5.476.193	46.144	527.888	12.438	73.311	817.044	169.961	20.401	624.750	7.768.130
25 - 34	9.788.540	119.332	1.102.115	12.916	246.765	1.776.992	359.967	75.826	1.828.734	15.311.187
35 - 44	10.181.586	275.878	3.210.422	92.661	882.474	4.070.821	1.115.759	456.016	4.228.392	24.514.009
45 - 54	4.685.444	281.963	4.845.021	79.817	2.466.617	4.762.094	1.607.577	551.920	1.985.943	21.266.396
55 - 59	1.079.107	61.742	769.398	4.728	553.561	2.007.278	624.126	42.036	555.958	5.697.934
60 - 74	786.284	59.422	745.667	12.202	304.149	3.238.086	1.194.449	103.014	874.473	7.317.746
75+	204.949	38.089	133.427	3.078	29.307	1.528.575	381.375	16.498	427.365	2.762.663
Jumlah	40.136.242	923.591	11.890.170	228.018	4.697.354	19.215.660	5.663.956	1.346.044	11.355.900	95.456.935

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Keterangan : Berdasarkan Sakernas 2006

^{*)} (1). Pertanian, Kehutanan, Perburuan , Perikanan

(2). Pertambangan

(3). Industri Pengolahan

(4). Listrik, Gas dan Air

(5). Bangunan

(6). Perdagangan Besar, eceran, Rumah Makan dan Hotel

(7). Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

(8). Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan

(9). Jasa Kemasyarakatan

^{**) Sementara Tidak Bekerja}

Tabel 2.14
Pekerja Menurut Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan
dengan Jenis Kelamin dan Wilayah (Desa Kota), Tahun 2007

Upah	Jenis Kelamin		Jumlah	Wilayah		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Desa	Kota	
1	2	3	4	5	6	7
<200 000	1.326.226	1.966.585	3.292.811	1.042.524	2.583.479	3.626.003
200 000 - 399 999	4.137.686	2.714.965	6.852.651	3.025.766	4.103.831	7.129.597
400 000 - 599 999	4.487.435	1.900.800	6.388.235	3.727.001	3.045.167	6.772.168
600 000 - 799 999	3.396.918	1.430.342	6.060.977	4.131.651	2.459.998	6.591.649
800 000 - 999 999	3.396.918	1.060.671	4.457.589	2.680.086	1.092.875	3.772.961
1 000 000 - 1 499 999	3.619.999	1.118.218	4.738.217	3.044.499	1.068.525	4.113.024
1 500 000 - 1 999 999	2.072.144	797.616	2.869.760	1.877.141	637.299	2.514.440
2 000 000 +	2.179.498	574.847	2.754.345	1.368.379	215.220	1.583.599
Jumlah	24.616.824	11.564.044	37.414.585	20.897.047	15.206.394	36.103.441

Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html>, 5,64,pnaker (BPS/Sakernas, Februari 2007)

Tabel 2.15
Sekolah Dasar (SD) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2003/2004-2005/2006

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2003/2004	2004/2005	2005/2006
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.872	3.214	3.258
2	Sumatera Utara	9.596	9.282	9.297
3	Sumatera Barat	4.009	4.642	4.635
4	Riau	3.696	3.130	3.108
5	Jambi	2.318	2.313	2.314
6	Sumatera Selatan	4.899	4.730	4.562
7	Bengkulu	1.301	1.302	1.295
8	Lampung	4.567	4.573	4.547
9	Kep. Bangka Belitung	840	787	788
10	Kep. Riau	-	675	737
	Sumatera	34.098	34.648	34.541
11	DKI Jakarta	3.040	3.034	3.023
12	Jawa Barat	20.475	20.299	20.283
13	Jawa Tengah	20.696	20.331	20.283
14	DI Yogyakarta	2.115	2.062	2.060
15	Jawa Timur	21.093	20.771	20.740
16	Banten	4.333	4.321	4.323
17	Bali	2.425	2.421	2.427
	Jawa dan Bali	74.177	73.239	73.139
18	Nusa Tenggara Barat	2.788	2.785	2.864
19	Nusa Tenggara Timur	3.997	4.113	4.160
	Nusa Tenggara	6.785	6.898	7.024
20	Kalimantan Barat	3.809	4.134	4.167
21	Kalimantan Tengah	2.601	2.830	2.834
22	Kalimantan Selatan	2.866	2.896	2.899
23	Kalimantan Timur	1.994	2.115	2.128
	Kalimantan	11.270	11.975	12.028
24	Sulawesi Utara	2.163	2.378	2.487
25	Sulawesi Tengah	2.356	2.685	2.741
26	Sulawesi Selatan	7.075	6.167	6.188
27	Sulawesi Tenggara	1.986	2.359	2.384
28	Gorontalo	800	1.000	1.004
29	Sulawesi Barat	-	1.081	1.044
	Sulawesi	14.380	15.670	15.848
30	Maluku	1.511	1.640	1.798
31	Maluku Utara	1.115	1.202	1.235
	Maluku	2.626	2.842	3.033
32	Papua	2.531	1.792	1.872
33	Irian Jaya Barat	-	729	777
	Papua dan Irian	2.531	2.521	2.649
	Indonesia	145.867	147.793	148.262

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 2.16
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2003/2004-2005/2006

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2003/2004	2004/2005	2005/2006
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	542	576	587
2	Sumatera Utara	1.698	1.702	1.832
3	Sumatera Barat	481	482	494
4	Riau	551	528	580
5	Jambi	336	378	418
6	Sumatera Selatan	749	813	863
7	Bengkulu	203	244	264
8	Lampung	927	915	955
9	Kep. Bangka Belitung	131	128	131
10	Kep. Riau	-	107	147
	Sumatera	5.618	5.873	6.271
11	DKI Jakarta	1.020	865	998
12	Jawa Barat	2.260	2.522	2.826
13	Jawa Tengah	2.687	2.698	2.742
14	DI Yogyakarta	422	418	416
15	Jawa Timur	2.913	3.023	3.114
16	Banten	559	613	717
17	Bali	303	307	310
	Jawa dan Bali	10.164	10.446	11.123
18	Nusa Tenggara Barat	286	340	359
19	Nusa Tenggara Timur	597	666	676
	Nusa Tenggara	883	1.006	1.035
20	Kalimantan Barat	591	661	755
21	Kalimantan Tengah	295	373	387
22	Kalimantan Selatan	340	375	387
23	Kalimantan Timur	405	476	497
	Kalimantan	1.631	1.885	2.026
24	Sulawesi Utara	492	517	539
25	Sulawesi Tengah	328	330	393
26	Sulawesi Selatan	941	853	925
27	Sulawesi Tenggara	275	275	309
28	Gorontalo	93	111	123
29	Sulawesi Barat	-	123	138
	Sulawesi	2.129	2.209	2.427
30	Maluku	312	312	335
31	Maluku Utara	147	164	191
	Maluku	459	476	526
32	Papua	372	293	313
33	Irian Jaya Barat	-	86	132
	Papua dan Irian	372	379	445
	Indonesia	21.256	22.274	23.853

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 2.17
Sekolah Menengah Atas (SMA) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2003/2004-2005/2006

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2003/2004	2004/2005	2005/2006
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	239	268	282
2	Sumatera Utara	706	762	822
3	Sumatera Barat	203	219	234
4	Riau	216	218	240
5	Jambi	143	152	157
6	Sumatera Selatan	330	374	389
7	Bengkulu	93	90	92
8	Lampung	295	300	313
9	Kep. Bangka Belitung	53	60	59
10	Kep. Riau	-	41	58
	Sumatera	2.278	2.484	2.646
11	DKI Jakarta	485	498	501
12	Jawa Barat	945	1.072	1.095
13	Jawa Tengah	863	875	869
14	DI Yogyakarta	193	184	180
15	Jawa Timur	1.067	1.108	1.125
16	Banten	219	282	323
17	Bali	165	166	160
	Jawa dan Bali	3.937	4.185	4.253
18	Nusa Tenggara Barat	151	166	187
19	Nusa Tenggara Timur	165	197	215
	Nusa Tenggara	316	363	402
20	Kalimantan Barat	210	230	255
21	Kalimantan Tengah	109	141	142
22	Kalimantan Selatan	114	135	140
23	Kalimantan Timur	170	195	205
	Kalimantan	603	701	742
24	Sulawesi Utara	170	169	176
25	Sulawesi Tengah	111	114	135
26	Sulawesi Selatan	372	350	370
27	Sulawesi Tenggara	118	133	149
28	Gorontalo	24	33	33
29	Sulawesi Barat	-	34	35
	Sulawesi	795	833	898
30	Maluku	113	119	124
31	Maluku Utara	69	72	83
	Maluku	182	191	207
32	Papua	127	103	46
33	Irian Jaya Barat	-	39	123
	Papua dan Irian	127	142	169
	Indonesia	8.238	8.899	9.317

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 2.18
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2003/2004-2005/2006

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2003/2004	2004/2005	2005/2006
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	56	61	76
2	Sumatera Utara	550	571	590
3	Sumatera Barat	140	158	159
4	Riau	89	74	76
5	Jambi	56	65	66
6	Sumatera Selatan	89	114	115
7	Bengkulu	37	39	45
8	Lampung	179	197	202
9	Kep. Bangka Belitung	37	39	36
10	Kep. Riau	-	28	28
	Sumatera	1.233	1.346	1.393
11	DKI Jakarta	592	590	584
12	Jawa Barat	611	756	853
13	Jawa Tengah	720	783	852
14	DI Yogyakarta	147	161	167
15	Jawa Timur	821	865	919
16	Banten	156	175	188
17	Bali	77	88	90
	Jawa dan Bali	3.124	3.418	3.653
18	Nusa Tenggara Barat	39	54	58
19	Nusa Tenggara Timur	65	80	84
	Nusa Tenggara	104	134	142
20	Kalimantan Barat	89	101	105
21	Kalimantan Tengah	30	41	43
22	Kalimantan Selatan	41	52	57
23	Kalimantan Timur	87	108	114
	Kalimantan	247	302	319
24	Sulawesi Utara	61	58	63
25	Sulawesi Tengah	43	51	60
26	Sulawesi Selatan	186	180	188
27	Sulawesi Tenggara	34	33	35
28	Gorontalo	10	15	21
29	Sulawesi Barat	-	23	28
	Sulawesi	334	360	395
30	Maluku	25	33	37
31	Maluku Utara	10	19	22
	Maluku	35	52	59
32	Papua	38	38	17
33	Irian Jaya Barat	-	15	47
	Papua dan Irian	38	53	64
	Indonesia	5.115	5.665	6.025

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 2.19
Perguruan Tinggi¹⁾ Negeri Dan Swasta Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi
Tahun 2005 - 2006

No.	Provinsi	Jumlah Perguruan Tinggi	
		Negeri	Swasta
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3	48
2	Sumatera Utara	3	214
3	Sumatera Barat	5	91
4	Riau	1	69
5	Jambi	1	31
6	Sumatera Selatan	2	102
7	Bengkulu	1	16
8	Lampung	2	71
9	Kep. Bangka Belitung	-	15
10	Kep. Riau	-	22
	Sumatera	18	679
11	DKI Jakarta	4	336
12	Jawa Barat	7	421
13	Jawa Tengah	6	227
14	DI Yogyakarta	3	125
15	Jawa Timur	11	290
16	Banten	1	89
17	Bali	4	42
	Jawa dan Bali	36	1.530
18	Nusa Tenggara Barat	1	29
19	Nusa Tenggara Timur	3	28
	Nusa Tenggara	4	57
20	Kalimantan Barat	2	36
21	Kalimantan Tengah	1	26
22	Kalimantan Selatan	2	27
23	Kalimantan Timur	3	50
	Kalimantan	8	139
24	Sulawesi Utara	3	45
25	Sulawesi Tengah	1	24
26	Sulawesi Selatan	4	156
27	Sulawesi Tenggara	2	30
28	Gorontalo	1	11
29	Sulawesi Barat	-	12
	Sulawesi	11	278
30	Maluku	2	17
31	Maluku Utara	1	9
	Maluku	3	26
32	Papua	1	36
33	Irian Jaya Barat	1	12
	Papua dan Irian	2	48
	Indonesia	82	2.757

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional

Catatan : 1) Termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik
 Statistik Indonesia 2007

Tabel 2.20
Banyaknya Sarana Tempat Ibadah Menurut Provinsi
Tahun 2005

No.	Propinsi	Masjid	Surau/ Langgar	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara/ Klenteng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Daruss	3.392	8.243	151	21	4	26
2	Sumatera Utara	8.833	8.913	7.760	1.452	60	392
3	Sumatera Barat	4.405	11.105	178	77	1	19
4	Riau	4.939	7.716	612	134	11	175
5	Jambi	3.215	5.192	112	34	3	28
6	Sumatera Selatan	6.809	8.521	308	171	167	110
7	Bengkulu	2.475	1.629	118	39	23	11
8	Lampung	9.567	15.729	711	337	454	126
9	Kep. Bangka Belitung	775	632	93	36	6	170
10	Kep. Riau	1.086	810	178	52	9	154
	Sumatera	45.496	68.490	10.221	2.353	738	1.211
11	D.K.I Jakarta	2.936	5.983	550	156	42	157
12	Jawa Barat	50.399	120.276	578	175	37	145
13	Jawa Tengah	38.838	94.979	2.366	547	165	457
14	D.I Yogyakarta	6.243	4.835	276	177	19	22
15	Jawa Timur	36.822	144.162	1.868	404	416	162
16	Banten	7.727	17.500	164	45	7	74
17	Bali	232	277	95	38	10.504	41
	Jawa dan Bali	143.197	388.012	5.897	1.542	11.190	1.058
18	Nusa Tenggara Barat	4.838	8.297	28	12	401	30
19	Nusa Tenggara Timur	736	219	3.704	2.501	28	5
	Nusa Tenggara	5.574	8.516	3.732	2.513	429	35
20	Kalimantan Barat	3.136	3.804	2.017	1.944	31	446
21	Kalimantan Tengah	1.475	2.784	1.176	241	233	51
22	Kalimantan Selatan	2.518	7.590	151	33	75	16
23	Kalimantan Timur	2.332	2.995	1.191	394	41	17
	Kalimantan	9.461	17.173	4.535	2.612	380	530
24	Sulawesi Utara	876	257	3.824	243	18	27
25	Sulawesi Tengah	2.819	1.099	1.625	172	271	23
26	Sulawesi Selatan	11.743	2.608	2.766	492	153	26
27	Sulawesi Tenggara	2.565	905	199	51	194	12
28	Gorontalo	1.664	196	115	22	19	4
	Sulawesi	19.667	5.065	8.529	980	655	92
29	Maluku	950	477	843	181	10	14
30	Maluku Utara	924	572	567	36	1	4
	Maluku	1.874	1.049	1.410	217	11	18
31	Papua	750	963	4.761	833	32	12
	Indonesia	226.019	489.268	39.085	11.050	13.435	2.956

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

Tabel 2.21
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi
Tahun 2005

No.	Propinsi	Rumah Sakit	Rmh Sakit Bersalin	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tmpt.Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan	Posyandu	Polindes	Apotik	TK_Kusus Obat/Jamu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nanggroe Aceh Darussalar	37	74	150	277	705	427	1.078	4.247	2.765	176	429
2	Sumatera Utara	201	476	1.159	478	1.590	1.612	3.560	10.248	1.896	745	596
3	Sumatera Barat	36	173	154	239	829	717	1.629	6.043	1.020	185	361
4	Riau	42	138	282	181	770	536	1.095	3.490	222	266	521
5	Jambi	25	62	67	151	608	366	748	2.679	87	135	209
6	Sumatera Selatan	50	103	145	283	1.000	657	1.786	4.909	1.350	165	229
7	Bengkulu	10	14	37	138	437	211	576	1.491	370	65	83
8	Lampung	37	216	281	266	754	564	1.690	6.557	648	146	238
9	Kep. Bangka Belitung	10	21	34	48	156	123	158	801	193	32	47
10	Kep. Riau	15	46	67	49	174	212	234	720	123	95	174
	Sumatera	463	1.323	2.376	2.110	7.023	5.425	12.554	41.185	8.674	2.010	2.887
11	D.K.I Jakarta	109	393	726	245	83	2.835	996	3.480	5	779	813
12	Jawa Barat	194	713	2.629	1.029	1.779	4.700	7.075	41.988	1.458	1.655	2.679
13	Jawa Tengah	218	1.089	1.385	884	1.950	4.398	7.882	42.473	3.937	1.069	1.442
14	D.I Yogyakarta	38	147	97	124	327	1.104	631	5.034	85	233	169
15	Jawa Timur	208	800	1.119	985	2.427	4.969	8.022	39.176	5.334	1.435	6.965
16	Banten	48	261	921	189	276	909	1.580	7.930	205	368	639
17	Bali	42	144	64	114	498	1.035	890	4.340	183	288	187
	Jawa dan Bali	857	3.547	6.941	3.570	7.340	19.950	27.076	144.421	11.207	5.827	12.894
18	Nusa Tenggara Barat	17	21	40	137	479	416	391	4.913	458	103	72
19	Nusa Tenggara Timur	29	33	132	250	870	221	220	7.012	1.377	80	45
	Nusa Tenggara	46	54	172	387	1.349	637	611	11.925	1.835	183	117
20	Kalimantan Barat	28	59	96	204	736	373	445	3.144	1.112	88	289
21	Kalimantan Tengah	20	22	74	168	699	196	321	1.794	552	91	220
22	Kalimantan Selatan	28	18	123	211	559	369	986	2.994	756	86	436
23	Kalimantan Timur	43	48	147	222	642	566	515	3.734	231	174	389
	Kalimantan	119	147	440	805	2.636	1.504	2.267	11.666	2.651	439	1.334
24	Sulawesi Utara	34	56	118	142	427	476	357	1.554	370	116	79
25	Sulawesi Tengah	27	21	54	148	674	210	302	2.310	831	118	181
26	Sulawesi Selatan	64	117	157	415	1.268	813	777	8.363	758	400	432
27	Sulawesi Tenggara	16	11	20	160	501	146	234	2.092	245	65	126
28	Gorontalo	8	6	16	57	196	114	120	709	244	35	46
	Sulawesi	149	211	365	922	3.066	1.759	1.790	15.028	2.448	734	864
29	Maluku	24	13	38	152	361	115	102	1.207	205	39	66
30	Maluku Utara	14	5	22	63	196	56	86	944	120	33	28
	Maluku	38	18	60	215	557	171	188	2.151	325	72	94
31	Papua	39	48	296	269	814	188	133	2.252	546	144	78
	Indonesia	1.711	5.348	10.650	8.278	22.785	29.634	44.619	228.628	27.686	9.409	18.268

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2003 - 2006

Lapangan Usaha	2003	2004	2005 *)	2006 **)
1	2	3	4	5
Pertanian, peternakan, kehutanan , dan perikanan	3,79	2,82	2,66	2,98
Pertambangan dan penggalian	-1,37	-4,48	3,11	2,21
Industri pengolahan	5,33	6,38	4,57	4,63
Listrik, gas,dan air bersih	4,87	5,30	6,30	5,87
Konstruksi	6,10	7,49	7,42	8,97
Perdagangan,hotel,dan restoran	5,45	5,70	8,38	6,13
Pengangkutan dan komunikasi	12,19	13,38	12,97	13,64
Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	6,73	7,66	6,79	5,65
Jasa-jasa	4,41	5,38	5,05	6,22
PRODUK DOMESTIK BRUTO	4,78	5,03	5,68	5,48
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	5,69	5,97	6,57	6,09

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : * Angka sementara

xx Angka sangat sementara

Tabel 2.23
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2003 - 2006

Lapangan Usaha	2003	2004	2005 *)	2006 **)
1	2	3	4	5
Pertanian, peternakan, kehutanan , dan perikanan	15,19	14,34	13,07	12,90
Pertambangan dan penggalian	8,32	8,94	11,07	10,62
Industri pengolahan	28,25	28,07	27,71	28,05
Listrik, gas,dan air bersih	0,95	1,03	0,96	0,91
Konstruksi	6,22	6,59	7,03	7,46
Perdagangan,hotel,dan restoran	16,64	16,05	15,45	14,87
Pengangkutan dan komunikasi	5,91	6,20	6,50	6,92
Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	8,64	8,47	8,28	8,13
Jasa-jasa	9,87	10,32	9,94	10,14
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	91,42	90,73	88,62	89,17

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : * Angka sementara

xx Angka sangat sementara

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2002 - 2005
(Rupiah)

No	Provinsi	2002	2003	2004*	2005**
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh D.	10.815.894	11.466.813	12.315.041	12.679.206
2	Sumatera Utara	7.508.867	8.672.097	9.741.566	10.995.442
3	Sumatera Barat	6.956.844	7.401.055	8.237.021	9.783.911
4	Riau	21.578.297	21.966.682	25.277.950	30.356.486
5	Jambi	5.589.368	6.167.219	7.042.173	8.530.836
6	Sumatera Selatan	6.850.622	8.577.454	9.703.581	12.021.264
7	Bengkulu	3.789.085	4.754.867	5.231.840	6.460.095
8	Lampung	4.211.206	4.647.254	5.097.407	5.597.681
9	Kep. Bangka Belitung	8.900.191	9.688.715	10.823.236	12.830.188
10	Kep. Riau	-	28.122.215	30.818.150	32.148.725
	Sumatera	8.614.369	9.735.755	10.910.682	12.599.167
11	DKI Jakarta	35.785.088	38.694.928	42.922.396	49.236.113
12	Jawa Barat	6.503.363	7.162.863	7.796.044	9.940.941
13	Jawa Tengah	4.781.062	5.342.034	5.944.029	7.331.151
14	DI. Yogyakarta	5.539.203	6.107.386	6.832.258	7.551.079
15	Jawa Timur	7.584.395	8.288.127	9.348.913	11.114.488
16	Banten	7.032.754	7.397.808	8.074.880	9.372.468
	Jawa	8.355.677	9.151.301	10.150.977	12.230.836
17	Bali	7.385.128	7.781.517	8.532.323	10.032.731
	Jawa dan Bali	8.331.099	9.116.084	10.109.360	12.174.429
18	Kalimantan Barat	5.696.507	6.566.462	7.355.154	8.326.652
19	Kalimantan Tengah	7.144.994	8.488.742	9.764.700	10.975.772
20	Kalimantan Selatan	6.895.181	7.332.967	7.993.013	8.858.902
21	Kalimantan Timur	36.211.163	39.136.863	48.344.405	61.406.980
	Kalimantan	12.932.581	14.639.304	17.436.170	21.389.497
22	Sulawesi Utara	6.185.393	6.436.211	7.100.713	8.368.701
23	Sulawesi Tengah	5.157.233	5.859.828	6.506.984	7.446.956
24	Sulawesi Selatan	4.648.843	5.191.439	5.808.764	6.930.063
25	Sulaweasi Tenggara	4.157.171	4.720.254	5.340.428	6.612.777
26	Gorontalo	2.499.888	2.801.566	3.122.194	3.672.689
27	Sulawesi Barat	-	-	-	4.562.424
	Sulawesi	4.747.305	5.265.421	5.876.103	6.824.081
28	Nusa Tenggara Barat	3.924.888	4.347.882	5.415.973	6.151.413
29	Nusa Tenggara Timur	2.604.092	2.780.426	3.098.538	3.427.414
30	Maluku	2.974.241	3.013.391	3.254.396	3.652.035
31	Maluku Utara	2.754.412	2.534.800	2.713.703	2.919.169
32	Irian Jaya Barat	7.901.488	8.985.475	10.227.584	12.286.665
33	Papua	13.173.881	13.653.802	13.257.949	23.268.561
	Lainnya	4.822.089	5.106.703	5.657.372	7.560.358
	Kawasan Barat	8.404.781	9.274.223	10.314.110	12.284.336
	Kawasan Timur	7.216.856	7.983.680	9.212.984	11.358.869
	Jumlah 33 Provinsi	8.183.091	9.036.450	10.110.066	12.111.035
	Indonesia	8.645.086	9.429.501	10.610.081	12.704.839

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : * Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.25
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tanpa Migas
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2002 - 2005
(Rupiah)

No	Provinsi	2002	2003	2004*	2005**
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh D.	6.060.239	6.370.674	7.373.227	7.751.807
2	Sumatera Utara	7.441.744	8.603.286	9.670.724	10.910.146
3	Sumatera Barat	6.956.844	7.401.055	8.237.021	9.783.911
4	Riau	12.568.430	11.697.287	14.277.323	17.263.942
5	Jambi	4.616.297	5.208.522	5.967.350	6.981.859
6	Sumatera Selatan	4.950.975	6.150.891	6.859.975	7.774.228
7	Bengkulu	3.789.085	4.754.867	5.231.840	6.460.095
8	Lampung	4.092.053	4.493.400	4.935.584	5.460.507
9	Kep. Bangka Belitung	8.900.191	9.212.987	10.332.571	12.233.857
10	Kep. Riau	-	26.099.678	28.198.793	29.348.317
	Sumatera	6.708.013	7.725.129	8.766.844	10.015.254
11	DKI Jakarta	35.646.607	38.571.028	42.766.826	49.014.979
12	Jawa Barat	6.220.092	6.864.828	7.449.633	9.464.857
13	Jawa Tengah	4.374.727	4.853.271	5.395.505	6.292.626
14	DI. Yogyakarta	5.539.203	6.107.386	6.832.258	7.551.079
15	Jawa Timur	7.567.360	8.269.981	9.328.666	11.089.836
16	Banten	7.032.754	7.397.808	8.074.880	9.372.468
	Jawa	8.152.977	8.925.136	9.892.112	11.805.720
17	Bali	7.385.128	7.781.517	8.532.323	10.032.731
	Jawa dan Bali	8.133.533	8.895.733	9.857.151	11.760.222
18	Kalimantan Barat	5.696.507	6.566.462	7.355.154	8.326.652
19	Kalimantan Tengah	7.144.994	8.488.742	9.764.700	10.975.772
20	Kalimantan Selatan	6.722.013	7.163.989	7.817.869	8.664.338
21	Kalimantan Timur	15.935.405	17.003.687	19.382.993	23.253.190
	Kalimantan	8.446.340	9.454.087	10.655.756	12.352.411
22	Sulawesi Utara	6.176.785	6.426.778	7.090.976	8.359.774
23	Sulawesi Tengah	5.157.233	5.859.828	6.506.984	7.446.778
24	Sulawesi Selatan	4.639.546	5.181.825	5.798.657	6.912.773
25	Sulawesi Tenggara	4.157.171	4.720.254	5.340.428	6.612.777
26	Gorontalo	2.499.888	2.801.566	3.122.194	3.672.689
27	Sulawesi Barat	-	-	-	4.562.424
	Sulawesi	4.741.163	5.258.953	5.225.105	6.814.628
28	Nusa Tenggara Barat	3.924.888	4.347.882	5.415.973	6.151.413
29	Nusa Tenggara Timur	2.604.092	2.780.426	3.098.538	3.427.414
30	Maluku	2.959.826	2.998.929	3.239.707	3.636.719
31	Maluku Utara	2.754.412	2.534.800	2.713.703	2.919.169
32	Irian Jaya Barat	5.984.690	6.709.445	7.267.914	8.424.852
33	Papua	13.173.881	13.653.802	13.257.949	23.268.561
	Lainnya	4.726.650	4.993.604	5.508.235	7.369.320
	Kawasan Barat	7.762.738	8.596.996	9.578.562	11.308.688
	Kawasan Timur	5.843.979	6.413.897	7.164.698	8.626.571
	Jumlah 33 Provinsi	7.404.660	8.194.776	9.131.262	10.806.442
	Indonesia	7.874.140	8.620.232	9.626.872	11.258.690

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : * Angka Sementara

** Angka sangat sementara

BAB III

INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1 Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan antara lain : gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, dan lain-lain.

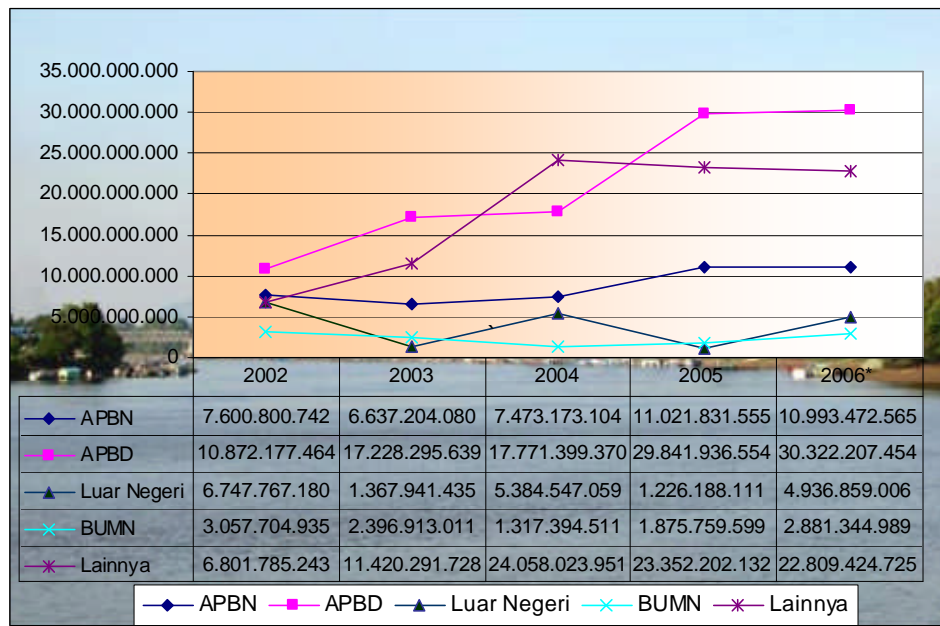
Sektor konstruksi memiliki peranan yang amat signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena sektor konstruksi memiliki keterkaitan sangat erat terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dari sisi lapangan kerja, peranan sektor konstruksi mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Ini karena jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Indonesia cukup besar, yaitu sekitar 76.867 perusahaan pada tahun 2006 (Tabel 3.1).

Besarnya nilai produksi sektor konstruksi yang telah diselesaikan selama setahun (nilai konstruksi) umumnya mengalami peningkatan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan konstruksi pada tahun 2006 masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan gedung dan pekerjaan prasarana fisik berupa jalan, jembatan, drainase serta irigasi. Pada tahun 2006 nilai konstruksi di provinsi DKI Jakarta diperkirakan terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Tabel 3.2), yang disusul oleh provinsi Jawa Barat. Kontribusi dari pekerjaan jalan dan jembatan terhadap konstruksi di Indonesia sebesar 27,7% sedangkan untuk irigasi, dan drainase kontribusinya sebesar 6,3%. Jaringan air

minum memberi kontribusi sebesar 0,7%, pemasangan pipa air minum dan gas sebesar 0,5%, dan pemasangan sanitasi sebesar 0,3% (Tabel 3.3).

Gambar 3.1 Nilai Konstruksi yang diselesaikan dari berbagai sumber dana (000 rupiah)



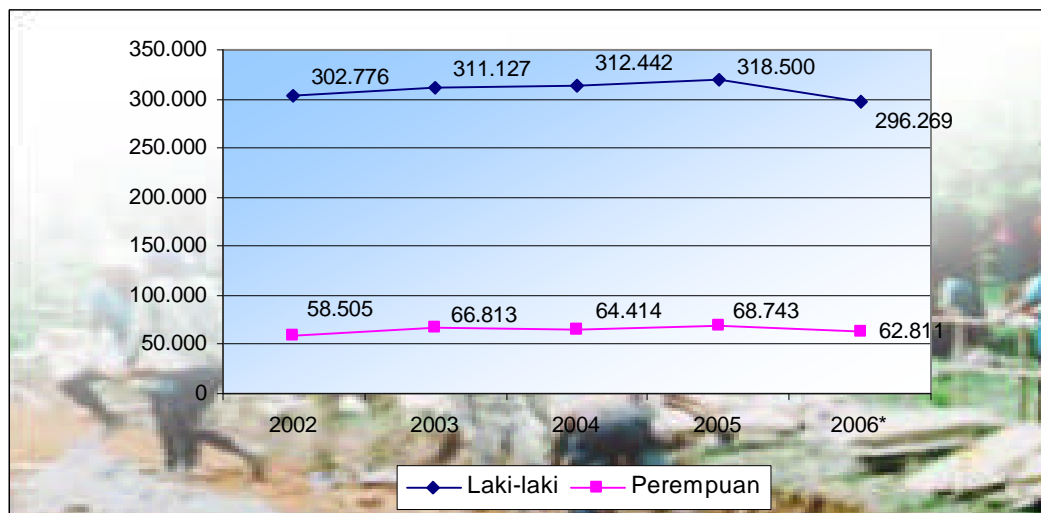
Sumber : Statistik Konstruksi 2006
Catatan : * Angka Sementara

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka untuk proyek-proyek konstruksi yang dibiayai dari APBD meningkat secara signifikan (Gambar 3.1). Pada tahun 2002 APBD berkontribusi sebesar 31,0% menjadi 44,1% pada tahun 2003 dan 31,7% pada tahun 2004. Pada tahun 2005 sebesar 44,3% dan tahun 2006 diperkirakan 42,1%. Fakta ini menunjukkan, bahwa salah satu fungsi Departemen PU sebagai pembina penyelenggaraan pembangunan dan telah menjalankan kebijakan otonomi daerah dengan baik.

Sektor konstruksi merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Sebagai gambaran, jumlah karyawan tetap yang diserap mulai tahun 2002 meningkat khususnya karyawan tetap laki-laki. Tahun 2006 diperkirakan jumlah karyawan tetap turun dari tahun 2005

sebesar 7%. Pada Gambar 3.2 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tetap laki-laki lebih besar dibanding dengan perempuan. Untuk tenaga kerja tetap perempuan mengalami penurunan jumlah dua kali, yaitu pada tahun 2004 dan diperkirakan tahun 2006.

Gambar 3.2 Jumlah karyawan bidang konstruksi tetap menurut gender



Sumber : Statistik Konstruksi 2006
Catatan : * Angka Sementara

3.2 Kondisi dan Permasalahan Air

Air merupakan sumber kehidupan. Namun demikian, saat ini masalah air di Indonesia merupakan permasalahan yang kronik dan pelik atau sangat kompleks, mulai dari peristiwa banjir sampai kekeringan. Wilayah Indonesia, menurut LIPI, memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Namun demikian, kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai/ konsumsi menjadi permasalahan besar, mulai muncul di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Kecenderungan konsumsi air naik secara eksponensial, sedangkan ketersediaan air bersih cenderung melambat akibat kerusakan alam dan pencemaran, yaitu diperkirakan sebesar 15-35% per kapita per tahun. Dengan

demikian di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta, kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak.

Sekitar 65 persen penduduk Indonesia atau sekitar 125 juta jiwa menetap di Pulau Jawa yang luasnya hanya tujuh persen dari seluruh luas daratan Indonesia. Sementara itu, dari sudut potensi air, hanyalah 4,5 persen dari total potensi air di Indonesia sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Dipandang dari segi pengembangan sumber daya air, permasalahan air di Jawa termasuk kategori kritis.

UUD 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) yang menjamin hak terhadap air yang setara merupakan hak asasi setiap manusia. Pasal tersebut mengandung makna tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara. Namun, hingga kini, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.

Saat ini kondisi air di Indonesia sangat memprihatinkan. Sangat sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Banyaknya permukiman padat penduduk, pabrik-pabrik serta penggunaan bahan kimia yang menimbulkan pencemaran pada lingkungan, terutama pada air yang sangat mudah tercemar. Rusaknya lingkungan kita, mengakibatkan berkurangnya kualitas dan kuantitas air tanah, yang membuat bakteri sangat mudah tumbuh dan berkembang.

Pada sebagian besar penduduk kita menggunakan air sumur yang terkadang di lingkungan sekitarnya banyak tercemar oleh limbah rumah tangga ataupun pabrik, terutama di lingkungan perkotaan yang padat penduduk, hingga jarak antara septick tank dan sumur tidak memenuhi standart kesehatan. Hal ini sangat berbahaya, karena bakteri-bakteri dari sampah/ limbah dan septick tank akan bercampur kembali dengan air tanah yang kita pakai dari sumur.

Banyak penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi air yang mengandung banyak bakteri, terutama bakteri E-coli, dari sakit perut ringan hingga diare, disentri, kolera, juga penyakit kulit seperti jerawat, gatal-gatal yang disebabkan air yang tidak bersih. Banyak kasus kematian yang diakibatkan mengkonsumsi air yang tidak bersih, terutama pada bayi, anak-anak, dan para ibu. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga. Lebih baik mencegah daripada mengobati.

Tahun 2006 ada 30 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi memantau 35 sungai di Indonesia. Parameter kualitas air yang dipantau antara lain BOD dan COD. Hasil pemantauan itu dievaluasi berdasarkan kriteria mutu air kelas II seperti diatur dalam PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil evaluasi pemantauan tersebut menunjukkan status mutu menurun atau air sudah tercemar jika dibandingkan dengan kriteria mutu air kelas II. Hasil pemantauan termaksud disajikan dalam Tabel 3.4.

Kualitas dan ketersediaan air sangat tergantung pada kualitas daerah tangkapan air dan kegiatan masyarakat yang tidak merusak sumber-sumber air. Kenyataan di lapangan menunjukkan hutan dan vegetasinya saat ini terutama di bagian hulu pada umumnya sudah rusak akibat penebangan liar. Untuk itu pengelolaannya perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi.

Perilaku petani cenderung menanam tanaman semusim pada tanah dengan kemiringan tinggi dapat memperparah kerusakan daerah tangkapan air. Kondisi itu akan menyebabkan daya dukung daerah tangkapan air menjadi menurun, karena air hujan banyak tertampung di permukaan tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya erosi dan banjir. Dampak lainnya, kualitas air pada sumber-sumber air ikut menurun.

Kelangkaan air dapat dicegah melalui berbagai upaya seperti konservasi sumber-sumber air, pengaturan dan pembagian air yang lebih baik serta penghematan menggunakan air. Dalam mencegah banjir, dapat dilakukan langkah-langkah seperti penghijauan lahan kritis dan reboisasi hutan, membangun tanggul-tanggul dan *checkdam* penahan banjir serta tidak membuang sampah ke sungai atau drainase. Langkah itu adalah wujud nyata dari pemerintah untuk menyokong ketahanan pangan sekaligus upaya memfasilitasi program pemerintah daerah dalam penyediaan air baku.

3.3 Potensi Lahan

3.3.1 Penggunaan Lahan Sawah

Lahan sawah di Indonesia pada tahun 2005 seluas 7,89 juta hektar, 3,24 juta hektar (41,03 persen) diantaranya berada di Jawa dan 4,65 juta hektar (58,97 persen) di luar Jawa. Hal ini menunjukkan pulau Jawa sebagai wilayah dengan potensi lahan sawah terbesar dibanding dengan pulau-pulau lainnya.

Menurut jenis pengairannya, lahan sawah di Indonesia terdiri dari lahan sawah irigasi teknis 2,19 juta hektar (27,72 persen), lahan sawah irigasi setengah teknis 990 ribu hektar (12,56 persen), irigasi sederhana 1,58 juta hektar (19,99 persen), lahan sawah tadah hujan 2,09 juta hektar (26,49 persen) dan lahan sawah pasang surut serta lainnya masing-masing 658 ribu hektar (8,34 persen) dan 387 ribu hektar (4,91 persen).

Selain sawah dengan sistem irigasi, terdapat lahan sawah tadah hujan, pasang surut, dan lainnya. Ternyata di luar Jawa masih banyak yang mengandalkan curah hujan sebagai sumber air bagi usaha tani di lahan sawah. Hal tersebut terlihat pada Tabel 3.5 dimana luas lahan tadah hujan

di luar Jawa merupakan yang terbesar yaitu 1,32 juta hektar atau 63,44 persen dari total lahan tadah hujan di Indonesia.

3.3.2 Perluasan Areal Tanam

Untuk kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) melalui dana tugas pembantuan tahun 2006, terlihat ada selisih beda antara rencana dan realisasinya (Tabel 3.6). Ini berarti ada beberapa provinsi yang tidak sesuai antara rencana dengan realisasi dari kegiatan perluasan areal tanaman pangan tersebut. Provinsi-provinsi tersebut antara lain, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat. Sedangkan provinsi-provinsi yang sudah sama rencana dan realisasinya adalah Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Selisih paling jauh antara rencana dengan realisasi ada di provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

3.3.3 Pengelolaan Lahan Pertanian

Penguasaan lahan pertanian oleh pemerintah dilandaskan pada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, yang salah satu pasalnya mengamanatkan agar pemerintah melindungi kawasan lahan pertanian pangan abadi. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung yang besar. Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak dapat menjadi sawah kembali. Implikasinya dirasakan pada produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di sekitar lahan tersebut.

Alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah, tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun, tapi juga menyebabkan degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, makin sempitnya luas

garapan usaha tani serta menurunnya kesejahteraan petani. Sempitnya rata-rata penguasaan lahan dan belum terintegrasinya dukungan terhadap petani yang berusaha di atas lahannya, menyebabkan kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Untuk mengatasi kerusakan lingkungan pada lahan pertanian, Departemen Pertanian mengembangkan konversi lahan terpadu di 21 provinsi (Tabel 3.7). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pengelolaan lahan yang sesuai kaidah konservasi tanah dan air. Pengembangan konservasi lahan terpadu terluas ada di provinsi Sulawesi Tengah sebesar 525 Ha, dan yang paling terkecil adalah provinsi Sumatera Barat sebesar 6 Ha.

3.4 Angkutan Darat

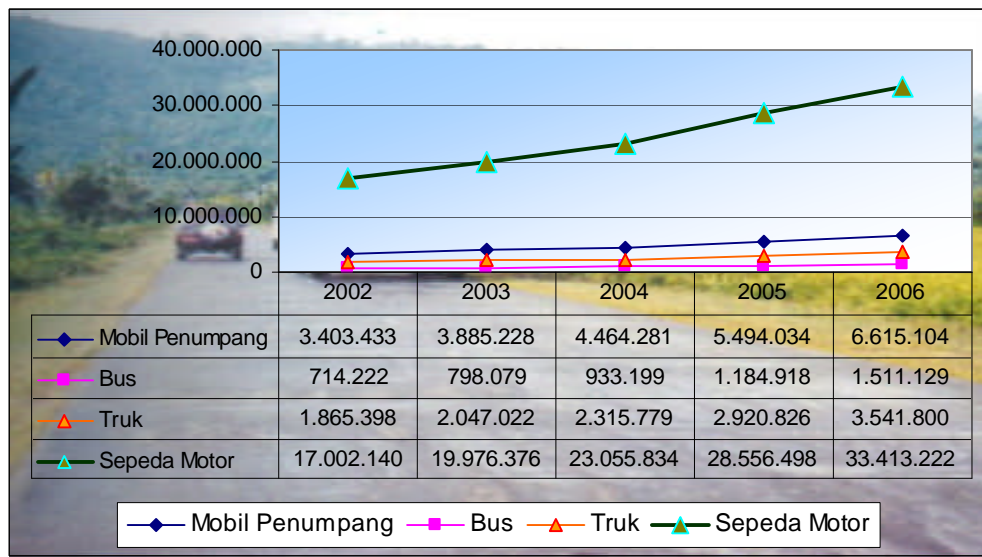
Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara. Pembahasan lebih lanjut hanya dibatasi angkutan umum di darat saja.

Pada tahun 2005 jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kepolisian RI diperkirakan sebanyak 38,16 juta unit. Komposisinya pada tahun 2005 terdiri atas : 74,84 persen sepeda motor, 14,40 persen mobil penumpang, 7,64 persen truk, dan 3,11 persen bis (Tabel 3.8). Jumlah kendaraan bermotor terbanyak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali.

Pada periode 2002-2006, terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan, ini disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah kendaraan yang terjadi pada semua jenis kendaraan setiap tahun. Kenaikan jumlah

kendaraan bermotor yang cukup signifikan terjadi pada bus diikuti kemudian oleh sepeda motor, mobil penumpang dan truk (Gambar 3.1).

Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 2002-2006



Sumber : Statistik Perhubungan, BPS, 2006

3.5 Perumahan dan Lingkungan Permukiman

3.5.1 Perumahan

Perumahan dibagi menjadi permukiman mewah dan permukiman kumuh. Permukiman mewah adalah kelompok hunian yang oleh masyarakat setempat dianggap mewah, termasuk kondominium / apartemen. Permukiman mewah dengan ciri-ciri, jumlahnya ≥ 10 rumah dan atau mempunyai kendaraan roda empat. Biasanya mempunyai pengamanan khusus disekitar perumahan dengan luas tanah/ kavling lebih dari 200 m².

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh :

1. Banyak rumah tidak layak huni
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet

3. Penduduk/ bangunan sangat padat
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban
5. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api)

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/ sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dan sebagainya) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman, termasuk rumah gubuk.

Jika dilihat dari jenis permukiman, maka jumlah permukiman mewah di Indonesia lebih sedikit (2.168) dibandingkan dengan tidak mewah (67.789), demikian pula permukiman kumuh lebih sedikit (6.190) dibandingkan dengan permukiman tidak kumuh (63.767). Sedangkan permukiman mewah lebih sedikit dibandingkan dengan permukiman kumuh, dan permukiman tidak mewah lebih banyak dibandingkan dengan permukiman tidak kumuh. Provinsi-provinsi yang banyak terdapat permukiman mewah antara lain : Jawa Barat (371), Jawa Timur (270) , DKI Jakarta (162). Adapun provinsi yang banyak permukiman kumuhnya antara lain : Jawa Barat (777), Sumatera Utara (459) dan Sulawesi Selatan (393).

Pada Tabel 3.9 terlihat, bahwa jumlah permukiman kumuh lebih banyak di Jawa Barat, yakni sebesar 2.541 lokasi dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 86.616 unit dengan jumlah keluarga 111.521 keluarga. Adapun jumlah bangunan rumah di permukiman kumuh paling banyak di DKI Jakarta, yakni sebesar 124.166 unit dengan jumlah keluarga yang tinggal ada 199.603 keluarga dan tersebar di 750 lokasi. Disusul provinsi Jawa Barat dengan jumlah bangunan rumah sebesar 86.616 unit dengan 111.521 keluarga yang tinggal disana dan tersebar di 2.541 lokasi.

Selain itu ada tempat lain yang dijadikan tempat tinggal oleh warga, walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan. Hal ini bisa dilihat pada jumlah keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/ tepi sungai dan atau sempadan sungai, serta tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi.

Yang dimaksud bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No. 35 Tahun 1991 tentang sungai). Palung adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran sungai secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu (Keppres No. 32/ 1990). Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai :

1. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman ;
2. Untuk sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter.

Jumlah keluarga yang tinggal di bantaran/ tepi sungai mencapai 931.576, sedangkan jumlah bangunan rumah ada 801.840. Selain itu ada 14.955 desa/ kelurahan, dimana masih ada keluarga yang tinggal di bantaran/ tepi sungai, walaupun masih lebih banyak jumlah desa/ kelurahan (35.528) dimana tidak ada keluarga yang tinggal di bantaran/ sungai (Tabel 3.10).

Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No.1.P/47/MTE/1992).

Jumlah desa/ kelurahan yang tidak ada listrik tegangan tinggi ada 45.956. Sedangkan yang ada listrik tegangan tinggi 24.001 desa/ kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 20.623 desa/ kelurahan dimana tidak ada keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, serta ada 3.378 desa/ kelurahan dimana masih ada keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Jumlah keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi sebanyak 122.292, sedangkan jumlah bangunan rumahnya ada sebanyak 106.746 buah (Tabel 3.11).

Dalam menyikapi kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, maka pemerintah selalu membuka kawasan perumahan sederhana (RS) dan Rumah Sederhana Sehat (RsH) yang bisa dibeli masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah berperan aktif membantu pengembangan dan pembangunan rumah sederhana dan layak huni di daerahnya, sehingga terjangkau daya beli masyarakat. Pada Tabel 3.12 terlihat masih banyak rumah sederhana sehat yang bersubsidi.

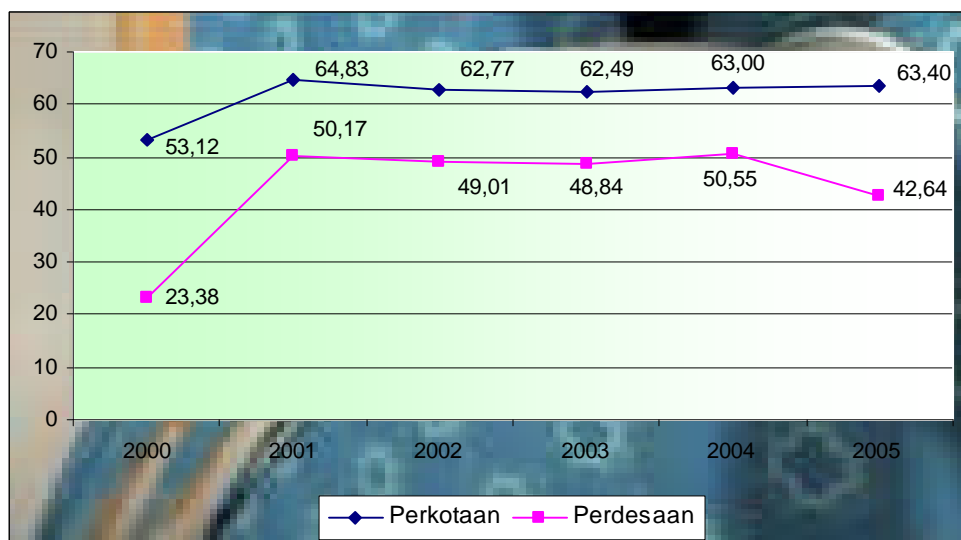
3.5.2 Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman yang bersih memberikan kenyamanan pada penghuninya. Lingkungan yang tidak bersih merupakan sumber penyakit seperti demam berdarah, malaria, penyakit perut, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan dapat bergotong royong membersihkan selokan, pekarangan rumah, lingkungan sekitar rumah dan permukimannya.

Dari Gambar 3.4 terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir (2004-2005) terjadi penurunan rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum, di daerah perdesaan masing-masing sebesar 50,55

persen dan 42,64 persen, sebaliknya di daerah perkotaan masing-masing sebesar 63,00 persen dan 63,40 persen. Kategori air bersih disini adalah air leding, air dalam kemasan, dan air hujan, termasuk pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung yang sumbernya atau tempat mengambilnya berjarak lebih dari 10 m dari tempat penampungan tinja/ limbah/ kotoran terdekat.

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2000-2005



Sumber : Statistik Perumahan, BPS, 2006

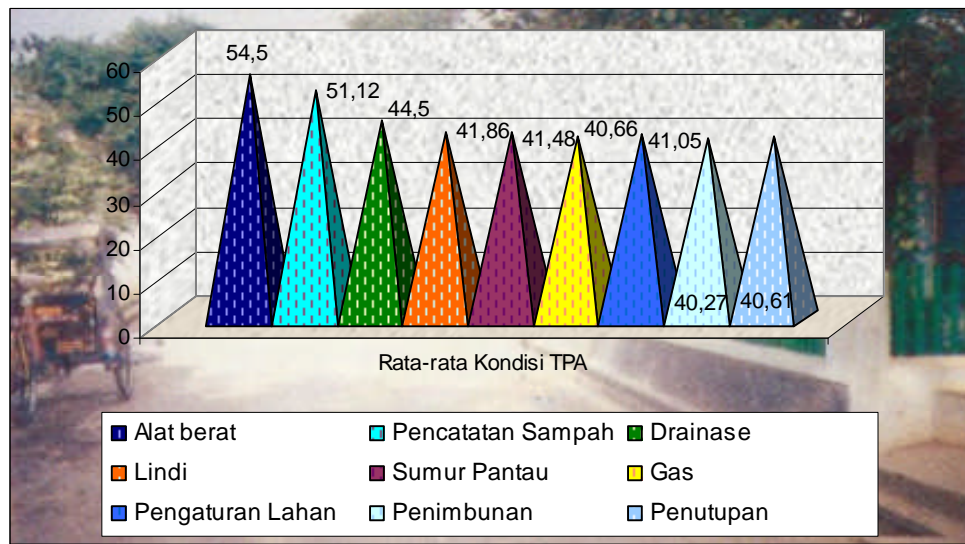
Secara umum, berdasarkan data sekunder dari KLH (2006), maka kondisi timbunan sampah untuk kategori kota-kota metropolitan di Indonesia sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di beberapa kota. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh penambahan penduduknya dan tingkat keberhasilan pengelolaan sampah pada kota bersangkutan. Pada Tabel 3.13 dapat dilihat bagaimana kondisi timbunan sampah yang ada di beberapa kota metropolitan di Indonesia.

Meskipun jumlah timbunan sampah di beberapa kota metropolitan di Indonesia masih relatif besar, namun jika diperhatikan ternyata terjadi

penurunan jumlah timbunan sampah dari tahun 2005 ke 2006. Jumlah timbunan sampah tertinggi terjadi di Surabaya, mencapai lebih dari 6.000 m³/ hari.

Berdasarkan data penilaian Adipura tahun 2006, rata-rata nilai komponen lokasi TPA di Indonesia relatif masih rendah. Nilai kondisi TPA berdasar penilaian Adipura tahun 2006 disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Rata-rata Kondisi TPA Seluruh Indonesia Akhir Tahun 2006



Sumber : Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2006 (KLH, 2006)

Keterangan : 30-45 Sangat Jelek; 46-60 Jelek; 61-70 Sedang; 71-85 Baik; 86-90 Sangat Baik

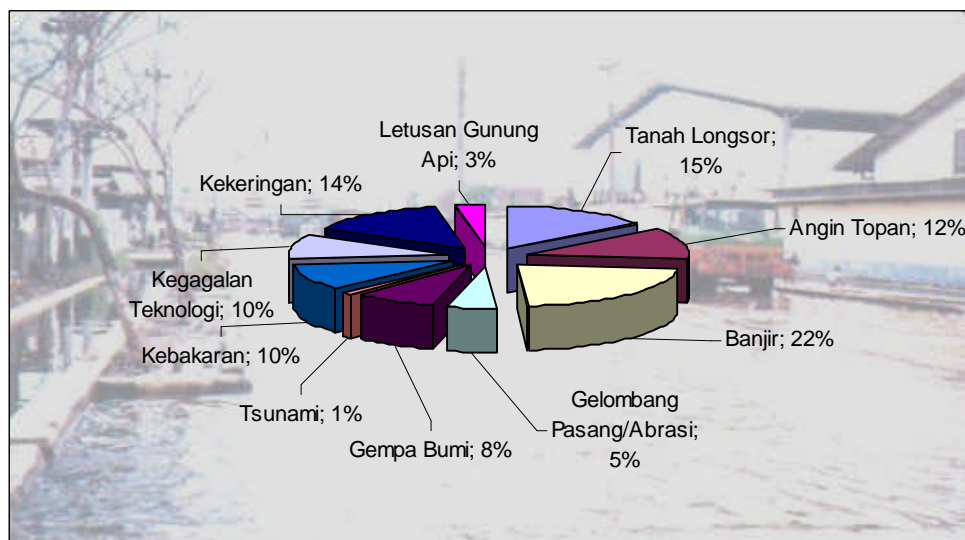
3.6 Bencana Alam

Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup, dimana air, tanah, udara, flora dan fauna akan berubah baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, dan biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu perubahan lingkungan hidup bisa terjadi karena adanya polusi atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana

alam juga dapat menimbulkan masalah sosial. Gangguan seperti ini bisa terjadi dengan sendirinya (alamiah) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Banjir merupakan jenis bencana alam yang paling besar menelan korban manusia, baik yang luka dan menderita, maupun yang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Bakornas PBP pada tahun 2006 telah terjadi 195 bencana. Dari total kejadian bencana tersebut, yang paling sering terjadi adalah banjir (22%) diikuti oleh tanah longsor dan kekeringan secara berurutan masing-masing sebesar 15% dan 14% (Gambar 3.6).

Gambar 3.6 Persentase Kejadian Bencana Alam di Indonesia Tahun 2006



Sumber : Suplemen Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2006 (Bakornas PBP, 2006)

Persentase total kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi) masing-masing relatif kecil. Namun demikian bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama gempa bumi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah serta Tsunami di pantai selatan Jawa tahun 2006.

Pada Tabel 3.14 terlihat, bahwa daerah yang rawan gempa bumi berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (4.257 desa/ kelurahan) dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 706.303. Adapun daerah rawan tanah longsor berada di provinsi Jawa Barat (1250 desa/kelurahan) dengan jumlah keluarga sebanyak 86.570. Untuk daerah rawan banjir berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (1.254 desa/ kelurahan) dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 92.789. Sedangkan keluarga yang tinggal di daerah rawan banjir bandang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (188 desa/ kelurahan) dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 12.600. Rawan bencana jenis abrasi pantai banyak terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan 6.831 keluarga.

Musim hujan tahun 2006-2007 menimbulkan berbagai bencana alam di bumi Indonesia ini. Kejadian bencana alam tersebut meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, gelombang tsunami, dan angin ribut. Frekuensi kejadian bencana alam terbanyak berada di Wilayah Tengah (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan), yakni sejumlah 391. Di Wilayah Tengah itu juga banyak rumah, fasilitas umum, jembatan, bendung yang rusak/ roboh/hanyut. Sedangkan yang tergenang paling banyak adalah rumah, jalan, sawah, dan perikanan. Jumlah orang meninggal, hilang, serta mengungsi pun terbanyak di Wilayah Tengah ini (Tabel 3.15). Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dalam pembuatan program pembangunan dan pengembangan infrastruktur PU.

Tabel 3.1
Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi

Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	3.234	3.896	3.859	3.710	3.866	4.071
Sumatera Utara	3.323	3.824	3.962	3.890	3.807	3.936
Sumatera Barat	2.592	2.779	2.882	2.837	2.435	2.664
Riau	1.805	1.982	2.010	1.973	1.652	1.773
Jambi	1.737	1.830	1.845	1.807	1.931	2.302
Sumatera Selatan	2.272	2.433	2.552	2.548	2.629	2.394
Bengkulu	622	666	657	657	804	693
Lampung	3.723	3.961	3.955	3.857	3.636	4.033
Bangka Belitung	301	338	332	325	294	388
Kep Riau	-	-	-	-	332	502
DKI Jakarta	4.246	4.154	4.417	4.417	5.015	4.690
Jawa Barat	6.102	6.195	6.268	6.268	6.500	6.438
Jawa Tengah	7.128	7.338	7.619	7.619	7.203	5.535
DI. Yogyakarta	1.173	1.208	1.239	1.239	1.155	1.081
Jawa Timur	8.241	8.418	8.356	8.356	7.958	7.303
Banten	1.011	1.276	1.285	1.285	1.749	1.182
Bali	1.524	1.635	1.731	1.731	1.615	1.571
Nusa Tenggara Barat	1.020	1.015	1.213	1.213	1.253	1.198
Nusa Tenggara Timur	1.529	1.672	1.780	1.780	1.660	1.553
Kalimantan Barat	2.526	2.748	2.994	2.994	2.171	2.023
Kalimantan Tengah	149	162	173	178	202	218
Kalimantan Selatan	3.683	4.528	4.613	4.613	4.783	4.101
Kalimantan Timur	1.141	1.384	1.454	1.454	1.671	1.678
Sulawesi Utara	183	190	191	191	214	242
Sulawesi Tengah	1.760	2.227	2.217	2.217	2.554	2.128
Sulawesi Selatan	5.436	5.735	5.728	5.728	4.965	4.960
Sulawesi Tenggara	920	1.017	1.026	1.026	1.056	1.246
Gorontalo	983	1.110	1.132	1.132	1.288	1.612
Sulawesi Barat	-	-	-	-	576	655
Maluku	1.143	1.180	1.197	1.197	1.028	1.136
Maluku Utara	952	968	989	989	1.149	1.132
Papua	1.962	2.205	2.191	2.191	1.246	1.503
Papua Barat	-	-	-	-	994	926
Jumlah/ Total	72.421	78.074	79.867	79.422	79.391	76.867

Sumber : Statistik Konstruksi 2006

Catatan : * Angka Sementara

Tabel 3.2
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi

	000 rupiah					
Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
1	2	3	4	5	6	7
Nanggroe Aceh Darussalam	403.956.711	456.794.958	433.603.311	340.215.438	1.601.441.065	1.119.651.224
Sumatera Utara	1.210.077.088	1.741.339.518	1.852.577.739	3.430.316.940	3.845.946.561	4.022.747.789
Sumatera Barat	622.547.470	717.299.178	844.516.928	956.619.300	1.315.105.562	1.324.786.176
Riau	826.859.266	938.833.916	1.215.410.433	1.833.328.809	2.243.743.274	2.292.379.072
Jambi	199.779.946	240.975.799	302.720.464	839.472.780	976.398.039	1.001.312.431
Sumatera Selatan	978.787.216	1.152.798.825	1.320.870.084	1.395.898.329	1.849.403.179	1.927.593.528
Bengkulu	125.603.754	130.439.999	124.432.376	206.460.594	217.160.957	229.764.270
Lampung	301.759.642	347.863.805	440.410.225	1.029.280.128	1.214.793.553	1.222.124.389
Bangka Belitung	101.313.557	126.555.847	114.749.098	128.214.093	340.891.376	238.223.882
Kep Riau	0	0	0	0	757.523.262	943.595.942
DKI Jakarta	7.889.992.723	8.488.922.748	8.860.729.984	10.644.368.420	14.157.681.465	15.276.572.859
Jawa Barat	3.365.871.116	3.921.239.731	5.774.085.846	13.971.851.161	12.825.404.970	13.491.149.640
Jawa Tengah	3.658.970.675	4.119.270.271	4.191.497.672	4.107.492.710	3.978.874.466	5.226.542.060
DI. Yogyakarta	253.062.732	303.868.303	468.882.880	887.692.122	1.184.257.860	1.081.631.011
Jawa Timur	3.673.614.579	3.924.662.221	3.855.730.086	4.201.379.286	4.434.593.683	5.746.749.477
Banten	615.481.557	728.773.338	804.106.146	1.278.948.640	2.009.283.640	1.648.541.703
Bali	427.512.210	513.420.954	545.531.196	658.605.438	720.400.799	817.435.157
Nusa Tenggara Barat	174.142.878	200.978.252	245.289.935	298.692.233	313.190.208	350.014.121
Nusa Tenggara Timur	229.655.629	261.039.298	282.843.994	357.363.593	834.054.556	569.547.104
Kalimantan Barat	558.104.864	643.139.200	659.001.234	1.105.817.334	1.156.209.421	1.195.999.013
Kalimantan Tengah	177.578.495	200.308.720	202.438.040	228.940.514	305.701.219	311.356.488
Kalimantan Selatan	603.638.428	639.658.873	740.242.888	865.597.327	1.395.342.543	1.352.959.731
Kalimantan Timur	1.769.700.309	2.257.940.029	2.670.955.369	3.365.850.628	3.328.886.195	3.918.779.389
Sulawesi Utara	193.897.984	205.760.432	230.203.179	324.054.056	225.135.549	336.088.735
Sulawesi Tengah	183.573.447	227.241.797	205.410.245	366.832.324	549.166.599	449.118.292
Sulawesi Selatan	956.011.758	1.186.074.602	1.082.003.277	1.154.461.713	1.831.794.175	2.047.974.112
Sulawesi Tenggara	120.197.541	139.428.487	141.113.195	398.565.836	525.550.970	435.778.240
Gorontalo	86.936.153	98.236.337	160.748.172	259.175.589	579.034.707	474.781.325
Sulawesi Barat	0	0	0	0	169.858.268	223.413.900
Maluku	180.912.068	188.150.091	312.952.955	336.519.111	422.771.459	424.733.807
Maluku Utara	187.026.579	210.966.593	234.379.049	274.177.721	298.168.847	345.410.808
Papua	673.559.076	768.253.443	733.209.893	758.345.828	1.086.042.923	1.110.668.716
IrianJaya Barat	0	0	0	0	624106601	785.884.348
JUMLAH/TOTAL	30.750.125.451	35.080.235.565	39.050.645.893	56.004.537.995	67.317.917.951	71.943.308.739

Sumber : Statistik Konstruksi 2005

Catatan : * Angka Sementara

Tabel 3.3
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan

	000 rupiah					
Jenis Pekerjaan	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan tempat tinggal	4.352.406	4.891.746	6.155.685	4.795.995	7.495.904	9.305.172
Bangunan bukan tempat tinggal	8.690.856	9.653.059	10.547.568	18.581.659	20.701.163	22.069.558
Pemasangan instalasi listrik	1.211.073	1.387.860	1.099.642	3.825.819	3.174.567	3.363.393
Pemasangan pipa air minum dan gas	172.359	193.528	103.114	114.635	431.511	371.544
Pemasangan sanitasi	73.360	85.996	186.489	69.988	206.000	194.926
Pekerjaan pondasi	129.227	146.339	294.075	353.875	1.155.892	850.095
Sound system, AC, lift, dll	75.576	85.294	73.855	2.038.887	1.090.505	1.268.817
Jaringan air minum	259.266	317.420	269.802	447.877	487.919	512.374
Jaringan pipa gas dan minyak bumi	76.588	148.326	314.169	759.422	650.974	648.546
Jaringan listrik	555.456	665.628	1.679.716	1.559.105	439.088	1.027.867
Pekerjaan jalan dan jembatan	8.605.257	9.696.851	10.460.761	15.083.795	18.844.750	19.897.065
Pengairan/ drainase	2.147.633	2.412.684	2.106.474	4.975.447	3.845.006	4.553.470
Pembangkit tenaga listrik dan jaringan	108.123	132.198	110.385	20.973	2.823.137	1.137.230
Pekerjaan lapangan terbang, pelabuhan, terminal, dsb	273.007	728.708	637.340	1.440.669	1.688.968	1.598.572
Konstruksi lainnya	4.019.937	4.534.600	5.011.568	1.936.391	4.282.534	5.144.678
JUMLAH/TOTAL	30.750.124	35.080.237	39.050.643	56.004.537	67.317.918	71.943.307

Sumber : Statistik Konstruksi 2005

Catatan : * Angka Sementara

Tabel 3.4
Status Mutu Air Beberapa Sungai di Indonesia

No.	Sungai	Provinsi	Jumlah Titik	Status Mutu
1	2	3	4	5
1	Krueng Aceh	Nanggroe Aceh Darussa	6	Cemar ringan
2	Deli	Sumatera Utara	11	Cemar sedang - cemar berat
3	Batang Agam	Sumatera Barat	6	Memenuhi - cemar ringan
4	Kampar	Riau	10	Cemar ringan - cemar sedang
5	Indragiri	Riau	14	Cemar ringan - cemar sedang
6	Rokan	Riau	15	Cemar ringan - cemar sedang
7	Siak	Riau	14	Cemar ringan - cemar sedang
8	Batanghari	Jambi	12	Cemar berat
9	Air Bengkulu	Bengkulu	6	Cemar ringan
10	Musi	Sumatera Selatan	8	Cemar sedang
11	Rangkui	Bangka Belitung	6	Cemar sedang - cemar berat
12	Way Sekampung	Lampung	6	Cemar sedang - cemar berat
13	Ciliwung	D.K.I Jakarta	15	Cemar ringan - cemar berat
14	Kali Angke	Banten	6	Cemar sedang - cemar berat
15	Citarum	Jawa Barat	6	Cemar sedang - cemar berat
16	Progo	Jawa Tengah	6	Cemar sedang
17	Progo	DI Yogyakarta	7	Cemar berat
18	Brantas	Jawa Timur	18	Cemar sedang - cemar berat
19	Tukad Badung	Bali	6	Cemar ringan - cemar berat
20	Jangkok	Nusa Tenggara Barat	6	Memenuhi - cemar ringan
21	Dendeng	Nusa Tenggara Timur	5	Memenuhi - cemar ringan
22	Kapuas	Kalimantan Barat	6	Cemar ringan - cemar berat
23	Mahakam	Kalimantan Timur	6	Cemar sedang - cemar berat
24	Kahayan	Kalimantan Tengah	6	Cemar sedang - cemar berat
25	Martapura	Kalimantan Selatan	6	Cemar Sedang
26	Bone	Gorontalo	6	Cemar Sedang
27	Tondano	Sulawesi Utara	8	Cemar sedang - cemar berat
28	Palu	Sulawesi Tengah	6	Cemar ringan
29	Tallo	Sulawesi Selatan	6	Memenuhi - cemar sedang
30	Jeneberang	Sulawesi Selatan	6	Cemar ringan - cemar sedang
31	Konaweha	Sulawesi Tenggara	6	Memenuhi - cemar ringan
32	Batu Gajah	Maluku	3	Cemar ringan - cemar sedang
33	Batu Merah	Maluku	3	Cemar ringan - cemar sedang
34	Tabobo	Maluku Utara	6	Cemar ringan - cemar sedang
35	Anafre	Papua	6	Memenuhi - cemar berat

Sumber : Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2006 (KLH, 2006)

Tabel 3.5
Luas Lahan Sawah Dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Provinsi
Tahun 2005, (Ha)

No	Provinsi	Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis	Irigasi Sederhana	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	68.391	58.415	108.340	130.519	1.308	110	367.083
2	Sumatera Utara	74.163	78.215	232.311	168.532	7.860	14.168	575.249
3	Sumatera Barat	30.126	60.622	90.453	46.901	250	9.510	237.862
4	Riau	50	10.614	6.709	61.199	37.627	3.356	119.555
5	Jambi	3.349	9.129	19.534	20.720	92.230	16.251	161.213
6	Sumatera Selatan	31.906	12.514	11.445	83.680	153.876	190.786	484.207
7	Bengkulu	15.869	18.173	19.655	14.542	160	8.954	77.353
8	Lampung	103.076	22.818	37.877	88.338	30.820	30.388	313.317
9	Kepulauan Bangka Belitung	500	1.080	1.602	594	100	235	4.111
10	Kepulauan Riau	95	-	129	468	-	-	692
	Sumatera	327.525	271.580	528.055	615.493	324.231	273.758	2.339.950
11	D.K.I. Jakarta	510	782	582	370	-	-	2.244
12	Jawa Barat	376.718	119.407	250.525	168.998	13	2.064	917.725
13	Jawa Tengah	382.569	120.113	188.227	274.325	638	1.936	967.808
14	D.I Yogyakarta	18.493	22.630	6.742	9.305	-	18	57.188
15	Jawa Timur	641.001	110.435	109.866	232.397	8	2.370	1.096.077
16	Banten	51.908	18.217	46.030	78.237	-	112	194.504
17	Bali	-	67.555	12.064	586	-	6	80.211
	Jawa dan Bali	1.471.199	459.139	614.036	764.218	659	6.506	3.315.757
18	Nusa Tenggara Barat	78.154	74.478	38.477	34.371	-	228	225.708
19	Nusa Tenggara Timur	14.096	26.761	41.220	33.465	-	54	115.596
	Nusa Tenggara	92.250	101.239	79.697	67.836	0	282	341.304
20	Kalimantan Barat	227	11.793	61.610	110.883	81.302	8.847	274.662
21	Kalimantan Tengah	5.041	8.138	32.107	45.321	67.581	5.313	163.501
22	Kalimantan Selatan	17.039	5.261	23.719	140.948	155.760	91.137	433.864
23	Kalimantan Timur	2.583	5.086	20.946	68.000	26.429	848	123.892
	Kalimantan	24.890	30.278	138.382	365.152	331.072	106.145	995.919
24	Sulawesi Utara	18.001	16.144	13.607	10.097	50	70	57.969
25	Sulawesi Tengah	49.067	32.441	28.241	7.540	255	171	117.715
26	Sulawesi Selatan	153.659	55.508	131.325	227.241	1.015	-	568.748
27	Sulawesi Tenggara	25.318	16.914	23.115	7.793	151	21	73.312
28	Gorontalo	12.607	5.048	2.689	6.558	-	196	27.098
29	Sulawesi Barat	11.366	2.154	17.087	16.694	113	-	47.414
	Sulawesi	270.018	128.209	216.064	275.923	1.584	458	844.842
	Indonesia ¹⁾	2.185.882	990.445	1.576.234	2.088.622	657.546	387.149	7.885.878

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Catatan : 1) Tidak termasuk Maluku, Maluku Utara dan Papua, karena data tidak tersedia

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Kegiatan Perluasan Areal Tanaman
Pangan (Cetak Sawah) Melalui Dana Tugas Pembantuan
Tahun 2006, (Ha)

No	Provinsi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4
1	Sumatera Barat	300	170
2	Riau	255	216
3	Jambi	150	90
4	Sumatera Selatan	140	95
5	Bengkulu	250	150
6	Lampung	151	151
7	Kepulauan Bangka Belitung	50	50
8	Nusa Tenggara Timur	100	100
9	Kalimantan Barat	1.100	1.020
10	Kalimantan Tengah	80	80
11	Kalimantan Selatan	126	126
12	Kalimantan Timur	200	200
13	Sulawesi Utara	200	200
14	Sulawesi Tengah	1.363	1.263
15	Sulawesi Selatan	200	200
16	Sulawesi Tenggara	1.000	1.000
17	Gorontalo	140	50
18	Sulawesi Barat	50	50
19	Maluku	317	262
20	Maluku Utara	179	179
21	Papua Barat	655	642
22	Papua	450	450
	Indonesia	7.456	6.744

Sumber : <http://www.deptan.go.id/pla> (data aspek perluasan areal)

Tabel 3.7
Pengembangan Konservasi Lahan Terpadu
Tahun 2006, (Ha)

No	Provinsi	Luas (Ha)
1	2	3
1	NAD	60
2	Sumatera Barat	6
3	Riau	110
4	Jambi	37
5	Bengkulu	145
6	Lampung	220
7	Banten	20
8	Jawa Barat	110
9	D.I. Yogyakarta	23
10	Jawa Timur	158
11	Kalimantan Timur	160
12	Kalimantan Selatan	333
13	Sulawesi Utara	63
14	Gorontalo	200
15	Sulawesi Selatan	110
16	Sulawesi Tengah	525
17	Sulawesi Tenggara	230
18	Nusa Tenggara Timur	142
19	Maluku	440
20	Maluku Utara	20
21	Papua	40
	Indonesia	3.152

Sumber : Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2006

Tabel 3.8
Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Polda dan Jenis Kendaraan
Tahun 2003 - 2005, (Unit)

No	Polda	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh D	2003	44.069	19.555	42.240	493.970	599.834
		2004	57.352	28.872	51.517	592.810	730.551
		2005	63.254	33.884	54.371	634.188	785.697
2	Sumatera Utara	2003	285.314	26.570	140.255	1.300.995	1.753.134
		2004	326.015	27.011	146.703	1.461.760	1.961.489
		2005	367.452	32.340	157.031	1.729.262	2.286.085
3	Sumatera Barat	2003	27.857	48.035	52.340	289.067	417.299
		2004	33.354	61.518	59.441	366.445	520.758
		2005	35.765	69.245	75.520	501.920	682.450
4	Riau	2003	94.885	37.343	58.892	606.523	797.643
		2004	139.689	41.029	69.520	704.423	954.661
		2005	208.877	42.297	90.147	828.824	1.170.145
5	Jambi	2003	28.922	9.427	22.240	252.216	312.805
		2004	34.280	9.678	30.394	344.585	418.937
		2005	45.829	14.419	49.022	516.671	625.941
6	Sumatera Selatan	2003	79.721	16.627	67.788	334.395	498.531
		2004	94.866	19.747	69.120	364.998	548.731
		2005	150.733	28.477	76.599	508.150	763.959
7	Bengkulu	2003	12.591	1.048	12.799	75.428	101.866
		2004	13.554	1.141	15.381	98.014	128.090
		2005	16.609	1.248	20.810	146.943	185.610
8	Lampung	2003	49.397	3.489	49.446	328.944	431.276
		2004	54.411	3.961	52.366	415.449	526.187
		2005	61.501	6.356	56.477	549.514	673.848
9	Kep. Bangka Belitung	2003	0	0	0	0	0
		2004	8.127	14.833	13.777	190.535	227.272
		2005	8.432	16.951	14.312	199.813	239.508
10	Kep. Riau	2003	0	0	0	0	0
		2004	0	0	0	0	0
		2005	38.360	8.065	18.439	313.307	378.171
11	DKI Jakarta	2003	1.596.298	367.215	455.709	3.516.900	5.936.122
		2004	1.747.921	389.311	495.464	3.894.457	6.527.153
		2005	1.937.396	490.532	644.054	5.343.211	8.415.193
12	Jawa Barat	2003	389.339	98.189	239.259	1.285.648	2.012.435
		2004	411.250	103.385	264.767	1.343.902	2.123.304
		2005	438.310	117.177	319.494	1.415.801	2.290.782
13	Jawa Tengah	2003	146.266	30.982	264.189	3.516.900	3.958.337
		2004	153.550	31.761	284.313	4.091.542	4.561.166
		2005	205.404	37.751	330.628	5.069.421	5.643.204
14	DI Yogyakarta	2003	74.728	8.039	33.520	666.941	783.228
		2004	80.960	9.785	37.447	762.517	890.709
		2005	104.584	14.505	50.059	949.715	1.118.863
15	Jawa Timur	2003	508.611	13.201	267.742	3.944.098	4.733.652
		2004	556.595	14.010	284.915	4.326.336	5.181.856
		2005	721.013	17.084	330.929	4.729.983	5.799.009

Lanjutan Tabel 3.8

No	Polda	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Banten	2003	0	0	0	0	0
		2004	25.146	15.516	17.988	187.705	246.355
		2005	25.452	15.670	17.420	282.193	340.735
17	Bali	2003	177.571	8.617	54.868	902.465	1.143.521
		2004	239.587	10.307	69.580	1.018.230	1.337.704
		2005	340.333	13.216	99.729	1.117.609	1.570.887
18	Nusa Tenggara Barat	2003	15.636	4.005	17.551	203.066	240.258
		2004	19.366	5.516	19.469	245.606	289.957
		2005	30.538	10.407	26.034	305.804	372.783
19	Nusa Tenggara Timur	2003	11.130	8.857	7.626	59.848	87.461
		2004	19.348	11.989	6.528	71.169	109.034
		2005	34.260	18.794	9.878	110.511	173.443
20	Kalimantan Barat	2003	26.905	3.847	22.071	334.401	387.224
		2004	43.563	4.856	28.735	410.041	487.195
		2005	82.704	8.253	44.370	535.309	670.636
21	Kalimantan Tengah	2003	14.435	4.679	8.458	152.731	180.303
		2004	29.111	7.507	13.534	183.244	233.396
		2005	52.979	8.894	23.812	234.882	320.567
22	Kalimantan Selatan	2003	46.773	8.933	36.707	406.701	499.114
		2004	57.728	16.552	44.272	476.203	594.755
		2005	79.930	20.243	63.539	586.206	749.918
23	Kalimantan Timur	2003	49.997	9.331	50.579	394.995	504.902
		2004	62.998	11.776	73.846	489.981	638.601
		2005	89.489	21.770	114.255	642.953	868.467
24	Sulawesi Utara	2003	27.032	19.613	22.555	78.953	148.153
		2004	27.540	21.825	23.073	103.746	176.184
		2005	33.599	24.527	26.739	162.113	246.978
25	Sulawesi Tengah	2003	36.815	9.863	31.217	260.446	338.341
		2004	58.547	15.466	38.292	321.824	434.129
		2005	85.678	22.228	49.561	398.418	555.885
26	Sulawesi Selatan	2003	98.595	17.729	53.779	326.535	496.638
		2004	123.609	26.778	66.191	311.514	528.092
		2005	175.055	46.974	108.143	364.471	694.643
27	Sulawesi Tenggara	2003	4.657	8.905	7.951	62.562	84.075
		2004	5.246	14.652	9.917	66.632	96.447
		2005	7.575	26.522	14.893	72.449	121.439
28	Gorontalo	2003	0	0	0	0	0
		2004	320	22	633	5.676	6.651
		2005	4.492	652	4.904	55.141	65.189
29	Maluku	2003	26.015	3.281	15.585	69.441	114.322
		2004	27.102	3.316	15.590	77.835	123.843
		2005	28.072	4.141	15.855	101.870	149.938
30	Maluku Utara	2003	0	0	0	0	0
		2004	69	17	129	538	753
		2005	75	21	136	553	785
31	Papua	2003	11.669	10.699	11.656	112.207	146.231
		2004	13.077	11.059	12.879	128.115	165.130
		2005	20.285	12.275	13.668	149.292	195.520

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 3.9
Kualitas Bangunan Rumah dan Permukiman Kumuh di Indonesia
Tahun 2005

No	Provinsi	Kualitas Permukiman (desa/kelurahan)				Permukiman Kumuh			
		Mewah	Tidak Mewah	Kumuh	Tidak Kumuh	Jumlah lokasi (Lokasi)	Jumlah Bangunan Rumah (Unit)	Jumlah Keluarga (Keluarga)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	26	5.942	360	5.608	710	14.934	17.854	
2	Sumatera Utara	132	4.783	459	4.456	1.072	40.063	45.394	
3	Sumatera Barat	48	853	51	850	127	6.115	6.566	
4	Riau	67	1.410	187	1.290	488	15.504	19.066	
5	Jambi	25	1.210	136	1.099	312	8.826	11.000	
6	Sumatera Selatan	120	2.658	264	2.514	639	23.291	31.500	
7	Bengkulu	14	1.210	45	1.179	62	1.468	1.718	
8	Lampung	61	2.130	232	1.959	566	23.197	25.332	
9	Kep. Bangka Belitung	22	299	25	296	41	977	1.140	
10	Kep. Riau	26	229	90	165	239	9.480	16.712	
	Sumatera	541	20.724	1.849	19.416	0	4.256	143.855	176.282
11	D.K.I Jakarta	162	105	186	81	750	124.166	199.603	
12	Jawa Barat	371	5.437	777	5.031	2.541	86.616	111.521	
13	Jawa Tengah	133	8.431	273	8.291	682	18.263	22.714	
14	D.I Yogyakarta	29	409	15	423	35	828	1.147	
15	Jawa Timur	270	8.207	297	8.180	903	27.618	38.015	
16	Banten	115	1.367	326	1.156	984	34.600	42.840	
17	Bali	48	653	22	679	45	813	1.515	
	Jawa dan Bali	1.128	24.609	1.896	23.841	0	5.940	292.904	417.355
18	Nusa Tenggara Barat	32	788	263	557	1.095	56.480	62.575	
19	Nusa Tenggara Timur	11	2.727	68	2.670	164	5.648	6.286	
	Nusa Tenggara	43	3.515	331	3.227	0	1.259	62.128	68.861
20	Kalimantan Barat	35	1.495	256	1.274	656	14.944	22.426	
21	Kalimantan Tengah	35	1.316	104	1.247	230	9.522	12.056	
22	Kalimantan Selatan	41	1.918	144	1.815	351	12.413	16.544	
23	Kalimantan Timur	70	1.274	169	1.175	308	22.521	28.905	
	Kalimantan	181	6.003	673	5.511	0	1.545	59.400	79.931
24	Sulawesi Utara	58	1.211	164	1.105	240	8.373	11.254	
25	Sulawesi Tengah	20	1.510	186	1.344	308	13.474	14.638	
26	Sulawesi Selatan	92	3.194	393	2.893	909	35.106	45.163	
27	Sulawesi Tenggara	17	1.668	148	1.537	286	8.274	9.485	
28	Gorontalo	6	444	53	397	106	2.095	2.395	
	Sulawesi	193	8.027	944	7.276	0	1.849	67.322	82.935
29	Maluku	17	856	53	820	124	4.728	5.338	
30	Maluku Utara	24	757	63	718	84	3.167	3.493	
	Maluku	41	1.613	116	1.538	0	208	7.895	8.831
31	Papua	41	3.298	381	2.958	682	15.988	20.711	
	Indonesia	2.168	67.789	6.190	63.767	0	15.739	649.492	854.906

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005/2006

Tabel 3.10 :
Tempat Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai di Indonesia
Tahun 2005/2006

No.	Provinsi	Ada Keluarga yang Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai			Tidak Ada Keluarga yang Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai
		Jumlah Keluarga	Jumlah Bangunan Rumah	Desa/kelurahan	(desa/kelurahan)
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	26.947	24.687	951	1.929
2	Sumatera Utara	50.196	46.355	1.004	2.464
3	Sumatera Barat	13.276	12.047	246	431
4	Riau	49.114	43.217	514	576
5	Jambi	46.728	40.780	549	463
6	Sumatera Selatan	84.586	73.104	898	1.252
7	Bengkulu	6.182	5.781	222	594
8	Lampung	34.811	31.445	453	1.019
9	Kep.Bangka Belitung	1.802	1.632	41	155
10	Kep.Riau	3.246	2.878	57	28
	Sumatera	316.888	281.926	4.935	8.911
11	DKI Jakarta	22.654	16.790	102	112
12	Jawa Barat	80.691	66.210	1.143	3.706
13	Jawa Tengah	41.719	36.568	1.013	6.117
14	DI Yogyakarta	5.553	4.500	86	241
15	Jawa Timur	59.096	52.031	906	5.968
16	Banten	27.338	24.437	416	660
17	Bali	4.326	3.840	122	443
	Jawa dan Bali	241.377	204.376	3.788	17.247
18	Nusa Tenggara Barat	14.697	13.796	243	468
19	Nusa Tenggara Timur	16.213	15.205	453	1.073
	Nusa Tenggara	30.910	29.001	696	1.541
20	Kalimantan Barat	46.531	37.729	561	782
21	Kalimantan Tengah	64.566	51.478	748	501
22	Kalimantan Selatan	73.281	63.109	1.030	566
23	Kalimantan Timur	57.939	46.312	534	556
	Kalimantan	242.317	198.628	2.873	2.405
24	Sulawesi Utara	13.614	11.506	400	461
25	Sulawesi Tengah	14.375	13.171	383	592
26	Sulawesi Selatan	43.188	40.632	897	1.374
27	Sulawesi Tenggara	5.543	4.982	258	617
28	Gorontalo	5.566	4.034	142	222
	Sulawesi	82.286	74.325	2.080	3.266
29	Maluku	2.459	2.198	92	196
30	Maluku Utara	2.952	2.698	152	151
	Maluku	5.411	4.896	244	347
31	Papua	12.387	8.688	339	1811
	Indonesia	931.576	801.840	14.955	35.528

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005/2006

Tabel 3.11 :
Tempat Tinggal di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV) di Indonesia
Tahun 2005/2006

No.	Provinsi	Ada Keluarga yang Tinggal dibawah Jar. Listrik Tegangan Tinggi			Tdk Ada Keluarga Tinggal dibawah Jar. Listrik Teg. Tinggi (desa/kelurahan)	Tidak Ada Listrik Tegangan Tinggi (desa/kelurahan)
		Jumlah Keluarga	Jumlah Bangunan Rumah	Desa/kelurahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.382	1.435	140	2.153	3.675
2	Sumatera Utara	3.452	3.415	131	1.840	2.944
3	Sumatera Barat	3.115	3.087	82	296	523
4	Riau	7.730	6.887	122	643	712
5	Jambi	2.599	2.386	41	322	872
6	Sumatera Selatan	2.538	2.690	74	1.171	1.533
7	Bengkulu	744	724	23	260	941
8	Lampung	1.159	1.358	50	726	1.415
9	Kep.Bangka Belitung	233	231	6	101	214
10	Kep.Riau	74	93	4	79	172
	Sumatera	23.026	22.306	673	7.591	13.001
11	DKI Jakarta	14.338	10.547	58	123	86
12	Jawa Barat	29.921	24.148	700	1.831	3.277
13	Jawa Tengah	19.827	17.332	707	2.038	5.819
14	DI Yogyakarta	634	600	26	94	318
15	Jawa Timur	14.644	13.918	656	2.627	5.194
16	Banten	6.958	5.438	162	501	819
17	Bali	1.278	2.252	50	202	449
	Jawa dan Bali	87.600	74.235	2.359	7.416	15.962
18	Nusa Tenggara Barat	158	157	9	92	719
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	0	519	2.219
	Nusa Tenggara	158	157	9	611	2.938
20	Kalimantan Barat	542	300	23	353	1.154
21	Kalimantan Tengah	1.728	1.667	16	501	834
22	Kalimantan Selatan	558	520	42	397	1.520
23	Kalimantan Timur	3.129	2.711	40	411	893
	Kalimantan	5.957	5.198	121	1.662	4.401
24	Sulawesi Utara	3.104	2.769	111	609	549
25	Sulawesi Tengah	-	-	0	47	1.483
26	Sulawesi Selatan	1.402	1.319	88	855	2.343
27	Sulawesi Tenggara	15	15	1	17	1.667
28	Gorontalo	-	-	0	58	392
	Sulawesi	4.521	4.103	200	1.586	6.434
29	Maluku	936	656	4	207	662
30	Maluku Utara	12	10	1	68	712
	Maluku	948	666	5	275	1.374
31	Papua	82	81	11	1.482	1.846
	Indonesia	122.292	106.746	3.378	20.623	45.956

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005/2006

Tabel 3.12 :
Rencana Pembangunan Rumah Berdasarkan Provinsi
Tahun 2008

Status : 29 Januari 2008

No.	Pemerintah Daerah	RS (Unit)	RsH		Jumlah (Unit)
			Subsidi (Unit)	Non Subsidi (Unit)	
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	640	17.450	5.070	23.160
2	Sumatera Utara	2.213	9.621	350	12.184
3	Sumatera Barat	238	1.481	70	1.789
4	Kep.Riau	979	5.395	210	6.584
5	Khusus Batam	-	5.580	420	6.000
6	Bangka Belitung	-	279	21	300
7	Bengkulu	-	576	25	601
8	Sumatera Selatan	396	10.543	700	11.639
9	Lampung	1.397	5.845	210	7.452
10	Jambi	248	8.277	420	8.945
11	Riau	2.950	17.682	1.200	21.832
12	Banten	4.590	18.200	600	23.390
13	DKI Jakarta	2.688	5.320	-	8.008
14	Jawa Barat	4.808	48.288	3.100	56.196
15	DI Yogyakarta	225	1.172	35	1.432
16	Jawa Tengah	1.607	12.922	1.095	15.624
17	Jawa Timur	3.161	19.315	1.770	24.246
18	Bali	289	743	21	1.053
19	Nusa Tenggara Barat	35	1.010	70	1.115
20	Nusa Tenggara Timur	450	2.157	83	2.690
21	Kalimantan Barat	461	1.253	21	1.735
22	Kalimantan Tengah	10	1.910	140	2.060
23	Kalimantan Selatan	100	5.550	450	6.100
24	Kalimantan Timur	810	4.305	245	5.360
25	Sulawesi Utara	515	3.312	140	3.967
26	Sulawesi Tengah	-	980	70	1.050
27	Sulawesi Selatan	1.363	9.535	620	11.518
28	Sulawesi Tenggara	564	1.634	11	2.209
29	Gorontalo	-	293	18	311
30	Sulawesi Barat	-	140	11	151
31	Maluku	-	44	-	44
32	Maluku Utara	-	163	12	175
33	Papua	100	558	42	700
	Indonesia	30.837	221.533	17.250	269.620

Sumber : Menpera, Deputi Formal, 2008

Tabel 3.13
Rata-rata Timbunan Sampah di Kota Metropolitan di Indonesia
Tahun 2005 dan Tahun 2006

No	Kota	Jumlah Penduduk (jiwa), 2005	Jumlah Penduduk (jiwa), 2006	Rata-rata Timbunan Sampah (m3/hari), 2005	Rata-rata Timbunan Sampah (m3/hari), 2006
1	2	3	4	5	6
1	Jakarta Selatan	1.708.269	1.718.042	5.223,0	td
2	Jakarta Pusat	897.789	893.195	4.651,0	td
3	Medan	2.068.400	2.068.400	td	4.382,0
4	Semarang	1.424.000	1.406.999	4.274,0	3.805,0
5	Surabaya	2.599.796	2.740.490	6.700,0	6.234,0
6	Palembang	1.500.872	1.520.199	4.698,0	td
7	Jakarta Utara	1.176.307	1.182.749	4.180,0	td
8	Jakarta Timur	2.385.121	2.434.163	5.442,0	5.272,8
9	Jakarta Barat	1.565.406	1.573.619	5.500,0	5.500,0
10	Makassar	1.160.011	1.179.024	3.580,2	td
11	Depok	1.335.734	1.369.461	td	td
12	Bandung	2.141.837	2.453.302	6.473,7	td
13	Tangerang	1.700.000	1.914.316	4.225,0	5.000,0
14	Bekasi	td	1.914.316	td	td

Sumber : Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2006 (KLH, 2006)

Keterangan : td = tidak ada data

Tabel 3.14
Daerah Rawan Bencana Alam Beserta Keluarga yang Tinggal di Lokasi Tersebut
Tahun 2005

No	Provinsi	Bencana Tanah Longsor (desa/kelurahan)			Bencana Banjir (desa/kelurahan)			Banjir Bandang (desa/kelurahan)			Gempa Bumi (desa/kelurahan)			Abrasi Pantai (desa/kelurahan)		
		Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nanggroe Aceh D	223	4.329	7.069	1.254	3.298	92.789	188	4.364	12.600	4.257	296	706.303	126	4.422	6.831
2	Sumatera Utara	256	741	6.392	415	583	50.497	43	953	4.683	431	566	102.453	20	976	2.160
3	Sumatera Barat	178	378	10.774	160	396	17.438	13	543	2.173	376	179	383.747	35	519	3.279
4	Riau	21	414	1.313	361	74	46.850	6	429	1.237	1	434	480	49	386	1.869
5	Jambi	53	573	4.636	448	178	64.532	40	585	5.541	279	346	93.208	1	624	11
6	Sumatera Selatan	117	364	3.915	386	97	53.915	44	437	6.114	4	477	312	1	480	125
7	Bengkulu	33	1.180	1.042	84	1.130	4.469	2	1.212	148	1.209	4	373.440	16	1.198	1.450
8	Lampung	89	302	3.801	280	110	25.452	41	350	3.526	38	353	15.336	43	348	2.959
9	Kep. Bangka Belitung	2	32	64	12	22	1.881	1	33	124	0	34	0	8	26	494
10	Kep. Riau	6	24	1.109	12	18	1.225	1	29	85	0	30	0	7	23	433
	Sumatera	978	8.337	40.115	3.412	5.906	359.048	379	8.935	36.231	6.595	2.719	1.675.279	306	9.002	19.611
11	D.K.I Jakarta	0	114	0	113	3	82.408	2	112	1.579	0	114	0	0	114	0
12	Jawa Barat	1.250	556	86.570	675	1.136	123.146	75	1.736	6.996	63	1.748	14.752	25	1.786	4.118
13	Jawa Tengah	969	882	50.282	868	985	130.796	83	1.770	12.339	8	1.845	6.689	32	1.821	1.581
14	D.I Yogyakarta	65	59	7.987	71	53	7.658	3	121	1.744	1	123	104	1	123	35
15	Jawa Timur	478	926	38.821	894	511	126.462	111	1.289	26.368	35	1.367	20.961	47	1.355	3.810
16	Banten	83	347	4.097	310	114	43.056	12	417	3.938	79	350	61.611	20	409	912
17	Bali	26	54	778	23	57	2.083	1	79	21	1	79	90	28	52	746
	Jawa dan Bali	2.871	2.938	188.535	2.954	2.859	515.609	287	5.524	52.985	187	5.626	104.207	153	5.660	11.202
18	Nusa Tenggara Barat	26	121	1.382	95	53	9.946	1	146	160	10	137	6.195	16	131	1.508
19	Nusa Tenggara Timur	255	574	8.324	354	474	18.589	31	797	1.630	263	565	60.552	133	696	5.701
	Nusa Tenggara	281	695	9.706	449	527	28.535	32	943	1.790	273	702	66.747	149	827	7.209
20	Kalimantan Barat	21	425	1.033	412	35	64.431	15	431	1.721	0	446	0	22	424	1.739
21	Kalimantan Tengah	16	286	2.001	283	20	51.436	14	289	2.781	0	303	0	6	297	518
22	Kalimantan Selatan	33	357	954	353	37	45.957	1	389	0	0	390	0	10	380	680
23	Kalimantan Timur	37	311	1.154	299	52	50.760	9	338	612	0	347	0	17	329	5.511
	Kalimantan	107	1.379	5.142	1.347	144	212.584	39	1.447	5.114	0	1.486	0	55	1.430	8.448
24	Sulawesi Utara	226	277	6.660	218	285	11.703	18	485	2.090	23	480	6.210	133	370	6.542
25	Sulawesi Tengah	81	1.366	3.871	468	979	37.762	56	1.391	6.062	1.362	85	528.703	242	1.205	15.009
26	Sulawesi Selatan	345	616	14.694	597	365	66.502	34	927	3.807	2	959	1.036	97	864	8.161
27	Sulawesi Tenggara	68	378	1.557	235	211	9.641	6	440	98	115	331	46.173	87	359	3.349
28	Gorontalo	19	136	393	123	32	11.465	10	145	229	5	150	2.878	22	133	1.801
	Sulawesi	739	2.773	27.175	1.641	1.872	137.073	124	3.388	12.286	1.507	2.005	585.000	581	2.931	34.862
29	Maluku	28	154	1.213	60	122	2.903	2	179	366	11	171	1.755	122	60	4.550
30	Maluku Utara	12	189	503	91	110	2.736	6	195	113	27	174	3.427	118	83	6.337
	Maluku	40	343	1.716	151	232	5.639	8	374	479	38	345	5.182	240	143	10.887
31	Papua	181	489	8.085	227	443	12.867	19	651	1.239	222	448	40.385	128	548	7.632
	Indonesia	5.197	16.954	280.474	10.181	11.983	1.271.355	888	21.262	110.124	8.822	13.331	2.476.800	1.612	20.541	99.851

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

Tabel 3.15
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan
Tahun 2006 - 2007
(Status per 31 Desember 2006)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergenang								Rusak/Roboh/Hanyut							
						Pemukiman (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perikanan (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bang SDA (Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wilayah Barat		207	142	234	264.293	16.578	19.590	22	144	153	63.316	4.960	376	29.125	210	756	36	1	13.506	24.330	51
1	N A D	60	102	192	225.448	40	1.380	2	3	0	10.911	130	0	17.681	155	67	18	1	13.256	18.825	1
2	Sumatera Utara	48	11	34	15.921	52	2.890	7	13	150	740	500	60	1.175	4	0	1	0	0	5	50
3	Sumatera Barat	32	23	3	765	806	5.905	10	52	3	3.486	4.030	316	425	2	674	16	0	250	1.000	0
4	Sumatera Selatan	6	0	0	50	0	250	3	0	0	701	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
5	Riau	19	6	5	21.934	15.330	8.065	0	73	0	47.478	300	0	8.960	47	15	0	0	0	4.500	0
6	Kepulauan Riau	3	0	0	0	350	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jambi	6	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	674	2	0	0	0	0	0	0
8	Bengkulu	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	19	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	141	0	0	1	0	0	0	0
10	Bangka Belitung	1	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		391	6.777	716	546.779	7.520	66.837	89	1.313	12	95.913	1.200	7.110	620.066	3.273	185	135	52	5.225	14.590	3
11	DKI Jakarta	9	3	0	1.210	0	500	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	75	0
12	Banten	17	1	0	0	17	3.311	0	1	0	1.743	192	0	775	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Barat	77	511	162	44.973	2.972	12.962	39	6	1	48.250	0	5.150	2.761	21	7	8	0	0	480	3
14	Jawa Tengah	104	1.337	262	206.612	2.232	9.551	10	564	4	6.622	305	1.230	202.965	579	121	62	10	0	6.073	0
15	D.I.Y.	27	4.776	241	215.408	40	1.356	0	0	0	1.790	0	0	410.561	2.615	4	34	5	35	2.100	0
16	Jawa Timur	122	134	25	27.346	1.529	28.535	39	667	7	28.328	603	730	2.822	57	49	24	37	5.190	5.862	0
17	Kalimantan Timur	12	0	0	8.200	0	2.022	0	2	0	3.080	0	0	106	0	2	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	6	6	0	4.000	730	4.450	1	67	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	16	9	26	39.030	0	4.150	0	6	0	3.100	100	0	63	1	3	7	0	0	0	0
Wilayah Timur		242	384	190	90.283	945	23.589	210	39	2	62.858	10.109	530	8.348	108	350	57	24	75.389	15.085	3
21	Bali	5	1	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	25	10	0	8.989	200	2.827	13	12	1	30.220	211	330	4.428	31	308	19	8	51.972	0	3
23	NTT	24	14	0	772	0	2.562	33	0	0	5.035	47	0	152	0	4	1	10	600	0	0
24	Sulawesi Selatan	26	222	170	12.115	200	5.960	4	5	0	21.768	4.650	200	1.255	1	20	13	4	1.907	1.450	0
25	Sulawesi Tengah	15	0	0	3.400	45	1.200	0	1	0	470	4.700	0	420	0	0	0	0	2.410	0	0
26	Sulawesi Tenggara	9	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	189	3	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	9	0	1	8.000	500	3.723	0	0	0	0	101	0	0	53	1	5	0	0	0	0
28	Sulawesi Utara	31	33	15	48.043	0	5.526	23	21	0	4.965	0	0	1.425	12	16	18	2	18.500	13.335	0
29	Sulawesi Barat	3	0	0	0	0	300	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Maluku	53	3	2	4.400	0	191	2	0	0	400	0	0	284	1	0	1	0	0	0	0
31	Maluku Utara	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	108	7	1	0	0	0	0	0
32	Papua	23	98	2	4.364	0	700	5	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Irian Jaya Barat	7	3	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
Indonesia		840	7.303	1.140	901.355	25.043	110.016	321	1.496	167	222.086	16.269	8.016	657.539	3.591	1.291	228	77	94.120	54.005	57

Sumber : http://www.pu.go.id/infoStatistik/bencana/Lap_Bencb%20alam%20des06.xls

BAB IV

INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

4.1 Infrastruktur Sumber Daya Air

Air merupakan unsur utama bagi kehidupan di planet bumi ini serta bagian dari pembangunan berkelanjutan. Hal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Air seharusnya diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga terhadap pencemaran. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya air yang dimulai dari kebijakan pemerintah tentang air, seperti bagaimana menyediakan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sistem irigasi yang memiliki asas adil dan merata atau perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Ada tiga permasalahan air yaitu terlalu sedikit menimbulkan kekeringan, terlalu banyak menimbulkan banjir dan terlalu kotor menimbulkan pencemaran lingkungan. Sejalan dengan UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA, pengelolaan SDA harus melalui tiga aspek, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

Hingga akhir tahun 2007 tercatat tak kurang dari 7 juta hektar jaringan irigasi telah terbangun, termasuk 1,8 juta hektar jaringan irigasi rawa, 238 waduk dan 209 embung besar yang kesemuanya diarahkan kepada upaya pencapaian produksi beras sebesar 2 juta ton. Di Indonesia jaringan irigasi yang pasokan airnya dapat dikendalikan oleh waduk-waduk tersebut berkisar 10-11 persen. Artinya 90 persen lagi masih tergantung aliran di sungai. Berkaitan dengan itu perlu dibangun beberapa waduk besar lagi di tahun ini.

4.1.1 Sungai dan Wilayah Sungai

Sungai, termasuk anak-anak sungai dan sungai buatan, adalah alur atau tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu dan/ atau mata air sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai yaitu garis batas luar pengamanan sungai. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.

Daerah Pengaliran Sungai (DPS) di beberapa sungai mempunyai luas daerah tangkapan (catchment area), panjang dan lebar sungai, anak sungai, dimana airnya selalu ada dan mengalir sepanjang tahun. Ini merupakan suatu potensi sumber daya air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air antara lain : untuk air minum, irigasi, industri, penggelontoran dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Faktor kontribusi penyebab banjir adalah luas daerah pengaliran sungai, curah hujan, dan tata guna lahan. Tiga variabel ini berlaku pada daerah pengaliran sungai. Sedangkan besarnya aliran (debit) banjir di sungai dipengaruhi empat faktor : lebar, kedalaman air, jenis material di sungai, dan kemiringan memanjang sungai. Dari tujuh faktor itu, luas daerah pengaliran sungai dapat dikatakan relatif tetap. Enam faktor lainnya dapat berubah (hanya curah hujan yang bisa dikatakan faktor alam). Lima faktor lainnya -tata guna lahan, lebar sungai, kedalaman sungai, jenis material dan kemiringan sungai-dapat berubah akibat tindakan manusia. Pada Tabel 4.1 disajikan data sungai berdasarkan nama sungai di Indonesia yang sementara dapat terhimpun.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan penetapan wilayah sungai. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Permen PU No.11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, meliputi :

- (a) Wilayah Sungai Lintas Negara (Tabel 4.2)
- (b) Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Tabel 4.3)
- (c) Wilayah Sungai Strategis Nasional (Tabel 4.4)
- (d) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota (Tabel 4.5)
- (e) Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota (Tabel 4.6)

Penetapan Wilayah Sungai memerlukan data yang lengkap dan akurat tentang keberadaan daerah aliran sungai (DAS) dan/ atau wilayah sungai (WS) yang secara utuh berada di wilayah kabupaten/ kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Wilayah Sungai didasarkan pada pertimbangan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Efektivitas pengelolaan sumber daya air
- b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air
- c. Tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif

Untuk kriteria penetapan Wilayah Sungai strategis nasional yang disajikan pada Tabel 4.4 juga seharusnya memenuhi parameter sebagai berikut :

- a. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%
- b. Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk pada provinsi
- c. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional, yang meliputi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi

- d. Besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi

4.1.2 Danau

Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendali banjir (nilai ekologis), wisata olahraga air, seperti perahu dayung, kano, memancing (nilai ekonomi), habitat satwa liar (nilai edukatif), dan menambah keindahan kota (nilai estetis).

Pemanfaatan situ-situ (danau) sebagai sistem pengendalian banjir memang belum begitu besar. Sejauh ini pemanfaatan situ lebih banyak untuk keperluan pertanian, irigasi serta konservasi sumber daya air. Namun demikian sesuai dengan fungsinya, situ mampu memberikan kontribusi dalam pengendalian banjir. Tabel 4.7 menyebutkan bahwa jumlah danau lebih banyak dibandingkan dengan situ, yakni 927 banding 406. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki danau terbanyak, yaitu 555 buah dan provinsi DI Yogyakarta memiliki situ terbanyak, yakni 135 buah.

4.1.3 Rawa

Rawa juga merupakan sumber air permukaan yang sangat penting di Indonesia. Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (2007) menyebutkan bahwa luas rawa di Indonesia sebesar 33,4 juta ha atau 26,56 % dari total luas daratan. Dari jumlah tersebut, 20 juta ha (60%) diantaranya merupakan rawa pasang surut dan 13,4 juta ha (40%) rawa lebak. Data rawa di beberapa pulau di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.8. Dari data yang tersedia dalam tabel tersebut terlihat bahwa pulau yang

memiliki lahan rawa terluas di Indonesia adalah Pulau Papua dengan luas total rawa mendekati mencapai 5 juta ha yang berada di 84 lokasi. Sebagian besar rawa di Papua tergolong rawa lebak dan sebagian besar belum direklamasi. Di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sebagian besar lahan rawa telah di reklamasi.

Menurut jenisnya lahan rawa dibagi menjadi Rawa Pasang Surut (RPS) dan Rawa Non Pasang Surut (RNPS) atau rawa lebak. RNPS didefinisikan sebagai daerah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Tabel 4.9 menunjukkan data rawa di Indonesia, yang terdiri dari luas potensi (Ha), luas sudah reklamasi (Ha), dan luas belum reklamasi (Ha) untuk jenis rawa pasang surut dan rawa lebak. Sedangkan Tabel 4.10 menyajikan tentang pemanfaatan lahan rawa di Indonesia (Ha), yang terdiri dari sawah, kebun, tambak, lainnya, serta rawa yang belum dimanfaatkan (Ha). Adapun Tabel 4.11 menceritakan tentang detail daerah rawa di beberapa tempat di Indonesia, yang meliputi desa dan kecamatan dimana daerah rawa itu berada, jenis dan luas rencana rawa, dan fungsi irigasi dari rawa tersebut. Dari Tabel 4.11 terlihat, bahwa rawa jenis lebak yang paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan pasang surut.

4.1.4 Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri.

Adanya krisis air akibat kerusakan lingkungan, perlu suatu upaya untuk menjaga keberadaan/ ketersediaan sumber daya air tanah. Salah satunya

dengan memiliki suatu sistem monitoring penggunaan air tanah yang dapat divisualisasikan dalam data spasial dan atributnya. Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah yang di definisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Elemen cekungan air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah, jadi seakan-akan merupakan kebalikan dari air permukaan.

Secara umum, provinsi yang memiliki potensi air tanah tinggi (Tabel 4.12) adalah Jawa Tengah dengan memiliki lokasi air tanah di 13 kabupaten dengan kepadatan penduduk 989 per km². Debit pompa terbesar berada di kabupaten Blora, yakni 3.337,95 Lt/dt. Kenyataan ini menunjukkan bahwa air tanah lebih mudah mendapatkannya dari pada air PAM atau memperoleh air dari sumber lain, sehingga banyak orang lebih memilih menyedot air tanah. Akibatnya air tanah terancam kesinambungannya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan disinsentif bagi mereka yang mengambil air tanah, terutama air tanah dalam. Pelaksanaannya antara lain tiap sumur yang akan dipakai untuk mengambil air tanah harus ada ijin sehingga terdeteksi jenis serta debit pompa yang digunakan.

4.1.5 Irigasi

Program pembangunan irigasi terdiri dari beberapa kegiatan. Diantaranya adalah rehabilitasi prasarana air baku, pembangunan saluran air baku, pembangunan embung, pembangunan bendung karet/ waduk/ bendung. Jenis sarana air baku sendiri diantaranya adalah embung, mata air/ sungai, bendung/ bendungan, dan air tanah. Pemanfaatan air tanah untuk irigasi dilaksanakan secara selektif dan sedapat mungkin diupayakan memenuhi kriteria teknis maupun sosial ekonomis.

Rencana strategi irigasi (2005-2009) dibuat berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan luas areal tanam. Kebijakannya adalah memberi prioritas pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan secara optimum, rehabilitasi jaringan yang telah mengalami penurunan fungsi. Serta penyelesaian pembangunan jaringan irigasi agar berfungsi optimum (*full development*) dengan memperhatikan konsep pengelolaan sumber daya air yang komprehensif; terpadu dengan basis wilayah sungai, serta rencana tata ruang wilayah.

Pemerintah memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,5 juta hektar hingga 2009. Rehabilitasi ini sangat penting untuk mendukung program utama pemerintah di bidang ketahanan pangan, hemat energi, serta mengatasi kesulitan air baku.

Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota merupakan daerah irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah di luar irigasi rawa. Penetapan status daerah irigasi ini berdasarkan kriteria :

1. Daerah irigasi lintas negara merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara
2. Daerah irigasi lintas provinsi merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tapi masih dalam satu negara
3. Daerah irigasi lintas kabupaten/ kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/ kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi
4. Daerah irigasi pada satu kabupaten/ kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan, saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/ kota

Penetapan status daerah irigasi dimaksudkan untuk menegaskan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (Tabel 4.13.1), pemerintah provinsi (Tabel 4.13.2), dan pemerintah kabupaten/kota (Tabel 4.13.3) sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Sampai dengan tahun 2007 secara keseluruhan daerah irigasi yang terbangun di seluruh Indonesia meliputi luas potensial sekitar 7,4 juta Ha, dengan luas terbangun terdiri atas 6,8 juta Ha jaringan utama dan 6,6 juta Ha jaringan tersier (Tabel 4.14).

4.1.6 Bendungan/ Waduk

Bendungan adalah bangunan strategis. Hal ini disebabkan pembangunan dan pengelolaannya memerlukan teknologi tinggi, fungsi dan manfaat bendungan menyangkut masyarakat banyak (air minum, industri, pertanian, listrik), risiko yang besar apabila jebol, sehingga memerlukan pemeliharaan yang teliti. Dalam pengelolaan bendungan terus dilakukan *reservoir operation* dan monitoring setiap musimnya. Kedua hal tersebut bertujuan bagaimana mengoperasikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan air. Jika ketersediaan air karena curah hujan menurun maka pengeluarannya harus dihemat, sehingga ketersediaan air akan tetap terjaga. Untuk itu keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan bendungan ini sangat diperlukan.

Pembangunan bendungan tergantung dari topografi dari masing-masing daerah serta berapa besar air yang mengalir dalam skala tahunan. Data elevasi (ketinggian air) dan luas muka air waduk berdasarkan nama bendungan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.15. Sedangkan elevasi dan luas muka air waduk berdasarkan provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Waduk adalah tampungan buatan yang dibentuk akibat pembendungan aliran sungai. Peruntukkan waduk sebagai sumber air adalah untuk irigasi, PLTA, air minum, dan industri. Berdasarkan data dan informasi Direktorat Bina

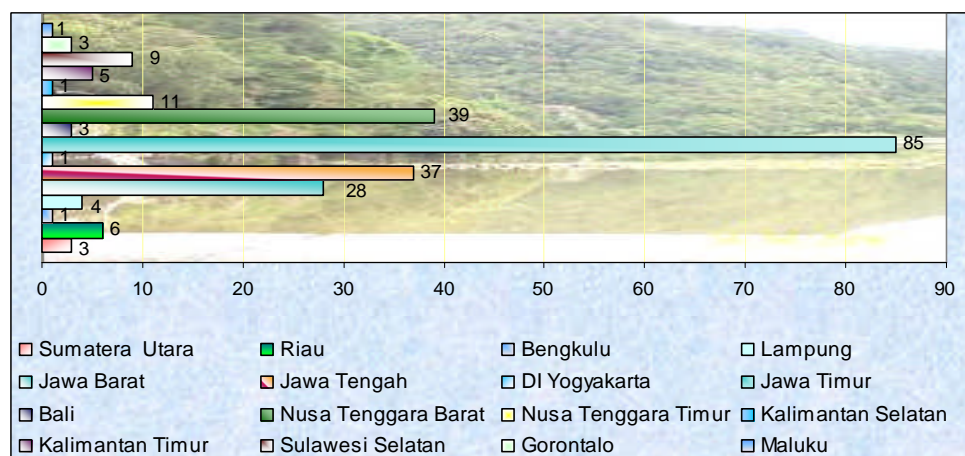
Pengelolaan Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (2007), kondisi waduk utama di Indonesia per 25 Juni 2007 dalam kondisi waspada (diantara elevasi pola normal dan pola kering) (lihat Tabel 4.17). Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa saat ini waduk-waduk di Indonesia baru mampu melayani 800 ribu hektar dari 6,7 juta hektar daerah irigasi yang ada di Indonesia, sisanya sebanyak 5,9 juta hektar persawahan masih mengandalkan air dari sungai.

Secara teknis ada tiga pola waduk, yaitu :

1. Waduk tahunan, dimana sepanjang tahun akan tetap terisi air dan pengaturannya tergantung musim tahunan, seperti Jatiluhur, Kedungombo
2. Waduk bulanan, adalah waduk-waduk kecil yang fungsinya hanya memperpanjang ketersediaan air dengan membangun embung-embung kecil ataru reservoir, dimana ketersediaan airnya bisa diperpanjang. Misalnya di daerah-daerah pertanian seperti di Gunung Kidul dan Lombok, dimana musim hujannya kurang lebih empat bulan
3. Waduk harian, untuk penyediaan air minum

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah bendungan yang tersebar di Indonesia, dimana provinsi Jawa Timur paling banyak memiliki bendungan, yaitu 85 buah.

Gambar 4.1 Jumlah Bendungan/ Waduk di Indonesia



Sumber : <http://sda.pu.go.id/bendungan.php>

4.1.7 Embung

Salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air di lahan sawah tadah hujan adalah dengan membangun kolam penampung air atau embung. Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau. Embung yang bisa menampung genangan air seluas diharapkan bisa menjaga kelestarian dan kelangsungan dari usia bendungan, ketersediaan / cadangan air untuk irigasi akan terpenuhi terutama pada musim kering dan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

Data embung yang sementara didapat terdapat di delapan provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hasil lengkap data embung ini dapat dilihat pada Tabel 4.18, yang berisi informasi tentang lokasi, nama, jenis penanganan, dan fisik embung tiap provinsi. Jumlah embung terbanyak di provinsi Nusa Tenggara Barat (84 embung) dan paling sedikit di provinsi Jawa Timur (2 embung). Sedangkan untuk embung potensi, informasi yang dapat disajikan adalah lokasi, jenis penanganan, serta proyeksi kapasitas tampung dari embung tersebut, yang dapat dilihat pada Tabel 4.19.

4.2 Infrastruktur Bina Marga

4.2.1 Jalan Tol

Disebabkan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan jalan baru, maka dibangun jalan tol yang pembangunan dan pemeliharaannya didanai oleh para pengguna jalan. Hal ini mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan tol dengan cara melibatkan partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sejak Pemerintah mengenakan kebijakan untuk menggali partisipasi sektor swasta

dalam pengembangan infrastruktur, maka pembangunan jalan tol di Indonesia mulai meningkat. Rencana pembuatan jalan tol di Indonesia sebesar 2.015,35 km (Tabel 4.20).

Pemerintah berkeinginan untuk mempercepat pembangunan jalan tol guna mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, pembangunan jalan tol akan dilakukan sebagian besar di Pulau Jawa dan beberapa ruas di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi dan Bali (Tabel 4.21A-Tabel 4.21D).

Sesuai Penetapan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 8 Juni 2006 dan Tanda Tangan PPJT tanggal 7 Juli 2006 tentang masa konsesi jalan tol maka Tabel 4.22 menunjukkan ruas jalan tol yang telah beroperasi. Disini perusahaan dan pengelola jalan tol yang beroperasi dibagi dua, yaitu dari PT. Jasa Marga dan PT. Jasa Marga dengan Badan Usaha yang lain.

Program percepatan pembangunan jalan tol dibagi menjadi dua, yaitu Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Non Trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa terdiri dari 13 ruas jalan tol dengan total panjang 763,24 km, sedangkan Jalan Tol Non Trans Jawa terdiri dari 19 ruas jalan tol sepanjang 335,84 km . Adapun data detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.23.1 dan Tabel 4.23.2.

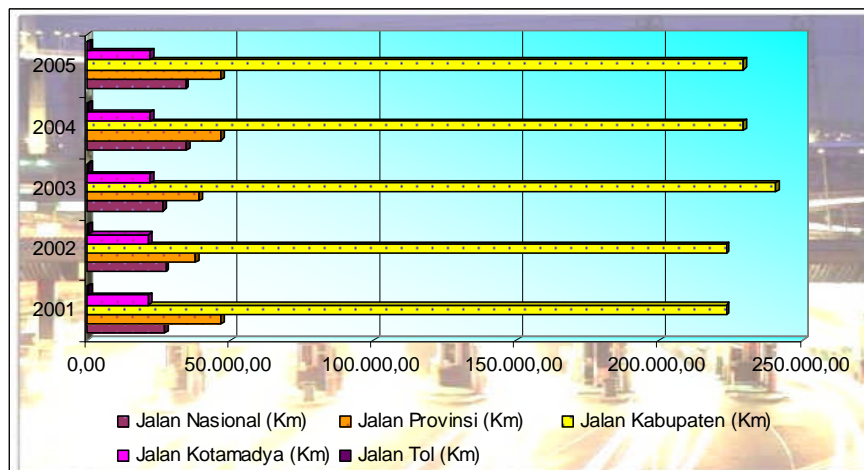
4.2.2 Jalan

Jalan adalah prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas bisa meningkatkan usaha pembangunan terutama dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2005 mencapai 377,9 ribu kilometer. Panjang jalan yang berada dibawah wewenang negara ada 34,6 ribu kilometer, di bawah wewenang Daerah Tingkat I ada 40,1 ribu kilometer dan dibawah wewenang Daerah Tingkat II sebanyak 303,2 ribu kilometer. Pada tahun tersebut, ternyata jalan yang diaspal sebesar 57,34 persen, tidak diaspal 39,45 persen dan 3,21 persen untuk lainnya dari total panjang jalan yang ada.

Perkembangan panjang jalan beserta jenis permukaan jalan disajikan pada Tabel 4.24 dan 4.25. Pada tahun 2004-2005 panjang jalan negara dan daerah tingkat I tidak mengalami perubahan, tetapi tidak demikian halnya dengan daerah tingkat II yang mengalami kenaikan. Untuk panjang jalan menurut kewenangan dimana jalan tol masuk didalamnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa Jalan Kabupaten tiap tahunnya menduduki tingkat tertinggi dibandingkan dengan yang lain.

Gambar 4.2 Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kewenangan Tahun 2001-2005

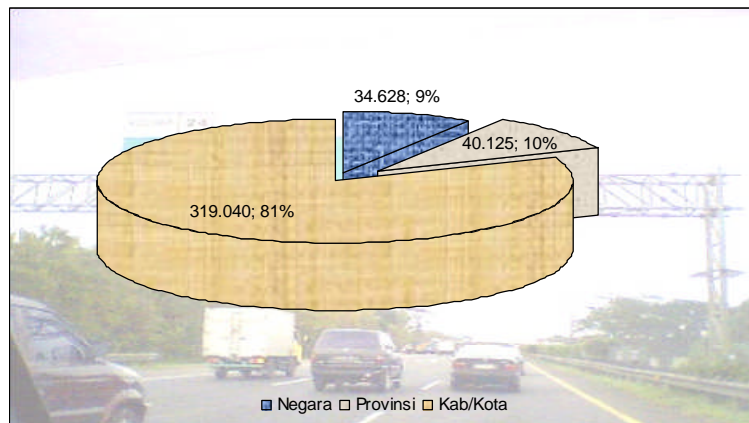


Sumber : <http://www.dephub.go.id/statistik/DATA/llaj.pdf>

Pada tahun 2006, panjang jalan di Indonesia mencapai 393.793 kilometer. Berdasarkan tingkat kewenangan pembinaan, jalan kabupaten / kotamadya masih merupakan bagian terbesar, yaitu 319.040 kilometer atau sekitar 81 persen dari total panjang jalan di Indonesia. Sedangkan untuk jalan negara dan

jalan provinsi masing-masing 34.628 kilometer dan 40.125 kilometer atau sebesar 9 persen dan 10 persen (Gambar 4.3).

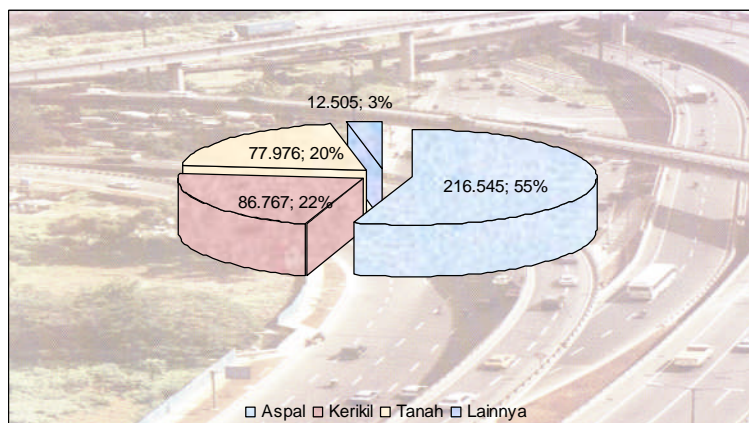
Gambar 4.3 Panjang Jalan di Indonesia Menurut Tingkat Kewenangan (Km;%) Tahun 2006



Sumber : Statistik Perhubungan, BPS, 2006

Dirinci menurut jenis permukaan, jalan beraspal selalu memiliki komposisi paling besar dibandingkan jenis permukaan yang lain, yaitu 55 persen (216.545 km) dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dengan jenis permukaan kerikil dan tanah masing-masing sebesar 22 persen (86.767 km) dan 20 persen (77.976 km). Proporsi terkecil dimiliki oleh jalan dengan jenis permukaan lainnya, yaitu 3 persen atau sekitar 12.505 km (Gambar 4.4).

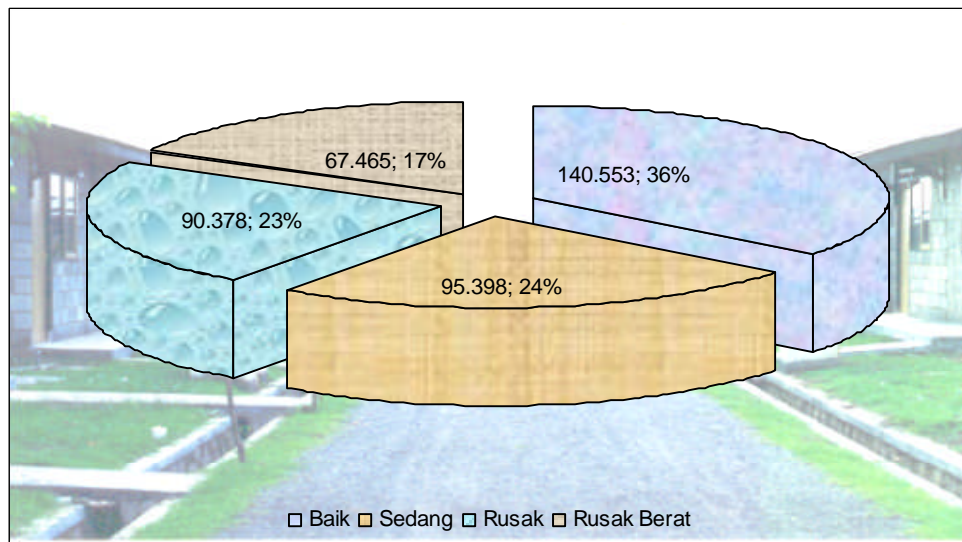
Gambar 4.4 Panjang Jalan di Indonesia Menurut Jenis Permukaan (Km;%) Tahun 2006



Sumber : Statistik Perhubungan, BPS, 2006

Selanjutnya jika dirinci menurut kondisi jalan, sekitar 36 persen (140.553 km) panjang jalan di Indonesia berada dalam kondisi baik, 24 persen (95.398 km) dalam kondisi sedang, 23 persen (90.378 km) dalam kondisi rusak dan 17 persen (67.465 km) dalam kondisi rusak berat (dapat dilihat di Gambar 4.5). Disini menunjukkan bahwa kondisi jalan baik masih lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat (40 persen).

**Gambar 4.5 Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kondisi Jalan (Km;%)
Tahun 2006**

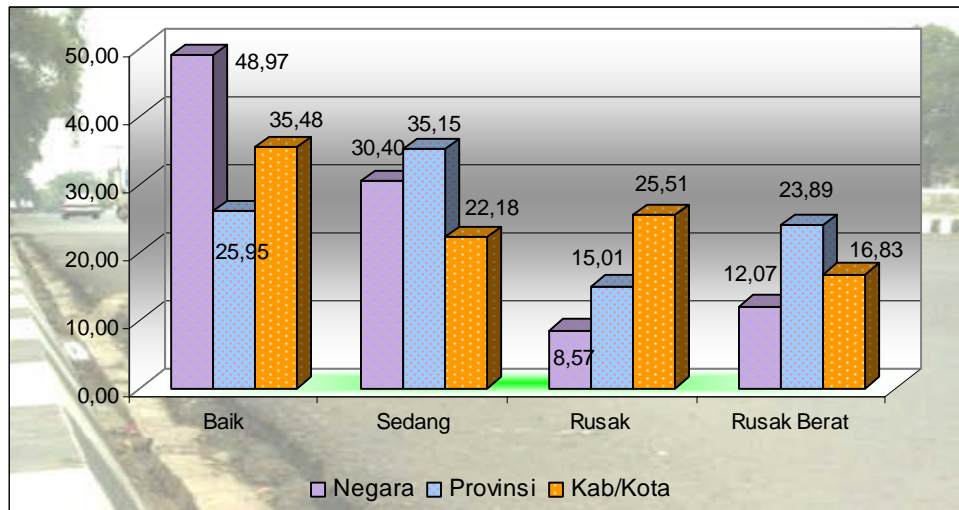


Sumber : Statistik Perhubungan, BPS, 2006

Dilihat menurut kewenangan, jalan negara dan provinsi secara umum berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya komposisi kondisi baik yang relatif besar dibandingkan kondisi yang lain (Gambar 4.6). Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa jalan negara yang memiliki kondisi baik mencapai 48,97 persen diikuti kemudian oleh kondisi sedang sebesar 30,40 persen, sedangkan sisanya sekitar 20 persen merupakan jalan rusak dan rusak berat. Untuk Jalan Provinsi, kondisi baik mencapai 25,95 persen diikuti kemudian oleh kondisi sedang sebesar 35,15 persen dan sisanya kondisi rusak dan rusak berat sebesar hampir 39 persen. Sedangkan untuk jalan kabupaten/kota, kondisi baik hanya 35,48 persen diikuti kemudian oleh kondisi sedang

sebesar 22,18 persen dan sisanya sekitar 42 persen berada pada kondisi rusak dan rusak berat.

Gambar 4.6 Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan (%) Tahun 2006



Sumber : Statistik Perhubungan, BPS, 2006

Pada Tabel 4.26 terdapat data panjang jalan trayek angkutan umum dan jumlah kendaraan angkutan umum di beberapa provinsi Indonesia tahun 2004-2005. Disini terlihat bahwa jumlah kendaraan angkutan umum hampir sama banyak dengan panjang jalan yang dilayani trayek. Dari rasio yang dihitung dengan perbandingan jalan dilayani trayek per kendaraan angkutan umum, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan angkutan umum lebih banyak dibandingkan dengan tersedianya jalan yang dilayani trayek. Akan tetapi ada satu provinsi, yaitu Kalimantan Selatan yang memiliki kendaraan angkutan umum lebih sedikit dibandingkan dengan tersedianya jalan, yang ditunjukkan dengan nilai rasio paling besar dari seluruh provinsi yang ada.

Untuk Tabel 4.27.1 disajikan data hasil survai panjang jalan nasional tahun 2007 dari SK Menteri dan dari IRMS untuk tiap provinsi di Indonesia. Bila Tabel 4.27.1 ini disandingkan dengan Tabel Jenis Kendaraan Bermotor Menurut Polda 2005 dari BPS, maka bisa memberikan nilai rasio panjang jalan dengan

jumlah kendaraan yang dapat dilihat di Tabel 4.27.2. Dari data rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan terlihat bahwa hampir seluruh provinsi nilai rasio nya dibawah 1, kecuali dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara serta Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut masih sedikit jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Nilai rasio terkecil terdapat di provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa makin padatnya jumlah kendaraan di jalan yang tidak diimbangi dengan panjang jalan yang tersedia.

Klasifikasi jalan nasional berdasarkan tipe perkerasan menunjukkan bahwa jalan beraspal memiliki prosentase sebesar 95,20% dan jalan non aspal hanya 4,80%. Beberapa provinsi sudah memiliki jalan beraspal semua di daerahnya. Hasil lengkap untuk masing-masing provinsi dapat dilihat di Tabel 4.28.

4.2.3 Jembatan

Jembatan merupakan salah satu prasarana perhubungan dan merupakan kesatuan sistem transportasi nasional yang terintegrasi untuk kelancaran transportasi barang dan jasa yang pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam mendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana Departemen Pekerjaan Umum (PU), khususnya jembatan masih akan terus dilanjutkan mengingat penyediaan prasarana jalan dan jembatan sangat penting dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

Dari rekapitulasi kondisi jembatan nasional menurut *Bridge Management System (BMS)*, maka jembatan di Indonesia secara umum yang masih dalam kondisi baik sekali ada sekitar 44,54% dan kondisi baik sebesar 24,03%. Sedangkan jembatan dalam kondisi rusak ringan sebesar 18,38%, rusak berat sebesar 7,33%. Adapun kondisi jembatan kritis ada sekitar 3,48% dan yang runtuh/ tidak ada jembatan hanya sebesar 2,25% (Tabel 4.29).

Pembangunan jembatan di Indonesia terbagi 5 dasa warsa. Pembangunan paling banyak berada pada dasa warsa keempat, yakni antara tahun 1990 - 2000, dimana pada saat itu mencapai 30,40% jumlah jembatan yang dibangun. Prosentase terkecil berada pada rentang diatas tahun 2000, karena baru ada 4,04% jumlah jembatan yang dibangun. Data selengkapnya terdapat pada Tabel 4.30.

4.3 Prasarana Cipta Karya

4.3.1 Penyediaan Air Minum

Ketersediaan air bersih yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006 estimasi jumlah perusahaan air bersih di Indonesia telah mencapai 491 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor tersebut, terlihat mengalami peningkatan dari 46.420 orang pada tahun 2005 menjadi 47.109 orang pada tahun 2006 atau naik sebesar 1,48 persen (Tabel 4.31).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bersih dan sehat, jumlah air bersih yang telah disalurkan kepada konsumen pada tahun 2006 sebanyak 2.333 juta meter kubik. Sedangkan air bersih yang telah disalurkan pada tahun sebelumnya sebanyak 2.169 juta meter kubik. Pada Tabel 4.31 disajikan perkembangan PAM selama lima tahun terakhir.

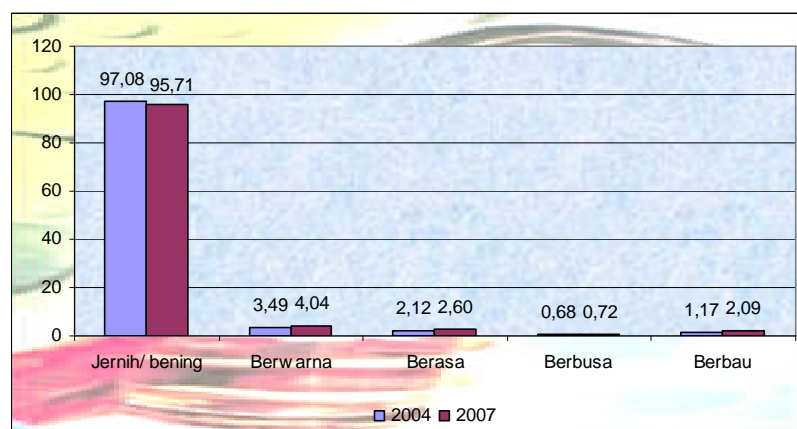
Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas dari air minum. Sumber air minum yang saat ini masih dianggap terbaik adalah air dalam kemasan, karena sifatnya yang higienis. Namun air dalam kemasan baru dikonsumsi oleh 7,18 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Secara nasional, persentase rumah tangga yang mengandung air leding meteran sebagai sumber air minum sebesar 12,36 persen sedangkan leding eceran sebesar 3,82 persen. (Tabel 4.32). Sebanyak lima provinsi yang paling banyak menggunakan air leding

sebagai sumber air minum, Kalimantan Timur (47,70%), Kalimantan Selatan (35,30%), Bali (34,86%), DKI Jakarta (34,26%), dan Kepulauan Riau (25,47%).

Di Pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) serta Sumatera, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum. Sedangkan di provinsi Kalimantan Barat lebih banyak rumah tangga yang menggunakan air hujan (41,62%), dan di Kalimantan Tengah mayoritas rumah tangga memakai air sungai sebagai sumber air minum (35,70%). Untuk provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur sebagian rumah tangga menggunakan mata air tak terlindung sebagai sumber air minum, yaitu masing-masing 22,61 persen dan 20,73 persen (Tabel 4.32).

Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa lebih dari 95% rumah tangga mengkonsumsi air minum dengan kualitas yang jernih/ bening pada tahun 2007, yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 (lebih dari 97%). Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum yang berwarna, berasa, berbusa ataupun berbau cukup kecil. Namun demikian dibandingkan tahun sebelumnya (2004), tahun 2007 telah mengalami kenaikan nilai presentase. Kondisi seperti ini perlu segera ditangani, agar di tahun mendatang kualitas air minum yang jernih lebih meningkat jumlah konsumsinya dan sebaliknya untuk kualitas air minum yang tidak jernih.

Gambar 4.7 Persentase Rumah tangga Menurut Kualitas Air Minum, 2004 dan 2007



Sumber : BPS, Statistik Perumahan dan Permukiman 2007

Penyuplaian air bersih ke pelanggan tergantung pada pasokan air bakunya. Tabel 4.33 menunjukkan Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) hingga tahun 2007, dimana kapasitas terpasangnya sebesar 135.044 L/dt dan kapasitas produksi sebesar 106.380 L/dt. Disini terlihat bahwa jumlah kapasitas terpasang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas produksi. Kapasitas terpasang dan produksi terbanyak berada di provinsi Jawa Timur, sedangkan paling sedikit di provinsi Maluku Utara. Untuk itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan air bersih ini dengan meningkatkan kapasitas produksi IPA yang biasa melayani pelanggan untuk memproduksi air bersih.

Kebutuhan air minum dalam kondisi saat ini sangat mendesak keberadaannya, sementara lokasinya tersebar di berbagai daerah dimana kebutuhan pelayanan tiap daerah bervariasi dengan kapasitas yang berbeda. Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum nasional melalui peningkatan kapasitas, dimana sasaran pelayanan air minum tersebut untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan. Kemajuan pencapaian peningkatan pelayanan air minum sampai dengan tahun 2007 telah mencapai 10.445 l/det (Tabel 4.34).

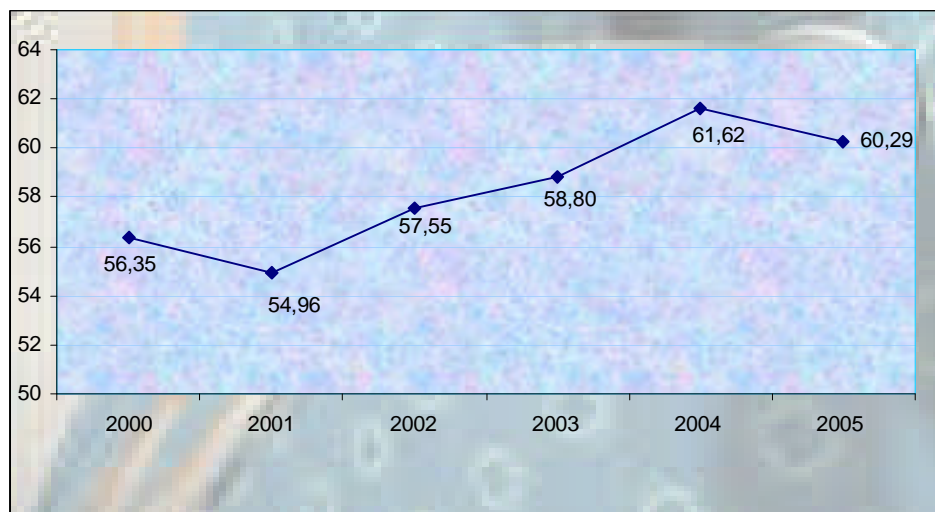
4.3.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Hasil Susenas pada tahun 2006 memberikan gambaran fasilitas rumah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, yaitu penggunaan tempat buang air besar. Sekitar 60,38 persen rumahtangga memiliki tempat buang air besar sendiri. Tetapi, satu hal yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah masih ada sekitar 19,67 persen rumahtangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar (Tabel 4.35).

Tempat buang air besar merupakan salah satu fasilitas sanitasi yang harus ada dalam satu rumahtangga. Penggunaan fasilitas tersebut seyogyanya hanya diperuntukkan anggota rumahtangga agar bisa selalu terjaga kebersihannya.

Berdasarkan Susenas tahun 2005, ada sebanyak 39,71 persen rumahtangga yang belum mempunyai fasilitas buang air besar. Presentase rumahtangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri pada tahun 2005 sedikit turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Gambar 4.8)

Gambar 4.8 Persentase Rumahtangga Menggunakan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri Menurut Tipe Daerah, 2000-2005



Sumber : BPS, Statistik Perumahan 2006

Untuk lokasi IPAL hingga tahun 2007 hanya beberapa provinsi yang baru terkumpul (Tabel 4.36), dan kapasitas pengolahan Jawa Barat yang paling besar (261.500 M³/ hari). Untuk Air limbah, komponen-komponen yang dibangun/perbaiki yaitu IPLT dan IPAL, truck tinja, MCK, jaga/ jamlah, dan septic tank komunal. Pembuatan IPLT dan IPAL sangat dibutuhkan untuk pemrosesan air limbah. Saat ini baru sekitar sepuluh kota di Indonesia yang melakukan pengolahan air limbah secara on site (diolah dalam satu tempat) melalui sistem perpipaan.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai kota banyak yang tidak berfungsi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu akses dan kualitas pengolahan yang rendah, kelembagaan yang belum efektif termasuk belum lengkapnya perangkat perundang-undangan yang ada, terbatasnya

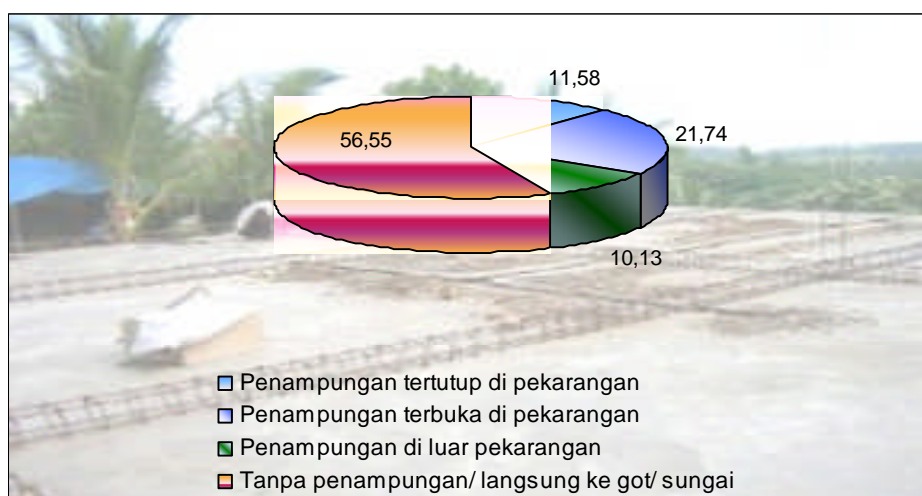
kapasitas pendanaan pembangunan di daerah, serta rendahnya peran serta masyarakat dan swasta.

Seperti halnya IPAL, maka lokasi IPLT hingga tahun 2007 hanya beberapa provinsi yang baru terkumpul. Sedangkan kapasitas pengolahan lokasi IPLT paling besar hingga tahun 2007 adalah provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 700 M³/hari (Tabel 4.37).

Pada Tabel 4.38 menunjukkan, bahwa tangki septik (49,13%) merupakan tempat penampungan akhir tinja yang paling banyak digunakan rumah tangga. Namun di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampung sebagian besar penduduknya memilih lobang tanah sebagai tempat penampungan akhir tinja (48,20% dan 46,39%).

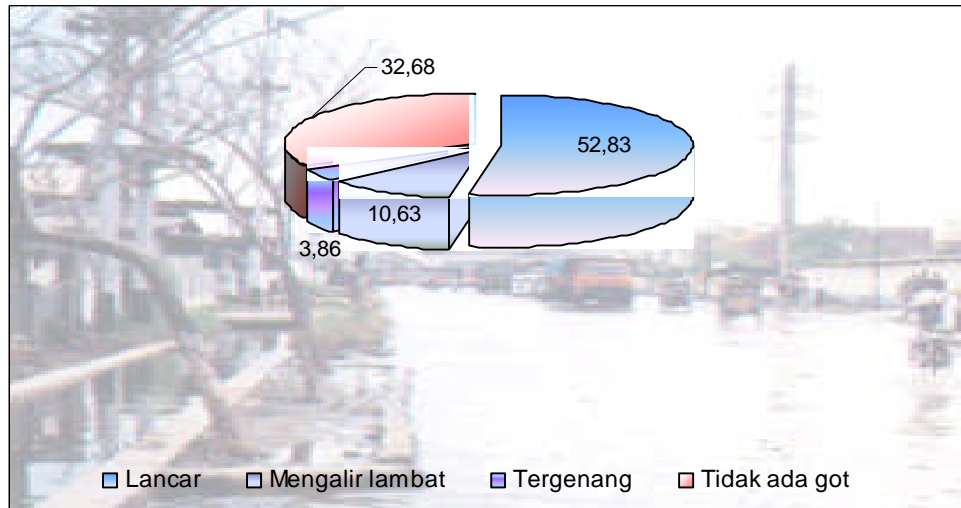
Dari Gambar 4.9 terlihat bahwa sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki tempat penampungan limbah/ mandi/ dapur/ cuci atau air limbah rumah tangga langsung dibuang ke got/ sungai. Persentase penduduk yang membuang air limbahnya ke tempat penampungan tertutup, hanya sebesar 11,58 persen. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tempat penampungan air limbah masih relatif kecil.

Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Air Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci, Tahun 2007



Sumber : BPS, Statistik Perumahan dan Permukiman 2007

Gambar 4.10 Persentase Rumah Tangga menurut Keadaan Air Got/ Selokan Di Sekitar Rumah, Tahun 2007



Sumber : BPS, Statistik Perumahan dan Permukiman 2007

Keadaan air got/ selokan yang ada di sekitar rumah perlu diperhatikan, terutama oleh mereka yang membuang air limbahnya langsung ke got. Gambar 4.10 memperlihatkan persentase rumah tangga yang keadaan air got di sekitar rumahnya mengalir dengan lancar, yaitu 52,83 persen, sekitar 10,63 persen airnya mengalir sangat lambat, air got/ selokannya tergenang sebesar 3,86 persen, dan 32,68 persen tidak memiliki got/ selokan. Kondisi air got/ selokan yang mengalir sangat lambat perlu mendapat perhatian karena menyebabkan bau yang tidak enak dan tempat berkembang biak berbagai sumber penyakit.

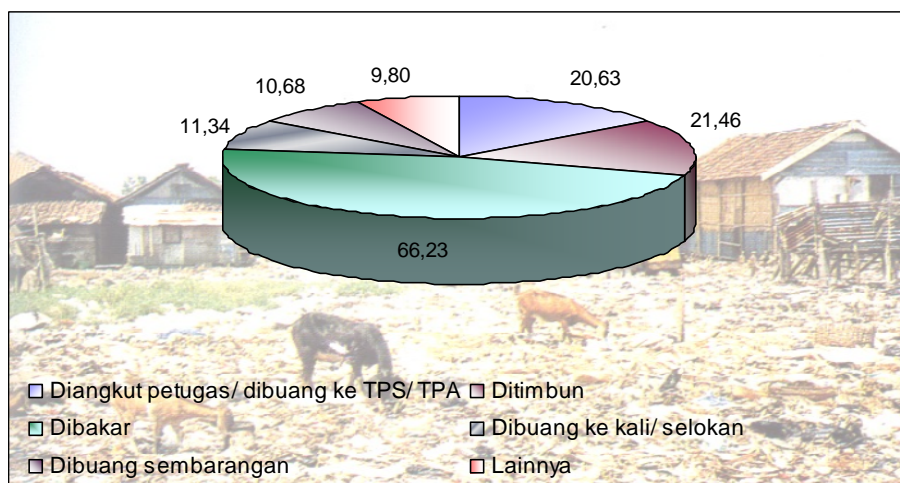
Pengurangan sampah pada sumbernya dapat mengurangi beban sampah yang masuk dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu masalah utama pengelolaan persampahan di Indonesia adalah bertambahnya timbunan sampah akibat jumlah penduduk yang kian bertambah. Kegiatan penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang (reuse, reduce, recycle atau 3R) merupakan upaya pengurangan jumlah sampah mulai dari sumbernya. Tabel 4.39 menunjukkan lokasi TPA hingga tahun 2007 dari beberapa provinsi di Indonesia. Dari provinsi-provinsi yang ada, maka provinsi yang mempunyai lokasi TPA terluas adalah Jawa Barat (445,90 Ha). Untuk selanjutnya, solusi

yang akan dilakukan Pemda Jawa Barat adalah dengan menyiapkan calon lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan persyaratan SNI.

Pada tahun 2005 diinformasikan, bahwa jenis tempat membuang sampah sebagian besar keluarga di Indonesia, terdiri atas tempat sampah kemudian diangkut, dalam lubang dibakar, sungai, dan lainnya. Dari Tabel 4.40 terlihat, bahwa tempat membuang sampah dalam lubang dibakar yang paling banyak dipilih oleh sebagian besar keluarga, yakni sebesar 45,054 desa. Sedangkan warga yang membuang sampah di sungai paling sedikit, yaitu sejumlah 4,204 desa. Di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada yang membuang sampah di sungai dan tempat lainnya.

Salah satu perilaku hidup sehat yang mempengaruhi kebersihan lingkungan adalah cara pembuangan sampah. Gambar 4.11 memperlihatkan sebagian besar rumah tangga membuang sampah dengan cara membakarnya (66,23%), kemudian menimbun sampah (21,46%), serta diangkut oleh petugas (20,63%). Walaupun demikian yang membuang sampah dengan cara yang salah cukup besar seperti membuang sampah ke kali (11,34%), dibuang sembarangan (10,68%) dan lainnya (9,80%).

Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga menurut Cara Pembuangan Sampah, Tahun 2007



Sumber : BPS, Statistik Perumahan dan Permukiman 2007

Penyediaan prasarana serta sarana permukiman bagi kawasan rumah sederhana sehat (RSH) dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah, sehingga diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah punya kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Dalam Tabel 4.41 terlihat hanya Sulawesi Barat belum mendapat dukungan RSH. Peremajaan kawasan (*urban renewal*) menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan potensi kawasan permukiman di perkotaan. Dari tahun 2005-2007 *urban renewal* di Indonesia baru ada 7 kawasan (Tabel 4.38). Penyediaan prasarana dan sarana permukiman di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil dilaksanakan pada pulau kecil yang didiami penduduk dengan prasarana dan sarana terbatas. Pengembangan permukiman di pulau kecil paling banyak terdapat di Sulawesi Tenggara, yaitu ada 11 kawasan (Tabel 4.41). Pengembangan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perbatasan dilaksanakan pada kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik berupa daratan maupun pulau-pulau, sesuai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Perbatasan Antar Negara. Pengembangan permukiman di daerah perbatasan sudah mencapai 91 kawasan, dimana yang paling besar adalah Sulawesi Utara, yaitu 20 kawasan (Tabel 4.41).

4.4 Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI (Penjelasan Pasal 20 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2007). Dengan demikian penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi rencana tata ruang harus melibatkan semua pelaku

pembangunan pada setiap tahap pembangunan dan tercipta sinergis antara pengembangan wilayah dan penataan ruang.

Penataan ruang diharapkan :

- i. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- ii. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;
- iii. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem, yang selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas ruang.

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan :

❖ Perencanaan Tata Ruang

Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR

❖ Pemanfaatan Ruang

Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya

❖ Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi

Pengembangan wilayah adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan dalam wadah NKRI. Pengembangan wilayah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pembangunan wilayah perlu mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang, didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya, dan dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Pengembangan wilayah dilakukan dalam payung "penataan ruang" untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi :

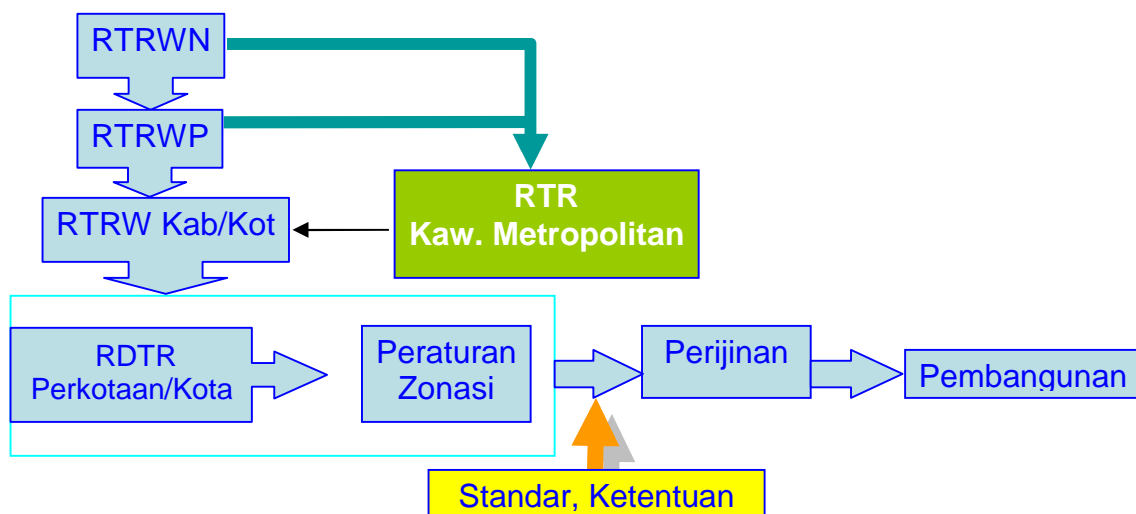
- i. Infrastruktur jalan sebagai prasarana pembentuk struktur ruang, infrastruktur sumber daya air sebagai prasarana pendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun pengendalian daya rusak air
- ii. Infrastruktur cipta karya pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang mencakup pelayanan transportasi lokal, pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, termasuk penanganan persampahan, penyediaan drainase untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir, penanganan air limbah domestik serta penataan ruang dalam menata struktur ruang dan pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional adalah perencanaan makro strategis Nasional yang menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketataruangan yang memuat antara lain infrastruktur nasional seperti jalan nasional, pelabuhan samudera maupun bandara internasional. Adapun RTRW Provinsi merupakan perencanaan regional yang menjabarkan RTRWN dalam konteks ruang wilayah Provinsi secara lebih rinci termasuk memuat rencana pengembangan infrastruktur jalan provinsi, terminal maupun pelabuhan regional. RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang

skala kabupaten/kota dengan muatan kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik pengembangan kawasan yang ada.

Adanya pengaruh pengembangan jalan tol sesuai siklus pembangunan jalan tol yang dimulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan paska konstruksi terhadap pemanfaatan ruang yang ditimbulkan, sedikitnya mencakup Pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, Pengaruh terhadap ekonomi, Pengaruh terhadap pembiayaan, Pengaruh terhadap perencanaan, Pengaruh preferensi masyarakat. Berikut adalah gambar Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Gambar 4.12 Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah



Sumber : Sosialisasi UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), maka diterbitkan Kepres No.120 tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI). Sebagai tindak lanjut dikeluarkan Kepres No.89 tahun 1996 yang lalu disempurnakan dengan Kepres No.9 tahun 1998 tentang pembentukan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Berdasarkan Kepres tersebut, KAPET meliputi beberapa Kawasan, antara lain :

1. Sanggau (Kalbar)
2. Batulicin (Kalsel)
3. Kakab (Kalteng)
4. Sasamba (Kaltim)
5. Manado – Bitung (Sulut)
6. Batui (Sulteng)
7. Pare-pare (Sulsel)
8. Bukari (Sultra)
9. Seram (Maluku)
10. Biak (Papua)
11. Bima (NTB)
12. Mbay (NTT)
13. Sabang (NAD)

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi beberapa kemungkinan kawasan:

- Kawasan Lindung (hutan lindung, lindung erosi, lindung longsor, lindung geologi, lindung resapan, lindung fauna, dsb)
- Kawasan Permukiman (desa, desa-kota, kota)
- Kawasan Pertambangan (tambang permukaan, bawah permukaan, logam, non logam, bahan galian, dsb)
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkebunan (pertanian, peternakan, dsb)
- Kawasan Sumber Daya Laut dan Pantai
- Kawasan Sarana dan Prasarana (bendungan, pembangkit listrik, jalan dan transportasi, air baku, dan tempat pembuangan sampah, dll)
- Kawasan Pariwisata (wisata alam, wisata agro, wisata pertambangan, dan industri, wisata bahari, wisata geologi, wisata budaya, wisata sejarah, dsb)

Untuk kawasan perbatasan laut, provinsi Irian Jaya Barat, Papua, dan Maluku Utara berdekatan dengan negara Palau. Provinsi Maluku dan NTT lebih ke Timor Leste, selain itu NTT juga berdekatan dengan Australia.

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Kawasan andalan merupakan kawasan yang mempunyai sejumlah sektor unggulan potensi untuk dikembangkan. Sektor-sektor tersebut berupa agroindustri, industri pertambangan, peternakan dan perikanan atau industri pariwisata. Dalam kawasan pengembangan baru di provinsi NTT, terdapat kawasan cepat tumbuh, yang meliputi :

- a) Pantai Utara Mumere (Kab. Sikka)
- b) Taman Wisata Danau Kalimutu (Kab. Ende)
- c) Zona Industri Maumere (Kab. Sikka)
- d) Zona Industri Kupang (Kab. Kupang Barat)
- e) Perairan Laut dan Kota Labuhan Bajo (Kab. Manggarai)
- f) Dataran Rendah Lasiana (Kab. Kupang)

Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) merupakan kawasan strategis nasional dan akan dikembangkan tahap awal tiga daerah yakni Batam, Bintan, dan Karimun. Batam, Bintan, dan Karimun memiliki keunggulan karena letaknya yang strategis berada di alur laut kepulauan Indonesia yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka, sehingga dengan diberi dukungan infrastruktur sedikit saja sudah bisa dikembangkan.

Dalam RUU Penataan Ruang yang tengah dibahas KEKI dimasukkan sebagai kawasan strategis nasional yang ditetapkan karena memiliki sektor unggulan, kesiapan infrastruktur serta tersedianya sumber daya manusia. Pada dasarnya RUU Penataan Ruang mendukung potensi-potensi yang dimiliki daerah seperti

adanya sektor unggulan untuk terus dikembangkan. Hal tersebut salah satunya direalisasikan melalui penetapan kawasan andalan.

Keberadaan KEKI diharapkan mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan investasi serta dapat menjadi pendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. Pengembangan KEKI merupakan upaya peningkatan daya saing Indonesia, dimana sebelumnya pemerintah juga mempunyai 13 lokasi Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Adapun KEKI ini meliputi daerah-daerah seperti :

1. Banda Aceh
2. Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang)
3. Duri – Dumai
4. Batam – Tanjung Pinang
5. Bojonegara – Merak – Cilegon
6. Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbang Kertasusila)
7. Pontianak
8. Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam (Bonsamtebajam)
9. Manado – Bitung
10. Makasar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Maminasata)
11. Ternate – Tidore
12. Sorong

Timbulnya Kerjasama Sub-regional (KESR) sangat erat sekali kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi dari masing-masing negara yang bersifat "*komplementaritas*" untuk mempercepat arus masuk investasi dengan kekuatan pendorong utamanya adalah sektor swasta dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor. Komplementaritas pada dasarnya adalah saling melengkapi apa yang kita miliki kita berikan kepada negara lain, demikian juga yang kita butuhkan kita dapatkan dari negara lain, namun

demikian dalam komplementaritas juga terkandung kompetisi bebas. Dalam kaitan ini pemerintah masing-masing negara berlaku sebagai fasilitator.

Pada tahun 1994 dibentuk kawasan sub-regional Indonesia, *Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, tahun 1995 dibentuk kawasan sub-regional Indonesia, *Malaysia, Singapore Growth Triangle (IMS-GT)*, tahun 1996 dibentuk kawasan pengembangan sub-regional *Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*, dan tahun 1997 dibentuk kawasan pengembangan sub-regional *Australia, Indonesia Development Area (AIDA)*.

Kerjasama Ekonomi Sub Regional di Wilayah IV (Kawasan Pengembangan Baru) sebagai berikut :

1. BIMP-EAGA :

Brunei Darussalam

Indonesia: Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sulawesi, Provinsi Maluku dan Papua

Malaysia : Negara Bagian Serawak dan Sabah

Philipina : Provinsi Mindanao terdiri dari Region IX Western Mindanao (3 provinsi), Region X Northern Mindanao (4 provinsi), Region XI Southern Mindanao (6 provinsi), Region XII Central Mindanao (5 provinsi), Autonomous Region in Muslim Mindao/ ARMM (4 provinsi) dan Caraga (4 provinsi) serta Provinsi (Pulau) Palawan

2. AIDA :

Australia

Indonesia: Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sulawesi

Tabel : 4.1
Data Sungai Berdasarkan Nama Sungai di Indonesia

Nama Sungai	Luas DPS (km²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m³/det)
1	2	3	4	5	6	7
KR. BARO/KR. BEURABO	426	51	100	8	0,0126	162
KR. MEURAKSA	71,9	12	17	7	17	0,0017
KR. JAMBU AYE	5405	265,5	60	192	0,0008	1.008
S. BABALAN	164,9	254	52	2	0,0047	176
S. SERAPU-S.WAMPU	5930,2	127	73	306	0,0356	807
S. BELAWAN	894	77	52	29	0,0128	317
S. DELI	353,2	74	53	20	0,0193	48
S. PERCUT	278	70	45	9	0,025	103,3
S. ULAR	1030	86	19	67	0,0178	600
S. ASAHAN	3741,1	147	230	92	0,0084	122
S. PANAI	21373	219,2	73	217	0,005	640
A.HARSIK	12.1	3.6	7	1	0.0072	1
S.KAMPAR	23746	496.1	174	639	0.0024	1.189
BT.PASAMAN	1533.3	70	182	58	0.0283	1.148
S.BATANG HARI	43424	746.5	295	1308	0.0026	1.792
S.MUSI	56692	622	325	2178	0.0024	5.754
W.SEKAMPUNG	4761.3	309.5	40	304	0.0037	631
CISADANE	1420.78	144	50	405	0.0292	919
ANGKE	628.08	14	20	40	0.0029	581
SUNTER	193.8	43.8	15	2	0.0026	463
CAKUNG	231.48	39.8	15	13	0.0018	441
CIDAMAR	267.21	33	30	52	0.04187	402
CIPANDAK	184.8	42.4	25	65	0.0472	456
CIUJUNG	156.2	29.2	25	73	0.02	378
CIWADUL	4.52	4.8	10	3	0.0156	153
CICADAS	11.7	6	15	3	0.0125	171
CISADEA	337.48	48	30	150	0.0319	480
CISERANG	105.2	22.6	30	44	0.0111	333
CIDUKU	18.16	7.7	10	11	0.0123	194
CITAPEAN	10.98	7.3	10	4	0.0082	198
CISOKAN	209.86	50.3	25	120	0.0092	496
CIBUNI	1397.8	111.2	125	585	0.0162	738
CIKASO	906.06	72.4	30	368	0.0093	596
CIKARANG BOLONG	19.36	9.2	10	7	0.0109	212
CIPAMARANGAN	25.36	10.7	10	16	0.014	229
CIKUTAMARA	6.94	6.1	10	1	0.0245	173
CIKARANG	188.18	44.2	40	54	0.0158	465
CIKADEHAN	11.64	7.2	20	3	0.0104	188
CIPANARIKAN	36.24	20.6	15	12	0.0097	318
CITIREM	17.62	12.2	10	9	0.0123	244
CIBUAYA	9.56	11.9	5	2	0.0084	241
CIBULAKAN	8.3	8.3	10	5	0.0151	202
CIKEPUH	8	6.5	10	7	0.0231	178
CIBATUNUNGGAL	9.9	6.7	10	6	0.0224	181

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
CILETUH	155.58	47.3	50	71	0.0159	481
CIMARINJANG	33.5	21.8	10	6	0.0148	327
CISAAR	13.08	5	5	2	0.08	157
CIHAUR	17.26	7.2	5	2	0.0788	212
CISEUREUH	17.5	13.1	10	4	0.0611	253
CIBUTUN	7.48	5.7	10	4	0.0153	167
CIMANDIRI	1768.48	8.6	50	504	0.0112	114
CITEPUS	46.06	17.6	10	22	0.0795	294
CISAKANAYANA	38.16	16.5	15	13	0.0909	284
CIMAJA	66.96	20.4	15	33	0.0809	316
CISOLOK	44.2	13.6	15	4	0.0735	258
CIBARENO	218.74	41.6	30	58	0.0348	451
CITARATE	14.02	7.1	5	1	0.0352	187
CISAWANG	58.3	31.5	5	7	0.027	393
CIASEMMLEUTIK	2.86	3.5	5	2	0.05	131
CIPAMUBULAN	22.3	9.1	5	5	0.0247	211
CIMANDUR	319.68	57.8	15	96	0.0406	532
CISIIH	138.78	32.9	35	48	0.022	402
CIMANDIRI	13.6	12	5	5	0.025	243
CIHARA	173.18	41.2	20	56	0.0212	449
CISENDEKAN	5.1	4	5	2	0.0375	140
CIPAGER	68.14	21.5	20	19	0.0221	325
CIPRUNG CIUNGSARI	130.08	31.5	15	25	0.0127	393
CIBALIUNG	359.26	51.4	15	125	0.0044	502
CIPEUNDEUY	23.1	11.5	10	9	0.0065	237
CISUREN	28.38	10.4	10	13	0.0072	226
CITELUK	110.94	21.1	20	54	0.0083	322
CIPATUJAH	36.16	19.6	20	14	0.0255	310
CIHANDAYAN	39.48	18.1	10	7	0.0262	198
CIJERUK	8.82	13	10	3	0.0365	252
CIKALAJETAN	13.38	10.5	10	3	0.0238	227
CIBANDAWATI	25.88	20.7	10	9	0.0013	318
CIKEUSIK	17.2	13.2	10	6	0.0019	254
CITENDEHAN	8.74	6.8	10	1	0.0074	183
CIHERANG	10.98	4.8	10	3	0.0521	153
CICUKANGGALIH	696	9	5	2	0.0056	210
CICAWANG	12.38	9.1	10	4	0.0275	211
CILOMANJAYA	6.12	8	5	2	0.0594	198
CISAAT	5.5	3.5	10	1	0.1143	131
CIPANGGEHAUR	3.26	4.5	5	1	0.0556	148
CISIIH	21.68	14	10	6	0.0179	162
CIRALANG	66.38	21.5	15	22	0.0233	235
CITARUM	6080.8	268.6	75	2235	0.0068	1.131
CILESUNG	115.7	36.5	15	10	0.0006	422
CIJALU	454.44	43	25	57	0.0022	459
JATI	330.08	76.1	10	71	0.0066	610
CILAMAYA	329.8	81.6	25	96	0.0184	632

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
BLANAKAN	64.62	15.5	10	6	0.0013	275
CIASEM	584.8	89.8	40	167	0.01	663
BANTARGEDE	72.62	12	10	2	0.0007	242
CIPUNEGARA	1277.78	148.7	50	504	0.0104	498
CILUNCAT	179.62	41.4	15	5	0.0017	450
CITEMPEL	1150.2	79.1	20	67	0.0053	618
CIMANUK	3557.1	258.4	60	774	0.0059	1.125
PONDOK	144.14	48.1	10	9	0.0045	485
CIWARINGIN	182.84	24.4	10	26	0.001	486
BADUGILA	105.04	28	10	14	0.0018	356
JAMBLANG	95.86	33	10	16	0.022	402
GODONG	70.68	28.5	10	16	0.014	373
GESIK	73.18	14	30	12	0.0208	432
KEDUNG BINU	14.3	16.5	10	1	0.0182	284
SIWILIWIL	28.56	16.1	10	1	0.0186	288
JAGA	62.3	18.6	40	18	0.0226	301
JAGAPATI	19.38	14.5	10	3	0.0138	266
CISILA	6.46	5.2	10	1	0.0096	159
CIKINGKIRAN	7.82	12.5	10	1	0.013	247
KANCI	42.4	17.5	10	8	0.0229	292
CIBAGO	33.5	16	10	2	0.0063	280
CIMANIS	199.6	36.8	10	48	0.0163	424
CIJURANG REJO	89.12	81.6	10	5	0.0095	325
S.KALAENA	1977	137	50	135	0.0102	442
CIBERES	89.9	86.5	20	17	0.0068	422
CISANGGARUNG	834.3	103.6	80	244	0.0077	712
CIKABUYUTAN	208.74	51.53	24	53	0.0194	502.54
BABAKAN	100.76	52	51	34	0.0186	504.78
CIJULANG	229.8	48.6	30	68	0.0093	488
BANTAR PANJANG	23.64	10	10	6	0.01	221
CIPEUTEUY	13.04	6	15	2	0.0167	2
CIMEDANG	703.8	85.2	50	238	0.007	646
CIWULAN	904.76	119.3	80	404	0.0208	765
CILANGKA	409.36	55.2	30	103	0.0145	510
CIPATIREMAN	6.32	5.5	15	4	0.0091	164
CIPATUJAH	242.46	33.4	40	31	0.024	405
CIPANYERANG	44.16	17.3	15	25	0.0262	290
CIPANGUKURAN	67.28	17.3	30	23	0.0376	291
CIKAINGAN	275.28	53.9	55	176	0.0417	514
CIPANGISIKAN	11.38	9.5	5	12	0.0368	216
CIJERUK	6.3	5.4	5	2	0.0371	163
CIBABALUKAN	83.45	24.3	30	41	0.0309	345
CIMERAK	27.8	16.3	10	12	0.0383	283
CIMANGGIRI	154.88	34.7	35	99	0.0375	412
CIBERA	25.06	15.6	10	17	0.0335	276
CIKAWUNG	13.24	9.5	5	6	0.0474	216
CIAWI	20.86	14.8	10	12	0.027	260

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
CIKASO	126.34	25.2	40	44	0.0367	359
CILANTEURENAN	27	16.5	10	4	0.0364	284
CIKARANG	11.6	8.2	10	4	0.0487	200
CIPASARANGAN	52.34	22.5	20	13	0.0533	332
CISEUNDEUKAN	4	5.4	10	2	0.0463	162
CIMANGKE	40.46	17.3	20	18	0.0202	291
CIDADAP	8.6	6	10	2	0.05	171
CICADAS	11.28	9.5	10	5	0.0442	215
CITEUREUP	7.6	6	10	4	0.0182	171
CIMARI	25.9	14.3	10	13	0.0559	164
CICALENGKA	10.3	7.6	10	5	0.046	193
CIKANDANG	439.4	49.3	15	224	0.0446	491
CIJAYANG	10.2	7.2	10	3	0.0416	188
CILANGGEULEUK	15.6	10.2	20	7	0.0441	224
CISEUREUK	9.8	7	10	4	0.05	185
CIPARAS	7.8	6	10	1	0.0333	171
CICULA	3.6	5	10	3	0.075	157
CIANDA	20.84	11.8	15	10	0.0056	240
CIKASO	5.64	3.6	10	6	0.0556	133
CIPANJANG	32.1	21.2	10	9	0.0547	322
CILUDEUNG	19.08	10	10	8	0.055	221
S.BALE ASE	1350	105	35	73	0.0162	442
CILAYU	120.7	19.9	30	42	0.0475	383
CIKAWUNG	7.8	6	10	3	0.05	171
CIAWI	29.6	18	10	9	0.0486	197
CILAKI	418.43	54.3	30	159	0.0313	506
CIBEUREUM	391.66	40	40	100	0.04	442
CITANDUY	2850.02	210	70	962	0.0054	1164
CIPUTRA PINGGAN	100.62	31.5	10	15	0.0175	393
CIKEMBULAN	140	23.4	50	45	0.0171	338
K.GUNG	155.52	54	45	52	0.0384	514.33
CACABAN	33.92	43	16	58	0.0088	459.02
CONANG	36.3	14	50	9	0.0011	261.92
K.RAMBU	167.42	57	37	61	0.0189	528.49
K.WALUH	139.66	36	55	48	0.0146	452.07
K.COMAL	764.56	165	118	230	0.0104	744.11
K.SRAGI	23	46	22	93	0.0239	474.76
K.SENGKARANG	289.04	51.5	65	109	0.0262	502.35
K.AMBO	11.02	5	20	1	0.02	156.53
K.URANG	118.48	33.5	20	28	0.0373	405.15
K.KOTO	340.74	52	44	104	0.0399	504.78
K.JALI/COKROYASAN	323.36	63.5	36	107	0.0144	558
K.PADEGELAN	934.89	62	152	249	0.0101	551
K.LUK ULO	606.14	62	87	243	0.0097	551
K.CICINGGULUNG	436.7	49	35	91	0.0062	997
KR. ACEH	1780	113	32	93	8.99	359
K.IJO	268.34	36	25	53	0.015	613

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
K.BENGAWAN	193.76	29.5	18	51	0.0082	380
K.SERAYU	3625	176	66	1699	0.0134	1.837
K.KAWUNGATEN	113.28	25	10	41	0.009	350
K.BODRI	599.9	87	38	257	0.2352	241
K.KLAMPOK	81.5	21	12.5	9	0.0309	320.8
K.BODO	206.32	51	28	67	0.0099	499.9
K.GARANG	203.38	35	28	88	0.0283	414.13
K.JRAGUNG	354.1	75	36	84	0.0063	606.22
K.SERANG	3656.78	208.5	56	809	0.0088	679
K.WISO	36.64	27	73	15	0.027	363.73
K.GELIS	104.96	29	32	54	0.0336	376.96
J.PAPAK/B.PAMUKULU	389	42	45	20	0.0095	178
K.DELOK	143.1	40.3	8	26	0.0047	444
K.BOLAK	62	18.5	5	11	0.004	301
K.COPIK	136.8	38.5	10	37	0.0045	434
K.PANGGANG	9.24	5	4	3	0.009	157
K.LASEM	252.9	33.5	13	39	0.008	405
K.NYAMPLUNG	11.1	6.5	4	2	0.0769	178
K.BLITUNG	66.1	20	6	16	0.0187	313
K.WAGON	45.52	17	5	7	0.0047	289
K.TANJUNG	203.52	23.6	6	59	0.011	340
K.MACANAN	66.1	12	5	6	0.0116	242
K.KEMAWING	127.52	26.5	4	8	0.012	360
K.KLERA	84.17	23	36	12	0.0076	336
K.NGAMPEL	15.2	7.5	5	4	0.0062	192
K.LOHGUNG	61.9	10.2	11	13	0.0034	224
K.ASINAN	21.2	6	7	1	0.0081	171
K.GAYARAN	21.12	5.1	4	3	0.0098	158
K.BADURANG	8.96	3.5	3	2	0.0122	131
K.SUWUK	15.06	7	4	4	0.009	185
K.SILERO	22.1	6.5	3	6	0.0076	178
K.LAMONG	728.9	87.4	42	132	0.0013	654
K.BRANTAS	16000	140	75	1555	0.03869	119.6
K.TELEK	5.5	12	25	6	0.0708	242.45
K.WELANG	571.1	45	12.5	105	0.0167	270
K.MENGGAK	193	36	25	38	0.0641	420
K.GEDE	334.5	23	25	96	0.033	335.7
K.LAWEYAN	86.1	25.1	50	9	0.0796	150.7
K.KEDUNG JATI	8	5	25	6	0.32	156.5
K.WUNGU	52.6	17.5	20	23	0.028	292.8
K.BEKSO	20.3	14.5	12.5	3	0.1931	266.6
K.SUMBER MATA	42.7	17.5	12.5	13	0.0285	292.8
K.KRASAK	82.2	38	12.5	24	0.0571	26.5
JENE KLARA/PONTO	537	53.8	50	23	0.0316	447
K.TEMPURAN	116.8	42.5	12.5	31	0.0435	456.3
K.SUMBER BOLU	184.8	32.5	12.5	72	0.0486	399.1
K.SUMBER ANYAR	2.3	10	12.5	6	0.001	221.4

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
K.BUBUR	93.4	23	12.5	75	0.0086	315.7
K.TOPENG	95	22.5	25	31	0.0178	332
K.PINANGAN	23.3	12.5	12.5	7	0.0112	247.5
K.PEKALEN	21.24	50	40	87	0.037	495
K.LOPATI	155.5	38.5	12.5	31	0.0207	434.3
K.KRAKSAAN	56.7	21.5	12.5	14	0.0279	324.6
K.BEKUK	102.2	36	12.5	11	0.0061	420
K.PENJALIN	17.1	15	12.5	3	0.0046	271.1
K.TANGKIL	45.6	21.5	25	19	0.0279	324.6
K.CANGKRING	9.7	8	12	1	0.0625	198
K.PITAN	32.7	18.5	12.5	9	0.0216	301.1
K.KRESEK	33.7	18.5	25	11	0.027	301.1
K.BANCAK	36.5	13	12.5	15	0.0615	152.4
K.KALAHAN	15.8	7.5	12.5	4	0.0693	191.7
K.DELUWANG	19.6	37	50	25	0.0513	425.8
K.PATEMON	79.8	12	12.5	39	0.0193	242.5
K.AMPERE	49.1	14.5	12.5	11	0.0137	266.6
K.SAMPEAN	83.9	70	40	180	0.0471	1190.5
K.CANGKRING	175	10	12.5	5	0.025	211.4
K.SIMACAN	31.7	7	12.5	1	0.0285	185.2
K.TALTUL	10	11	12.5	1	0.0172	232.2
K.DALEM	205	24	12.5	9	0.0079	342.9
K.BANYUPUTIH	308.5	46	12.5	6	0.0456	474.8
K.KELOKORAN	48.6	9	12.5	1	0.01	210
K.BAJULMATI	299.1	25.5	25	9	0.0168	353.5
K.REJO	23	11.5	12.5	6	0.0347	257.5
K.SUKAWIDI	10.5	13	12.5	3	0.0246	252.4
K.SOBO	15.42	13	12.5	5	0.0846	252.4
K.WORO	25.5	18	12.5	7	0.0045	297.7
K.TAMBANG	166.8	29	50	37	0.0082	377
K.DINAU	98.2	41	12.5	21	0.0012	448.2
K.DINAU	43.1	22.5	12.5	15	0.0689	332
K.GUMA	74.3	29	12.5	11	0.0051	377
K.BOMO	124.75	36	40	17	0.0163	420
K.SB.HUMIS	85.75	30	12.5	4	0.0034	383.4
K.PANGGANG	136.5	32	10	29	0.0165	396
S.WALANAE/CENRANAE	7269	210	50	185	0.0001	1.435
K.MUNCAN	15.75	12.5	12.5	3	0.004	247.5
K.SETAIL	251.5	65	5	77	0.0261	564.4
K.BIDADUNG	936.8	61	25	234	0.0122	546.7
K.BANGERAN KIDUL	15	8	25	8	0.0002	198
K.PAPAK	16	5	12.5	6	0.0002	156.5
K.PELUK AGUNG	41.25	15	15	5	0.0026	171.1
K.BINDA	52.25	13.5	12.5	17	0.0037	157.2
K.GANDRIAN	6	2.5	12.5	7	0.032	110.7
K.BOGEM	26.5	10.5	12.5	7	0.0067	226.8
K.PERGUL	96.1	25	12.5	28	0.0016	350

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
K.BARA	75.6	72	50	151	0.0236	276
K.LOMPON	49.5	16	25	9	0.0062	280
K.AGUNG	18	8	12.5	4	0.0062	198
K.MAMBALEUR	21.7	6	12.5	9	0.0134	171.5
K.KARANG TAMBAK	198.8	23	50	113	0.026	335.7
K.SUKAMANDE	125	23	40	132	0.0308	335.7
K.MAYANG	1005.3	70	50	523	0.0098	585.7
K.PUGER	72	45	25	25	0.0267	469.6
K.TANGGUL	289.3	50	75	113	0.034	495
K.BONDOYUDO	1107.92	43	50	339	0.0581	495
K.MUJUR	281.7	45	50	34	0.04	469.6
K.RIJALI	128.5	22	25	23	0.0318	328.3
K.WELANG	12.8	6	12.5	1	0.015	171.5
K.PAWOAN	44.5	10	25	7	0.04	221.4
K.GLIDIK	607.25	25	50	57	0.032	350
K.TENGER	8.25	5.5	12.5	1	0.0545	164.2
K.SIPELAR	42	13.5	12.5	4	0.0296	257.2
K.KEMUDINAN	19	10	12.5	8	0.075	221.4
K.JOKROMO	18.5	10	12.5	15	0.067	221.4
K.LANG	25.75	11	12.5	6	0.0363	232.2
K.PANGULURAN	18.4	28	50	84	0.0178	370.4
K.ASAT	29.75	8	5	8	0.0562	6
K.SRIGANCA	166.5	25	12.5	42	0.012	350
K.SB.BERING	17.6	10.5	5	8	0.0323	226.8
K.BALE KAMBANG	8.5	6	5	1	0.0416	171.5
K.SENGKARENG	29	19	5	11	0.0236	305
K.SUMBER MANJING	41.5	22.5	5	8	0.004	332
K.KANDANG MERAT	30.75	15	5	12	0.03	271.1
K.ARJOSARI	25.5	14	5	12	0.03	261.9
K.DONOWARI	16	11.5	5	4	0.0314	292.8
K.PAKEM	16.5	20	12.5	3	0.0225	313.1
K.KARANG ANYAR	38.1	15.5	12.5	16	0.027	175.6
K.GEBLUS	22.25	10	12.5	12	0.045	221.4
K.RINGIN REJO	16.5	12.5	10	6	0.028	147.5
S.SIWA	252	58	15	13	0.0293	215
K.BUJUNG	2.5	3.5	5	3	0.0857	131
K.WATU SEWU	85.9	10.5	12.5	44	0.0087	316.9
K.NGADI REJO	69.9	18.5	25	41	0.0329	301.1
K.CENTUNG	14	11	15	20	0.0281	232.2
K.PASIRAMAN	20.5	11.5	15	10	0.026	237.4
K.BELIS	11.7	7.5	10	4	0.0346	191.7
K.RINGIN BANDULAN	91.5	17	12.5	37	0.0088	288.6
K.BLANDER	6.75	5	10	5	0.035	156.5
K.JOLO	35	9.5	12.5	13	0.0221	215.8
K.KRECAH	17.5	8.5	12.5	4	0.029	204.1
K.NGELO	45.23	19	15	20	0.0052	305.1
K.NGEMPLAK	33.6	8.5	50	26	0.0117	204.1

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
K.CENGKRONG	21.3	7.5	12.5	26	0.0134	191.7
K.SONGO	10.8	5	12.5	12	0.022	156.5
K.TENGAH	71.9	11.5	75	64	0.0484	217.4
K.MAYONG	6.2	7.5	12.5	11	0.0934	191.7
K.BLIMBING	15.08	5.5	25	16	0.0136	164.2
K.BLULUNG	9.6	5.5	50	14	0.0527	164.2
K.GEMBES	2.8	2	20	3	0.1	99
K.KONANG	65.9	10	40	76	0.08	221.4
K.PANGGUL	21.2	36	50	145	0.0305	420
K.BAWUR	34.4	9	90	22	0.05	210
K.SEBORO	7.7	7	12.5	6	0.0257	185.2
K.TRUMPAK SALAM	10.1	7	12.5	8	0.0142	185.2
K.LORONG	194.7	52.5	50	316	0.071	507.2
K.PENGOTAN	104.2	26.5	25	73	0.0226	360.3
K.PADI	19	9.5	12.5	25	0.02	215.8
K.KAKAP	7.9	4.5	12.5	3	0.0445	148.5
K.NGUJIL	4.4	1.5	10	5	0.2334	85.7
K.BOJONG	4	1.4	12.5	6	0.1041	108.4
K.PANDAN	4.9	3	12.5	511	0.0022	121.2
K.GRINDULU	4.2	61	50	14	0.0131	546.7
K.GAYAM	21.9	8	25	1	0.0025	197.8
K.SUMBERPUYUNG	12.5	5	25	3	0.008	156.5
K.RANGKAH	170	23.5	37.5	21	0.0085	339.3
K.SERPANG	16.4	9	25	3	0.0133	210
K.NYANTREN	22.5	15	12.5	5	0.0033	271
K.BALUNG	33.9	15.5	12.5	5	0.0013	275.6
K.TAM SURJAN	15.5	9	12.5	1	0.0033	210
K.UBAK	153.5	31.5	37.5	114	0.0035	392.9
K.TERBANG	6.1	3.5	12.5	2	0.0114	131
K.MANGSOKA	3.9	2.5	12.5	2	0.036	110.7
K.GLADAH	9.2	7.5	12.5	3	0.0008	191.7
K.TOBLEK	7.9	4	12.5	2	0.0025	140
S.RONGKONG	1646	97.5	50	92	0.0154	416
K.LEMBUNG	9.1	3	12.5	4	0.03	121.2
K.TAMBAK	35.9	12	12.5	4	0.0117	242.5
K.LELENGAN	65.9	20.5	25	16	0.0072	316.9
K.BRUMBUNG	22.8	10	12.5	4	0.015	221.4
K.SB.LANJANG	52.4	17.5	25	12	0.008	292.8
K.BRAMBAK	16.1	9.5	12.5	38	0.02	215.8
K.TUTUSUNG	12.9	10	25	7	0.02	221.4
K.SEDUNG	59	26	25	7	0.0065	256.9
K.SAWAAN	20.6	10	12.5	52	0.02	221
K.DEMPOWON	10.4	1.5	12.5	7	0.0667	85.7
K.BAYUR	14	7	12.5	4	0.0257	185.2
K.TAMBERU	117.8	25	37.5	2	0.008	759.7
K.LESUNG	22.4	11	12.5	13	0.0154	331.3
K.BELONJONG	6.5	4	12.5	1	0.0375	140

Lanjutan Tabel 4.1

Nama Sungai	Luas DPS (km ²)	Panjang (km)	Lebar (m)	Anak Sungai (buah)	Kelerengan	Q banjir (m ³ /det)
1	2	3	4	5	6	7
K.PASIAN	92.7	20.5	27.5	62	0.0092	316.9
K.ANGSOKA	11.5	4.5	12.5	5	0.0556	148.5
K.PASONGSONGAN	66.3	20	37.5	29	0.011	313
K.KORENG	6.8	4	12.5	1	0.04	140
K.PANDI	6.8	4.5	12.5	1	0.0489	148.5
K.AMBUNTEN	65.6	16	15	38	0.0167	271.1
K.KADAS	18	10	12.5	2	0.015	221.4
K.PURABUN	16.1	10	12.5	1	0.014	221.4
K.LANGAN	7.8	4	12.5	5	0.0075	140
K.SUMBERABAT	166.9	22.5	50	73	0.0057	332
K.KETELENG	124.5	24.5	50	41	0.004	346.5
K.SASAK	318.6	43	50	52	0.0034	459
K.LONTANG	12.8	5	12.5	9	0.04	156.5
K.DURBUAR	3.8	2.5	12.5	4	0.044	110.6
K.SUMBERRAJA	8.1	5	12.5	11	0.042	156.5
K.PEKAMBON	42	16	25	31	0.0093	280
K.BEGRONG	15.3	5.5	12.5	7	0.0327	164.2
K.BUNDER	68.3	17.5	25	13	0.0022	292.8
K.SEMAJID	298.2	43	50	150	0.0046	459
K.KRAMAT	7.5	2.5	12.5	2	0.012	110.7
K.JLEKET	6.4	4	12.5	2	0.0125	140
K.PANGATAAN	7.4	3	12.5	2	0.0134	121.2
K.TAMBAK BATU	82.6	21	25	14	0.0071	320.8
K.SAMPANG	378.3	45	50	174	0.0045	469.6
K.BALIGA	721.4	25	200	287	0.008	350
K.LEKESEPAT	13.1	2	12.5	2	0.02	140
K.SUMBER KAILA	40.1	25	12.5	5	0.0016	350
OE MANIKIN	98	20	14	1	0.0149	3

Sumber : http://sda.pu.go.id/sungai_list.php?kriteria=bws&ws=sws

Tabel : 4.2
Wilayah Sungai Lintas Negara

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	A1 - 1	Benanain	NTT - <i>Timor Leste</i>	Benanain; Mena
2	A1 - 2	Noel Mina	NTT - <i>Timor Leste</i>	Noel Mina; N.Termanu; Nungkurus; (P.Rote); (P.Sabu)
3	A1 - 3	Sesayap	Kaltim - <i>Serawak; Mala ysia</i>	Sesayap; Sebakung; Sebakis; Sebuku; Sembaleun; Simenggaris; Noteh; Sinualan; Itai; Sekata; Linuang Kayan; Ansam; Belayau
4	A1 - 4	Mamberamo - Tami - Apauvar	Papua - <i>Papua Nugini</i>	Mamberamo; Gesa; Bigabu; Sobger; Tariku; Nawa; Taritatu; Van Dalen; Tami; Apauvar; Verkume; Tor; Biri; Wiru; Sermo; Grime; Sentani
5	A1 - 5	Einlanden - Digul - Bikuma	Papua - <i>Papua Nugini</i>	Einlanden; Digul; Maro; Kumbe; Bulaka; Bian; Dolak; Digul; Cemara

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran I : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.3
Wilayah Sungai Lintas Provinsi

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	A2 - 1	Alas - Singkil	N A D - Sumatera Utara	Lae Pardomuan; Lae Silabuhan; Lae Siragian; Lae Singkil; L.Kuala Baru
2	A2 - 2	Batang Natal - Btg.Batahan	Sumut - Sumbar	Btg. Batahan; Btg. Natal
3	A2 - 3	Rokan	Riau - Sumatera Barat - Sumatera Utara	Rokan; Bangko; Rokan Kiri; Rokan Kanan; Kubu; Sumpur; Sontang; Asik; Air Pesut; Sibinail; Pagang; Pincuran Panjang; Timbawan
4	A2 - 4	Kampar	Riau - Sumatera Barat	Kampar; Kampar Kiri; Kampar Kanan; Bt.Kapur; Bt.Mahat
5	A2 - 5	Indragiri	Riau - Sumatera Barat	Kuantan; Indragiri;Gaung Anak Serka; Guntung; Pateman; Palangki; Ombilin; Sinamar
6	A2 - 6	Batanghari	Jambi - Sumatera Barat	Btg.Hari; Tungkal; Bentaro; Mandahara; Lagan; Air Hutan; Jujuhan; Siat; Timpeh; Kuko; Pangean; Momong; Sipotar; Sangir; Talantam; Bangko; Gumanti; Pinti Kayu; Pkl.Duri Besar
7	A2 - 7	Musi	Sumsel-Bengkulu-Lampung	Musi; Lakitan; Kelingi; Rawas; Semangus; Batang Hari Leko;
8	A2 - 8	Mesuji - Tulang Bawang	Lampung - Sumsel	Mesuji; Tlg. Bawang; Tjg. Pasir; Randam Bsr; Sibur Besar; Tawar; Bati Dalam Kecil; Randam Besar; Meham Kecil
9	A2 - 9	Teramang-Ipuh	Bengkulu-Jambi	Teramang; Ipuh; Retak; Buluh; Selagan; Bantal; Dikit; Manjuto
10	A2 - 10	Nasal - Padang Guci	Bengkulu - Lampung	Air Nasal; Air Sambat; Air Tetap; Air Luas; Air Kinal; Air Padang Guci; Air Sulau; Air Kedurang; Air Bengkenang; Air Manna (Kepulauan Seribu)
11	A2 - 11	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta - Banten	Cisadane; Ciliwung; Citarum;
12	A2 - 12	Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum	Banten-DKI Jakarta-Jabar	Cidanau; Ciujung; Cidurian
13	A2 - 13	Citanduy	Jawa Barat - Jawa Tengah	Citanduy, Cibeureum; Cimeneng; Kadalmeteng; Ciputra Pinggan; Sapuregel; Kawungaten; Cikonde; Cikembulan; Cihaur
14	A2 - 14	Cimanuk - Cisanggarung	Jawa Barat - Jawa Tengah	Cimanuk; Cisanggarung; Cipanas; Ciwaringin;Cikondang; Kasuncang; Babakan; Kabuyutan; Kluwut
15	A2 - 15	Progo - Opak - Serang	DI Yogyakarta - Jateng	Progo; Opak; Serang; Tangsi; Elo; Oyo
16	A2 - 16	Bengawan Solo	Jawa Timur - Jawa Tengah	Keduwang; Jurang Gempal; B. Solo/Jurug Solo; Grindulu; Lorong; Lamong; K. Gondang; K. Sragen; Semawon; Wungu; Semawun; Geneng; Sondang
17	A2 - 17	Jelai-Kendawangan	Kalteng - Kalbar	Jelai; Kendawangan

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
18	A2 - 18	Barito - Kapuas	Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah	Barito; Kapuas; Murung, Martapura; Riam Kanan; Riam Kiwa; Negara; Ambawang; Kubu; Landak; Tapin
19	A2 - 19	Dumoga - Sangkup	Sulawesi Utara - Gorontalo	Dumoga; Sangkup; Buyat; Lomboit; Andagile; Bulawa; Tuliawa
20	A2 - 20	Limboto - Bulango - Bone	Gorontalo - Sulawesi Utara	Limboto; Bulango; Bone
21	A2 - 21	Randangan	Gorontalo-Sulawesi Tengah	Randangan;
22	A2 - 22	Palu - Lariang	Sulteng - Sulsel - Sulbar	Palu; Lariang; Watutela; Pasangkayu; Mesangka; Surumba; Sibayu; Tambu
23	A2 - 23	Kaluku - Karama	Sulbar - Sulsel	Kaluku; Karama; Babbalalang; Malunda; Mandar
24	A2 - 24	Pompengan - Larona	Sulsel - Sultra	Pompengan; Larona; Kalaena; Latuppa; Bua; Lamasi; Makawa; Bungadidi; Kebo; Rongkong; Balease
25	A2 - 25	Sadang	Sulsel - Sulbar	Sadang; Mamasa; Rapang; Libukasi; Galang-galang; Lissu; Barru; Lakepo; Lampoko; Kariango; Pangkajene; Bone-bone; Segeri; Karajae; Malipi;
26	A2 - 26	Lasolo - Sampara	Sul.Tenggara-Sulsel-Sulteng	Lasolo; Sampara; Lalindu; Aopa; Tinobu; Luhumbuti; Landawe; Amesi
27	A2 - 27	Omba	Papua - Irian Jaya Barat	Omba; Lengguru; Madefa; Bedidi; Bomberai

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran II : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.4
Wilayah Sungai Strategis Nasional

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	A3 - 1	Meureudu - Baro	N A D	Meureudu; Baro; Tiro; Pante Raja; Utue; Putu; Trienggadeng; Pangwa; Beuracan; Batee
2	A3 - 2	Jambo Aye	N A D	Jambo Aye; Geuruntang; Reungget; Lueng; Simpang Ulim; Malehan; Julok Rayeu; Keumuning; Gading; Idi Rayeuk; Lancang; Jeungki; Peundawa Rayeuk; Peureulak; Peundawa Puntong; Leugo Rayeuk;
3	A3 - 3	Woyla - Seunagan	N A D	Woyla; Seunagan;
4	A3 - 4	Tripa - Bateue	N A D	Tripa; Bateue;
5	A3 - 5	Belawan - Ular - Padang	Sumatera Utara	Belawan; Ular; Deli; Belumai; Padang; Martebing; Kenang; Serdang; Percut; Bedagai; Belutu
6	A3 - 6	Toba-Asahan	Sumatera Utara	Danau Toba; Sei Asahan; Silau; Tanjung; Suka
7	A3 - 7	Batang Angkola-Batang Gadis	Sumatera Utara	Batang Angkola; Batang Gadis
8	A3 - 8	Siak	Riau	Siak; Siak Kecil; Bukit Batu; Palentung; Tapung Kanan; Tapung Kiri; Masigit; Bulu Kala; Mandau; Dumai
9	A3 - 9	Reteh	Riau	Reteh; Gangsal
10	A3 - 10	Pulau Batam - Pulau Bintan	Kepulauan Riau	(Pulau Batam; Pulau Bintan)
11	A3 - 11	Anai-Kuranji-Arau-Mangau; Antokan;	Sumatera Barat	Anai; Kuranji; Arau; Mangau; Antokan; Air Dingin; Tapakis; Ulakan; Andaman; Pariaman; Manggung; Naras; Limau; Kamumuan; Paingan; Tiku; Bungus
12	A3 - 12	Sugihan	Sumatera Selatan	Burung; Gaja Mati; Pelimbangan; Beberi; Olok; Daras; Medang; Padang
13	A3 - 13	Banyuasin	Sumatera Selatan	Banyuasin; Senda; Limau; Ibul; Puntian; Pangkalan Balai; Buluain; Kepayang; Mangsang; Kedawang; Titikan; Mendes; Tungkal; Keluang; Lalan; Supat; Lilin
14	A3 - 14	Way Seputih-Way Sekampung	Lampung	Seputih; Sekampung; Wako; Kambas; Penet; Kuripan; Sabu; Sukamaju
15	A3 - 15	Pemali - Comal	Jawa Tengah	Pemali; Pemali Notog; Comal; Cacaban; Waluh; Sengkarang; Sambong; Sragi
16	A3 - 16	Jratunseluna	Jawa Tengah	Jragung, Tuntang; Serang; Lusi; Juwana; Bodri; Anyar; Klampok; Semarang; Garang; Randuguntini
17	A3 - 17	Serayu - Bogowonto	Jawa Tengah	Serayu; Bogowonto; Bengawan; Ijo; Luk Ulo; Cokroyasan; Sempor; Padegolan; Tipar; Wawar; Telomoyo; Watugemulung; Pasir; Tuk; Yasa; Sрати; Donan
18	A3 - 18	Brantas	Jawa Timur	Brantas; Santun; Punyu; Bango; Putih; Widas; Konto
19	A3 - 19	Bali - Penida	Bali	Ayung; Ho; Balian; Daya; Sabah; Panarukan; Sangiang Gede
20	A3 - 20	Pulau Lombok	N.T.B.	Dodokan; Jangkok; Babak; Renggung; Palung; Blimbing; Segara; Peming; Meninting; Sidutan

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
21	A3 - 21	Aesesa	N.T.T.	Aesesa; Wae Mokol; Naggaroro; Mautenda; Wolowona; Waiwajo; Nebe
22	A3 - 22	Kapuas	Kalimantan Barat	Kapuas; Ambawang; Kubu; Landak; Nipah; Paduan; Peniti; Kapar; Mancar; Kerawang; Melendang; Satai
23	A3 - 23	Pawan	Kalimantan Barat	Pawan; Simpang; Semandang; Semanai
24	A3 - 24	Seruyan	Kalimantan Tengah	Seruyan
25	A3 - 25	Kahayan	Kalimantan Tengah	Kahayan; Sebangau
26	A3 - 26	Mahakam	Kalimantan Timur	Mahakam; Semboja; Senipah; Semoi
27	A3 - 27	Sangihe Talaud	Sulawesi Utara	(Sangihe Talaud)
28	A3 - 28	Tondano - Likupang	Sulawesi Utara	Ranowangko; Ranopaso; Nimanga; Marondor; Sosongae; Tondano; Likupang
29	A3 - 29	Paguyaman	Gorontalo	Paguyaman; Bola; Dulupi; Buntaya; Marisa
30	A3 - 30	Parigi - Poso	Sulawesi Tengah	Parigi; Poso; Tompis; Bambalemo; Podi; Dolago; Tindaki
31	A3 - 31	Laa - Tambalako	Sulawesi Tengah	Laa; Tambalako; Tirongan; Salato; Morowali; Sumare; Bahonbelu; Bahodopi
32	A3 - 32	Walanae - Cenranae	Sulawesi Selatan	Walanae; Cenranae; Paremang; Bajo; Awo; Peneki; Keera; Ranang; Larompong; Gilirang; Noling; Suli; Suto;
33	A3 - 33	Jeneberang	Sulawesi Selatan	Jeneberang; Jenepono; Maros; Matulu; Salangketo; Tangka; Aparang; Pamukulu
34	A3 - 34	Pulau Buru	Maluku	(Pulau Buru)
35	A3 - 35	Pulau Ambon - Pulau Seram	Maluku	(Pulau Ambon; Pulau Seram)
36	A3 - 36	Kepulauan Kei - Aru	Maluku	(Kepulauan Kei - Aru)
37	A3 - 37	Kepulauan Yamdena-Wetar	Maluku	(Kepulauan Yamdena-Wetar)

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran III : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.5
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	B - 1	Krueng Aceh	N A D	Aceh; Raya; Tengku; Batee
2	B - 2	Pase - Peusangan	N A D	Pase; Peusangan; Peudada; Keureuteu; Mane; Mane; Geukeuh
3	B - 3	Tamiang - Langsa	N A D	Tamiang; Langsa; Raya; Telaga Muku; Bayeueun
4	B - 4	Teunom - Lambesoi	N A D	Teunom; Lambesoi; Bubon; Woyla; Sabe; Masen; Inong
5	B - 5	Krueng Baru - Kluet	N A D	Krueng Baru; Kluet
6	B - 6	Wampu - Besitang	Sumatera Utara	Wampu; Besitang; Babalan; Lapan; Gebang; Karang Gading; Btg. Serangan
7	B - 7	Bah Bolon	Sumatera Utara	Bah Bolon; Pare-pare/Gambus; Napal; Kiri; Tanjung; Pagurawan; Perupuk; Balai
8	B - 8	Barumon - Kualuh	Sumatera Utara	Barumon; Kualuh; Bilah; Panai
9	B - 9	Pulau Nias	Sumatera Utara	Inou; Matawa; Afia; Gido Zebua; Idano Zala; Bol; Erfi; Otua; No Awu; Tulang baho; Manliho; Lae Huwa; Oyo; Nalawo; Idanogowo; Mola
10	B - 10	Sibundong - Btg.Toru	Sumatera Utara	Sibundong; Batang Toru; Sirahar; Sitio-tio; Goman
11	B - 11	Silaut - Tarusan	Sumatera Barat	Silaut; Tarusan; Sindang; Lunang; Indrapura; Bantayan
12	B - 12	Masang - Pasaman	Sumatera Barat	Masang; Pasaman; Mandiingin; Ampu; Kapar; Sikilang; Air Bangis; Air Patibubur; Air Pigogah; Air Bakau; Air Pinang; Air Tamak; Air Parlantingan
13	B - 13	Pengabuan - Lagan	Jambi	Pengabuan; Lagan
14	B - 14	Pulau Bangka	Bangka Belitung	(Pulau Bangka)
15	B - 15	Pulau Belitung	Bangka Belitung	(Pulau Belitung)
16	B - 16	Semangka	Lampung	Semangka; Ngarip; Menanga; Canguk; Pemerihan; Bambang; Ngaras
17	B - 17	Air Bengkulu-Alas-Talo	Bengkulu	Air Bengkulu; Alas; Talo; Maras; Penago; Seluma; Kungkai; Air Hitam; Jenggalu
18	B - 18	Sebelat-Ketahun-Lais	Bengkulu	Ketahun; Lais; Bintunan; Lemau; Palik; Padang; Serangai; Bitunan; Urai; Kelingi; Kati; Beliti; Musi; Sebelat; Senaba; Sabai; Rami
19	B - 19	Ciliman - Cibungur	Banten	Ciliman; Cibungur
20	B - 20	Cibaliung - Cisawarna	Banten	Cibaliung; Cisawarna
21	B - 21	Cisadea - Cibareno	Jawa Barat	Cisadea; Cibareno; Cisolok; Cimandiri
22	B - 22	Ciwulan - Cilaki	Jawa Barat	Ciwulan; Cilaki; Cidadap; Ciptatujah; Ciawi; Cimerak; Cikaso; Cimari; Cilayu
23	B - 23	Bodri - Kuto	Jawa Tengah	Bodri; Kuto; Damar; Bulanan; Blukar; Buntu; Kendal; Blorong; Aji; Glagah
24	B - 24	Welang - Rejoso	Jawa Timur	Welang; Rejoso
25	B - 25	Pekalen - Sampean	Jawa Timur	Pekalen; Sampean
26	B - 26	Baru - Bajulmati	Jawa Timur	Baru; Bajulmati
27	B - 27	Bondoyudo - Bedadung	Jawa Timur	Bondoyudo; Bedadung

Lanjutan Tabel 4.5

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
28	B - 28	Kepulauan Madura	Jawa Timur	Rangkah; Ubak; Tamberu; Sumberabat; Semajid; Sampang; Keteleng; Baliga; Sasak; Pasian
29	B - 29	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa; Beh; Sekongkang; Rea; Moyo; Lamang; Empang; Jiram; Batu Bulan; Banggo
30	B - 30	Bima Dompu	Nusa Tenggara Barat	Sambana; Jatanga; Kwangko; Solo; Jatibaru; Parado
31	B - 31	Pulau Sumba	Nusa Tenggara Timur	Baing; Kambaniru; Memboro; Polapare; Wanakoka
32	B - 32	Wae Jamal	Nusa Tenggara Timur	Wae Jamal; Wae Raho/Lembor; Wae Pesi; (P. Komodo)
33	B - 33	Flotim - Lembata - Alor	Nusa Tenggara Timur	Konga; (P. Adonara); (P. Solor); (P. Lomblen); (P. Alor); (P. Pantar)
34	B - 34	Mempawah	Kalimantan Barat	Mempawah;
35	B - 35	Sambas	Kalimantan Barat	Sambas;
36	B - 36	Cengal-Batulicin	Kalimantan Selatan	Cengal; Batulicin; Sampanahan; Kusan; Kintap
37	B - 37	Kayan	Kalimantan Timur	Kayan; Bulungan; Bengara; Berasan; Malimpung; Selor; Ansam
38	B - 38	Berau-Kelai	Kalimantan Timur	Berau; Kuning; Bakau; Pangkung; Kasal; Pantai
39	B - 39	Karangan	Kalimantan Timur	Karangan; Sangata; Bengalon; Marangkayu; Santan
40	B - 40	Kendilo	Kalimantan Timur	Kendilo; Segendang; Janggeru; Kerang; Tunan
41	B - 41	Poigar - Ranoyapo	Sulawesi Utara	Poigar; Ranoyapo
42	B - 42	Lambunu-Buol	Sulawesi Tengah	Lambunu; Buol; Lobu; Salumpaga; Bangkir; Ogoamas; Silambo; Siraurang; Sioyong
43	B - 43	Bongka - Mentawa	Sulawesi Tengah	Bongka; Mantawa;
44	B - 44	Poleang - Roraya	Sulawesi Tenggara	Poleang; Roraya; Langkowala; Asole; Bogora; Muna; Lausu; Kasipute; Toburi; Laeya; Wolasi; Baito; Benua
45	B - 45	Towari - Lasusua	Sulawesi Tenggara	Towari; Lasusua; Welulu; Oko-oko; Mekongga; Tamboli; Woimenda; Simbune
46	B - 46	Pulau Buton	Sulawesi Tenggara	Bungi; Ambe; Wonco; Bau-bau; Kabongka; Winto
47	B - 47	Pulau Muna	Sulawesi Tenggara	Tiworo; Kancintala; Bone; Ronta; Jompi; Kontu
48	B - 48	Halmahera Selatan	Maluku Utara	(Halmahera Selatan)
49	B - 49	Kepulauan Sula - Obi	Maluku Utara	(Kepulauan Sula); (Kepulauan Obi)
50	B - 50	Kamundan - Sebyar	Irian Jaya Barat	Kamundan; Kais; Karabra; Kladuk; Warsamson; Mega; Koor; Sebyar; Arumasa; Muturi; Wasian; Mangopi; Prafi; Wariagar
51	B - 51	Wapoga - Mimika	Papua	Wapoga; Aikimuga; Otokwa; Minarjerwi; Kamura; Mimika; Yawe; Parongga; Aidoma; Wanggar; Siriwo; Rombak; Nadubuai; Yapen; Biak; Supiori; Kemabu

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran IV : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.6
Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Kabupaten	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5	6
1	C - 1	Pulau Simelue	N A D	Simeulue	(Pulau Simelue)
2	C - 2	Bengkalis - Rupat	Riau	Bengkalis	(P. Bengkalis) (P. Rupat)
3	C - 3	Kepulauan Natuna - Anambas	Kepulauan Riau	Natuna	(Kepulauan Natuna - Anambas)
4	C - 4	Kepulauan Karimun	Kepulauan Riau	Karimun	(Kepulauan Karimun)
5	C - 5	Kepulauan Lingga - Singkep	Kepulauan Riau	Lingga	(Kepulauan Lingga - Singkep)
6	C - 6	Pulau Siberut - Pagai - Sipora (Kepulauan Mentawai)	Sumatera Barat	Mentawai	Siberut; Sikabalan; Saibi; Simalegi; Takungan; Sibulelek; Sigep; Koilop; Kuioinan; Sigei; Sikako
7	C - 7	Wisio - Gelis	Jawa Tengah	Jepara	Pecangaan; Tukabul; Sirahan; Wisio; Gelis; Gung; Mlonggo; Balong; Wangkang; Telon; Banjaran; (Kepulauan Karimunjawa)
8	C - 8	Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah	Jepara	(Kepulauan Karimunjawa)
9	C - 9	Mentaya	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Timur	Mentaya
10	C - 10	Katingan	Kalimantan Tengah	Katingan	Katingan
11	C - 11	Pulau Laut	Kalimantan Selatan	Kota Baru	Senakin; Sigam; Taih; Paring; Sebelimbangan; Pasir; Limau; Oka-oka; Buah; Kapis; Serantak
12	C - 12	Kepulauan Banggai	Sulawesi Tengah	Bangkep	(Kepulauan Banggai)
13	C - 13	Halmahera Utara	Maluku Utara	Halmahera Utara	(Halmahera Utara)

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran V : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.7
Data Danau Berdasarkan Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jenis		Luas (Km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
		Danau	Situ		
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	15	246	6.844	7.826.523
2	Sumatera Utara	7	97	251.266	3.660.725
3	Sumatera Barat	14	51	173.980	880.142.735
4	Riau	21	2	10	528.138.750
5	Jambi	6	0	5.000	0
6	Sumatera Selatan	9	2	30.065	796.250.000
7	Bengkulu	7	0	309	2.100.000
8	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	100	3.000.000
9	Lampung	45	0	2.023	6.014.588
		124	399		
10	DKI Jakarta	0	38	25	0
11	Jawa Barat	206	229	1.459	758.342
12	Jawa Tengah	88	19	7	386.960
13	DI Yogyakarta	69	48	2.430	1.028.100
14	Jawa Timur	8	0	0	0
15	Bali	4	14	2.877	1.018
16	Banten	31	17	1.594	2.902
		406	365		
17	Nusa Tenggara Barat	2	0	31	25
18	Nusa Tenggara Timur	34	27	35	1.120.963
		36	27		
19	Kalimantan Barat	0	1	305	0
20	Kalimantan Tengah	0	0	3.683	0
21	Kalimantan Selatan	2	0	0	0
22	Kalimantan Timur	21	0	46.000	0
		23	1		
23	Sulawesi Utara	24	2	3	72.500
24	Sulawesi Tengah	19	0	0	0
25	Sulawesi Selatan	26	30	115	6.856.535
26	Sulawesi Tenggara	15	0	340	776.230
27	Gorontalo	5	5	15	270.000
		89	37		
28	Maluku	10	0	0	0
29	Maluku Utara	8	0	0	0
		18	0		
30	Papua	51	2	0	0
	Indonesia	1443	1660	528.516	2.238.406.896

Sumber : http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_danausumm.asp?pilih=WIL&prop=

Tabel : 4.8
Data Rawa di Beberapa Pulau di Indonesia
Tahun 2007

No.	Pulau	Jenis Rawa	Jumlah Rawa	Luas Potensi (Ha)	Luas Reklamasi (Ha)	Luas Belum Direklamasi (Ha)
1		2	3	4	5	6
1	Sumatera	Rawa Pasang Surut	458	1.997.465	1.423.393	478.799
		Rawa Lebak	454	970.584	464.561	551.538
		Rawa	912	2.968.049	1.887.954	1.030.337
2	Jawa	Rawa Pasang Surut	5	166.490	150.977	15.513
		Rawa Lebak	13	18.461	18.461	0
		Rawa	18	184.951	169.438	15.513
3	Kalimantan	Rawa Pasang Surut	390	1.539.615	1.090.708	448.907
		Rawa Lebak	213	424.407	400.379	24.028
		Rawa	603	1.964.022	1.491.087	472.935
4	Sulawesi	Rawa Pasang Surut	172	524.374	279.437	244.937
		Rawa Lebak	72	227.815	78.403	149.412
		Rawa	244	752.189	357.840	394.349
5	Papua	Rawa Pasang Surut	1	4.216.950	8.655	4.208.295
		Rawa Lebak	83	715.971	44.402	671.569
		Rawa	84	4.932.921	53.057	4.879.864

Sumber : Direkap dari Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Tabel : 4.9
Data Rawa di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Luas Potensi (Ha)	Luas Sudah Reklamasi (Ha)			Luas Belum Direklamasi (Ha)
				Pemerintah	Swasta	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAD	Rawa Pasang Surut	120.309	14.951	37.209	52.160	68.149
		Rawa Lebak	96.049	9.500	-	9.500	86.549
		Rawa	216.358	24.451	37.209	61.660	154.698
2	Sumatera Utara	Rawa Pasang Surut	247.293	28.489	119.011	147.500	99.793
		Rawa Lebak	70.382	11.637	32.192	43.829	26.553
		Rawa	317.675	40.126	151.203	191.329	126.346
3	Sumatera Barat	Rawa Pasang Surut	40.181	-	425	425	39.756
		Rawa Lebak	326.113	30.584	69.798	100.382	224.931
		Rawa	366.294	30.584	70.223	100.807	264.687
4	Riau	Rawa Pasang Surut	640.693	217.748	274.279	492.027	148.666
		Rawa Lebak	50.198	13.630	21.284	34.914	15.284
		Rawa	690.891	231.378	295.563	526.941	163.950
5	Jambi	Rawa Pasang Surut	233.033	-	154.552	154.552	78.481
		Rawa Lebak	38.321	-	14.696	14.696	23.625
		Rawa	271.354	-	169.248	169.248	102.106
6	Bengkulu	Rawa Pasang Surut	3.072	-	572	572	2.500
		Rawa Lebak	87.500	25.600	5.980	31.580	55.920
		Rawa	90.572	25.600	6.552	32.152	58.420
7	Sumatera Selatan	Rawa Pasang Surut	455.949	384.334	45.787	430.121	25.828
		Rawa Lebak	157.846	13.900	106.785	120.685	37.161
		Rawa	613.795	398.234	152.572	550.806	62.989
8	Lampung	Rawa Pasang Surut	201.851	65.655	78.556	144.211	57.640
		Rawa Lebak	72.825	48.825	-	48.825	24.000
		Rawa	274.676	114.480	78.556	193.036	81.640
9	Bangka Belitung	Rawa Pasang Surut	55.084	-	1.825	1.825	53.259
		Rawa Lebak	71.350	6.952	52.398	59.350	12.000
		Rawa	126.434	6.952	54.223	61.175	65.259
10	Banten	Rawa Pasang Surut	19.511	-	14.511	14.511	5.000
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-
		Rawa	19.511	0	14.511	14.511	5.000
11	Jawa Tengah	Rawa Pasang Surut	32.028	14.916	16.112	31.028	1.000
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-
		Rawa	32.028	14.916	16.112	31.028	1.000
12	Jawa Timur	Rawa Pasang Surut	62.207	13.793	44.181	57.974	4.233
		Rawa Lebak	18.461	18.461	-	18.461	-
		Rawa	80.668	32.254	44.181	76.435	4.233
13	Jawa Barat	Rawa Pasang Surut	52.069	7.660	39.779	47.439	4.630
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-
		Rawa	52.069	7.660	39.779	47.439	4.630
14	Yogyakarta	Rawa Pasang Surut	675	-	25	25	650
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-
		Rawa	675	0	25	25	650
15	Bali	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0
16	NTB	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0
17	NTT	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0
18	Sulawesi Selatan	Rawa Pasang Surut	370.555	43.227	86.777	130.004	254.100
		Rawa Lebak	54.700	8.726	-	8.726	31.575
		Rawa	425.255	51.953	86.777	138.730	285.675
19	Gorontalo	Rawa Pasang Surut	11.675	-	1.000	1.000	10.675
		Rawa Lebak	22.507	-	-	0	22.057
		Rawa	34.182	0	1.000	1.000	32.732
20	Sulawesi Tengah	Rawa Pasang Surut	74.124	3.550	762	4.312	69.812
		Rawa Lebak	22.800	17.000	-	17.000	5.800
		Rawa	96.924	20.550	762	21.312	75.612
21	Sulawesi Tenggara	Rawa Pasang Surut	125.352	34.145	12.166	46.311	79.041
		Rawa Lebak	116.620	20.940	2.450	23.390	93.230
		Rawa	241.972	55.085	14.616	69.701	172.271

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Luas Potensi (Ha)	Luas Sudah Reklamasi (Ha)			Luas Belum Direklamasi (Ha)
				Pemerintah	Swasta	Jumlah	
22	Sulawesi Utara	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Barat	Rawa Pasang Surut	61.887	1.000	1.000	2.000	59.887
		Rawa Lebak	10.814	-	-	0	10.814
		Rawa	72.701	1.000	1.000	2.000	70.701
24	Kalimantan Barat	Rawa Pasang Surut	239.541	122.886	80.422	203.308	36.233
		Rawa Lebak	1.585	-	1.585	1.585	-
		Rawa	241.126	122.886	82.007	204.893	36.233
25	Kalimantan Timur	Rawa Pasang Surut	497.371	6.650	394.884	401.534	95.837
		Rawa Lebak	239.637	25.693	213.944	239.637	-
		Rawa	737.008	32.343	608.828	641.171	95.837
26	Kalimantan Selatan	Rawa Pasang Surut	144.700	81.623	7.077	88.700	56.000
		Rawa Lebak	105.124	95.566	9.558	105.124	-
		Rawa	249.824	177.189	16.635	193.824	56.000
27	Kalimantan Tengah	Rawa Pasang Surut	658.003	292.371	104.795	397.166	260.837
		Rawa Lebak	78.061	11.910	42.123	54.033	24.028
		Rawa	736.064	304.281	146.918	451.199	284.865
28	Maluku	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0
30	Papua	Rawa Pasang Surut	4.216.950	-	8.655	8.655	4.208.295
		Rawa Lebak	714.771	43.202	-	43.202	671.569
		Rawa	4.931.721	43.202	8.655	51.857	4.879.864
31	Irian Jaya Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	-	0	-
		Rawa Lebak	1.200	1.200	-	1.200	-
		Rawa	1.200	1.200	0	1.200	0

Sumber : Direkap dari Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Tabel : 4.10
Pemanfaatan Lahan Rawa di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Pemanfaatan Lahan Rawa (Ha)				Jumlah	Belum Dimanfaatkan (Ha)
			Sawah	Kebun	Tambak	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	Rawa Pasang Surut	-	-	51.854	-	51.854	306
		Rawa Lebak	5.452	705	-	956	7.113	2.387
		Rawa	5.452	705	51.854	956	58.967	2.693
2	Sumatera Utara	Rawa Pasang Surut	93.990	50.180	3.130	99.343	246.643	650
		Rawa Lebak	36.527	7.530	20	26.305	70.382	-
		Rawa	130.517	57.710	3.150	125.648	317.025	650
3	Sumatera Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	425	-	425	-
		Rawa Lebak	14.370	73.820	-	1.330	89.520	11.912
		Rawa	14.370	73.820	425	1.330	89.945	11.912
4	Riau	Rawa Pasang Surut	75.173	223.585	462	24.938	324.158	167.869
		Rawa Lebak	9.205	11.621	-	2.688	23.514	11.400
		Rawa	84.378	235.206	462	27.626	347.672	179.269
5	Jambi	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	154.552
		Rawa Lebak	8.342	2.665	-	170	11.177	3.519
		Rawa	8.342	2.665	0	170	11.177	158.071
6	Bengkulu	Rawa Pasang Surut	-	-	572	-	572	-
		Rawa Lebak	11.118	4.378	-	588	16.084	15.496
		Rawa	11.118	4.378	572	588	16.656	15.496
7	Sumatera Selatan	Rawa Pasang Surut	182.763	56.934	7.946	95.504	343.147	86.974
		Rawa Lebak	48.782	1.500	-	23.339	73.621	47.064
		Rawa	231.545	58.434	7.946	118.843	416.768	134.038
8	Lampung	Rawa Pasang Surut	40.949	-	98.735	2.000	141.684	2.527
		Rawa Lebak	33.438	1.615	-	3.472	38.525	10.300
		Rawa	74.387	1.615	98.735	5.472	180.209	12.827
9	Bangka Belitung	Rawa Pasang Surut	-	-	1.825	-	1.825	-
		Rawa Lebak	25.950	8.800	-	14.785	49.535	9.815
		Rawa	25.950	8.800	1.825	14.785	51.360	9.815
10	Banten	Rawa Pasang Surut	-	-	150.977	-	150.977	-
		Rawa Lebak	18.461	-	-	-	18.461	-
		Rawa	18.461	0	150.977	0	169.438	-
11	Jawa Tengah	Rawa Pasang Surut	-	-	31.028	-	31.028	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	31.028	0	31.028	-
12	Jawa Timur	Rawa Pasang Surut	-	-	57.974	-	57.974	-
		Rawa Lebak	18.461	-	-	-	18.461	-
		Rawa	18.461	0	57.974	0	76.435	-
13	Jawa Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	47.439	-	47.439	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	47.439	0	47.439	-
14	Yogyakarta	Rawa Pasang Surut	-	-	150.977	-	150.977	-
		Rawa Lebak	18.461	-	-	-	18.461	-
		Rawa	18.461	0	150.977	0	169.438	-
15	Bali	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
16	NTB	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
17	NTT	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
18	Sulawesi Selatan	Rawa Pasang Surut	-	-	103.688	3.209	106.897	13.491
		Rawa Lebak	2.528	-	-	1.300	3.828	657
		Rawa	2.528	0	103.688	4.509	110.725	14.148
19	Gorontalo	Rawa Pasang Surut	-	-	1.000	-	1.000	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	1.000	0	1.000	-
20	Sulawesi Tengah	Rawa Pasang Surut	400	-	3.812	-	4.212	100
		Rawa Lebak	6.600	1.900	-	865	9.365	7.635
		Rawa	7.000	1.900	104.688	865	13.577	7.735
21	Sulawesi Tenggara	Rawa Pasang Surut	2.104	250	29.276	7.521	39.151	7.160
		Rawa Lebak	11.690	-	-	4.623	16.313	7.077
		Rawa	13.794	250	29.276	12.144	55.464	14.237

Lanjutan Tabel 4.10

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Pemanfaatan Lahan Rawa (Ha)				Jumlah	Belum Dimanfaatkan (Ha)
			Sawah	Kebun	Tambak	Lainnya		
22	Sulawesi Utara	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	1.280	80	1.360	640
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	1.280	80	1.360	640
24	Kalimantan Barat	Rawa Pasang Surut	117.313	-	3.646	654	121.613	81.695
		Rawa Lebak	1.585	-	-	-	1.585	-
		Rawa	118.898	0	3.646	654	123.198	81.695
25	Kalimantan Timur	Rawa Pasang Surut	10.098	18.165	23.279	10.435	61.977	339.557
		Rawa Lebak	12.954	18.163	-	12.000	43.117	196.500
		Rawa	23.052	36.328	23.279	22.435	105.094	536.057
26	Kalimantan Selatan	Rawa Pasang Surut	52.985	7.593	2.364	11.558	74.500	14.200
		Rawa Lebak	77.026	-	-	-	77.026	28.098
		Rawa	130.011	7.593	2.364	11.558	151.526	42.298
27	Kalimantan Tengah	Rawa Pasang Surut	163.884	16.046	4.772	57.849	242.551	154.615
		Rawa Lebak	24.890	14.449	-	10.282	49.621	4.412
		Rawa	188.774	30.495	4.772	68.131	292.172	159.027
28	Papua	Rawa Pasang Surut	8.655	-	-	-	8.655	-
		Rawa Lebak	14.305	-	-	1.480	-	27.417
		Rawa	22.960	0	0	1.480	8.655	27.417
29	Irian Jaya Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	0	-
		Rawa Lebak	250	-	-	850	1.100	100
		Rawa	250	0	0	850	1.100	100

Sumber : Direkap dari Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Tabel : 4.11
Detil Daerah Rawa di Beberapa Tempat di Indonesia
Tahun 2007

No.	Nama Rawa	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Rencana (Potensi) (Ha)		Fungsi Irigasi (Ha)
						Pasang Surut	Lebak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sei Pinyuh	Sungai Pinyuh	Sei Pinyuh	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		400	298
2	Sei Bakau Besar	Sei Bakau Besar	Sei Piyuh	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		350	347
3	Anjungan	Anjungan Melancar	Sei Piyuh	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		1.335	1.078
4	Punun Kecil	Peniti Besar	Sei Piyuh	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		220	152
5	Peniraman	Peniti Dalam	Sei Piyuh	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		170	100
6	Nusapati	Peniti Dalam	Sei Piyuh	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		350	325
7	Wajok Hilir	Wajok Hilir	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		600	300
8	Jungkat	Jungkat	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		650	200
9	Sei Nipah	Sei Nipah	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		713	450
10	Air Hitam	Pendi Luar	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		287	200
11	Sui Burung	Sui Burung	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		500	450
12	Penepat Kiri	Peniti Besar	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		500	100
13	Penepat Kanan	Peniti Dalam II	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		300	100
14	Sei Kunyit	Sei Duri I	Sei Kunyit	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		650	397
15	Sei Limau	Sei Limau	Sei Kunyit	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		100	92
16	Pasir	Kampung Pasir	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		300	300
17	Cengkodok	Kampung Pasir	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		300	200
18	Sepuk Merah	Kampung Pasir	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		300	75
19	Mengkacak	Terusan	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		150	75
20	Tanjung	Tanjung	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		200	165
21	Kuala Secapah	Kuala Secapah	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		50	5
22	Sei Bakau Kecil	Bakau Kecil	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		300	250
23	Parit Wan Salim	Parit Wan Salim	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		200	0
24	Semayar	Semayar	Mempawah Hilir	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		100	0
25	Kapuas Kecil I	Pal IX	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	3079		1.270
26	Kapuas Kecil II	Sei Kakap	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	3531		1.509
27	Kapuas Kecil III	Sungai Itik	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	4084		1.155
28	Kakap Jawi	Sei Kakap	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1050		895
29	Kakap Kalimas	Kalimas	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	949		908
30	Betutu	Punggur Besar	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1278		727
31	Punggur	Punggur Kecil	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2225		505
32	Selat Kering	Punggur Besar	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	365		113
33	Sei Rengas	Sei Rengas	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat			
34	Rasau Jaya 1	Rasau Jaya I	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1400		387
35	Rasau Jaya 2	Rasau Jaya II	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1537		600
36	Rasau Jaya 3	Rasau Jaya III	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2773		925
37	Rasau Jaya 4	Bintang Mas	Sei Kakap	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1400		370
38	Sei Bulan	Sungai Bulan	Sei Raya	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2190		284
39	Pinang Dalam	Pinang Dalam	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1771		138
40	Jangkang I	Jangkang I	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1906		381
41	Jangkang II	Jangkang II	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1250		183
42	Air Putih	Air Putih	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2291		527
43	Desa Kubu	Kubu	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	3900		404
44	Olak-Olak Kubu	Kubu Kampung	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	4922		475
45	Pinang Luar	Pinang Luar	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2224		510
46	Teluk Kemantan	Teluk Kemantan	Kubu	Kota Pontianak	Kalimantan Barat			
47	Arus Deras	Arua Deras	Teluk Pakedai	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		750	400
48	Sei Nipah	Sungai Deras	Teluk Pakedai	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		1.497	450
49	Sungai Radak	Sungai Radak I	Terentang	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		1.742	213
50	Terentang	Sungai Dungun	Terentang	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		1.725	674
51	Teluk Betung II	Sungai Karawang	Batu Ampar	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		2.452	200
52	Teluk Nibung	Teluk Nibung	Batu Ampar	Kota Pontianak	Kalimantan Barat			
53	Kedamin Hilir	Kedamin Hilir	Kedamin	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		800	400
54	Kedamin Hulu	Kedamin Hulu	Kedamin	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		500	370
55	Semelagi Sei Wie	Semelagi Kecil	Tujuh Belas	Bengkayang	Kalimantan Barat	3965		3.965
56	Sei Raya	Sei Raya	Sei Raya	Bengkayang	Kalimantan Barat	615		615
57	Sukan Tengah		Tanjung Redeb	Berau	Kalimantan Timur		2.000	
58	Tanying Batu		Pulau Dewara	Berau	Kalimantan Timur	50		
59	Pilanjau		Sembaliung	Berau	Kalimantan Timur	50		
60	Tanjung Palas		Tanjung Palas	Bulongan	Kalimantan Timur		3.734	
61	Tanjung Buka		Tanjung Palas	Bulongan	Kalimantan Timur		2.700	
62	Seliman		Sembakung	Bulongan	Kalimantan Timur		2.000	
63	Tanjung Keramat		Pulau Bunyu	Bulongan	Kalimantan Timur		1.000	
64	Pulau Bunyu		Pulau Bunyu	Bulongan	Kalimantan Timur		114	
65	Nunukan		Nunukan	Bulongan	Kalimantan Timur		4.366	
66	Ma Jaipang		Muara Kaman	Kutai	Kalimantan Timur	4000		

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Nama Rawa	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Rencana (Potensi) (Ha)		Fungsi Irigasi (Ha)
						Pasang Surut	Lebak	
67	Resak		Muara Kaman	Kutai	Kalimantan Timur	1000		
68	Anggana		Tenggarong	Kutai	Kalimantan Timur	2485		
69	Sebuntal		Muara Badak	Kutai	Kalimantan Timur	950		
70	Palaran		Palaran	Kutai	Kalimantan Timur	200		
71	Seliba		Tanjung Aru	Pasir	Kalimantan Timur	3118		
72	Muara Pasir		Tanjung Aru	Pasir	Kalimantan Timur		1.500	
73	Saemba Walati I	Barati	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah	1200		700
74	Saemba Walati II	Saemba	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah	2300		1.300
75	Saemba Walati III	Singkona	Pamona Selatan	Poso	Sulawesi Tengah	2000		500
76	Saemba Walati IV	Saemba	Tomata	Poso	Sulawesi Tengah	2000		500
77	Saemba Walati V	Taripa	Pamona Utara	Buol	Sulawesi Tengah	2000		1.800
78	Oyom Lampasio I	Tinading	Baolan	Buol	Sulawesi Tengah	2000		1.850
79	Oyom Lampasio II	Batuan	Baolan	Buol	Sulawesi Tengah	500		450
80	Oyom Lampasio III	Salusu Pande	Baolan	Buol	Sulawesi Tengah	1000		500
81	Oyom Lampasio IV	Dondo	Dondo	Buol	Sulawesi Tengah	1500		
82	Oyom Lampasio V	Kamalu	Dondo	Buol	Sulawesi Tengah	1500		
83	Oyom Lampasio V I	Buga	Dondo	Buol	Sulawesi Tengah		1.000	
84	Latambalako	Tompia	Dondo	Buol	Sulawesi Tengah	2000		
85	Unit Seruyan V		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		2.250	600
86	Unit Seruyan VI		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		600	600
87	Unit Seruyan VII		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		845	
88	Unit Seruyan VIII		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.020	
89	Unit Bagendang Hulu		Mentaya H.Ut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.600	
90	Bagendang Hilir		Mentaya H.Ut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.000	500
91	Unit Basawang		Mentaya H.Ut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		950	475
92	Regai		Mentaya H.Ut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.100	550
93	Unit Samodra Kota		Hulu Selatan	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		750	105
94	Unit Samodra Kecil		Hulu Selatan	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		750	69
95	Unit Pelansian I		NB Ketapang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.250	732
96	Unit Pelansian II		MB Ketapang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		2.500	1.000
97	Unit Cempaga Mulya		Cempaga	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		10.000	150
98	Unit Mentaya Seberang		MB Ketapang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	3000		52
99	Handil Bali I		Bapinang Hulu	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.800	700
100	Handil II		Bapinang Hulu	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.935	500
101	Unit Satiruk		P. Panamut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.000	
102	Unit Terantang		Mendawai	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		10.000	650
103	Unit Ramban		Mendawai	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		10.000	
104	Unit Pagatan		Katingan Kuala	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.000	
105	Unit Katingan 3		Mandawai	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		900	178
106	Unit Katingan 2		Katingan Kuala	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		4.600	2.300
107	Unit Katingan 1		Katingan Kuala	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		4.300	1.300
108	Unit Terendang		Katingan Kuala	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		10.000	
109	Unit Paduran I		Kahayan Kuala	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.400	850
110	Padurian 2		Kahayan Kuala	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.125	142
111	Padurian 3		Kahayan Kuala	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.625	350
112	Unit Sabangau		Kahayan Kuala	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.000	
113	U.Handil Umar Jaya		Pandih Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.750	68
114	Unit Tailo		Bandih Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.026	367
115	Unit Pangkoh 2		Pandih Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.934	380
116	Unit Kantan		Pandih Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.927	643
117	Maliku Kiri		Maliku	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.699	1.017
118	Maliku Kanan		Maliku	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.325	981
119	Unit Maliku A		Maliku	Kapuas	Kalimantan Tengah		290	120
120	Unit Maliku B		Maliku	Kapuas	Kalimantan Tengah		527	100
121	Unit Kanamit		Maliku	Kapuas	Kalimantan Tengah		7.135	2.500
122	Unit Kanamit Muara		Maliku	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.325	
123	Unit Pulang Pisau		Kahayan Hilir	Kapuas	Kalimantan Tengah		2.000	95
124	Unit Pilang		Kahayan Hilir	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.500	55
125	Unit Jabiren		Kahayan Hilir	Kapuas	Kalimantan Tengah		2.936	75
126	Unit Anjir Kalampah		Kahayan Hilir	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.730	185
127	Mantaren		Kahayan Hilir	Kapuas	Kalimantan Tengah		2.500	162
128	Unit Tahai		P. Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.787	1.286
129	Balanti 1		P. Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.600	1.000
130	Balanti 2		P. Batu	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.970	1.500
131	Unit Mentangan		Mentangan	Kapuas	Kalimantan Tengah		833	417
132	Terusan Tengah		Selat	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.652	780
133	U. Besarang P.Sari		Besarang	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.148	1.729
134	Unit Palingkau		K. Murung	Kapuas	Kalimantan Tengah		4.000	150
135	Unit Handil Palambang		P. Petak	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.000	
136	Unit Sei Asam		P. Petak	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.200	34
137	Unit Sakalagun		K. Barat	Kapuas	Kalimantan Tengah		2.994	729

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Nama Rawa	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Rencana (Potensi) (Ha)		Fungsi Irigasi (Ha)
						Pasang Surut	Lebak	
138	Unit Talas		K. Barat	Kapuas	Kalimantan Tengah		5.800	1.044
139	Unit Anjir Serapat		K. Timur	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.800	950
140	Unit Tamban Luar		Selat	Kapuas	Kalimantan Tengah		3.715	2.118
141	Unit Tamban Lupak		Lupak	Kapuas	Kalimantan Tengah		1.492	763
142	Unit Cemara Lebat		K. Kuala	Kapuas	Kalimantan Tengah		2.000	82
143	Unit Parapak		Dusun Tengah	Kapuas	Kalimantan Tengah	1500		115
144	Unit Kalahien		Dusun Tengah	Kapuas	Kalimantan Tengah	2000		23
145	Sesayap		Sesayap	Bulungan	Kalimantan Timur		4.292	
146	Rantau Pulung		Sengata	Kutai	Kalimantan Timur	1500		
147	Sei Meriam			Kutai	Kalimantan Timur	925		
148	Palaran		Palaran		Kalimantan Timur	200		20
149	Anggana	Anggana	Anggana		Kalimantan Timur	2500		133
150	Sebuntai	Sebuntai	Muara Badak		Kalimantan Timur	500		300
151	Sei Meriam	Sei Meriam	Anggana		Kalimantan Timur			500
152	Sebalung		Long Kali	Pasir	Kalimantan Timur	3000		
153	Sesulu		Waru	Pasir	Kalimantan Timur	250		
154	Muara Adang		Kuaro	Pasir	Kalimantan Timur	3500		
155	Waru		Waru	Pasir	Kalimantan Timur	1500		
156	Yone		Penajam	Pasir	Kalimantan Timur	1500		
157	Sebakung I	Babulu	Babulu	Pasir	Kalimantan Timur			
158	Sebakung II	Babulu	Babulu	Pasir	Kalimantan Timur			
159	Sebakung III	Babulu	Babulu	Pasir	Kalimantan Timur			
160	Sebakung - Maruat	Babulu	Babulu	Pasir	Kalimantan Timur			
161	Sebakung - Patiku	Babulu	Babulu	Pasir	Kalimantan Timur			
162	Jone	Jone	Tanah Grogot	Pasir	Kalimantan Timur			
163	Petung	Petung	Penajam	Pasir	Kalimantan Timur			
164	Muara Adang	Adang	Long Ikis	Pasir	Kalimantan Timur			
165	Sebakung V	Babulu	Babulu	Pasir	Kalimantan Timur			
166	Sebang - MA Adang	Long Ikis	Long Ikis	Pasir	Kalimantan Timur			
167	Tanjung Perapat		Taliyasan	Berau	Kalimantan Timur		2.000	
168	Bedaun		Taliyasan	Berau	Kalimantan Timur	50		
169	Taliyasan		Taliyasan	Berau	Kalimantan Timur		4.000	
170	Selakau Semelagi	Pangkai Baman	Selakau	Sambas	Kalimantan Barat	5562		5.562
171	Buduk Sempadang	Buduk Sempadang	Selakau	Sambas	Kalimantan Barat	1200		350
172	Selakau Sebangkau	Parit Baru	Selakau	Sambas	Kalimantan Barat	1292		1.292
173	Sarang Burung	S.B.Danau	Jawai	Sambas	Kalimantan Barat	2087		2.087
174	Sei Nyirih	Bakau	Jawai	Sambas	Kalimantan Barat	490		490
175	Sebangkau Pemangkat	Harapan	Pemangkat	Sambas	Kalimantan Barat	2499		2.499
176	Seburing	Seburing	Pemangkat	Sambas	Kalimantan Barat	890		890
177	Sei Kalambu	Sei Kelambu	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	360		360
178	Seturang	Mkr Sekuntum	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	455		455
179	Tebas Kompleks	Tebas	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat			
180	Sebubus	Sebubus	Paloh	Sambas	Kalimantan Barat	923		923
181	Pimpinan	Mt.Segantar	TLK.Keramat	Sambas	Kalimantan Barat	4202		4.202
182	Simpang Empat	Simpang Empat	TLK.Keramat	Sambas	Kalimantan Barat	750		750
183	Sekura	Sekura	TLK.Keramat	Sambas	Kalimantan Barat	250		250
184	Lumbang	Lumbang	Sambas	Sambas	Kalimantan Barat	327		327
185	Sei Pinang	Sei Rambah	Sambas	Sambas	Kalimantan Barat	254		254
186	Sajingan	Semanga	Sejangkung	Sambas	Kalimantan Barat			
187	Pelerangan	Benawai Agung	Sukadana	Ketapang	Kalimantan Barat		400	200
188	Padu Banjar	Padu Banjar	Sukadana	Ketapang	Kalimantan Barat		200	200
189	Sei Mata-Mata	Mata-mata	Sukadana	Ketapang	Kalimantan Barat		1.566	900
190	Banjar Sari I	Banjarsari	Kendawangan	Ketapang	Kalimantan Barat		2.000	1.025
191	Membuluh	Kendawang Kn	Kendawangan	Ketapang	Kalimantan Barat		2.280	738
192	Sei Awan	Sei Awan Kanan	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		887	875
193	Tempurukan I	Tempurukan	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		136	135
194	Tempurukan II	Tempurukan	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		197	190
195	Sei Putri I	Sei Putri	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		245	245
196	Sei Putri II	Sei Putri	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		135	135
197	Tj. Baik Budi III	Tj.Baik Budi	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		75	75
198	Tj. Baik Budi II	Tj.Baik Budi	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		780	700
199	Tj. Baik Budi I	Tj.Baik Budi	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		169	169
200	Kuala Tolak	Kuala Tolak	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		320	300
201	Pelansi	Kuala Satong	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		232	230
202	Pematang Gadung	Tuan-Tuan	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		6.000	5.420
203	Negeri Baru	Negeri Baru	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		1.200	475
204	Bintang Mosia	Sei Kinjil	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		250	250
205	Sei Nanjung	Sei Nunjung	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		408	408
206	Suka Baru	Suka Baru	Matan Hir Utr	Ketapang	Kalimantan Barat		115	115
207	Teluk Batang I/5	Sponti Jaya	Teluk Batang	Ketapang	Kalimantan Barat		3.244	944
208	Teluk Batang I/4	Wono Rejo	Teluk Batang	Ketapang	Kalimantan Barat		1.578	378

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Nama Rawa	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Rencana (Potensi) (Ha)		Fungsi Irigasi (Ha)
						Pasang Surut	Lebak	
209	Teluk Batang I/3	Podo Rukun	Teluk Batang	Ketapang	Kalimantan Barat		1.572	472
210	Teluk Batang I/6	Sei Sepeti	Teluk Batang	Ketapang	Kalimantan Barat		3.350	950
211	Teluk Batang I/2	Banyu Abang	Teluk Batang	Ketapang	Kalimantan Barat		2.917	461
212	Mendawa Linda	Mendawa Linda	Teluk Batang	Ketapang	Kalimantan Barat		5.613	290
213	Unit Taruntun		Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	1000		500
214	Unit Kuala Jelai		Buik	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah		1.500	750
215	Unit Kumpai Batu		Arut Selatan	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah		250	250
216	Unit Sebuai		Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah		370	
217	Unit Sekonyer		Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah		1.075	1.000
218	Unit Teluk Pulau		Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah		400	
219	Pematang Limau		Seruyan Hilir	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		2.800	2.000
220	Unit Pematang Kambat		Seruyan Hilir	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.000	400
221	Unit Seruyan I		Seruyan Hilir	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		460	150
222	Unit Seruyan II		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.400	460
223	Unit Seruyan III		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		1.700	500
224	Unit Seruyan IV		Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah		2.100	500

Sumber : http://sda.pu.go.id/rawa_list.php?admin=semua

Tabel : 4.12
Data Air Tanah dan Kepadatan Penduduk di Indonesia

No	Provinsi	Lokasi Air Tanah Kabupaten	Debit Pompa (Lt/det)	Kepadatan Penduduk per km² (2006)
1	2	3	4	5
1	Lampung	Lampung Selatan	307,6	204
		Lampung Tengah	488,5	
		Lampung Utara	55,5	
		Lampung Barat	10,4	
		Way Kanan	29	
		Tulang Bawang	99	
2	Jawa Tengah	Sragen	3682	989
		Boyolali	262	
		Blora	3337,95	
		Pati	50	
		Purworejo	10	
		Cilacap	35	
		Kudus	1373	
		Klaten	2078	
		Brebes	823,5	
		Tegal	1265,5	
		Pemalang	780	
		Jepara	934,2	
		Karanganyar	156	
3	Kalimantan Barat	Pontianak	74,35	28
		Sambas	9,4	
		Bengkayang	17,5	
		Sanggau	4,4	
		Ketapang	3,8	
4	Kalimantan Tengah	Kapuas	94,37	13
		Kotawaringin Timur	28,07	
5	Sulawesi Tengah	Donggala	1332,2	37
		Poso	146	
6	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA	1018	211
		Dompu	448	
		Lombok Barat	55	
		Lombok Timur	279	

Sumber : <http://sda.pu.go.id/airtanah.php> (direkap oleh Pusdata) dan BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 4.13.1
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Tahun 2007

No.	Provinsi	Lintas Provinsi	Jumlah Daerah Irigasi	Lintas Kabupaten/ Kota	Utuh Kabupaten/ Kota
		(ha)	(DI)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6
A LINTAS PROVINSI					
1	BBWS Sumatera VI (Jambi dan Sumatera Barat)	18.936,0			
2	UPT (Bengkulu dan Sumatera Barat)	6.600,0			
3	BBWS Sumatera VIII Sumatera Selatan	59.728,0			
	Lampung	8.100,0			
4	BBWS Citanduy Jawa Barat	5.052,0			
	Jawa Tengah	22.417,0			
5	BBWS Citanduy Jawa Barat	432,0			
	Jawa Tengah	563,0			
6	BBWS Serayu Opak Jawa Tengah	115,0			
	DI Yogyakarta	149,0			
7	BBWS Bengawan Solo Jawa Tengah	24.461,0			
	Jawa Timur	500,0			
8	BBWS Jratunseluna Jawa Tengah	564,0			
	Jawa Timur	365,0			
B LINTAS KABUPATEN/ KOTA					
1	Nanggroe Aceh Darussalam		1	19.360,0	
2	Sumatera Utara		2	10.650,0	
3	Sumatera Barat		1	4.200,0	
4	Sumatera Selatan		1	10.163,0	
5	Lampung		2	97.116,0	
6	Banten		3	51.104,0	
7	Jawa Barat		6	346.056,0	
8	Jawa Tengah		14	190.155,0	
9	DI Yogyakarta		1	5.159,0	
10	Jawa Timur		13	150.567,0	
11	Bali		2	9.598,0	
12	Nusa Tenggara Barat		7	28.101,0	
13	Nusa Tenggara Timur				
14	Sulawesi Tengah		1	7.922,0	
15	Kalimantan Selatan		1	6.000,0	
16	Sulawesi Selatan		9	113.763,0	
B UTUH KABUPATEN/ KOTA					
1	Nanggroe Aceh Darussalam		12		101.561,00
2	Sumatera Utara		10		43.849,00
3	Sumatera Barat		10		63.747,00
4	Jambi		2		9.429,00
5	Sumatera Selatan		13		113.461,00
6	Bengkulu		4		23.608,00
7	Bangka Belitung		2		8.868,00
8	Lampung		23		176.526,00
9	Banten		3		48.441,00
10	Jawa Barat		27		270.015,00
11	Jawa Tengah		17		108.723,34
12	DI Yogyakarta		1		7.152,00
13	Jawa Timur		22		156.612,00
14	Nusa Tenggara Barat		3		12.673,00
15	Nusa Tenggara Timur		23		87.994,00
16	Kalimantan Selatan		4		15.090,00
17	Sulawesi Utara		3		16.782,00
18	Sulawesi Barat		2		20.085,00
19	Sulawesi Tengah		6		32.142,00
20	Sulawesi Tenggara		2		19.471,00
21	Sulawesi Selatan		33		260.701,00
22	Maluku		7		34.034,84
23	Maluku Utara		2		7.500,00
24	Papua		2		10.200,00
25	Irian Jaya Barat		1		3.450,00

Sumber : Ditjen SDA Departemen PU, 2007 (Lampiran I Kepmen 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Tabel 4.13.2
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Tahun 2007

No.	Provinsi	Lintas Kabupaten/ Kota (ha)	Jumlah Daerah Irigasi	Utuh Kabupaten/ Kota (ha)	Jumlah Daerah Irigasi
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.344,00	2	72.303,00	42
2	Sumatera Utara	8.712,00	17	69.456,00	47
3	Sumatera Barat	14.305,21	31	36.830,73	24
4	Riau			104.784,00	57
5	Jambi			7.933,00	5
6	Sumatera Selatan			21.718,00	14
7	Bengkulu	514,00	1	13.689,00	8
8	Bangka Belitung			9.036,00	5
9	Lampung	3.851,00	4	22.386,00	14
10	Banten			23.203,00	13
11	Jawa Barat	16.424,00	34	119.625,00	75
12	Jawa Tengah	32.694,01	63	56.266,50	35
13	DI Yogyakarta	4.890,87	36	12.222,00	8
14	Jawa Timur	49.862,00	94	139.897,00	94
15	Bali	8.033,00	15	23.872,00	18
16	Nusa Tenggara Barat			65.984,00	39
17	Nusa Tenggara Timur	1.630,00	3	56.295,00	38
18	Kalimantan Barat			11.704,00	8
19	Kalimantan Tengah			38.051,00	25
20	Kalimantan Selatan			41.602,00	26
21	Kalimantan Timur			63.051,00	47
22	Sulawesi Utara	2.895,00	3	16.533,00	11
23	Gorontalo	2.688,00	2	15.623,00	10
24	Sulawesi Tengah			48.777,00	30
25	Sulawesi Tenggara	1.406,00	3	18.085,00	10
26	Sulawesi Selatan	5.016,00	3	56.488,00	32
27	Sulawesi Barat			2.800,00	2
28	Maluku			38.499,00	22
29	Maluku Utara			43.809,80	33
30	Papua			3.150,00	2
31	Irian Jaya Barat			12.285,00	9

Sumber : Ditjen SDA Departemen PU, 2007 (Lampiran II Kepmen 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Tabel 4.13.3
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
Tahun 2007

No.	Provinsi	Utuh Kabupaten/ Kota (ha)	Jumlah Daerah Irigasi
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	186.603,00	1.119
2	Sumatera Utara	182.723,00	932
3	Riau	55.848,00	165
4	Bengkulu	45.448,00	330
5	Jambi	15.886,00	86
6	Sumatera Barat	169.033,40	1.266
7	Sumatera Selatan	34.696,00	131
8	Lampung	122.825,29	762
9	Bangka Belitung	10.017,00	38
10	Banten	106.100,53	962
11	Jawa Barat	219.640,00	1.017
12	Jawa Tengah	481.055,18	8.982
13	DI Yogyakarta	46.480,74	2.468
14	Jawa Timur	459.436,46	7.701
15	Kalimantan Barat	68.229,00	514
16	Kalimantan Selatan	71.028,00	252
17	Kalimantan Tengah	35.930,00	103
18	Kalimantan Timur	129.635,00	438
19	Sulawesi Selatan	211.626,00	1.473
20	Sulawesi Barat	28.442,00	214
21	Sulawesi Tengah	61.157,49	162
22	Sulawesi Tenggara	28.268,00	73
23	Sulawesi Utara	38.631,00	216
24	Gorontalo	12.620,00	30
25	Bali	101.505,00	832
26	Nusa Tenggara Barat	102.723,00	304
27	Nusa Tenggara Timur	130.906,00	1.199
28	Maluku	21.474,00	35
29	Maluku Utara	7.169,00	19
30	Irian Jaya Barat	4.621,00	9
31	Papua	5.811,00	28

Sumber : Ditjen SDA Departemen PU, 2007 (Lampiran III Kepmen 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Tabel 4.14
Rekapitulasi Daerah Irigasi
Tahun 2007

No.	Provinsi	Luas Potensial (Ha)	Luas Terbangun (Ha)	
			Jaringan Utama	Jaringan Tersier
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	384.171,00	346.478,00	285.893,00
2	Sumatera Utara	315.390,00	308.500,00	308.426,00
3	Riau	160.632,00	147.549,00	144.058,00
4	Bengkulu	89.859,00	89.434,00	86.236,00
5	Jambi	52.184,00	52.184,00	51.030,00
6	Sumatera Barat	288.116,13	280.538,48	279.227,48
7	Sumatera Selatan	239.766,00	199.325,00	197.646,00
8	Lampung	430.785,20	425.552,20	408.391,20
9	Bangka Belitung	28.771,00	28.771,00	27.599,00
10	Banten	228.848,53	228.764,53	218.916,53
11	Jawa Barat	977.244,00	768.498,00	770.748,00
12	Jawa Tengah	917.473,53	917.151,53	917.151,53
13	DI Yogyakarta	76.053,52	76.053,52	76.053,52
14	Jawa Timur	951.706,46	951.326,46	951.321,46
15	Kalimantan Barat	79.933,00	79.933,00	79.933,00
16	Kalimantan Selatan	133.720,00	128.630,00	128.630,00
17	Kalimantan Tengah	73.981,00	73.356,00	72.064,00
18	Kalimantan Timur	192.686,00	192.261,00	189.672,00
19	Sulawesi Selatan	647.594,00	641.288,00	639.230,00
20	Sulawesi Tengah	149.998,49	-	1.247,50
21	Sulawesi Tenggara	67.230,00	61.268,00	46.945,00
22	Sulawesi Utara	74.841,00	74.841,00	63.039,00
23	Gorontalo	30.931,00	28.431,00	24.402,00
24	Bali	143.008,00	143.008,00	132.339,76
25	Nusa Tenggara Barat	209.481,00	209.081,00	178.572,00
26	Nusa Tenggara Timur	276.825,00	240.386,00	237.107,00
27	Maluku	94.007,84	66.709,84	58.184,84
28	Maluku Utara	58.478,80	44.579,00	39.163,50
29	Papua	39.517,00	39.517,00	39.517,00
Total		7.413.232,50	6.843.414,56	6.652.744,32

Sumber : http://sda.pu.go.id/IRIGASI/New_irigasi2007.ASP (direkap oleh Pusdata)

Tabel : 4.15
Data Bendungan Berdasarkan Nama Bendungan di Indonesia

No.	Nama Bendungan	Elevasi & Luas Muka Air (MA) Waduk					
		MA Banjir		MA Normal		MA Minimum	
		m	Ha	m	Ha	m	Ha
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pongkor	511,00	20,00	510,00	10,77	-	-
2	Saguling	645,00	5.343,00	643,00	4.869,00	623,00	-
3	Cirata	233,00	-	220,00	6.200,00	205,00	-
4	Jatiluhur	111,50	8.440,00	107,00	7.780,00	75,00	2.730,00
5	Cileunca	1.418,75	182,50	1.417,50	180,00	1.408,50	40,00
6	Cipanunjang	1.446,50	191,00	1.446,00	181,00	1.422,00	24,00
7	Darma	713,40	410,00	712,50	397,00	697,00	20,00
8	Situ Patok	33,20	175,50	32,40	175,00	23,85	2,00
9	Malahayu	57,55	80,09	55,75	70,20	46,50	12,60
10	Cacaban	78,75	900,00	77,50	790,00	50,00	100,00
11	Penjalin	340,45	132,00	339,50	120,00	327,00	19,00
12	Mrica	234,50	-	231,00	1.250,00	224,50	-
13	Garung	1.200,50	-	1.199,00	67,00	1.174,00	-
14	Sempor	73,70	290,00	72,00	275,00	43,00	75,00
15	Wadaslintang	190,30	1.460,00	185,00	1.320,00	124,00	230,00
16	Pejengkolan	43,90	6,40	39,50	4,85	35,20	3,95
17	Klego	240,00	76,40	239,50	68,60	235,00	15,00
18	Kedung Ombo	95,00	4.950,00	90,00	4.600,00	64,50	1.000,00
19	Greneng	121,50	-	120,80	51,00	111,68	-
20	Nglangon	79,50	18,00	79,00	17,00	70,00	2,40
21	Tempuran	9,00	-	8,00	4,72	4,00	-
22	Lodan Wetan	47,78	123,36	46,50	97,97	37,00	7,61
23	Gunung Rowo	321,00	-	320,00	-	307,07	-
24	Gembong	208,75	-	207,00	110,00	184,40	-
25	Nawangan	230,00	11,00	229,10	10,40	213,50	0,24
26	Ngancar	249,50	35,60	248,50	34,00	236,73	5,20
27	Song Putri	225,08	8,60	224,00	8,20	213,50	0,90
28	Plumbon	226,00	-	225,00	121,10	222,00	-
29	Parangjoho	198,00	204,25	196,00	200,00	184,00	-
30	Wonogiri/Gajah Mungkur	138,30	9.100,00	136,00	7,36	127,00	2,67
31	Krisak	113,75	-	113,50	44,00	-	-
32	Cengklik	143,50	276,00	142,60	253,00	133,49	-
33	Delingan	179,00	50,00	148,00	47,00	169,50	-
34	Ketro	100,00	110,00	99,00	81,60	92,10	8,00
35	Sermo	140,88	180,00	136,60	159,00	113,70	37,50
36	Pacal	116,35	-	115,00	520,00	97,00	390,00
37	Prijetan	51,52	-	49,00	170,00	47,00	-
38	Gondang	39,45	660,00	38,00	544,00	29,40	535,00
39	Ngebek	-	-	733,00	143,00	726,50	-
40	Pondok	107,50	430,00	106,50	380,00	94,00	84,60
41	Selorejo	622,60	420,00	622,00	400,00	598,00	100,00
42	Sengguruh	293,10	260,00	292,50	237,00	291,40	220,00
43	Wlingi	164,50	-	163,00	3,80	162,00	-
44	Lahor	274,90	300,00	272,70	260,00	253,00	60,00

Lanjutan Tabel 4.15

No.	Nama Bendungan	Elevasi & Luas Muka Air (MA) Waduk					
		MA Banjir		MA Normal		MA Minimum	
		m	Ha	m	Ha	m	Ha
45	Sutami	277,00	1.700,00	272,50	1.500,00	246,00	500,00
46	Wonorejo	185,00	400,00	183,00	380,00	141,00	-
47	Bening/Widas	109,30	590,00	108,60	570,00	96,00	73,00
48	Sampean Baru	123,10	57,50	120,00	35,00	118,00	24,00
49	Klampis	33,00	280,00	31,80	244,00	27,50	90,00
50	Siruar	905,50	-	905,00	1.100,00	899,00	-
51	Sigura-gura	-	-	735,40	-	132,60	-
52	Tangga	-	-	506,00	18,40	505,00	-
53	Kotopanjang	-	-	85,00	-	13,50	-
54	Muka Kuning	-	-	19,00	-	-	-
55	Duriangkang	8,54	-	7,50	2.340,00	1,00	-
56	Ladi	-	-	-	107,18	-	-
57	Sei Harapan	9,54	-	3,31	68,80	-	-
58	Way Rarem	57,00	130,00	54,00	106,10	47,20	50,00
59	Way Jepara	37,90	-	36,50	310,00	26,50	137,00
60	Betutegi	281,50	2.020,00	274,00	1.700,00	208,00	100,00
61	Riam Kanan	63,00	9.200,00	60,00	3.200,00	52,00	-
62	Manggar	6,40	200,00	5,80	127,00	2,70	-
63	Samboja	12,04	-	11,30	197,00	9,50	-
64	Larona (Batu Besi)	1.322,00	-	1.319,60	-	1.317,80	-
65	Bakaru	617,00	212,00	615,50	199,85	612,00	96,12
66	Kalola	43,00	2.150,00	39,00	1.330,00	32,40	200,00
67	Bili-Bili	103,00	18.500,00	99,50	17.000,00	65,00	2.100,00
68	Palasari	80,55	120,00	77,00	40,00	58,00	5,20
69	Grogak	130,50	380,00	126,00	305,00	115,00	120,00
70	Batujae	92,50	890,00	89,00	-	87,00	-
71	Pengga	59,00	641,70	57,00	533,30	50,00	167,00
72	Batu Bokah	56,00	27,50	55,60	25,30	41,00	1,00
73	Bringe	-	-	169.605,00	1,75	153.335,00	-
74	Gunung Paok	-	-	13,50	3,60	-	-
75	Mamak	97,00	295,00	93,20	270,00	74,00	49,50
76	Tiu Kulit	59,40	122,00	57,00	110,00	41,80	23,00
77	Batu Bulan	60,00	650,00	-	-	47,00	-
78	Sepayung Dalam	85,40	-	84,00	54,00	-	-
79	Selante	-	-	53,00	8,43	-	-
80	Ncera	78,00	4,96	76,00	4,20	66,00	-
81	Roi/ Roka	78,90	50,00	77,50	40,00	-	-
82	Lamenta	86,00	17,80	85,00	15,70	75,00	2,2

Sumber : http://sda.pu.go.id/bendungan_list.php?admin=semua

Tabel : 4.16
Data Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Elevasi & Luas Muka Air (MA) Waduk						Jumlah Bendungan Buah
		MA Banjir		MA Normal		MA Minimum		
		m	Ha	m	Ha	m	Ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0	0	0	
2	Sumatera Utara	905,5	0	2.146,4	1.118,4	2.133,6	0	3
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	
4	Riau	9.543,54	0	3.424,5	2.515,98	74,5	0	6
5	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	
6	Jambi	0	0	0	0	0	0	
7	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	
8	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	1
9	Lampung	376,4	2.150	364,5	2.116,1	281,7	287	4
10	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	
11	D.K.I Jakarta	0	0	0	0	0	0	
12	Jawa Barat	5.102,35	14.762	5.088,4	19.792,77	4.454,35	2.816	28
13	Jawa Tengah	5.145,31	17.831,698	5.101,75	9.653,003	4.529,67	1.482,566	37
14	DI Yogyakarta	140,88	180	136,6	159	113,7	37,5	1
15	Jawa Timur	2.397,32	5.097,5	3.107,6	5.386,8	2.926,8	2.076,6	85
16	Banten	0,00	0	0,0	0	0	0	
17	Bali	211,05	500	203	345	173	125,2	3
18	Nusa Tenggara Barat	752,82	2.698,96	170.345,8	1.066,28	153.816,8	242,70	39
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	11
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	
22	Kalimantan Selatan	63	9.200	60	3.200	52	0	1
23	Kalimantan Timur	18,44	200	17,1	324	12,2	0	5
24	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	
25	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	
26	Sulawesi Selatan	2.085	20.862	2.073,6	18.529,85	2.027,2	2.396,12	9
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	
28	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	3
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	
30	Maluku	0	0	0	0	0	0	1
31	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	
32	Papua	0	0	0	0	0	0	
33	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	0	0	

Sumber : <http://sda.pu.go.id/bendungan.php>, Tanggal 08 Juli 2008, Jam 9:38 WIB

Tabel 4.17
Kondisi Waduk Utama di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Waduk	Ketinggian Air Ideal (m)	Ketinggian Air Saat ini (m)	Deviasi (cm)
1	2	3	4	5	6
1	Jawa Barat	Djuanda/ Jatiluhur	101,60	101,21	-39
2	Jawa Tengah	Kedungombo	86,70	86,70	0
3	Jawa Tengah	Wonogiri	136,17	135,37	-80
4	Jawa Tengah	Sempor	57,35	66,72	+937
5	Jawa Tengah	Wadaslintang	160,01	172,00	+1199
6	Jawa Tengah	Sermo	128,00	129,10	+110
7	Jawa Timur	Sutami	272,50	272,41	-9
8	Jawa Timur	Selorejo	621,53	621,34	-19
9	Jawa Timur	Bening	106,51	106,51	0
10	Jawa Timur	Wonorejo	180,05	180,85	+80
11	Jawa Timur	Sangiran	126,00	120,00	-600
12	Lampung	Batutegi	257,00	256,74	-26
13	Sulawesi Selatan	Bili-Bili	94,97	94,55	-42
14	Nusa Tenggara Barat	Batujae	89,00	92,24	+324
15	Nusa Tenggara Barat	Penggo	46,50	56,50	+700

Sumber : Ditabulasi dari Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air,
Departemen Pekerjaan Umum, 25 Juni 2007

Tabel : 4.18
Data Embung Berdasarkan Nama Embung di Indonesia

No	Provinsi	No	Lokasi Embung			Nama Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung			
			Kabupaten	Kecamatan	Desa			T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)	
								M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Lampung	1	Lampung Selatan	Sidomulyo	Batu Liman	Way Batu Liman	E. Baru/Pemerintah		9,25		640.815,0
		2	Lampung Selatan	Ketibung	Trans Tanjungan	Way Cikuluk	E. Baru/Pemerintah		10,50		185.560,0
		3	Lampung Selatan	Ketibung	Cikuluk	Way Tengkorak	E. Baru/Pemerintah		8,25		470,0
		4	Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Sidomukti	Way Sidomukti	E. Baru/Pemerintah		6,75		120,0
		5	Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Trimulyo	Way Muluhan	E. Baru/Pemerintah		7,87		490,0
		6	Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Budi Lestari	Way Sari	E. Baru/Pemerintah		10,00		320,0
		7	Lampung Selatan	Tanjung Bintang		Way Talang Jahat	E. Baru/Pemerintah		6,00		87.156,0
		8	Lampung Tengah	Seputih Mataram	Mataram Udik	Way Pias	E. Baru/Pemerintah		7,49		404.362,0
		9	Lampung Tengah	Seputih Mataram	Sendang Agung	Way Sendang	E. Baru/Pemerintah		7,90		147.581,0
		10	Lampung Tengah	Seputih Mataram	Mataram Jaya	Way Matram Jaya	E. Baru/Pemerintah		9,92		100,0
		11	Lampung Tengah	Seputih Mataram	Tri Mulyo	Way Tri Mulyo	E. Baru/Pemerintah		9,91		213,0
		12	Lampung Tengah	Seputih Banyak	Siswo Bangun	Way Seputih Banyak	E. Baru/Pemerintah		9,00		174.365,0
		13	Lampung Tengah	Padang Ratu	Gedong Harta	Way Suban	E. Baru/Pemerintah		10,38		150,0
		14	Tulang Bawang	Menggala	Bogatama	Way Siwa	E. Baru/Pemerintah		7,80		233,0
		15	Tulang Bawang	Menggala	Sidoarjo	Way Sidoarjo	E. Baru/Pemerintah		6,50		280,0
		16	Tulang Bawang	Mesuji	Boko Poso	Way Boko Poso	E. Baru/Pemerintah		7,05		250,0
		17	Tulang Bawang	Mesuji	Hadi Mulyo	Way Hadi Mulyo	E. Baru/Pemerintah		5,37		170,0
		18	Tulang Bawang	Mesuji	Wira Bangun	Way Wira Bangun	E. Baru/Pemerintah		6,50		400,0
		19	Tulang Bawang	Gunung Terang	Setia Budi	Way Tijang	E. Baru/Pemerintah		6,00		284,6
		20	Tulang Bawang	Lambu Kibang	Mekar Sari	Way Lahat	E. Baru/Pemerintah		8,15		403.725,0
		21	Tulang Bawang	Lambu Kibang	Pagar Jaya	Way Pagar Jaya	E. Baru/Pemerintah		7,12		124.513,0
		22	Tulang Bawang	Mesuji	Trikarya Mulya	Way Darsiem I	E. Baru/Pemerintah		7,00		101.800,0
		23	Tulang Bawang	Mesuji		Way Darsiem II	E. Baru/Pemerintah		7,89		167.072,0
		24	Lampung Utara	Pakuan Ratu	Negara Jaya	Way Awa	E. Baru/Pemerintah		6,00		250,0
		25	Lampung Utara	Pakuan Ratu	Negara Tama	Way Bima Sakti	E. Baru/Pemerintah		9,90		226,0
2	Jawa Barat	1	Tasikmalaya	Kuwalu	Lingga Jaya	Situ Gede	E. Baru/Rehabilitasi	3,00	800.000	1.000.000	
		2	Tasikmalaya	Cibeureum	Sumelap	Situ Cibeureum	E. Baru/Rehabilitasi	2,00	180.000	242.000	
		3	Tasikmalaya	Cibeureum	Sumelap	Situ Malingping	E. Baru/Rehabilitasi	2,50	90.000	120.000	
		4	Tasikmalaya	Sukaraja	Cibalarik	Situ Sangiang	E. Baru/Rehabilitasi	4,00	153.000	160.000	
		5	Bogor	Cibinong	Cariung	Cibinong	E. Baru/Pemerintah	2,00		270.000	
		6	Bogor	Depok	Citayam	Citayam	E. Baru/Pemerintah	2,00		350.000	
		7	Bogor	Cileungsi		Tlajung Udik	E. Baru/Pemerintah	2,00		150.000	
		8	Bogor	Ciomas	Gede	Gede	E. Baru/Pemerintah	2,00		400.000	
		9	Cianjur	Cibinong	Cijengkol	Cikaramat	E. Baru/Pemerintah	6,50		24.375	
		10	Cianjur	Cibinong	Sukamulya	Klinik	E. Baru/Pemerintah	4,00		4.280	
		11	Cianjur	Cibinong	Cigar Enam	Aclun	E. Baru/Pemerintah	6,00		11.250	
		12	Garut	Pakanjang	Jatiwangi	Arinem I-1	E. Baru/Pemerintah	4,00		4.000	
		13	Garut	Pakanjang	Jatiwangi	Arinem I-2	E. Baru/Pemerintah	4,00		4.500	
		14	Garut	Pakanjang	Jatiwangi	Arinem II-1	E. Baru/Pemerintah	3,50		8.000	

Lanjutan Tabel 4.18

No	Provinsi	No	Lokasi Embung			Nama Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung			
			Kabupaten	Kecamatan	Desa			T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)	
								M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)
		15	Garut	Pakanjang	Jatiwangi	Arinem II-2	E. Baru/Pemerintah	4,00		14.000	
3	Jawa Tengah	1	Rembang	Sarang	Lodan Wetan	Lodan Wetan	E. Baru/Pemerintah			17,50	
		2	Rembang	Sumber	Sukorejo	Banyukuwung	E. Baru/Pemerintah			14,50	
		3	Blora	Ngawen	Sambirejo	Bruk	E. Baru/Pemerintah			4,06	
		4	Wonogiri	Pracimantoro	Walangrejo	Pringwalang	E. Baru/Rehabilitasi	3	4	2.000	
		5	Wonogiri	Paranggupito	Gendayaam	Puring	E. Baru/Rehabilitasi	2	3	1.800	
		6	Wonogiri	Paranggupito	Gunturharjo	Geming	E. Baru/Rehabilitasi	2	3	950	
		7	Wonogiri	Pracimantoro	Petirsari	Tlogo Broholo	E. Baru/Rehabilitasi	3	4	900	
		8	Wonogiri	Giritontro	Tlogosari	Tlogo Mantang	E. Baru/Rehabilitasi	4	5	750	
4	Jawa Timur	1	Pacitan	Punung	Kendal	Telaga Ngaritan	E. Baru/Rehabilitasi	3	4	1.100	
		2	Pacitan	Pringkuku	Jlubang	Jlubang	E. Baru/Rehabilitasi	3	4	1.050	
5	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Pasekar	E. Pemerintah Rehabilitasi			6	
		2	Lombok Tengah	Janapria	Lakor	Jangkar	E. Pemerintah Rehabilitasi			7	
		3	Lombok Timur	Keruak	Sepit	Lingkok Lamun	E. Pemerintah Rehabilitasi			14,25	
		4	Lombok Timur	Sakra	Batu Lawang	Batu Lawang	E. Pemerintah Rehabilitasi			3,5	
		5	Lombok Tengah	Praya Timur	Semoyang	Pare	E. Pemerintah Rehabilitasi			11,55	
		6	Lombok Tengah	Praya	Pejanggik	Pejanggik	E. Pemerintah Rehabilitasi			14,4	
		7	Lombok Tengah	Praya Barat	Pengembur	Sepit	E. Pemerintah Rehabilitasi			21,2	
		8	Lombok Timur	Keruak	Sepit	Tundak	E. Pemerintah Rehabilitasi			13,5	
		9	Lombok Barat	Bayan	Akar-akar	Bayan	E. Pemerintah Rehabilitasi			6	
		10	Lombok Tengah	Praya Barat	Pengembur	Pancor	E. Pemerintah Rehabilitasi			9	
		11	Lombok Timur	Keruak	Sukaraja	Pondok Raden	E. Pemerintah Rehabilitasi			8	
		12	Lombok Tengah	Praya Barat	Kateng	Batu Bokah	E. Pemerintah Rehabilitasi			21,2	
		13	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Pasekar	E. Pemerintah Rehabilitasi			6	
		14	Lombok Tengah	Janapria	Lakor	Jangkar	E. Pemerintah Rehabilitasi			7,0	
		15	Lombok Timur	Keruak	Sepit	Lingkok Lamun	E. Pemerintah Rehabilitasi			14,3	
		16	Lombok Timur	Sakra	Bt. Lawang	Batu Lawang	E. Pemerintah Rehabilitasi			3,5	
		17	Lombok Tengah	Praya Timur	Semoyang	Pare	E. Pemerintah Rehabilitasi			11,6	
		18	Lombok Tengah	Praya	Pejanggik	Pejanggik	E. Pemerintah Rehabilitasi			14,4	
		19	Lombok Tengah	Praya Barat	Pengembur	Sepit	E. Pemerintah Rehabilitasi			21,2	
		20	Lombok Timur	Keruak	Sepit	Tundak	E. Pemerintah Rehabilitasi			4,3	
		21	Lombok Barat	Bayan	Akar-akar	Bayan	E. Pemerintah Rehabilitasi			6,0	
		22	Lombok Tengah	Praya Barat	Pengembur	Pancor	E. Pemerintah Rehabilitasi			9,0	
		23	Lombok Timur	Keruak	Sukaraja	Pondok Raden	E. Pemerintah Rehabilitasi			8,0	
		24	Lombok Tengah	Praya Barat	Kateng	Batu Bokah	E. Pemerintah Rehabilitasi			21,2	
		25	Lombok Timur	Pringgabaya	Swela	Kembar	E. Desa Rehabilitasi			6,0	
		26	Lombok Timur	Sakra	Surabaya	Dambrug	E. Desa Rehabilitasi			8,5	
		27	Lombok Timur	Sakra	Gereng	Pengoros	E. Desa Rehabilitasi			2,5	
		28	Lombok Timur	Sakra	Buntiang	Kondok	E. Desa Rehabilitasi			4,5	
		29	Lombok Timur	Sakra	Buntiang	Lingkok Kolo	E. Desa Rehabilitasi			3,0	
		30	Lombok Timur	Sakra	Buntiang	Toyang	E. Desa Rehabilitasi			3,7	

Lanjutan Tabel 4.18

No	Provinsi	No	Lokasi Embung			Nama Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung		
			Kabupaten	Kecamatan	Desa			T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)
								M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)
		31	Lombok Timur	Terara	Perian	Gunung Paoq	E. Desa	Rehabilitasi		15,0
		32	Lombok Timur	Selong	Denggen	Gunung Sepang	E. Desa	Rehabilitasi		4,27
		33	Lombok Timur	Masbagek	Masbagek	Semat	E. Desa	Rehabilitasi		3,5
		34	Lombok Tengah	Janapria	Lekor	Melat 1	E. Desa	Rehabilitasi		8,25
		35	Lombok Tengah	Janapria	Loang Make	Loang Make	E. Desa	Rehabilitasi		4,5
		36	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Jebak	E. Desa	Rehabilitasi		4,54
		37	Lombok Tengah	Janapria	Pendem	Kuang Sampi	E. Desa	Rehabilitasi		4,5
		38	Lombok Tengah	Janapria	Pendem	Pendem	E. Desa	Rehabilitasi		6,0
		39	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Gusi	E. Desa	Rehabilitasi		5,2
		40	Lombok Tengah	Janapria	Durian	Bengak	E. Desa	Rehabilitasi		5,0
		41	Lombok Tengah	Bt. Kellang	Selebung	Jurang Dao	E. Desa	Rehabilitasi		5,0
		42	Lombok Tengah	Pujut	Rembitan	Tantih	E. Desa	Rehabilitasi		5,25
		43	Lombok Tengah	Praya	Jurang Jaler	Jurang Jaler	E. Desa	Rehabilitasi		5,7
		44	Lombok Tengah	Praya	Braim	Dakung	E. Desa	Rehabilitasi		6,62
		45	Lombok Tengah	Praya	Pengadang	Pengadang	E. Desa	Rehabilitasi		6,62
		46	Lombok Tengah	Praya Barat	Mangkung	Bombas	E. Desa	Rehabilitasi		6,5
		47	Lombok Tengah	Kopang	Muncan	Muncan	E. Desa	Rehabilitasi		6,5
		48	Lombok Tengah	Praya Barat	Mangkung	Orogendang	E. Desa	Rehabilitasi		4,75
		49	Lombok Tengah	Terara	Jenggik	Tridaya	E. Desa	Rehabilitasi		5,07
		50	Lombok Tengah	Kopang	Wajageseng	Bual	E. Desa	Rehabilitasi		3,5
		51	Lombok Tengah	Praya	Bodak	Bubuk	E. Desa	Rehabilitasi		3,5
		52	Lombok Tengah	Kopang	Mt. Gamang	Bingkok	E. Desa	Rehabilitasi		7,2
		53	Lombok Tengah	Pujut	Turuwai	Pengkemit	E. Desa	Rehabilitasi		6,75
		54	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Pejeruk	E. Desa	Rehabilitasi		5,0
		55	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Lendang Telaga	E. Desa	Rehabilitasi		3,5
		56	Lombok Tengah	Terara	Jenggik	Mare	E. Desa	Rehabilitasi		12,0
		57	Lombok Tengah	Janapria	Lekor	Bringe	E. Desa	Rehabilitasi		18,75
		58	Lombok Tengah	Kopang	Dasan Baru	Tokan	E. Desa	Rehabilitasi		2,0
		59	Lombok Tengah	Pujut	Jenggik	Bt. Bangke/ Penggeh	E. Desa	Rehabilitasi		1,47
		60	Lombok Tengah	Kopang	Dasan Baru	Rindik	E. Desa	Rehabilitasi		1,87
		61	Lombok Tengah	Terara	Santong	Raja	E. Desa	Rehabilitasi		6,7
		62	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Tasik - Asik	E. Desa	Rehabilitasi		5,83
		63	Lombok Tengah	Janapria	Janapria	Perok	E. Desa	Rehabilitasi		4,7
		64	Lombok Timur	Sakra	Swangi	Peye	E. Desa	Rehabilitasi		3,5
		65	Lombok Timur	Sakra	Surabaya	Munte	E. Desa	Rehabilitasi		4,75
		66	Lombok Timur	Terara	Suradadi	Keyait	E. Desa	Rehabilitasi		6,43
		67	Lombok Timur	Terara	Rarang	Penyampet	E. Desa	Rehabilitasi		2,5
		68	Lombok Timur	Keruak	Sukaraja	Tembeng	E. Desa	Rehabilitasi		4,19
		69	Lombok Tengah	Janapria	Lekor	Inan Ratu	E. Desa	Rehabilitasi		11,1
		70	Lombok Tengah	Praya	Lajut	Goa	E. Baru/Pemerintah			10,0
		71	Lombok Tengah	Praya	Braim	Tanggor	E. Baru/Pemerintah			6,45
		72	Lombok Timur	Terare	Suradadi	Kandong	E. Baru/Pemerintah			7,0
		73	Lombok Timur	Praya	Braim	Tanggor	E. Baru/Pemerintah			6,45
		74	Lombok Timur	Janapria	Lekor	Melat 2	E. Baru/Pemerintah			8,5

Lanjutan Tabel 4.18

No	Provinsi	No	Lokasi Embung			Nama Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung					
			Kabupaten	Kecamatan	Desa			T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)			
								M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)		
		75	Lombok Timur	Keruak	Sukaraja	Runggang	E. Baru/Pemerintah					9,0	
		76	Lombok Barat	Sakra	Ringsing	Kali Ujung	E. Baru/Pemerintah					15,75	
		77	Lombok Tengah	Keruak	Batu Nampar	Batu Nampar	E. Baru/Pemerintah					16,25	
		78	Lombok Barat	Sekotong	Sekotong	Kengkang	E. Baru/Pemerintah					15,0	
		79	Lombok Tengah	Jonggat	Batu Tulis	Batu Tulis	E. Baru/Pemerintah					12,0	
		80	Lombok Tengah	Praya Barat	Mangkung	Jangkeh Jawe	E. Baru/Pemerintah					15,5	
		81	Lombok Timur	Keruak	Pemongkong	Termodo	E. Baru/Pemerintah					7,25	
		82	Lombok Timur	Pringgabaya	Sapit	Senang	E. Baru/Pemerintah					18,5	
		83	Lombok Tengah	Praya	Jontlak	Surabaya	E. Baru/Pemerintah					16,15	
		84	Lombok Tengah	Praya	Bodak	Bodak	E. Baru/Pemerintah					7,0	
		85	Lombok Barat	Sekotong	Sekotong Timur	Talekong 1	E. Baru/Pemerintah					10,5	
		86	Sumbawa	Plampang	Selante	Embung Selante	E. Baru/Pemerintah					9,8	
		87	Sumbawa	Plampang	Muer	Embung Muer	E. Baru/Pemerintah					15,33	
		88	Sumbawa	Plampang	Labangka	Embung Labangka	E. Baru/Pemerintah					14,5	
		89	Sumbawa	Moyo Hilir	Ngeru	Embung Ngeru	E. Baru/Pemerintah					7,5	
		90	Sumbawa	Lape Lopok	Berora	Embung Mamak	E. Baru/Pemerintah					7,0	
		91	Sumbawa	Moyo Hilir	Ngeru	E. Batu Bangka	E. Baru/Pemerintah					7,5	
		92	Sumbawa	Moyo Hilir	Ngeru	Embung Songkar	E. Baru/Pemerintah					6,8	
		93	Sumbawa	Plampang	Plampang	E. Sepayung Dalam	E. Baru/Pemerintah					11,0	
		94	Dompu	Kempo	Soriutu	E. Sanggupa Sante	E. Baru/Pemerintah					9,5	
		95	Dompu	Kempo	Kempo	Embung Kempo							500.000
		96	Dompu	Kempo	Kempo	Embung Roi Roka						1.9E+6	
6	Nusa Tenggara Timur	1	Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Nimasi	Oefui	E. Baru/Pemerintah			7			12.200
		2	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Sopo	Fatului	E. Baru/Pemerintah			6			5.000
		3	Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Nian	Nian	E. Baru/Pemerintah			6			12.380
		4	Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Bijaepasu	Bijaepasu	E. Baru/Pemerintah			6			10.220
		5	Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan	Kiubaat	Hane	E. Baru/Pemerintah			8			14.000
		6	Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan	Polo	Besamnutu	E. Baru/Pemerintah			7			9.700
		7	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Pili	Pili	E. Baru/Pemerintah			6			8.500
		8	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Billa	Billa	E. Baru/Pemerintah			5			5.500
		9	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Oinlasi I	Oinlasi I	E. Baru/Pemerintah			7			5.500
		10	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Oenai	Oenai	E. Baru/Pemerintah			5			5.500
		11	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Fatukopa	Fatukopa	E. Baru/Pemerintah			4			7.300
		12	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Mnela	Mnela	E. Baru/Pemerintah			4			6.120
		13	Timor Tengah Selatan	Amanuban Timur	Mauleum	Mauleum	E. Baru/Pemerintah			5			13.700
		14	Timor Tengah Selatan	Miomafo Barat	Banfanu	Banfanu	E. Baru/Pemerintah			6			7.350
		15	Timor Tengah Utara	Insana	Manunain B	Manunain B	E. Baru/Pemerintah			6			9.000
		16	Timor Tengah Utara	Insana	Banae	Banae	E. Baru/Pemerintah			6			13.700
		17	Timor Tengah Utara	Insana	Lanaus	Lanaus	E. Baru/Pemerintah			6			29.370
		18	Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Pantae	Pantae	E. Baru/Pemerintah			6			8.500
		19	Timor Tengah Utara	Insana	Subun	Subun	E. Baru/Pemerintah			6			28.050
		20	Timor Tengah Selatan	Miomafo Barat	Tuabatan	Tuabatan	E. Baru/Pemerintah			6			18.640
		21	Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan	Skinu	Tonom	E. Baru/Pemerintah			5			6.700

Lanjutan Tabel 4.18

No	Provinsi	No	Lokasi Embung			Nama Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung			
			Kabupaten	Kecamatan	Desa			T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)	
								M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)
		22	Timor Tengah Selatan	Amanatun Utara	Bokong	Onibesak	E. Baru/Pemerintah		6		9.300
		23	Timor Tengah Selatan	Amanatun Utara	Fotilo	Fotilo	E. Baru/Pemerintah		6		6.500
		24	Timor Tengah Selatan	Amanatun Selatan	Manufui	Manufui	E. Baru/Pemerintah		8		10.700
		25	Timor Tengah Selatan	Amanatun Selatan	Poli	One	E. Baru/Pemerintah		6		13.250
		26	Timor Tengah Selatan	Amanatun Selatan	Lilo	Lilo	E. Baru/Pemerintah		7		10.700
		27	Timor Tengah Selatan	Amanatun Selatan	Sunu	Sunu	E. Baru/Pemerintah		7		18.700
		28	Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Nilulat	Nilulat	E. Baru/Pemerintah		6		6.750
		29	Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Batnes	Batnes	E. Baru/Pemerintah		6		6.200
		30	Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Haumeni	Haumeni	E. Baru/Pemerintah		6		6.760
		31	Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Banain	Banain	E. Baru/Pemerintah		6		8.140
		32	Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Amol	Amol	E. Baru/Pemerintah		6		6.370
		33	Timor Tengah Utara	Insana	Humusu A	Humusu A	E. Baru/Pemerintah		6		7.330
		34	Timor Tengah Utara	Insana	Fafinesu C	Fafinesu C	E. Baru/Pemerintah		6		7.470
7	Sulawesi Selatan	1	Gowa	Bonto Maranu	Mawang	Mawang	E. Baru/Pemerintah		0	5	0
		2	Gowa	Bonto Maranu	Bolangi	Tonjong	E. Baru/Pemerintah		0	4	0
		3	Jeneponto	Binamu	Garasikang	Garasikang	E. Baru/Pemerintah			6	0
		4	Jeneponto	Binamu	Buludoang	Buludoang	E. Baru/Pemerintah		0	6,23	0
		5	Takalar	Mangarabombang	Cikoang	Cikoang	E. Baru/Pemerintah		0	5,4	0
		6	Takalar	Takalar	Laikang	Laikang 1	E. Baru/Pemerintah		0	7,45	0
		7	Takalar	Takalar	Laikang	Laikang 2	E. Baru/Pemerintah		0	7,8	0
		8	Takalar	Takalar	Laikang	Laikang 3	E. Baru/Pemerintah		0	4,05	0
		9	Takalar	Polombangkeng S	Bonto Kadato	Bonto Kadato 1	E. Baru/Pemerintah			9,5	0
		10	Takalar	Polombangkeng S	Bonto Kadato	Bonto Kadato 2	E. Baru/Pemerintah		0	6,8	0
		11	Wajo	Takalala	Bola	Tocule	E. Baru/Pemerintah		0	7,9	0
		12	Wajo	Pamana	Palaguna	Palaguna	E. Baru/Pemerintah		0	2,1	0
		13	Maros	Tanralili	Bonto Manai	Bontomanai	E. Baru/Pemerintah		0	3	0
		14	Gowa	Tompobulu	Garing	Garing	E. Baru/Pemerintah		0	3,2	0
		15	Takalar	Polombangkeng U	Lassang	Lassang	E. Baru/Pemerintah		0	4	0
		16	Jeneponto	Tamalatea	Batu Jala	Tabuakang	E. Baru/Pemerintah		0	6	0
		17	Jeneponto	Bangkala	Maero	Maero	E. Baru/Pemerintah			7,35	0
		18	Jeneponto	Bangkala	Pattiro	Pattiro	E. Baru/Pemerintah		0	6	0
		19	Bantaeng	Bantaeng	Pabentengan	Pabentengan	E. Baru/Pemerintah		0	5	0
		20	Bulukumba	Bonto Tiro	Bonto Tangnga	Bonto Tangnga	E. Baru/Pemerintah		0	7	0
		21	Barru	Tanete Rilau	Lalabata	Matajang	E. Baru/Pemerintah		0	4	0
8	Sulawesi Tenggara	1	Kendari	Lambuya	Teteasa	Teteasa	E. Baru/Pemerintah		0	6	0
		2	Kendari	Tinanggea	Molo Indah	Lapulu	E. Baru/Pemerintah		0	7	0
		3	Kendari	Ladongi	Pangi-pangi	Pangi-pangi	E. Desa Rehabilitasi		4,5	4	809.875
		4	Kendari	Palangga	Parasi	Parasi	E. Desa Rehabilitasi		4,3	4	623.953
		5	Kendari	Atari	Atari	Atari I	E. Desa Rehabilitasi		4,4	4	717.607
		6	Kendari	Lapulu	Lapulu	Wadonggo II	E. Desa Rehabilitasi		3,8	3	463.432
		7	Kendari	Lapoa	Lapoa	Lapoa I	E. Desa Rehabilitasi		9,25	8	861.564
		8	Buton	Rumbia	Lakomea	Lakomea	E. Desa Rehabilitasi		6,75	6	746.918

Sumber : <http://sda.pu.go.id/embung.php>

Tabel : 4.19
Data Embung Potensi Berdasarkan Nama Embung Potensi di Indonesia

No	Provinsi	No	Lokasi Embung	Jenis Penanganan	Proyeksi Kapasitas Tampung (m ³)
			Kabupaten		
1	2	3	4	5	6
1	Sumatera Utara	1	Tapanuli Selatan	Embung Rakyat Rehabilitasi	692.000
		2	Nias		15.000
		3	Karo		160.992
		4	Dairi	Embung Rakyat Rehabilitasi	223.825
		5	Tapanuli Utara		2.213.000
		6	Toba Simosir	Embung Rakyat Rehabilitasi	925.000
		7	Kota Pematang Siantar		30.000
		8	Langkat		214.600
		9	Labuhan Batu		630.800
		10	Asahan	Embung Rakyat Rehabilitasi	600.000
		11	Tapanuli Tengah		3.430.000
2	Riau	1	Indragiri Hilir	Embung Baru/Pemerintah	325.125
		2	Bengkalis		749.800
		3	Kota Pekanbaru		525.000
		4	Indragiri Hulu		356.000
3	Lampung	1	Lampung Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	2.435.419
		2	Lampung Tengah		1.575.000
		3	Lampung Selatan		1.600.000
		4	Lampung Utara		525.000
4	Jawa Barat	1	Ciamis	Embung Desa Rehabilitasi	3.580.980
		2	Tasikmalaya		1.382.000
		3	Garut		2.850.000
		4	Tasikmalaya		1.300.000
		5	Bogor		5.908.000
5	Jawa Tengah	1	Rembang	Embung Rakyat Rehabilitasi	5.013.500
		2	Blora		29.044.000
		3	Wonogiri		38.515.000
		4	Pekalongan		75.000
6	Jawa Timur	1	Tuban	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.098.500
		2	Nganjuk		134.918
		3	Sidoarjo		237.386
		4	Ponorogo		370.000
		5	Madiun		114.000
		6	Bojonegoro		10.134.750
		7	Bangkalan		235.310
		8	Lamongan		48.754.130
		9	Gresik		6.910.530
7	Bali	1	Tabanan	Embung Rakyat Rehabilitasi	3.134.093
8	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Timur	Embung Baru/Pemerintah	6.547.554
		2	Lombok Tengah		14.395.170
		3	Dompu		5.736.523

Lanjutan Tabel 4.19

No	Provinsi	No	Lokasi Embung Kabupaten	Jenis Penanganan	Proyeksi Kapasitas Tampung (m ³)
		4	Bima	Embung Rakyat Rehabilitasi	37.689.315
		5	Lombok Barat	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.287.367
		6	Sumbawa	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.881.113
9	Nusa Tenggara Timur	1	Kupang	Embung Rakyat Rehabilitasi	92.854.000
		2	Timor Tengah Selatan	Embung Rakyat Rehabilitasi	297.000
		3	Timor Tengah Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	189.000
		4	Belu	Embung Rakyat Rehabilitasi	378.000
		5	Alor	Embung Rakyat Rehabilitasi	5.026.437
		6	Flores Timur	Embung Rakyat Rehabilitasi	14.157.928
		7	Sikka	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.589.517
		8	Ende	Embung Rakyat Rehabilitasi	12.996.534
		9	Ngada	Embung Rakyat Rehabilitasi	13.484.697
		10	Manggarai	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.718.388
		11	Sumba Timur	Embung Rakyat Rehabilitasi	39.088.970
		12	Sumba Barat	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.067.489
10	Sulawesi Tengah	1	Kota Palu	Embung Rakyat Rehabilitasi	130.000
		2	Donggala	Embung Rakyat Rehabilitasi	500.000
		3	Kota Palu	Embung Rakyat Rehabilitasi	250.000
		4	Donggala	Embung Rakyat Rehabilitasi	200.000
		5	Poso	Embung Rakyat Rehabilitasi	200.000
		6	Banggai	Embung Rakyat Rehabilitasi	170.000
		7	Buol	Embung Rakyat Rehabilitasi	110.000
11	Sulawesi Selatan	1	Wajo	Embung Rakyat Rehabilitasi	463.772
		2	Polewali Mamasa		126.403
		3	Tana Toraja		44.025
		4	Luwu Utara		10.950
		5	Luwu		310.267
		6	Soppeng	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.434.658
		7	Maros	Embung Rakyat Rehabilitasi	335.000
		8	Gowa	Embung Rakyat Rehabilitasi	585.000
		9	Takalar	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.140.000
		10	Jeneponto	Embung Rakyat Rehabilitasi	3.235.000
		11	Bantaeng	Embung Rakyat Rehabilitasi	644.000
		12	Bulukumba	Embung Rakyat Rehabilitasi	510.000
		13	Bone	Embung Rakyat Rehabilitasi	862.000
		14	Barru	Embung Rakyat Rehabilitasi	585.000
		15	Enrekang	Embung Rakyat Rehabilitasi	610.000
		16	Sidenreng Rappang	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.156.000
		17	Sinjai	Embung Rakyat Rehabilitasi	664.000
12	Sulawesi Tenggara	1	Kendari	Embung Desa Rehabilitasi	9.230.390
13	Maluku	1	Maluku Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.039.880
14	Papua	1	Paniai	Embung Rakyat Rehabilitasi	3.108.279
		2	Sorong	Embung Rakyat Rehabilitasi	171.813

Sumber : <http://sda.pu.go.id/embungp.php> (direkap oleh Pusdata)

Tabel 4.20
Jalan Nasional Jalan Tol

No	Provinsi	Panjang	
		Operasi	Rencana
		(km)	(km)
1	2	3	4
1	Sumatera Utara	42,70	75,80
2	Riau	-	90,00
3	Sumatera Selatan	-	22,00
4	Lampung	-	150,00
5	DKI Jakarta		
6	Banten		
7	Jawa Barat		
8	Jawa Tengah	600,37	1.612,45
9	D.I. Yogyakarta		
10	Jawa Timur		
11	Bali	-	7,50
12	Sulawesi Utara	-	46,00
13	Sulawesi Selatan	6,05	11,60
	Total Indonesia	649,12	2.015,35

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.21 A
Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
1	Tangerang Merak	73,00		
2	Cilegon			8,80
3	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	
4	Jalan Tol Dalam Kota Jakarta			
	Tomang-Grogol-Pluit	7,55		
	Tomang-Cawang	16,00		
	Ir. Wiyoto Wiyono.Msc (Cawang - Tj.Priok)	15,50		
	Harbour Road (Tanjung Priok-Pluit)	11,55		
5	Prof. DR. Sedyanto	14,30		
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR) I			
	Seksi S (Pd. Pinang-Taman mini)	14,25		
	Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC - Hankam Raya)	4,00		
	Seksi E2 (Cikunir-Cakung)	9,07		
	Seksi W2 Selatan (Pd. Pinang - Ulujami)	3,70		
	Seksi W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk)			7,00
	Seksi E3 (Cakung-Cilincing)			3,10
	Seksi E1 Utara (Hankam raya-Cikunir)			8,40
	Seksi W1 (Kebun Jeruk-Penjarangan)			9,80
7	Pondok Aren-Serpong	7,25		
8	Pondok Aren-Ulujami	5,55		
9	Akses Tanjung Priok			12,10
10	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu			21,00
11	Depok Antasari			21,70
12	Jakarta Outer Ring Road (JORR) II			
	Tol Tangerang/Merak -Tangerang -Teluk Naga-Sedyatmo			25,00
	Tol Tangerang/Merak -Tol Serpong			24,81
	Tol Serpong - Cinere			12,39
	Tol Jagorawi - Cinere			14,70
	Tol Jagorawi - Tol Jakarta/Cikampek			27,10
	Cikarang - Tanjung Periok			34,00
13	Bogor Ring Road			11,00
14	Jagorawi	50,00	9,00	
15	Ciawi Sukabumi			54,00
16	Sukabumi - Ciranjang			31,00
17	Ciranjang - Padalarang			33,00
18	Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cilenyi			20,85
19	Ujung Berung - Gedebage - Majalaya			19,20
20	Soreang - Pasir Koja			15,00
21	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	
22	Cikampek - Padalarang	58,50		
23	PadangLarang - Cileunyi	35,63	28,77	
24	Cileunyi - Sumedang - Dawuan			58,50
25	Cikampek - Padalarang			114,00

Lanjutan Tabel 4.21 A

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
26	Palimanan - Cirebon/Kanci	26,30		
27	Kanci - Pejagan			34,00
28	Pejagan - Pemalang			56,00
29	Pemalang - Batang			35,00
30	Semarang - Batang			75,00
31	Semarang - Seksi A, B, dan C	24,75		
32	Semarang - Demak			25,00
33	Semarang - Solo			75,70
34	Yogyakarta - Bawean			104,00
35	Yogyakarta - Solo			45,00
36	Solo - Mantingan			58,00
37	Mantingan - Ngawi			27,00
38	Ngawi - Kertosono			84,00
39	Kertosono - Mojokerto			38,00
40	Mojokerto - Surabaya			37,00
41	Waru (Aloha) - Wonokromo - Tj. Perak			18,40
42	SS Waru - Bandara Juanda			13,50
43	Bandara Juanda - Tj Perak			23,00
44	Surabaya - Gresik	20,70		
45	Surabaya - Madura			5,40
46	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	
47	Gempol - Pandaan			14,00
48	Pandaan - Malang			30,00
49	Gempol - Pasuruan			32,00
50	Pusuruan - Probolinggo			40,00
51	Probolinggo - Banyuwangi			156,00
		542,60	64,77	
	Total Pulau Jawa	607,37		1.612,45

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.21B
Jalan Nasional Jalan Tol, Pulau Sumatera
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Antar Kota				
1	Binjai - Medan			15,80
2	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi			60,00
3	Pekanbaru-Dumai			90,00
4	Bakauheni-Terbanggi Besar			150,00
	Sub Total			315,80
Dalam Kota				
5	Balmera (Belawan-Medan-Tj. Morawa)	33,70	9,00	
6	Palembang-Indralaya			22,00
	Sub Total	33,70	9,00	22,00
Total Sumut,Riau,Sumsel dan Lampung		42,70		337,80

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.21C
Jaringan Jalan Tol Pulau Sulawesi
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Antar Kota				
1	Menado			46,00
	Sub Total			46,00
Dalam Kota				
2	Ujung Pandang I	6,05		
3	Makasar Seksi IV			11,60
	Sub Total	6,05		11,60
Total Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan		6,05		57,60

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.21 D
Jaringan Jalan Tol Pulau Bali
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas JalanTol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Dalam Kota				
1	Serangan-Tanjung Benoa			7,50
	Sub Total	0	-	7,50
	Total Pulau Bali	0		7,50

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.22
Ruas Jalan Tol Yang Telah Beroperasi

Status 27 Juli 2006

No.	Ruas	Panjang (KM)			Pengelola	Masa Konsesi		Keterangan
		Utama	Akses	Total		dari - sampai	tahun	
A. PENGUSAHAAN OLEH PT. JASA MARGA								
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	50,00	9,00	59,00	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	Penetapan Men. PU ttg Masa Konsesi tgl 8 Juni 2006 dan Tanda Tangan PPJT tgl 7 Juli 2006
2	Cawang - Tomang	16,00	-	16,00	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
3	Tomang - Grogol - Pluit	7,55	-	7,55	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
4	Prof. Dr. Ir. Soedyatmo (Cengkareng)	14,30	-	14,30	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
5	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	83,00	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
6	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	33,00	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
7	Cikampek - Padalarang	58,50	-	58,50	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
8	Padalarang - Cileunyi	35,63	28,77	64,40	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
9	Palimanan - Cirebon/Kanci	26,30	-	26,30	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
10	Semarang Seksi A,B,C	24,75	-	24,75	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
11	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	49,00	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
12	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	33,70	9,00	42,70	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
13	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	-	5,55	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
14	JORR E2 (Cikunir - Cakung)	9,07	-	9,07	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
15	JORR E1 Selatan (Taman Mini IC - Hankam Raya)	4,00	-	4,00	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
16	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Ulujami)	3,70	-	3,70	PT. Jasa Marga	2005 - 2045	40	
TOTAL A		431,05	69,77	500,82				
B. PENGUSAHAAN OLEH PT. JASA MARGA dan BADAN USAHA								
1	Tangerang - Merak	73,00	-	73,00	PT. Marga Mandala Sakti			
	- Tangerang - Ciujung Tahap I	34,00	-	34,00		1990 - 2020	30	
	- Ciujung - Merak Tahap II	39,00	-	39,00		1993 - 2023	30	
2	Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc. (Cawang - Tg. Priok)	15,50	-	15,50	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1994 - 2023	29	
3	Harbour Road (Pluit - Ancol - Jembatan Tiga)	11,55	-	11,55	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1994 - 2023	29	
4	Surabaya - Gresik	20,70	-	20,70	PT. Margabumi Matraraya	1991 - 2016	25	
5	Ujung Pandang Tahap I	6,05	-	6,05	PT. Bosowa Marga Nusantara	1994 - 2024	30	
6	Serpong - Pondok Aren	7,25	-	7,25	PT. Bintaro Serpong Damai	1997 - 2024	27	
7	JORR S (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25	-	14,25	PT. Jalantol Lingkar Luar Jakarta			
TOTAL B		148,30	-	148,30				
TOTAL		579,35	69,77	649,12				

Sumber : Ditjen. Bina Marga, Dep. PU

Tabel 4.23.1
Prioritas Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

No.	Ruas	Panjang (km)	Waktu Pelaksanaan	Investor
1	2	3	4	5
1	Cikarang - Tj. Priok	33,92	2006 - 2009	MTD - Nusa Cipta
2	Cikampek - Palimanan	116,00	2006 - 2009	PT. Lintas Marga Sedaya
3	Kanci - Pejagan	34,00	2006 - 2009	PT. Semesta Marga Raya
4	Pejagan - Pemalang	57,50	2006 - 2009	PT. Pejagan Pemalang Toll Road
5	Pemalang - Batang	39,00	2006 - 2009	PT. Pemalang Batang Toll Road
6	Semarang - Batang	75,00	2006 - 2009	PT. Marga Setiapuritama
7	Semarang - Solo	75,70	2006 - 2009	PT. Jasa Marga
8	Solo - Mantingan - Ngawi	90,10	2006 - 2009	-
9	Ngawi - Kertosono	87,02	2006 - 2009	-
10	Kertosono - Mojokerto	41,00	2006 - 2009	PT. Marga Hanuratama Intrinsic
11	Surabaya - Mojokerto	37,00	2006 - 2008	PT. Marga Nujuyasumo Agung
12	Gempol - Pasuruan	32,00	2006 - 2009	PT. Jasa Marga
13	Pasuruan - Probolinggo	45,00	2006 - 2009	PT. Bukaka Teknik Utama Tbk
Total		763,24		

Sumber : <http://www.bpjt.net/index.php?id=52>

Tabel 4.23.2
Prioritas Pembangunan Jalan Tol Non Trans Jawa

No.	Ruas	Panjang (km)	Waktu Pelaksanaan	Investor
1	2	3	4	5
1	JORR Seksi W2 Utara	7,00	2006 - 2008	PT. Jasa Marga
2	JORR Seksi E3	4,60	2005 - 2006	PT. Jasa Marga
3	JORR Seksi E1 Utara Seksi 4	4,05	2005 - 2006	PT. Jasa Marga
4	SS Waru - Bandara Juanda	13,50	2006 - 2007	PT. Citra Margatama Surabaya
5	Gempol - Pandaan	13,61	2006 - 2009	PT. Margabumi Adhikaraya
6	Bekasi - Cawang - Kp. Melayu	20,42	2006 - 2009	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
7	Ciranjang - Padalarang	33,30	2006 - 2009	Bina Puri Holding Bhd
8	Waru (Aloha) - Wonokromo - Tg. Perak	17,72	2006 - 2009	PT. Margaraya Jawa Tol
9	JORR Seksi W1	9,70	2006 - 2008	PT. Jalantol Lingkar Baratsatu
10	Bogor Ring Road	11,00	2006 - 2008	PT. Jasa Marga
11	Ciawi - Sukabumi	54,00	2006 - 2009	PT. Bukaka Teknik Utama
12	Pandaan - Malang	37,00	2006 - 2009	PT. Setdco Intrinsic Nusantara
13	Depok - Antasari	21,70	2006 - 2008	PT. Citra Wasphtowa
14	Cinere - Jagorawi	14,70	2006 - 2008	PT. Trans Lingkar Kita Jaya
15	Makasar Seksi IV	11,60	2006 - 2007	PT. Jalan Tol Seksi Empat
16	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	15,22	2006 - 2009	-
17	Kunciran - Serpong	11,19	2006 - 2009	-
18	Serpong - Cinere	10,14	2006 - 2009	-
19	Cimanggis - Cibitung	25,39	2006 - 2009	-
Total Non Trans Jawa		335,84		

Sumber : <http://www.bjpt.net/index.php?id=52>

Tabel 4.24
Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang (km)
Tahun 1978-2005

Akhir Tahun	Negara	Daerah Tingkat I	Daerah Tingkat II	Jumlah
1	2	3	4	5
1977	11.436	27.410	83.948	122.794
1978	11.572	27.911	89.232	128.715
1979	11.573	28.772	88.717	129.062
1980	12.402	33.848	100.248	146.498
1981	12.094	33.846	111.327	157.267
1982	12.164	34.625	121.518	168.307
1983	12.211	36.559	139.309	188.079
1984	12.153	36.964	149.338	198.455
1985	12.494	38.962	155.907	207.363
1986	13.634	41.128	169.449	224.211
1987	14.138	41.075	172.131	227.344
1988	14.859	41.043	199.032	254.934
1989	17.498	41.445	212.232	271.175
1990	20.170	38.799	229.758	288.727
1991	22.239	43.245	253.886	319.370
1992	22.119	43.730	259.592	325.441
1993	23.483	46.231	275.178	344.892
1994	26.351	49.693	280.834	356.878
1995	23.857	38.170	265.200	327.227
1996	26.850	39.747	269.780	336.377
1997	27.127	42.205	272.135	341.467
1998	27.977	47.863	279.523	355.363
1999	26.206	46.538	283.207	355.951
2000	26.272	46.781	282.898	355.951
2001	26.328	47.877	287.577	361.782
2002	27.616	48.905	291.841	368.362
2003	29.318	48.424	292.774	370.516
2004	34.629	40.125	298.175	372.929
2005	34.629	40.125	303.175	377.929

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, Dinas Pek Umum Daerah Tk I dan Tk II

Catatan : Sejak 1999 tanpa Timor Timur

Statistik Indonesia 2007

Tabel 4.25
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)
Tahun 1978-2005

Akhir Tahun	Diaspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5
1977	49.319	65.017	8.458	122.794
1978	59.029	62.086	7.600	128.715
1979	57.746	62.889	8.427	129.062
1980	59.622	75.316	11.560	146.498
1981	65.827	79.860	11.580	157.267
1982	69.488	88.272	10.547	168.307
1983	75.999	98.266	13.814	188.079
1984	81.336	103.062	14.057	198.455
1985	84.363	111.016	11.984	207.363
1986	90.787	121.568	11.856	224.211
1987	99.467	117.048	10.829	227.344
1988	111.649	128.929	14.356	254.934
1989	121.313	133.522	16.340	271.175
1990	130.262	138.863	19.602	288.727
1991	142.053	146.157	31.160	319.370
1992	150.930	146.239	28.272	325.441
1993	159.329	155.119	30.444	344.892
1994	164.866	159.220	32.792	356.878
1995	171.508	135.505	20.214	327.227
1996	180.614	139.233	16.530	336.377
1997	192.668	132.237	16.562	341.467
1998	168.072	155.390	31.901	355.363
1999	203.374	136.210	16.367	355.951
2000	203.214	136.590	16.147	355.951
2001	212.935	132.173	16.674	361.782
2002	211.998	131.081	25.283	368.362
2003	216.109	128.813	25.594	370.516
2004	206.144	139.630	27.155	372.929
2005	216.714	149.084	12.131	377.929
	57,34	39,45	3,21	

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga

Catatan : Sejak 1999 tanpa Timor Timur

Statistik Indonesia 2007

Tabel 4.27.1
Data Hasil Survai Jalan Nasional TA 2007

No.	Provinsi	Panjang (Km)	
		SK	IRMS
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Daruss	1.782,78	1.729,77
2	Sumatera Utara	2.098,05	2.063,65
3	Sumatera Barat	1.200,09	1.221,03
4	Riau	1.126,11	1.113,44
5	Jambi	820,40	813,65
6	Bengkulu	736,44	699,08
7	Sumatera Selatan	530,65	520,48
8	Bangka Belitung	1.290,24	1.384,70
9	Lampung	1.004,16	1.133,92
10	D.K.I Jakarta	122,38	
11	Banten	490,40	482,73
12	Jawa Barat	1.140,69	1.217,41
13	Jawa Tengah	1.297,63	1.301,03
14	DI Yogyakarta	168,81	172,37
15	Jawa Timur	1.899,21	2.100,65
16	Bali	501,64	451,94
17	Nusa Tenggara Barat	601,83	611,51
18	Nusa Tenggara Timur	1.273,02	1.240,88
19	Kalimantan Barat	1.575,32	1.464,92
20	Kalimantan Timur	1.539,70	1.587,48
21	Kalimantan Tengah	1.714,95	1.671,28
22	Kalimantan Selatan	876,00	848,35
23	Gorontalo	616,24	613,24
24	Sulawesi Utara	1.267,39	1.294,17
25	Sulawesi Tengah	1.806,46	1.814,24
26	Sulawesi Selatan	1.577,95	1.665,80
27	Sulawesi Tenggara	1.293,87	1.311,71
28	Sulawesi Barat	529,59	530,98
29	Maluku	985,46	1.032,90
30	Maluku Utara	458,21	451,25
31	Irian Jaya Barat	508,21	510,62
32	Papua	1.794,95	1.684,43

Sumber : Ditjen Bina Marga, 2007

Tabel 4.27.2

ata Hasil Survei Jalan Nasional TA 2007 dan Jenis Kendaraan Bermotor Menurut Polda Tahun 200

No.	Provinsi	Panjang (Km)		Jumlah Kendaraan Bermotorasio Panjang Jalan (SK	
		SK	IRMS	Menurut Polda Tahun 2005	dan Jumlah Kendaraan
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussala	1.782,78	1.729,77	785.697	0,227
2	Sumatera Utara	2.098,05	2.063,65	2.286.085	0,092
3	Sumatera Barat	1.200,09	1.221,03	682.450	0,176
4	Riau	1.126,11	1.113,44	1.170.145	0,096
5	Jambi	820,40	813,65	625.941	0,131
6	Bengkulu	736,44	699,08	185.610	0,397
7	Sumatera Selatan	530,65	520,48	763.959	0,069
8	Bangka Belitung	1.290,24	1.384,70	239.508	0,539
9	Lampung	1.004,16	1.133,92	673.848	0,149
10	D.K.I Jakarta	122,38		8.415.193	0,001
11	Banten	490,40	482,73	340.735	0,144
12	Jawa Barat	1.140,69	1.217,41	2.290.782	0,050
13	Jawa Tengah	1.297,63	1.301,03	5.643.204	0,023
14	DI Yogyakarta	168,81	172,37	1.118.863	0,015
15	Jawa Timur	1.899,21	2.100,65	5.799.009	0,033
16	Bali	501,64	451,94	1.570.887	0,032
17	Nusa Tenggara Barat	601,83	611,51	372.783	0,161
18	Nusa Tenggara Timur	1.273,02	1.240,88	173.443	0,734
19	Kalimantan Barat	1.575,32	1.464,92	670.636	0,235
20	Kalimantan Timur	1.539,70	1.587,48	868.467	0,177
21	Kalimantan Tengah	1.714,95	1.671,28	320.567	0,535
22	Kalimantan Selatan	876,00	848,35	749.918	0,117
23	Gorontalo	616,24	613,24	65.189	0,945
24	Sulawesi Utara	1.267,39	1.294,17	246.978	0,513
25	Sulawesi Tengah	1.806,46	1.814,24	555.885	0,325
26	Sulawesi Selatan	1.577,95	1.665,80	694.643	0,227
27	Sulawesi Tenggara	1.293,87	1.311,71	121.439	1,065
28	Sulawesi Barat	529,59	530,98		
29	Maluku	985,46	1.032,90	149.938	0,657
30	Maluku Utara	458,21	451,25	785	58,371
31	Irian Jaya Barat	508,21	510,62		
32	Papua	1.794,95	1.684,43	195.520	0,918

Sumber : Ditjen Bina Marga, 2007 dan BPS, Statistik Indonesia, 2007

Tabel 4.28
Klasifikasi Jalan Nasional Tahun 2008
(Berdasarkan Tipe Perkerasan)

Status : 10 Desember 2008

No.	Provinsi	Klasifikasi Jalan (km)				Total (km)
		Aspal	(%)	Non Aspal	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.674,25	93,91	108,53	6,09	1.782,78
2	Sumatera Utara	2.018,92	96,23	79,13	3,77	2.098,05
3	Sumatera Barat	1.200,09	100,00	-	-	1.200,09
4	Riau	1.070,86	95,09	55,25	4,91	1.126,11
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	-
6	Jambi	820,40	100,00	-	-	820,40
7	Bengkulu	736,44	100,00	-	-	736,44
8	Sumatera Selatan	1.289,78	99,96	0,46	0,04	1.290,24
9	Bangka Belitung	530,65	100,00	-	-	530,65
10	Lampung	958,67	95,47	45,49	4,53	1.004,16
11	DKI Jakarta	122,38	100,00	-	-	122,38
12	Banten	490,40	100,00	-	-	490,40
13	Jawa Barat	1.140,69	100,00	-	-	1.140,69
14	Jawa Tengah	1.297,01	99,95	0,62	0,05	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	168,81	100,00	-	-	168,81
16	Jawa Timur	1.899,21	100,00	-	-	1.899,21
17	Kalimantan Barat	1.171,52	74,37	403,80	25,63	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	1.714,95	100,00	-	-	1.714,95
19	Kalimantan Timur	1.376,26	89,38	163,44	10,62	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	876,00	100,00	-	-	876,00
21	Bali	501,64	100,00	-	-	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	601,83	100,00	-	-	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	1.270,31	99,79	2,71	0,21	1.273,02
24	Sulawesi Utara	1.195,52	94,33	71,87	5,67	1.267,39
25	Gorontalo	616,24	100,00	-	-	616,24
26	Sulawesi Tengah	1.727,65	95,64	78,81	4,36	1.806,46
27	Sulawesi Barat	518,01	97,81	11,58	2,19	529,59
28	Sulawesi Selatan	1.565,02	99,18	12,93	0,82	1.577,95
29	Sulawesi Tenggara	1.293,87	100,00	-	-	1.293,87
30	Maluku	666,71	67,65	318,75	32,35	985,46
31	Maluku Utara	299,73	65,41	158,48	34,59	458,21
32	Papua	1.794,95	100,00	-	-	1.794,95
33	Irian Jaya Barat	356,66	70,18	151,55	29,82	508,21
Total		32.965,44	95,20	1.663,39	4,80	34.628,83

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Ditjen Bina Marga Departemen PU

Tabel 4.29
Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut Bridge Management System (BMS) Tahun 2008
Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 10 Desember 2008

No.	Provinsi	Kondisi Baik Sekali		Kondisi Baik		Kondisi Rusak Ringan		Kondisi Rusak Berat		Kondisi Kritis		K. Runtuh/Tdk ada Jemb.		T o t a l	
		Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nanggroe Aceh Darussalam	327	6.379,20	281	6.024,40	225	5.430,40	113	2.777,00	53	835,10	11	696,00	1.010	22.142,10
2	Sumatera Utara	562	8.805,80	146	2.028,70	65	976,90	40	733,70	39	592,20	13	961,50	865	14.098,80
3	Sumatera Barat	340	7.869,10	121	1.728,20	68	1.212,90	29	1.021,60	48	541,40	11	451,50	617	12.824,70
4	Riau	184	4.655,10	70	1.965,30	43	1.759,00	46	951,30	20	693,00	8	726,00	371	10.749,70
5	Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	149	3.314,80	124	1.536,10	32	846,80	11	1.276,50	1	40,00	7	342,20	324	7.356,40
7	Bengkulu	131	3.485,20	37	1.056,30	80	2.349,30	32	1.224,50	22	349,80	7	893,00	309	9.358,10
8	Sumatera Selatan	237	5.811,50	63	1.376,00	52	1.710,40	24	523,20	6	317,20	12	950,60	394	10.688,90
9	Bangka Belitung	17	196,70	22	349,40	54	934,60	14	371,10	2	22,40	1	30,00	110	1.904,20
10	Lampung	181	4.149,70	175	5.029,90	88	2.324,90	14	609,60	4	136,60	2	190,00	464	12.440,70
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Banten	173	2.381,10	62	390,30	53	631,00	29	435,90	10	249,70	2	60,30	329	4.148,30
13	Jawa Barat	340	7.098,30	290	2.977,50	225	4.455,40	90	2.107,60	7	203,10	65	1.463,60	1.017	18.305,50
14	Jawa Tengah	782	12.259,30	260	4.176,40	142	2.799,60	89	1.201,30	8	66,60	2	406,50	1.283	20.909,70
15	D.I. Yogyakarta	103	3.578,00	11	2.339,10	15	638,30	13	528,90	-	-	3	100,00	145	7.184,30
16	Jawa Timur	487	7.891,40	616	5.203,70	331	3.789,30	81	956,20	24	672,20	4	145,20	1.543	18.658,00
17	Kalimantan Barat	215	5.567,40	98	2.471,90	253	4.491,00	80	1.287,80	12	227,70	6	482,40	664	14.528,20
18	Kalimantan Tengah	241	7.325,30	43	2.108,50	39	650,40	52	1.645,60	22	426,50	10	753,50	407	12.909,80
19	Kalimantan Timur	132	2.899,20	85	2.770,60	53	1.276,70	31	837,90	9	206,50	1	25,00	311	8.015,90
20	Kalimantan Selatan	373	6.907,80	63	2.394,80	66	1.674,50	68	1.365,60	51	987,00	2	235,00	623	13.564,70
21	Bali	207	3.882,10	69	1.332,00	54	678,00	12	325,30	5	70,90	3	200,00	350	6.488,30
22	Nusa Tenggara Barat	89	1.684,10	102	1.077,80	105	1.898,90	15	171,00	2	83,30	-	-	313	4.915,10
23	Nusa Tenggara Timur	235	3.525,80	209	3.777,40	134	1.558,20	48	561,20	7	166,80	10	187,10	643	9.776,50
24	Sulawesi Utara	150	3.185,70	103	1.677,00	84	1.355,20	17	325,20	29	513,00	24	1.317,50	407	8.373,60
25	Gorontalo	260	4.779,30	8	149,50	15	288,10	-	-	-	-	3	57,00	286	5.273,90
26	Sulawesi Tengah	464	8.553,50	146	2.954,40	370	3.620,70	35	577,60	21	351,10	7	80,40	1.043	16.137,70
27	Sulawesi Barat	270	4.231,90	238	2.446,20	71	1.015,80	29	352,40	29	608,90	10	518,00	647	9.173,20
28	Sulawesi Selatan	443	7.417,30	257	3.093,40	149	2.666,10	44	552,50	17	228,80	1	125,00	911	14.083,10
29	Sulawesi Tenggara	126	2.821,10	190	2.574,50	52	804,70	99	1.023,50	31	698,10	75	1.457,00	573	9.378,90
30	Maluku	78	1.350,90	87	1.812,00	119	2.584,50	41	862,50	20	384,00	56	2.424,00	401	9.417,90
31	Maluku Utara	178	2.477,60	85	1.031,20	44	540,10	28	364,50	22	527,60	-	-	357	4.941,00
32	Papua	118	2.206,40	62	820,40	59	1.012,20	28	910,70	62	1.385,00	14	1.118,00	343	7.452,70
33	Irian Jaya Barat	134	4.124,00	46	820,70	48	689,80	19	225,00	20	545,30	21	1.121,30	288	7.526,10
Total		7.726	150.814,60	4.169	69.493,60	3.188	56.663,70	1.271	26.106,70	603	12.129,80	391	17.517,60	17.348	332.726,00

^{*)} Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Ditjen Bina Marga Departemen PU

Tabel 4.30
Rekapitulasi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2008
Berdasarkan Tahun Dibangun
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 10 Desember 2008

No.	Provinsi	<1970		1970 - 1980		1980 - 1990		1990 - 2000		>2000		T o t a l	
		Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	65	1.748,50	352	4.109,20	255	5.941,10	314	9.344,20	24	999,10	1.010	22.142,10
2	Sumatera Utara	173	2.606,40	247	3.107,90	229	3.563,10	205	4.440,10	11	381,30	865	14.098,80
3	Sumatera Barat	82	1.316,90	155	2.042,70	201	4.674,20	177	4.698,90	2	92,00	617	12.824,70
4	Riau	8	668,00	14	659,40	123	2.908,10	205	5.563,60	21	950,60	371	10.749,70
5	Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	21	717,00	135	1.646,80	121	3.854,40	44	1.003,20	3	135,00	324	7.356,40
7	Bengkulu	13	1.089,30	26	412,80	148	3.457,80	115	4.057,40	7	340,80	309	9.358,10
8	Sumatera Selatan	40	2.330,80	115	1.612,80	132	3.298,40	102	3.268,90	5	178,00	394	10.688,90
9	Bangka Belitung	9	131,50	23	587,70	43	408,10	34	574,80	1	202,10	110	1.904,20
10	Lampung	19	488,90	48	790,80	89	1.668,50	259	7.119,50	49	2.373,00	464	12.440,70
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Banten	109	976,60	96	895,60	88	782,60	26	967,50	10	526,00	329	4.148,30
13	Jawa Barat	307	3.912,90	326	5.539,80	214	3.836,40	149	4.085,20	21	931,20	1.017	18.305,50
14	Jawa Tengah	463	4.881,40	226	4.206,90	328	4.357,50	228	5.876,00	38	1.587,90	1.283	20.909,70
15	D.I. Yogyakarta	10	487,60	21	669,30	29	816,70	41	1.822,20	44	3.388,50	145	7.184,30
16	Jawa Timur	911	6.805,00	133	2.057,90	247	3.379,40	234	5.755,40	18	660,30	1.543	18.658,00
17	Kalimantan Barat	206	3.309,80	41	1.022,80	316	6.216,20	72	3.373,60	29	605,80	664	14.528,20
18	Kalimantan Tengah	39	1.494,50	68	807,70	123	1.946,80	173	7.975,20	4	685,60	407	12.909,80
19	Kalimantan Timur	5	122,00	45	713,40	92	1.946,10	155	4.808,40	14	426,00	311	8.015,90
20	Kalimantan Selatan	17	486,10	80	1.431,80	92	1.937,40	335	7.635,00	99	2.074,40	623	13.564,70
21	Bali	87	971,60	132	2.322,70	70	1.830,70	61	1.363,30	-	-	350	6.488,30
22	Nusa Tenggara Barat	49	855,10	63	792,80	103	1.764,90	90	1.458,80	8	43,50	313	4.915,10
23	Nusa Tenggara Timur	100	1.275,30	191	1.738,10	58	1.023,00	247	4.478,40	47	1.261,70	643	9.776,50
24	Sulawesi Utara	64	1.965,40	98	1.423,60	76	1.706,20	158	2.886,40	11	392,00	407	8.373,60
25	Gorontalo	37	849,10	31	234,10	32	762,30	176	3.013,70	10	414,70	286	5.273,90
26	Sulawesi Tengah	19	172,60	98	1.206,90	225	2.899,80	634	10.620,70	67	1.237,70	1.043	16.137,70
27	Sulawesi Barat	321	2.962,60	18	191,00	125	2.107,50	95	2.406,80	88	1.505,30	647	9.173,20
28	Sulawesi Selatan	207	1.579,10	229	3.401,90	322	4.105,80	137	4.278,40	16	717,90	911	14.083,10
29	Sulawesi Tenggara	113	1.954,20	53	782,70	149	2.013,00	246	4.119,80	12	509,20	573	9.378,90
30	Maluku	60	2.491,50	78	758,30	113	2.521,60	150	3.646,50	-	-	401	9.417,90
31	Maluku Utara	20	277,50	89	944,90	148	1.994,50	99	1.716,30	1	7,80	357	4.941,00
32	Papua	26	1.303,30	7	137,00	99	1.684,70	194	3.781,70	17	546,00	343	7.452,70
33	Irian Jaya Barat	106	2.592,30	6	146,00	35	891,70	118	3.217,10	23	679,00	288	7.526,10
TOTAL		3.706	52.822,80	3.244	46.395,30	4.425	80.298,50	5.273	129.357,00	700	23.852,40	17.348	332.726,00

^{*)} Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Ditjen Bina Marga Departemen PU

Tabel 4.31
Perkembangan Perusahaan Air Minum (PAM)
Tahun 2002 - 2006

No	Perincian	Satuan	2002	2003 ^r	2004 ^r	2005 ^r	2006 ^e
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banyaknya Perusahaan	Perusahaan	469	490	475	498	491
2	Banyaknya Pekerja	Orang	44.693	46.086	45.720	46.420	47.109
3	Pengeluaran untuk pekerja	000 000	506.515	780.583	755.130	826.204	894.222
4	Air bersih yang disalurkan	000 000 M ³	2.095	2.302	2.144	2.169	2.333
5	Biaya Input	000 000	1.748.592	2.226.504	3.390.902	2.223.954	2.352.640
6	Nilai Output	000 000	3900977 ^r	4.553.697	4.684.144	5.014.537	5.393.691

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007 (Diolah dari hasil Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih)

Catatan : ^e) Diestimasi oleh BPS

^r) Angka yang diperbaiki

Tabel 4.32
Persentase Rumahtangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum
Tahun 2007

No	Provinsi	Perkotaan + Perdesaan										
		Air Kemasan	Leding Meteran	Leding Eceran	Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nanggroe Aceh D	6,73	8,76	3,42	4,92	41,58	21,41	3,55	3,16	4,76	1,14	0,58
2	Sumatera Utara	3,19	19,07	2,35	18,39	25,98	11,21	6,11	6,42	4,44	2,15	0,70
3	Sumatera Barat	4,10	20,30	2,41	7,81	28,71	13,94	5,41	11,46	3,15	2,21	0,50
4	Riau	10,63	1,94	0,64	10,22	28,28	18,38	0,29	0,78	2,33	25,85	0,65
5	Jambi	3,69	16,11	0,60	4,16	29,79	22,66	1,30	1,32	7,36	12,72	0,29
6	Sumatera Selatan	5,13	13,91	3,91	2,42	37,35	16,50	1,15	1,50	9,69	7,75	0,69
7	Bengkulu	2,92	9,48	1,67	2,80	25,78	46,53	3,25	5,06	2,02	0,03	0,48
8	Lampung	4,27	2,13	1,95	4,65	42,99	34,71	2,21	3,06	2,27	1,48	0,28
9	Kep. Bangka Belitung	11,43	1,77	0,33	9,63	49,54	23,61	0,75	1,27	1,49	0,15	0,03
10	Kepulauan Riau	30,07	21,96	3,51	3,37	20,88	10,70	3,03	2,64	0,48	1,90	1,46
11	DKI Jakarta	31,26	24,18	10,08	32,16	1,06	0,29	0,03	0,06	-	0,17	0,69
12	Jawa Barat	6,89	8,12	3,26	28,63	28,04	8,65	8,65	7,03	0,44	0,10	0,19
13	Jawa Tengah	2,47	10,87	3,84	14,94	42,40	7,60	11,84	4,30	0,94	0,58	0,22
14	DI Yogyakarta	12,24	9,88	0,37	8,86	55,56	6,12	2,03	1,75	0,03	3,16	0,02
15	Jawa Timur	6,93	11,53	4,83	22,17	33,46	6,40	9,94	3,47	0,46	0,37	0,46
16	Banten	16,61	5,85	3,37	34,81	20,28	7,21	3,22	3,76	4,13	0,06	0,71
17	Bali	19,55	33,75	1,11	4,88	12,16	1,81	15,39	4,55	2,32	4,12	0,35
18	Nusa Tenggara Barat	5,71	12,61	2,11	8,42	47,15	9,61	9,98	2,62	1,76	-	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	0,83	11,48	2,66	1,11	17,69	11,65	25,41	20,73	5,44	1,31	1,68
20	Kalimantan Barat	3,28	6,27	1,16	2,00	6,50	8,97	4,12	2,95	22,99	41,62	0,14
21	Kalimantan Tengah	2,39	13,97	1,73	13,42	12,90	8,29	1,34	1,59	35,70	8,48	0,19
22	Kalimantan Selatan	1,95	22,51	12,79	13,78	11,98	14,09	0,72	0,54	18,87	2,43	0,33
23	Kalimantan Timur	9,17	40,16	7,54	5,04	7,89	7,73	1,65	1,66	11,35	6,83	0,98
24	Sulawesi Utara	6,96	15,55	4,09	9,38	30,81	12,17	13,67	4,88	0,51	1,63	0,33
25	Sulawesi Tengah	4,53	11,42	3,38	16,52	21,32	11,69	14,75	7,37	7,48	0,80	0,75
26	Sulawesi Selatan	4,92	18,43	4,83	15,52	25,18	14,68	8,52	5,43	1,83	0,60	0,06
27	Sulawesi Tenggara	0,59	17,46	2,95	4,99	30,52	17,48	15,63	6,11	2,20	1,85	0,21
28	Gorontalo	1,03	15,44	2,54	4,72	52,79	11,86	4,26	1,82	5,42	0,03	0,09
29	Sulawesi Barat	0,93	6,84	3,42	7,29	33,82	15,40	12,02	11,11	8,73	0,24	0,21
30	Maluku	0,73	12,06	5,60	5,77	34,71	10,12	20,79	6,44	1,46	1,71	0,60
31	Maluku Utara	0,85	15,10	1,81	2,08	42,69	18,36	6,16	1,99	6,39	4,49	0,08
32	Irian Jaya Barat	10,14	14,88	12,14	2,59	13,28	7,77	9,13	9,14	10,60	9,90	0,43
33	Papua	5,00	12,24	2,19	3,60	9,06	10,20	6,35	22,61	14,44	13,23	1,09
	Indonesia	7,18	12,36	3,82	17,62	30,07	10,32	7,86	4,77	3,02	2,57	0,40

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007

Tabel 4.33
Lokasi IPA Hingga Tahun 2007 PDAM

No.	Provinsi	Kapasitas	
		Terpasang (L/dt)	Produksi (L/dt)
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.930	1.423
2	Sumatera Utara	9.666	7.910
3	Sumatera Barat	3.160	2.265
4	Riau	1.563	1.043
5	Kepulauan Riau	2.590	2.169
6	Jambi	2.291	1.727
7	Sumatera Selatan	4.432	4.157
8	Bangka Belitung	467	403
9	Bengkulu	1.394	1.253
10	Lampung	1.408	908
11	DKI Jakarta	16.275	14.482
12	Jawa Barat	14.514	10.991
13	Jawa Tengah	16.166	11.123
14	DI Yogyakarta	2.156	1.632
15	Jawa Timur	20.551	17.008
16	Banten	5.835	5.410
17	Bali	4.692	3.999
18	Nusa Tenggara Barat	3.293	1.113
19	Nusa Tenggara Timur	1.760	1.226
20	Kalimantan Barat	2.755	2.273
21	Kalimantan Tengah	1.116	815
22	Kalimantan Selatan	2.348	1.966
23	Kalimantan Timur	3.784	2.999
24	Sulawesi Utara	2.360	1.810
25	Sulawesi Tengah	755	512
26	Sulawesi Selatan	4.744	3.623
27	Sulawesi Tenggara	951	627
28	Gorontalo	473	291
29	Sulawesi Barat	237	206
30	Maluku	347	306
31	Maluku Utara	64	39
32	Papua	436	366
33	Irian Jaya Barat	534	308
	Indonesia	135.044	106.380

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.34
Pencapaian Di Bidang Air Minum, 2005 - 2007

Provinsi	Hasil Pencapaian 2005		Hasil Pencapaian 2006		Hasil Pencapaian 2007	
	Lt/detik	Jiwa	Lt/detik	Jiwa	Lt/detik	Jiwa
Nanggroe Aceh Darus	223	127.157	188	80.151	53	28.650
Sumatera Utara	83	32.215	165	74.581	1.208	193.110
Sumatera Barat	47	27.300	218	78.859	284	14.750
Riau	67	291.831	43	81.390	145	52.700
Kepulauan Riau	12	7.983	43	24.217	59	14.980
Jambi	102	48.229	60	55.291	47	16.000
Bengkulu	39	35.530	73	46.272	118	29.635
Sumatera Selatan	58	75.360	77	97.536	326	599.284
Bangka Belitung	69	18.368	70	38.793	373	18.499
Lampung	71	28.619	278	79.779	258	35.920
Banten	65	53.006	53	32.570	633	77.400
Jawa Barat	12	4.600	133	57.587	548	130.800
Jawa Tengah	386	151.806	795	191.885	555	91.490
DI Yogyakarta	149	84.560	195	83.115	113	32.675
Jawa Timur	70	28.050	225	86.633	1.080	231.600
Kalimantan Barat	73	58.239	80	76.800	117	129.005
Kalimantan Tengah	60	54.617	50	20.000	464	43.920
Kalimantan Selatan	93	93.105	560	247.500	271	64.115
Kalimantan Timur	1.757	601.631	218	151.215	910	72.740
Sulawesi Utara	172	144.590	125	105.000	239	42.240
Gorontalo	33	39.507	123	102.500	65	10.500
Sulawesi Tengah	263	203.842	270	177.812	487	18.060
Sulawesi Selatan	307	132.727	230	172.897	543	99.845
Sulawesi Barat	30	20.879	33	31.000	43	24.555
Sulawesi Tenggara	53	22.347	225	139.410	115	11.935
Bali	54	27.161	51	14.500	153	28.590
Nusa Tenggara Barat	261	176.831	202	135.694	317	25.165
Nusa Tenggara Timur	105	42.045	160	99.454	307	25.530
Maluku	189	184.892	208	197.050	119	112.400
Maluku Utara	159	137.172	153	163.775	122	19.135
Papua	376	247.073	168	128.859	83	6.647
Irian Jaya Barat	86	26.799	131	258.700	290	9.715
Total	5.524	3.228.071	5.603	3.330.825	10.445	2.311.590

Sumber : Memori Serah Terima Dirjen Cipta Karya, Januari 2008

Tabel 4.35
Persentase Rumah tangga menurut Provinsi dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tahun 2006

No	Provinsi	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	48,41	12,55	14,12	24,93	100,00
2	Sumatera Utara	71,68	8,91	6,26	13,15	100,00
3	Sumatera Barat	46,77	15,79	9,54	27,90	100,00
4	Riau	80,96	9,30	2,14	7,60	100,00
5	Jambi	61,90	11,99	5,85	20,27	100,00
6	Sumatera Selatan	64,73	10,14	5,04	20,09	100,00
7	Bengkulu	61,32	8,60	3,90	26,18	100,00
8	Lampung	73,83	12,66	2,59	10,92	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	62,33	5,57	2,23	29,88	100,00
10	Kepulauan Riau	72,32	17,92	3,66	6,09	100,00
11	DKI Jakarta	74,74	18,62	6,12	0,52	100,00
12	Jawa Barat	60,50	15,04	12,00	12,46	100,00
13	Jawa Tengah	59,38	13,06	5,02	22,54	100,00
14	DI Yogyakarta ¹	67,58	26,67	0,91	4,85	100,00
15	Jawa Timur	58,24	14,97	3,29	23,50	100,00
16	Banten	56,51	16,40	5,03	22,06	100,00
17	Bali	60,54	21,34	0,48	17,64	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	33,68	12,05	3,32	50,95	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	62,59	11,85	1,76	23,79	100,00
20	Kalimantan Barat	60,75	7,48	2,93	28,83	100,00
21	Kalimantan Tengah	49,48	15,65	7,18	27,70	100,00
22	Kalimantan Selatan	58,83	14,74	8,85	17,57	100,00
23	Kalimantan Timur	75,01	12,03	5,38	7,58	100,00
24	Sulawesi Utara	64,74	19,51	3,37	12,39	100,00
25	Sulawesi Tengah	46,49	9,25	5,16	39,09	100,00
26	Sulawesi Selatan	58,21	11,25	2,46	28,09	100,00
27	Sulawesi Tenggara	56,03	10,06	4,47	29,43	100,00
28	Gorontalo	28,83	16,98	9,81	44,38	100,00
29	Sulawesi Barat	38,16	8,20	4,67	48,97	100,00
30	Maluku	42,26	8,13	14,14	35,47	100,00
31	Maluku Utara	39,23	11,29	15,35	34,12	100,00
32	Irian Jaya Barat	40,97	17,24	8,09	33,69	100,00
33	Papua	44,32	14,51	5,34	35,83	100,00
	Indonesia	60,38	13,90	6,05	19,67	100,00

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007 (Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006)

Catatan : ¹ Tanpa Kabupaten Bantul

Tabel 4.36
Lokasi IPAL Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Kap. Pengolahan (M3/HARI)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	
2	Sumatera Utara	32.010
3	Sumatera Barat	
4	Riau	
5	Kepulauan Riau	
6	Jambi	
7	Sumatera Selatan	
8	Bangka Belitung	
9	Bengkulu	
10	Lampung	
11	DKI Jakarta	48.400
12	Jawa Barat	261.500
13	Jawa Tengah	4.666
14	DI Yogyakarta	15.000
15	Jawa Timur	
16	Banten	5.617
17	Bali	61.000
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	1.000
23	Kalimantan Timur	800
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	
26	Sulawesi Selatan	
27	Sulawesi Tenggara	
28	Gorontalo	
29	Sulawesi Barat	
30	Maluku	
31	Maluku Utara	
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	
Indonesia		429.993

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.37
Lokasi IPLT Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Kap. Pengolahan (M ³ /HARI)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	
2	Sumatera Utara	
3	Sumatera Barat	
4	Riau	
5	Kepulauan Riau	82,00
6	Jambi	196,60
7	Sumatera Selatan	42,00
8	Bangka Belitung	
9	Bengkulu	
10	Lampung	
11	DKI Jakarta	
12	Jawa Barat	
13	Jawa Tengah	
14	DI Yogyakarta	
15	Jawa Timur	
16	Banten	
17	Bali	78,40
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	
23	Kalimantan Timur	333,40
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	
26	Sulawesi Selatan	700,00
27	Sulawesi Tenggara	27,00
28	Gorontalo	
29	Sulawesi Barat	
30	Maluku	39,00
31	Maluku Utara	30,49
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	
	Indonesia	1.528,89

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.39
Lokasi TPA Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Luas (HA)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28,00
2	Sumatera Utara	
3	Sumatera Barat	54,84
4	Riau	20,00
5	Kepulauan Riau	
6	Jambi	145,25
7	Sumatera Selatan	102,00
8	Bangka Belitung	9,50
9	Bengkulu	25,00
10	Lampung	52,40
11	DKI Jakarta	
12	Jawa Barat	445,90
13	Jawa Tengah	181,82
14	DI Yogyakarta	14,60
15	Jawa Timur	197,82
16	Banten	48,90
17	Bali	57,50
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	54,55
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	88,26
23	Kalimantan Timur	115,95
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	50,00
26	Sulawesi Selatan	110,20
27	Sulawesi Tenggara	27,00
28	Gorontalo	4,00
29	Sulawesi Barat	3,50
30	Maluku	5,00
31	Maluku Utara	7,00
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	38,00
Indonesia		1.886,99

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.38
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Air Tinja
Tahun 2007

No	Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
		Tangki/ Septik	Kolam/ Sawah	Sungai/ Danau/ Laut	Lobang Tanah	Pantai/ Kebun	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh D	38,12	1,56	22,85	22,52	11,86	3,08
2	Sumatera Utara	53,92	1,32	13,80	20,74	5,52	4,70
3	Sumatera Barat	39,11	14,76	30,00	11,41	2,06	2,66
4	Riau	47,23	2,08	11,73	34,32	3,79	0,84
5	Jambi	38,16	1,09	30,89	26,78	1,65	1,44
6	Sumatera Selatan	43,15	2,16	25,46	24,89	2,51	1,82
7	Bengkulu	34,34	1,62	21,92	33,05	7,20	1,88
8	Lampung	36,54	3,35	11,50	46,39	1,09	1,14
9	Kep. Bangka Belitung	55,68	0,42	3,89	11,81	25,37	2,83
10	Kep. Riau	54,04	0,59	14,99	25,84	4,11	0,44
11	DKI Jakarta	86,75	0,66	5,53	5,91	0,01	1,15
12	Jawa Barat	49,96	14,78	22,50	9,89	1,32	1,55
13	Jawa Tengah	49,84	5,32	21,90	20,00	1,86	1,08
14	DI Yogyakarta	70,34	1,49	7,35	20,06	0,15	0,61
15	Jawa Timur	46,49	1,18	21,94	25,58	4,11	0,70
16	Banten	55,07	6,26	14,47	7,85	15,03	1,32
17	Bali	76,26	0,46	6,47	3,86	12,19	0,76
18	Nusa Tenggara Barat	41,52	2,29	30,89	7,16	17,04	1,10
19	Nusa Tenggara Timur	19,98	0,29	0,75	48,20	23,69	7,10
20	Kalimantan Barat	35,01	1,95	24,80	24,15	11,56	2,53
21	Kalimantan Tengah	23,75	0,35	45,40	28,19	1,64	0,66
22	Kalimantan Selatan	32,26	0,52	33,29	30,87	1,92	1,14
23	Kalimantan Timur	57,89	0,94	15,56	22,43	2,33	0,85
24	Sulawesi Utara	61,20	0,49	11,91	20,03	3,34	3,03
25	Sulawesi Tengah	39,94	1,39	24,84	14,66	14,84	4,34
26	Sulawesi Selatan	52,95	1,47	8,48	18,29	17,07	1,75
27	Sulawesi Tenggara	41,69	0,81	11,78	25,96	17,66	2,09
28	Gorontalo	41,62	1,15	15,39	12,64	27,26	1,94
29	Sulawesi Barat	33,26	1,09	22,74	20,61	20,59	1,70
30	Maluku	41,94	2,11	13,29	8,80	29,30	4,55
31	Maluku Utara	55,64	0,34	5,95	5,93	30,87	1,26
32	Papua Barat	37,90	1,87	20,32	18,51	19,98	1,42
33	Papua	32,35	0,97	8,49	20,87	29,74	7,58
	Indonesia	49,13	4,89	19,24	19,54	5,54	1,65

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007

Tabel 4.39
Lokasi TPA Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Luas (HA)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28,00
2	Sumatera Utara	
3	Sumatera Barat	54,84
4	Riau	20,00
5	Kepulauan Riau	
6	Jambi	145,25
7	Sumatera Selatan	102,00
8	Bangka Belitung	9,50
9	Bengkulu	25,00
10	Lampung	52,40
11	DKI Jakarta	
12	Jawa Barat	445,90
13	Jawa Tengah	181,82
14	DI Yogyakarta	14,60
15	Jawa Timur	197,82
16	Banten	48,90
17	Bali	57,50
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	54,55
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	88,26
23	Kalimantan Timur	115,95
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	50,00
26	Sulawesi Selatan	110,20
27	Sulawesi Tenggara	27,00
28	Gorontalo	4,00
29	Sulawesi Barat	3,50
30	Maluku	5,00
31	Maluku Utara	7,00
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	38,00
Indonesia		1.886,99

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.40
Banyaknya Desa Menurut Provinsi Dan Jenis Tempat
Membuang Sampah Sebagian Besar Keluarga

Perkotaan+Perdesaan

No	Provinsi	Tempat Sampah Kemudian Diangkut	Dalam Lubang Bakar	Sungai	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	219	4.767	303	679	5.968
2	Sumatera Utara	485	3.234	208	988	4.915
3	Sumatera Barat	157	547	65	132	901
4	Riau	170	1.232	129	201	1.732
5	Jambi	97	768	207	163	1.235
6	Sumatera Selatan	254	1.405	411	708	2.778
7	Bengkulu	163	575	73	413	1.224
8	Lampung	130	1.623	59	379	2.191
9	Kep. Bangka Belitung	26	215	2	78	321
10	Kep. Riau	63	113	6	73	255
11	DKI Jakarta	256	11	-	-	267
12	Jawa Barat	689	4.277	233	609	5.808
13	Jawa Tengah	711	6.729	188	936	8.564
14	DI Yogyakarta	54	378	2	4	438
15	Jawa Timur	810	6.901	91	675	8.477
16	Banten	174	807	44	457	1.482
17	Bali	166	185	11	339	701
18	Nusa Tenggara Barat	74	355	95	296	820
19	Nusa Tenggara Timur	104	1.452	26	1.156	2.738
20	Kalimantan Barat	89	646	203	592	1.530
21	Kalimantan Tengah	39	664	507	141	1.351
22	Kalimantan Selatan	143	933	380	503	1.959
23	Kalimantan Timur	145	527	467	205	1.344
24	Sulawesi Utara	165	940	30	134	1.269
25	Sulawesi Tengah	78	1.001	52	399	1.530
26	Sulawesi Selatan	338	2.002	122	824	3.286
27	Sulawesi Tenggara	68	1.013	26	578	1.685
28	Gorontalo	32	350	6	62	450
29	Maluku	33	240	19	581	873
30	Maluku Utara	37	245	22	477	781
31	Papua	72	1.032	223	2.012	3.339
	Indonesia	6.041	45.167	4.210	14.794	70.212

Sumber : BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2005

Tabel 4.41
Pencapaian Pengembangan Permukiman
Tahun 2005 - 2007

No	Provinsi	Pencapaian (Kws.)				
		Dukungan RSH	Urban Renewal	KTP2D/ DPP	Pulau Kecil	Perbatasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8	-	20	4	3
2	Sumatera Utara	2	2	39	3	1
3	Sumatera Barat	8	-	28	4	-
4	Riau	6	-	15	3	2
5	Kep. Riau	4	-	7	4	8
6	Jambi	3	-	18	8	-
7	Sumatera Selatan	7	1	24	3	-
8	Kep. Bangka Belitung	4	-	11	5	-
9	Bengkulu	9	-	13	3	-
10	Lampung	4	-	15	-	-
11	DKI Jakarta	6	-	15	2	-
12	Jawa Barat	22	-	18	-	-
13	Banten	12	-	33	3	-
14	Jawa Tengah	26	-	33	-	-
15	DI Yogyakarta	9	1	44	-	-
16	Jawa Timur	14	1	44	2	-
17	Kalimantan Barat	4	-	18	3	14
18	Kalimantan Tengah	8	-	23	3	-
19	Kalimantan Selatan	13	-	19	3	-
20	Kalimantan Timur	2	-	18	1	4
21	Sulawesi Utara	9	1	18	9	20
22	Gorontalo	7	-	28	8	-
23	Sulawesi Tengah	7	-	31	9	-
24	Sulawesi Selatan	6	1	51	4	-
25	Sulawesi Tenggara	20	-	30	11	-
26	Sulawesi Barat	-	-	11	-	-
27	Bali	4	-	23	5	-
28	Nusa Tenggara Barat	4	-	23	3	-
29	Nusa Tenggara Timur	3	-	20	2	13
30	Maluku	2	-	15	2	11
31	Maluku Utara	5	-	11	8	1
32	Papua	3	-	18	7	12
33	Irian Jaya Barat	3	-	20	3	2
Total		244	7	754	125	91

Sumber : Memori Serah Terima Dirjen Cipta Karya, Januari 2008

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum merupakan salah satu dukungan dalam kegiatan kestatistikan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dukungan ini dalam rangka menyediakan data kuantitatif, dengan harapan dapat berguna bagi kegiatan manajemen khususnya dalam penyusunan program dan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum.

5.1 Kesimpulan

Departemen Pekerjaan Umum memegang peranan penting di dalam penyediaan prasarana dan sarana di bidang ke-PU-an untuk menunjang sektor-sektor strategis lainnya, seperti kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan peribadatan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, konstruksi, lingkungan hidup, pertanian, perumahan dan lingkungan permukiman, serta perhubungan. Hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang sumber daya air, jalan, dan jembatan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, serta penataan ruang relatif menunjukkan keefektifannya dan berhasil memberi kontribusi yang cukup dalam aspek pemerataan dalam menjangkau sebagian besar daerah dan lapisan masyarakat secara memadai.

Untuk menunjang pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pembangunan yang menjadi tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum, dibutuhkan informasi guna pembangunan prasarana dan sarana bidang ke-PU-an yang berkaitan dengan masing-masing sektor strategis di atas. Program ataupun rencana kegiatan bilamana didukung oleh data kuantitatif dan data kualitatif tentunya mempunyai nilai yang nyata dan positif.

Informasi statistik yang disajikan lebih bersifat kuantitatif dimana terdiri dari tabulasi dan grafik yang menggambarkan keadaan atau perkembangan pembangunan yang menjadi tugas Departemen Pekerjaan Umum selama ini. Informasi tersebut mengenai statistik wilayah, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial, budaya, ekonomi, konstruksi, air, potensi lahan, angkutan, perumahan, lingkungan permukiman, bencana alam, Infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penataan Ruang.

5.2 Saran

Untuk pembangunan ke depan, masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan, khususnya bagi daerah-daerah yang belum terjangkau di kawasan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dari proses pembangunan prasarana dan sarana bidang ke-PU-an, selalu terjadi perubahan-perubahan yang berupa peningkatan kualitas maupun kuantitas dari hasil-hasil pembangunan tersebut, sehingga penyajian informasi selalu mengikuti perubahan yang terjadi. Untuk itu informasi harus terus dikembangkan disamping harus di remajakan agar keandalan informasi tersebut dapat dipercaya.

Untuk bisa mendapatkan informasi statistik yang dapat diandalkan, perlu terus ditingkatkan kerjasama antara Pusdata dengan sumber-sumber data di Unit-Unit Kerja dan Satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ataupun instansi terkait lainnya. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusianya serta dengan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengolahan data.

Kepada semua pihak, baik dari dalam maupun luar lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, diharapkan dapat memberi saran-saran yang dimaksud guna lebih menyempurnakan penyajian dari Buku Induk Statistik PU. Semoga BIS PU ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.